

Persembahan Atas Pengukuhan
Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. sebagai Guru Besar
Ilmu Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah
IAIN Sumatera Utara

ILMU PENDIDIKAN & Masyarakat Belajar

STRATEGI PENDIDIKAN UNTUK PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA ERA GLOBAL

Editor: Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.



ILMU PENDIDIKAN
DAN MASYARAKAT
PEMBELAJAR

**ILMU PENDIDIKAN
DAN MASYARAKAT PEMBELAJAR**

**Strategi Pendidikan untuk Pengembangan
Sumberdaya Manusia Era Global**

Editor:

Drs. Annuddin Siahaan, M.Pd.

ILMU PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT PEMBELAJAR

Strategi Pendidikan untuk Pengembangan
Sumberdaya Manusia Era Global



Editor:

Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.



citapustaka
MEDIA PERINTIS

ILMU PENDIDIKAN & MASYARAKAT BELAJAR
Strategi Pendidikan untuk Pengembangan
Sumberdaya Manusia Era Global

Editor: Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.

Copyright © 2010, Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Imada Syaifullah Daulay
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

Citapustaka Media Perintis

Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung Telp. (022) 82523903

Contact person: 08126516306-08562102089

E-mail: citapustaka@gmail.com

Website: citapustaka.com

Cetakan pertama: Nopember 2010

ISBN 978-602-8826-29-7

Didistribusikan oleh:

Perdana Mulya Sarana

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756

E-mail: asrulmedan@gmail.com

Contact person: 08126516306

PENGANTAR EDITOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Sesungguhnya merupakan kebanggaan yang bersifat normatif bagi semua dosen sebagai pengajar di perguruan tinggi, adalah salah satunya ketika mencapai kehormatan tertinggi memperoleh kesempatan dikukuhkan sebagai guru besar atau dengan kata lain disebut dengan Profesor. Sebutan profesor yang melekat dalam diri seorang dosen, merupakan proklamir diri terhadap kematangan dalam bersikap, bertindak, berobsesi, terhadap ilmu yang melekat dalam dirinya, sekaligus wujud dari pengejawantahan keberpihakannya kepada kebenaran, kejujuran, keadilan terhadap hidup dan kehidupan, baik bagi dirinya maupun juga kepada orang lain serta lingkungannya.

Karenanya, ketika prediket sebagai profesor melekat dan dilekatkan kepada seorang dosen di perguruan tinggi, mau tidak mau kehidupannya haruslah mampu memberikan makna bagi hidup dan kehidupan siapa saja yang menjadi *stakeholders* pribadi dan profesinya. Kemelekatan berbagai makna yang menjadi tanggung jawabnya itu, mengharuskan ia setiap saat tidak boleh stagnan dalam melakukan hal-hal yang menjadi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaannya sebagai seorang guru besar atau profesor terutama dalam kebebasan akademik.

Makanya, ketika seseorang menjadi profesor, hal-hal yang tidak boleh ditinggalkannya dalam denyut nadi dan napasnya adalah melakukan tindakan-tindakan inovatif, selalu mengemukakan gagasan atau ide-ide cemerlang, dan merekam jejak pemikiran-pemikirannya ke dalam bentuk buku atau artikel, penelitian, dan tulisan lainnya yang dapat di akses siapa saja yang berkepentingan sebagai *stakeholders*-nya.

Dengan demikian, seorang guru besar itu haruslah menjadi *navigator moral keilmuan*, yang memungkinkannya sebagai “warga istimewa” di perguruan tinggi yang mampu mencerahkan siapa saja dalam lingkungannya tersebut, terutama dalam konteks keilmuan yang spesifik menjadi keahliannya. Maka, berbahagialah dosen yang memperoleh dan mencapai sebutan Profesor.

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. adalah nama seorang dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, yang jauh sebelum memperoleh dan mencapai sebutan Profesor, telah menunjukkan jati dirinya sebagai dosen yang telah memiliki indikator sebagai *navigator moral keilmuan*. Ia merupakan pribadi yang menarik, cenderung pendiam, dan adakalanya sebagian orang sulit menerima sikapnya yang pendiam itu. Namun, disela-sela sifat pendiam itu, sebenarnya ia tidak pendiam, kependiaman itu hanya wujud dari karakter pribadi yang tidak begitu suka banyak berbicara, tetapi lebih banyak menuangkan pembicaraannya dalam bentuk tulisan. Menulis adalah salah satu karakter kepribadiannya.

Itulah sebabnya, ia banyak mengemukakan gagasan atau ide-idenya itu ke dalam bentuk buku atau artikel lainnya. Ia adalah salah satu dosen yang sangat produktif dalam menulis dan meneliti. Pengukuhan guru besarnya ini juga diisi dengan penulisan buku yang merupakan kontribusi dari beberapa teman atau rekan sejawat, sahabat dan dekat dengan pemikiran dan gagasan-gagasannya.

Buku ini mencerminkan keinginan dan kebiasaannya yang dicoba untuk dijadikan tradisi dalam rekam jejak gagasan beberapa teman-teman. Sayang sekali rasanya, jika gagasan-gagasan itu tidak terdokumen dalam tulisan atau buku. Salah satu kegagalan dalam mentradisikan gagasan atau ide-ide adalah, tidak terdokumentkannya ke dalam bentuk buku. Padahal buku itu akan menjaga gagasan dan secara berkesinambungan akan menjadi acuan bagi siapa saja dalam menumbuhkembangkan ilmu secara berkelanjutan.

Berbagai tulisan yang merupakan kontribusi dari teman-teman sejawat ini, merupakan bagian dari dukungan positif dan kesamaan pandangan dalam melihat perlunya pengembangan gagasan untuk didokumenkan sehingga dapat menjadi acuan bagi orang lain. Sedangkan bagi kontributor, adalah untuk melihat kemampuan artikulasi pemikirannya dan seberapa jauh tesis-tesis yang dikemukakan dapat diterima orang atau bahkan dapat dijadikan kutipan (rujukan) dalam mengilhami gagasan-gagasan masing-masing ketika mengemukakan pendapat dalam pengembangan keilmuannya.

Mentradisikan pemikiran atau ide-ide dalam bentuk dokumen, seperti buku, jurnal, penelitian, dan lain sebagainya, juga merupakan wujud monumen pemikiran yang kerap tidak lepas dalam kehidupan keilmuan Profesor Syafaruddin. Hal ini bisa dilihat dari rekam jejaknya sejak mengikuti jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di awal tahun 1980-an jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Hampir semua rekan-rekan sejawat sebayanya, mengakui bahwa kecerdasan kognitifnya terpuji, sehingga ia dikenal sebagai calon ilmuwan yang memiliki masa depan baik jika bekerja dalam lingkungan perguruan tinggi. Alhamdulillah, hal itu terbukti secara empiris dan tidak diragukan oleh siapa saja. Sebagai orang yang pernah sekamar karena satu kost dengannya ketika kuliah Program Pasca-sarjana di Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 1997-2000, saya merasakan dan membuktikan bahwa kecerdasan kognitifnya sempurna, apalagi ditopang oleh rasa sayangnya kepada siapa saja sebagai seorang teman, sehingga dapat dikatakan bukan kecerdasan kognitifnya saja yang baik, tetapi juga kecerdasan afeksinya.

Dalam banyak hal, Profesor Syafaruddin selalu bisa menjadi inspirator dan dapat mengilhami berbagai hal yang dianggap positif. Secara konkrit, apa yang dilakukannya mencerminkan kematangannya sebagai Guru Besar, yang selalu tidak mengemukakan sesuatu secara *blak-blakan*, tetapi selalu dengan bahasa kiasan yang oleh sebagian orang enak mendengarnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi sebagian orang “bingung” mendengarnya.

Sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya pun, ia terkesan mampu menjaga *ritme*, sehingga anak-naknya memberi kesan demokratis padanya, demikian juga dengan istrinya. Karenanya, ketika ia memperoleh sebutan sebagai Profesor, yang membuatnya akan menerima tunjangan yang “lumayan hebat”, tidak mempengaruhi perilakunya terhadap anak dan istrinya, juga kepada rekan-rekan sejawat lainnya.

Melalui penerbitan buku ini, yang merupakan wujud dari keberpihakan rekan sejawat atas gagasan-gagasan dan ide-idenya, editor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Profesor Dr. Syafaruddin, M.Pd, memberikan kepercayaan kepada saya sebagai editor. Editor juga pada saat yang sama mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kontributor atau para penulis yang telah memberi kontribusi dalam penyelesaian buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi inspirasi dan mengilhami siapa saja. Amin.

Medan, 20 Oktober 2010

Editor

Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.

SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUMATERA UTARA

Bertambahnya jumlah guru besar atau profesor dari 6 (enam) orang menjadi 8 (delapan) orang, merupakan kebanggaan dan prestasi tersendiri bukan hanya bagi dosen yang telah mencapai profesor atau guru besar tersebut, tetapi juga bagi institusi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara. Sejak berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara tahun 1973, sampai saat ini jumlah dosen mencapai 112 orang, diantara 112 orang itu terdapat 8 (delapan) orang yang bergelar dengan jabatan profesor atau guru besar.

Kebanggaan, rasa percaya diri, dan memiliki prestise adalah kata yang sudah pantas melekat pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara. Namun demikian, kebanggaan, rasa percaya diri, dan prestise itu bukan membuat Fakultas Tarbiyah stagnan apalagi arogan, tetapi secara terus-menerus harus meningkatkan diri sehingga mampu mengemban tugas dengan sebaik-baiknya terutama dalam merealisasikan seluruh visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sulit untuk mengingkari kenyataan, bahwa kebanggaan sangat terasa karena Fakultas Tarbiyah IAIN Sum. Utara sampai saat ini telah memiliki jumlah guru besar yang mencapai 8 (delapan) orang. Apalagi, secara kebetulan 2 (dua) orang guru besar yang dikukuhkan ini adalah guru besar Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), yaitu suatu Program Studi yang relatif muda yang awalnya merupakan Konsentrasi dari Jurusan Kependidikan Islam (KI).

Program Studi yang baru berumur 5 (lima) bulan ini telah memiliki 2 (dua) orang guru besar, yaitu Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd, dan Prof. Dr. Fachruddin, M.A. Dengan adanya 2 (dua) guru besar seperti ini, maka kinerja Program Studi akan semakin meningkat dan membawa implikasi atau

konsekuensi logis sebagai Program Studi yang mandiri dalam merealisasikan seluruh program pembelajarannya.

Pada saatnya nanti diharapkan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di Fak. Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, akan memiliki kewenangan untuk membuka jenjang Strata 2 (S2) secara mandiri, sehingga akan lebih efektif melakukan pengawasan kurikulum dan proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan rencana pencapaian akademik yang terstandar, terstruktur dan lebih akuntabel.

Kehadiran 2 (dua) orang guru besar ini tentu saja akan meningkatkan kualifikasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara sebagai penyelenggara akademik di perguruan tinggi. Peningkatan kualifikasi ini akan berimplikasi luas kepada mutu Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara secara khusus dan IAIN Sumatera Utara secara umum. Karenanya, upaya-upaya terus dilakukan dengan cara mendorong para dosen untuk terus mencapai jabatan guru besar sehingga setidaknya akan tercapai jumlah guru besar mencapai 30 % dari jumlah seluruh tenaga pengajar.

Jika melihat sumber daya yang tersedia pada saat ini, diprediksi dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan, jumlah guru besar di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara akan mencapai 30 % dari jumlah dosen yang ada. Upaya ke arah itu semakin kuat karena jumlah dosen yang telah mencapai gelar doktor saat ini terdapat 10 orang, sedangkan yang sedang mengikuti pendidikan Strata 3 (S3) mencapai 27 orang. Jumlah yang cukup signifikan ini tentu saja dapat merealisasikan rencana-rencana strategis pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara.

Penerbitan buku ini yang dalam bentuk bunga rampai, yang merupakan kesepahaman rekan sejawat dalam mendukung pemikiran atau gagasan Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd, dapat dijadikan model bagi siapa saja untuk mendukung dan membimbing rekam jejak karya-karya ilmiah dikalangan dosen, sehingga muncul tradisi akademik yang akuntabel. Kebiasaan menulis buku dan meneliti ini harus dijadikan sarana pengejawantahan gagasan cerdas dan cemerlang dikalangan tenaga pengajar (dosen) sehingga memungkinkan melakukan evaluasi diri terhadap gagasan yang dimiliki, apakah masih dapat dipertahankan atau sedang menuju keusangan sehingga perlu dikemukakan secara inovatif gagasan-gagasan yang bersifat baru dan relevan.

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd yang dikenal memiliki derajat keilmuan yang tinggi dan membumi, dapat dilihat bukan hanya dari karya-karya ilmiahnya semata, tetapi juga dapat didengar dan dilihat dari apa yang dikatakan dan

dilakukannya. Sebagai guru besar, maka pengukuhan Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd, pada hari ini bukan merupakan proklamir yang bersifat seremonial semata, tetapi yang lebih penting dari itu adalah tetap membingkai berbagai karya monumental keilmuan di Fakultas Tarbiyah IAIN SU dan berkelanjutan dalam berkarya, berbuat, dan menjadi inspirasi dan mampu untuk mengilhami siapa saja.

Segejap jajaran civitas akademika, dan keluarga besar Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara mengucapkan selamat atas prestasi dan kinerja yang prestisius ini, semoga Allah SWT tetap memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Medan, 22 Oktober 2010

Dekan

Drs. H. Irwan Nasution, M.Sc

SAMBUTAN

REKTOR IAIN SUMATERA UTARA

Salah satu kebahagiaan yang tidak dapat ditutup-tutupi di kalangan pemimpin (Rektor) perguruan tinggi, adalah ketika tenaga pengajar atau dosen-dosen bertambah yang mencapai jabatan Guru Besar atau Profesor. Dengan bertambahnya jumlah Guru Besar, maka kualifikasi perguruan tinggi akan semakin meningkat. Apalagi jika penyebaran jumlah Guru Besar secara proporsional di jajaran Jurusan atau Program Studi di setiap fakultas sesuai dengan keperluan pengembangan akademik yang dilaksanakan.

Sampai saat ini, jumlah Guru Besar IAIN Sumatera Utara telah mencapai 28 orang, dan mereka merupakan Guru Besar yang berada pada 4 (empat) fakultas yang terdapat di IAIN Sumatera Utara. Dengan jumlah ini tentu saja IAIN Sumatera Utara telah memiliki prestasi dan prestise. Hanya saja, prestasi dan prestise itu tidak boleh berhenti sampai disitu saja, dan harus terus ditingkatkan, apalagi upaya ke arah itu semakin kuat dan nyata karena jumlah dosen yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 3 (S3) telah mencapai 44 orang, dan masih terdapat jumlah yang cukup signifikan yang sedang dalam penyelesaian program Strata 3 (S3).

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang secara terus-menerus memacu diri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada, IAIN Sumatera Utara tetap melakukan peningkatan kualifikasi sumber daya manusianya, terutama sumber daya manusia yang memiliki tugas sebagai tenaga pengajar atau dosen. Namun demikian, sumber daya non tenaga pengajar juga tetap ditingkatkan sehingga dapat mengikuti irama perjalanan IAIN Sumatera Utara dalam upaya merealisasikan seluruh visi dan misinya. Itu artinya keberadaan IAIN Sumatera Utara dalam hal ini berupaya menjadikan dirinya sebagai bagian dari *learning society* (masyarakat belajar) dan pada saat yang bersamaan menjadi tempat belajar masyarakat.

Dengan bertambahnya jumlah Guru Besar pada saat ini, diharapkan efektivitas proses pembelajaran akan semakin meningkat. Apalagi jika ditelaah secara fungsional, dengan diraihnya pangkat Guru Besar, maka setiap Guru Besar akan setiap saat mengembangkan gagasan atau ide-ide cerdas terkait dengan keahliannya, dan pada saat yang bersamaan menulis buku sebagai bagian dari pengembangan keilmuannya.

Konsekuensi dari pencapaian Guru Besar itu memang akan meningkatkan harga diri Guru Besar itu sendiri, tetapi yang lebih penting lagi adalah akan meningkatnya tanggung jawab dalam lingkup keilmuannya, sehingga hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab itu akan tumbuh subur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, perguruan tinggi akan menikmati karya-karya yang bersifat ilmiah dari setiap kegiatan fungsional yang dilakukan oleh setiap Guru Besar. Oleh karena itu, tepat untuk mengatakan bahwa perguruan tinggi akan semakin meningkat kualifikasiannya karena bertambahnya jumlah Guru Besar dilingkungannya.

Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara saat ini sudah memiliki 8 orang Guru Besar, suatu jumlah yang signifikan dalam meningkatkan jati diri keinstitusian. Jumlah ini boleh dikatakan memadai untuk dikatakan sebagai fakultas yang layak operasi, namun demikian, jumlah ini tidak boleh hanya sampai disini, harus ditingkatkan terus dengan jumlah yang proporsional sesuai dengan jumlah jurusan atau program studi yang ada.

Mentradisikan penerbitan buku yang merupakan kelengkapan ketika terjadi proses pengukuhan Guru Besar, adalah suatu tradisi yang memiliki keunggulan dan berdimensi luas terhadap pengembangannya gagasan. Hal ini menunjukkan, bahwa Guru Besar yang dikukuhkan memiliki wawasan yang luas dan mendapat dukungan yang signifikan dari rekan sejawat dalam mengemukakan pendapat dan terukur penerimaannya.

Guru Besar yang baik adalah Guru Besar yang bukan hanya mampu berkarya sesuai dengan prinsip-prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga adalah yang dapat diterima oleh rekan sejawat terhadap apa yang dikemukakannya. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd, sebagai salah satu Guru Besar yang termuda di Fakultas Tarbiyah IAIN Sum. Utara telah teruji keterterimaannya di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara. Hal ini membuktikan bahwa gagasan-gagasan dan perilaku yang ditampilkannya telah memiliki kredibilitas keilmuan yang tinggi dan dilandasi oleh semangat kebersamaan dalam meningkatkan kualifikasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara sebagai Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan, yang terus berusaha mewujudkan visi

unggul, terpercaya dan terkemuka dalam kompetensi utama bidang pendidikan dan keguruan.

Sebagai pimpinan IAIN Sumatera Utara, kami mengucapkan selamat atas pangkat Guru Besar yang telah diraih, dan kami berharap jangan pernah berhenti untuk berkarya demi kemaslahatan diri sendiri, lembaga dan umat secara menyeluruh, sehingga terwujudlah IAIN Sumatera Utara sebagai kampus atau perguruan tinggi yang mumpuni. Amin.

Medan, 22 Oktober 2010

Rektor

Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, M.A

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
Sambutan Dekan	viii
Sambutan Rektor	xi
Daftar Isi	xiv
Kontributor	xvi

BAGIAN I

SEKILAS TENTANG PEMIKIRAN PENDIDIKAN

PROF. DR.SYAFARUDDIN, M.PD.	1
----------------------------------	---

BAGIAN II

PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER

A. Pendidikan Islam Dalam Era Digital Dr. Mardianto, M.Pd.	37
B. Menimbang Visi Baru Pendidikan Islam Drs. Amiruddin. MS. MA.	39
C. Esensi Metode dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam HJ. Ira Suryani, M.Si.	53
D. Finansial Pendidikan Islam (Menoleh Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam Klasik) Sapri, MA.	67
	87

BAGIAN III

STRATEGI MANAJEMEN DAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH

A. Eksistensi Madrasah Swasta Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Dr. Muhammad Syaifudin, M.Ag.	103
B. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Kompetensi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan	105

Dr. Siti Halimah, M.Pd.	121
C. Supervisi Pendidikan Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.	138
D. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia Prof. Dr. H. Fachruddin, M.A.	150
E. Integrasi Perencanaan Strategik dengan Peningkatan Mutu Candra Wijaya, M.Pd.	161

BAGIAN IV

ANTARA MENDIDIK DAN MENGAJAR

A. Pembelajaran Yang Mendidik Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.	179
B. Meningkatkan Kualitas pembelajaran Pendidikan Terdesentralisasi Dr. Indra Jaya, M.Pd.	181
C. Performance Assesment (Penilaian Unjuk Kerja) Rusydi Ananda, M.Pd.	211
	231

BAGIAN V

EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA

A. Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang Unggul Melalui Pendidikan Drs. Syahrur, M.Pd.	251
B. Peran Ibu dalam Pengembangan Potensi Keagamaan Anak Dr. Masganti Sit, M.Ag.	253
C. Pemberdayaan Konseling dalam Kehidupan Manusia Drs. Abdurrahman, M.Pd.	267
D. Laskar Pelangi The Phenomenon: Merajut Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Tercecer Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag.	281
E. Bahasa Sebagai Identitas Pendidikan dalam Era Globalisasi Tien Rafida, M.Hum.	289
	296

KONTRIBUTOR

Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 6 Oktober 1960
Pendidikan Terakhir : S2 Unipersitas Negeri Padang (UNP) (2000)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Drs. Amiruddin, MS. M.Ag

Pendidikan Terakhir : S2 UIN Jakarta
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Dr. Al Rasyidin, MA.

Tempat/Tanggal Lahir : Sinasak, 20 Januari 1967.
Pendidikan Terakhir : S3 UPI Bandung (2005)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Candra Wijaya, M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Deli Serdang/ 1974
Pendidikan Terakhir : S2 UNIMED (2003)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA.

Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Berandan, 26 Desember 1953
Pendidikan Terakhir : S3 UIN Yogyakarta (1997)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Dr. Indra Jaya, M.Pd

Tempat/tgl Lahir : Indrapura, 21 Mei 1970
Pendidikan : Doktor (S3) Pendidikan Kependudukan dan Lngkungan Hidup PPS UNJ Jakarta (2009).
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara

Dra. Ira Suryani, M.Si.

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 13 Juli 1967
Pendidikan Terakhir : S2 USU
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Dr. H. Mardianto, M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Pulau, 12-12-1967
Pendidikan Terakhir : S3 (2010) Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Dr. Masganti, M.Ag

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 21 Agustus 1967
Pendidikan Terakhir : S3 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 2009
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Mesiono, M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Bah Butong (Simalungun), 27 Juli 1971.
Pendidikan Terakhir : S2 UNIMED (2003)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Dr. Muhammad Syaifudin, M.Ag

Tempat/Tanggal Lahir : Cipto Mulyo, 4 Juli 1974
Pendidikan Terakhir : Doktor (S3) Pendidikan Islam PPS IAIN Imam Bonjol Padang (2008)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Rusdy Ananda, M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pura/ 1 Januari 1972
Pendidikan Terakhir : S2 UNIMED (2006)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Sapri, MA

Tempat/Tanggal Lahir : Riau, 31-12 1970
Pendidikan Terakhir : S2 (2003) Pendidikan Islam IAIN Sumatera Utara Medan
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Dr. Siti Halimah, M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 6 Juli 1966
Pendidikan Terakhir : S3 UPI Bandung (2007)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Drs. Syahrums, M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 4 Agustus 1962
Pendidikan Terakhir : S2 UNP (2001)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

Prof. Dr. H. Syamsu Nizar, M.Ag.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Suska Riau.
Pendidikan Terakhir : S3 UIN Jakarta
Jabatan : Ketua STAI Bengkalis Riau

Tien Rafida, M.Hum.

Tempat/tgl Lahir : Simalungun, 10 Nopember 1970
Pendidikan : S2 linguistik PPS USU
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara

Dr, Wahyudin Nur Nasution M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 27 April 1970
Pendidikan Terakhir : S3 UNJ (2006)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan

BAGIAN SATU

SEKILAS TENTANG PEMIKIRAN DAN PERJALANAN HIDUP PROF. DR. SYAFARUDDIN, M.Pd.

PENDIDIKAN ISLAM DAN TANTANGAN GLOBALISASI

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta transportasi telah menghasilkan perubahan massif dalam kebudayaan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah memudahkan kehidupan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Di tepian awal dan dasawarsa pertama abad ke-21 sedang terjadi pergeseran kekuasaan, demikian Toffler (1990:1), yang ditandai betapa pada mulanya begitu kuat dominasi kekerasan, berubah kepada kekuatan kekayaan, dan saat ini bergeser kepada kekuatan pengetahuan". Suatu sintesis yang jelas dan komprehensif, membentuk citra dengan visi jauh ke depan sebagai perubahan baru. Bahkan kini merentang ke seluruh sudut planet bumi.

Dalam konteks ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dipastikan merupakan produk dari ilmu pendidikan yang berkembang pesat sejalan dengan akselerasi perubahan zaman. Di zaman ini, manusia diindikasikan sebagai masyarakat pembelajar (*learning society*), dengan beragam model pembelajaran, tidak dibatasi di sekolah saja pada banyak negara, bahkan kebutuhan pendidikan bergerak dalam rentang waktu sepanjang hayat "*life-long education*" (Belanger, 1998:261 dalam Delors, ed)

Globalisasi dimaknai sebagaimana sudah populer adalah kebebasan perpindahan bahan mentah, komoditi, modal, pelayanan dan tenaga kerja melintasi semua geograpis dan lingkaran politik. Dalam era globalisasi manfaat kemajuan IPTEK menghasilkan kemudahan hidup, mempercepat hubungan dan pengaruh antar negara sehingga dunia ini bagaikan *global village* (perkampungan global). Selain itu globalisasi menciptakan sikap materialisme, hedonistik, dan permisif (serba boleh) menggeser nilai-nilai transendental/sakral. Di sini ada peluang dan sekaligus tantangan yang perlu direspon umat Islam, tak terkecuali respon para komunitas pendidik muslim dan pengelola lembaga pendidikan Islam".

Sebagai bagian komunitas dunia, pada saat bersamaan umat Islam cenderung kurang mampu mengantisipasi perkembangan zaman, bahkan nampaknya terus tertinggal. Apalagi jika ingin mengungguli bangsa lain dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengarahkan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik tentu saja semakin sangat rumit. Padahal Islam sangat memperhatikan upaya menciptakan generasi *qur'ani* (pandangan dan perilaku berbasis nilai *qur'an*), pribadi berkarakter, dan berkualitas. Generasi yang diharapkan tampil dengan kekuatan iman dan *taqwa*, memiliki keterampilan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menuju pembumih nilai Islam secara *kaffah* (QS.4:9;2:208; QS.3:104,110). Cita ideal ini perlu diwujudkan sebagai upaya memenuhi tugas risalah, menyemai suburnya iman, membangun kekuatan budaya Islami dengan mengamalkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamain* (QS. 21:107). Visi keunggulan dan daya saing umat, sebagai umat terbaik (QS.3:110) dan umat tengah/adil (QS.2:143), sebagai saksi sejarah yang mendapat petunjuk dalam merancang kebudayaan umat.

Keberadaan sekolah, madrasah dan pesantren sebagai sistem pendidikan nasional mengusung sepenuhnya idealisme pendidikan untuk mengatualisasikan potensi anak atau generasi muda menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Fenomena menunjukkan institusi pendidikan termasuk yang kurang berdaya dan lambat berubah berhadapan dengan perubahan yang semakin cepat. Begitupun, dalam kerangka membumih idealisme pendidikan Islam, maka dalam perspektif global ada beberapa faktor yang disoroti oleh Djamali, sebagai fenomena kemunduran umat, yaitu: kemunduran bidang agama, akhlak, keterbelakangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, keterbelakangan ekonomi, sosial, kesehatan, politik, manajemen, dan bidang pendidikan (Al-Djamali, 1993:58-59;114). Secara global di dunia Islam, faktor-faktor tersebut yang memperlemah peran umat Islam dalam memaksimalkan kemampuan atau daya saing dalam percaturan dunia global. Umat Islam nampaknya masih kurang memiliki daya saing global karena keterbelakangan sistemik yang belum bisa dieliminir melalui upaya melejitkan potensi dan kemampuan kompetitif serta kooperatif umat Islam. Sudah saatnya umat Islam menetapkan strategi mewujudkan kemajuan dan kedamaian dalam tatanan dunia baru Islam tidak hanya melalui peran politik, tetapi justru melalui peman-tapan peran kulturalisasi Islam secara komprehensif.

Semua persoalan yang memperlemah kondisi umat harus diretas melalui upaya strategis memperkuat sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya manusia, alam, sosial, IPTEK, maupun modal/keuangan. Salah satu upaya strategis

ke arah peningkatan kualitas umat adalah dengan membenahi sistem pendidikan yang secara langsung berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia supaya berkualitas sesuai keperluan lokal, nasional, regional dan global. Ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) atau SDM unggul yang mampu menjawab persaingan/kompetitif dan sekaligus mampu bekerjasama mewujudkan kebaikan untuk semua. Semangat kompetitif, *Fastabiqul Khairat*, QS.2:147; QS.5:48, sekaligus membangun kerjasama untuk kebaikan (*ta'awun*) (QS.6:2). harus menjadi visi perjuangan umat dalam semua level dan segmen kehidupan.

Dalam konteks keIndonesiaan, banyak hal yang perlu dicermati dalam kerangka telaah terhadap Pendidikan Islam dan Globalisasi. Islam di Indonesia adalah fakta mayoritas umat. Penduduk beragama Islam di Indonesia lebih 207 juta (88,20) dari 240-an juta jumlah penduduk negeri ini. Begitupun, secara kualitatif umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masih lemah kondisinya. Karena itu, secara konsekuensial umat Islam Indonesia bertanggung jawab dan memiliki kontribusi besar atas perkembangan dan kemajuan Indonesia dalam semua aspek pembangunan, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Namun faktanya dalam perkembangan kontemporer, berdasarkan *Human Development Index* (HDI) dalam rentang tahun 2003-2007, menempatkan Indonesia pada urutan 58, 59, 61, 61. Selanjutnya laporan PBB, yang dipaparkan UNESCO tahun 2007 bahwa peringkat Indonesia dalam hal pendidikan turun dari peringkat 58 menjadi 62, di antara 130 negara. Kemudian *Education Development Index* (EDI), menempatkan Indonesia berada pada nilai (0,935), di bawah Malaysia dengan nilai (0,945) dan Brunei (0,965). Tingkatan yang semakin melorot ini, menempatkan visi pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa relatif semakin lama terwujud. Data dari Kementerian Pendidikan Nasional RI, tahun 2009, menetapkan penentuan ranking HDI ini mengacu kepada lima indikator, yaitu: (1) nilai HDI, (2) angka harapan hidup, (3) tingkat melek huruf usia 15 tahun ke atas, (4) rasio pertumbuhan pendaftar sekolah dasar dan menengah, (5) pendapat perkapita”.

Saat ini secara kualitatif masih banyak persoalan yang membelit sistem pendidikan nasional, di antaranya: (1) rendah pemerataan kesempatan belajar (*equity*) disertai dengan banyaknya peserta didik yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, (2) rendahnya mutu akademik terutama dalam penguasaan ilmu pengetahuan alam, matematika dan bahasa khususnya bahasa asing. Padahal kemampuan penguasaan

terhadap materi-materi tersebut merupakan modal dasar untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) rendahnya efisiensi internal, terutama dengan banyaknya peserta didik yang mengulang kelas dan lamanya masa studi yang melampaui waktu standar yang ditetapkan, (4) rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan atau yang biasa disebut dengan relevansi pendidikan, (5) kecenderungan terjadinya penurunan akhlak dan moral yang menyebabkan anak didik cenderung bersikap bringas, kasar, asosial, mudah sekali terjerembab kepada perilaku yang merugikan dirinya maupun lingkungannya, seperti penyalahgunaan obat, minuman keras, penodongan, pembajakan, dan lain sebagainya” (Al-Hamdani, 2005:13), bahkan radikalisme, pelanggaran HAM dan terorisme. Di satu sisi tuntutan atas kontribusi pendidikan Islam terhadap pengembangan kualitas anak bangsa semakin menguat, sementara fenomena stagnasi lembaga pendidikan Islam masih merisaukan karena kurang mampu berkompetisi dalam menghasilkan lulusan berkualitas. Kajian ini berusaha memaparkan dan memaknai praktik pendidikan Islam sebagai pilar pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di Indonesia dan tantangan globalisasi.

B. Kontribusi Strategis Pendidikan Islam

Pendidikan adalah fenomena kultural/budaya suatu masyarakat. Perkembangan budaya merupakan produk sistem pendidikan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Sedangkan pengembangan budaya adalah khas manusia. Tak pelak, manusia menjadi satu-satunya makhluk Allah yang berbudaya dan mampu mengembangkan kebudayaannya. Sebagai fenomena kebudayaan, maka pendidikan menjadi faktor yang menjamin pembinaan potensi secara maksimal guna mencapai kedewasaan individu dan memelihara eksistensi serta perkembangan suatu masyarakat dalam mengisi kehidupan dengan pengabdian dan kekhalifahannya secara berkualitas/unggul sebagai insan shaleh di muka bumi (QS.2:249).

Langgulung (1989:22), menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang dididik. Setiap suasana pendidikan mengandung tujuan-tujuan, maklumat-maklumat berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dinyatakan sebagai materi, dan metode yang sesuai untuk mempersembahkan materi itu secara berkesan kepada anak.

Sedangkan tujuan pendidikan Islam ditegaskan bahwa: “*The aim of education in Islam is to produce a good man*”, yang berarti bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menghasilkan pribadi manusia yang baik. Adapun yang baik itu adalah berkenaan dengan adab, berkenaan esensi budi dalam pencapaian kualitas kebaikan dimensi spiritual dan material manusia” (Al-Attas, 1979:1). Itu artinya, pribadi yang otaknya penuh dengan ilmu, hatinya subur dengan iman, dan fisiknya menguasai berbagai keterampilan hidup.

Al-Attas juga menegaskan bahwa pendidikan membantu dalam menyempurnakan kepribadian seseorang atau kelompok untuk melakukan tugas-tugas secara efisien”. Karena itu pendidikan Islam selain sebagai proses pembinaan fitrah/potensi anak (aktualisasi *asmaul husna*) sekaligus merupakan transformasi kebudayaan sehingga eksistensi dan pengembangan hidup umat Islam berlangsung secara berkelanjutan”. Tujuan yang ditata Islam dalam pendidikan adalah membuat kepatuhan manusia, dan menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Pendidikan adalah proses pemenuhan keyakinan dan cita-cita pendidikan Islam adalah membangun pribadi taqwa sehingga menghasilkan kebudayaan berbasis religius. Pendidikan Islam membuat kesadaran manusia sebagai kenyataan jiwa mempengaruhi kegiatan dan kehidupan yang tidak sempurna sehingga hanya melalui pendidikan maka jiwa mencapai keunggulannya” (Alam, 2003:42).

Secara sistemik, sistem pendidikan Islam terdiri dari dasar dan tujuan, pendidik, anak didik, kurikulum, strategi dan metode, evaluasi dan lingkungan. Semua komponen ini berfungsi, saling berhubungan dan bekerjasama menuju kepada pencapaian tujuan sistem pendidikan yang ideal”.

Tegasnya, sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen yang terpadu, saling berhubungan dan berfungsi dalam mencapai tujuan. Sistem pendidikan Islam dibentuk dan ditetaskan dari filosofi pendidikan Islam yang mempertanyakan dan menjawab persoalan hakikat manusia, tujuan penciptaan manusia, fungsi manusia, hakikat pengetahuan (epistemologi), dan hakikat nilai (aksiologi). Secara filosofis, manusia/anak adalah makhluk *theomorfic*, (manusia berasal dari Tuhan dan kembali Tuhan) yang diberi amanah sebagai *khalifah* (pemimpin/wakil, penguasa), dan *abdun* (hamba) (QS.6:165, dan QS.51:56), dalam kerangka misi menemukan dan mengamalkan *sunnatullah* untuk keselamatan dan kemakmuran kehidupan umat manusia di muka bumi. Dengan memantapkan perpaduan filosofi dan sistem pendidikan Islam sebagaimana mestinya tentu saja memastikan keutuhan ideologi pendidikan Islam yang mengilhami praktik pendidikan yang ideal.

Dengan begitu, sistem pendidikan Islam merupakan upaya mewujudkan sistem pembinaan potensi individu dan umat dalam upaya Islamisasi kehidupan (cocok dan sesuai dengan *sunnatullah*). Penerimaan dan pelaksanaan secara sadar kultur Islam yang ideal oleh orang-orang yang bukan muslim dan orang-orang yang hanya mengaku muslim (Husaini, 1983:373), kehidupan dalam segala aspek. Itu artinya, dasar pendidikan Islam adalah *sunnatullah* (wahyu dan hukum alam/sosial empiris) yang menegaskan tauhid sebagai nilai tertinggi dari puncak kebenaran realitas (QS. 4:48;116.), sehingga segala bentuk pengingkaran atas realitas Maha Pencipta (*Al-Khaliq*) dan realitas yang diciptakan (*makhluk*) menjadikan seseorang musyrik.

Tegasnya tujuan pendidikan Islam berfokus kepada perwujudan *sunnatullah* dalam kehidupan pribadi (muslim sejati) dengan terbinanya seluruh potensi/fitrah anak menjadi pribadi muslim dan masyarakat Islami seutuhnya melalui pendekatan *ta'lim*, *tilawah* dan *tazkiyah* (QS.2:128;151), yang memunculkan berbagai metode, media, dan alat pendidikan dengan materi/nilai bersumber dari pengetahuan *qur'aniyah*, dan pengetahuan yang bersumber dari penafsiran terhadap hukum alam/sosial. Bagi Al-Attas (1979:2), selain *al-tarbiyah*, dan *al-ta'lim*, maka *al-ta'dib* merupakan istilah yang juga digunakan dalam pendidikan Islam, karena misi utama Rasulullah adalah membaguskan akhlak/adab individu dan masyarakat sebagai diungkap dalam salah satu hadis: "*Addabany Rabbi, Fa ahsani Ta'diiby*", Tuhanku yang mendidikku dan membaguskan akhlakku".

Sejatinya, sistem pendidikan Islam adalah sistem yang mengacu kepada pemahaman adanya format pendidikan yang berasaskan Islam, dan atau bernuansa Islami untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam *lembaga*, *program*, *proses*, dan aktivitas pembelajaran. Dalam wujudnya, ada berbagai lembaga pendidikan Islam, yaitu madrasah, pesantren dan sekolah Islam atau sekolah yang dikelola organisasi/yayasan Islam yang diyakini dalam pengembangannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, melalui materi/isi, proses, kegiatan, dan metode pendidikan yang Islami dalam rangka meraih kualitas/keunggulan pribadi muslim sejati dan masyarakat Islam terbaik/unggul (Al-Attas (1979:4).

Pentingnya pendidikan tidak hanya bagi pencapaian tujuannya, tetapi merupakan bahagian integral sebagai suatu agama. Istilah pendidikan, "*al-ta'lim*", dan *al-tarbiyah*" dapat diinterpretasikan dalam kenyataannya sebagai inti dari kehidupan religius, mengarahkan manusia melalui *al-ta'lim* dari proses transformasi pengetahuan, sama halnya dengan *al-tarbiyah* atau pelatihan

terhadap jiwa untuk mencapai derajat kesempurnaan lebih besar sampai pada perjumpaan dengan Allah (QS.3:104 dan 110). Melalui proses *al-ta'lim*, Rasulullah mengajarkan membaca al-qur'an kepada kaum muslimin tidak sekedar dapat membaca saja, melainkan membaca dengan perenungan, berisikan pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan penanaman amanah. Dari terampil membaca, Rasul membawa umat kepada *al-tazkiyah* (pensucian jiwa) yaitu membersihkan jiwa manusia menjadi muslim sejati/taqwa (QS.2:151.*al-Tarbiyah* menurut Jalal (1988), hanya diungkapkan pada dua tempat dalam al-qur'an; QS.17:24, dan QS.As-Syu'ara ayat 18). Menurut Al-Baqi, (tt:362) kata "*al-tarbiyah*" dengan berbagai kata yang serumpun dengannya disebutkan sebanyak lebih dari 872 kali". *Al-tarbiyah* sebagai istilah bagi pendidikan Islam ialah proses persiapan dan pengasuhan pada fase pertama pertumbuhan manusia atau masa kanak-kanak. Masa pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tanggung jawab orang tua dengan mendidik sepenuh kasih sayang.

Peran para pendidik dalam mendidik anak tentu saja harus diarahkan untuk mengembangkan potensi/talenta anak secara maksimal dan menyiapkan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran sehingga tercapai kedewasaan yang maksimal (intelektualitas, moralitas, estetik, spiritualitas) sebagaimana pribadi muslim sejati/insan shaleh. Tegasnya, pribadi yang diinginkan sistem pendidikan sekolah Islam adalah yang memiliki kecerdasan intelek, emosi dan spiritual secara terpadu. Suatu perpaduan berpikir Islami (*aqliyah Islamiyah*)-cara berpikir dengan landasan Islam dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya standar pemikiran, dan dengan sikap Islami (*nafsiyah Islamiyah*) – sikap jiwa dan kecenderungan berpedoman kepada Islam dalam standar pemuasan semua keperluan manusia.

Untuk itu epistemologi pendidikan Islam menawarkan bagi sistem pendidikan sekolah Islam untuk mengembangkan metodologi dan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam dengan fokus kajian sumber pengetahuan adalah ketundukan kepada hukum-hukum Allah, penjelajahan atas alam semesta, dan pengenalan sepenuhnya atas kedirian manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam konteks ini ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, yaitu :

- Pendekatan agama (*religious approach*), yaitu menanamkan ajaran-ajaran agama pada setiap cabang ilmu pengetahuan yang masuk sebagai materi pelajaran.
- Materi pelajaran agama yang akan disampaikan kepada siswa harus

sesuai dengan daya dan perkembangan kemampuan menerima mereka, dan diberikan secara bertahap, karena bidang pengetahuan agama sangat luas.

- c. Dalam penyusunan kurikulum perlu diperhatikan tiga aspek, yaitu kesinambungan (*continuity*), berurutan (*sequence*) dan aspek keterpaduan (*integration*) (Ashraf, 1989:1).

Pembelajaran dalam pendidikan Islam harus menyediakan lingkungan yang memudahkan anak-anak memahami dimensi Ketuhanan, alam semesta, dan dirinya sehingga anak mampu mengkonstruksi pengetahuannya. Berpijak pada kerangka konseptual sebagaimana diungkap di atas, berarti sistem pendidikan Islam bermakna sebagai suatu keterpaduan komponen pendidikan Islam yang mengarahkan implementasi proses pembinaan fitrah manusia melalui transformasi kebudayaan sebagaimana ada dalam struktur program kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Untuk itu, muncullah berbagai sistem kelembagaan dan sekolah Islam dalam kehidupan umat Islam, baik institusi madrasah, sekolah, maupun pesantren yang turut memberikan kontribusi signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang membingkai pengembangan sumberdaya manusia. Sistem kelembagaan pendidikan Islam termasuk produk budaya umat dalam spektrum upaya umat menjalankan misi kehidupan Islami sesuai tuntunan dan tuntutan ajaran Islam.

Dalam perspektif individu, fungsi pendidikan Islam adalah sebagai kaderisasi mengarahkan pembinaan potensi anak menuju terbentuknya pribadi muslim seutuhnya meraih bahagia di dunia dan di akhirat. Suatu kepribadian yang menjaga keseimbangan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia (QS.3:112). Dalam perspektif masyarakat, fungsi pendidikan Islam sebagai sosialisasi terbentuknya masyarakat Islam yang adil dan sejahtera. Dalam konteks al-qur'an, masyarakat Islam adalah *ummat washatan* (umat tengah) (QS.2:143), umat terbaik atau *khaira ummah* (QS.3:110) dan umat yang utuh (*ummatan wahidah*).

Al-Djamali (1993:58:59) berpendapat bahwa pada intinya pendidikan Islam memiliki dua sifat fungsi, yaitu: fungsi menunjukkan, dan fungsi menangkal. Dijelaskan Al-Djamali, bahwa fungsi pendidikan Islam dalam menunjukkan, yaitu:

- 1) Hidayah kepada iman
Cara terbaik mendidik anak adalah yang mengandung nilai hidayah. Jadi pendidikan merupakan pergaulan yang mengandung rasa kemanu-

siaan terhadap anak dan mengarahkan kepada kebaikan serta cinta kasih dengan menyediakan suasana bagi perkembangan bakat anak secara maksimal dan lurus. Jadi pendidik adalah perantara dalam menumbuhkan kembangkan fitrah anak dalam keimanan (QS.49:17). KeIslaman seseorang adalah nikmat dari Allah, bukan balas jasa kepada Allah.

- 2) Hidayah kepada penggunaan akal pikiran dan analisis
Allah telah menganugerahkan kepada manusia potensi akal atau kecerdasan. Dengan akal yang dimiliki manusia dapat dijadikan alat membedakan yang baik dan buruk, yang halal dengan yang haram. Demikian pula Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan analisis dan penyelidikan. Pendidikan mengarahkan kemampuan akal dan analisis untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalan yang baik dan buruk ditunjukkan Allah kepada manusia untuk memilihnya (QS. 90:10 dan QS.76: 3).
- 3) Hidayah kepada akhlak mulia
Pendidikan Islam dalam semua aspeknya bermuara kepada terbentuknya akhlak yang mulia. Sebagai pendidik, akhlak adalah alat yang dijadikan mengarahkan anak. Sikap lemah lembut, tegas, jujur, mulia dan adil menjadi alat perilaku yang membentuk perilaku anak. Sifat mulia ini harus ada dalam perilaku pendidik (QS.3:159).
- 4) Hidayah ke arah perbuatan shaleh
Dalam fitrah manusia ada kecenderungan pada keinginan memelihara diri, kerjasama dan bergaul dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Setiap pribadi wajib dipersiapkan memasuki sistem sosial yang menentukan corak pergaulan sesuai dengan nilai keislaman - jalan lurus untuk melakukan amal shaleh (QS.17:9).

Selain itu, ada pula fungsi pendidikan Islam dalam rangka menangkal berbagai penyimpangan dan kejahatan. Fungsi pendidikan Islam yang bersifat menangkal, yaitu:

- 1) Sebagai penangkal menyekutukan Allah
Hidayah iman merupakan nikmat paling besar. Manusia akan memperoleh keberhasilan dan terhindar dari syirik dengan hidayah tersebut. Fungsi pendidikan Islam adalah menyelematkan generasi muda atau anak-anak muslim dari syirik. Kisah Luqman mengajarkan akidah tauhid sebagai materi dan fondasi pertama pendidikan Islam (QS. 31:13).
- 2) Penangkal terhadap kesesatan dan kebathilan

Pendidikan Islam berfungsi membina anak-anak agar dapat membedakan yang benar dan salah, serta antara yang halal dan haram. Nilai-nilai kebenaran harus dijunjung tinggi untuk kebaikan bersama (QS.17:18).

3) Penangkal terhadap kerusakan jasmaniah

Pendidikan Islam berfungsi untuk menghindarkan orang dari kerusakan diri, karena itu setiap orang dibekali pengetahuan untuk menjadi mandiri dan hidup lebih baik (QS.5:29-30; QS.2:195; QS.17:33).

4) Memelihara kesehatan

Pendidikan Islam juga memberikan penekanan kepada kehidupan yang sehat, agar dapat mengabdikan kepada Allah dan berperan sebagai khalifah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hidup tidak boleh merusak lingkungan. Setiap muslim harus memelihara hidup bersih, makan-makanan dan minum yang baik (QS.2:171-172).

5) Menjaga diri dari kerusakan hubungan sosial

Pendidikan Islam berfungsi membimbing anak menghormati orang tua, kerabat, pakir-miskin dan *musthad'afin* (orang lemah). Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* harus memberi perlindungan kepada semua orang".

6) Menangkal terhadap segala penyakit moral

Membina keutamaan akhlak dalam proses pendidikan Islam menjadi nilai penting dalam pribadi seutuhnya. Anak-anak harus dibimbing dengan keteladanan dan pembiasaan kepada akhlak yang baik. Sifat dusta, zhalim, mencuri, hasad dan dengki harus dihindari karena berbahaya bagi pribadi anak.

7) Menjaga terhadap segala bahaya dari luar dirinya

Pendidikan Islam mendidik anak-anak muslim untuk mencintai tanah airnya serta mempertahankan keselamatan bangsanya (QS.8:29 dan 60), mempelajari bahaya yang mengancam dari kekuatan militer, ekonomi dan budaya. Pendidikan berfungsi dalam mempersiapkan diri sebagai sumberdaya manusia yang kokoh dan memiliki kemampuan ilmu, teknologi dan ketaqwaan.

C. Membenahi Lembaga Pendidikan Islam

Kini globalisasi semakin menggeliat. Sekolah, madrasah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin dihadang oleh globalisasi. Lalu apa yang harus dicermati para pengelola dan pemimpin lembaga pendidikan Islam dalam era globalisasi?

Meminjam pendapat Papadapoulus (1998:26) bahwa di abad ke-21, ada beberapa konteks baru pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan masa depan yang tidak bisa diabaikan, yaitu: (1) pertumbuhan pengetahuan dan informasi yang berguna bagi pendidikan dan pengajaran yang di atasnya berguna bagi peningkatan budaya dan ilmu masyarakat, (2) perubahan teknologi akan berlanjut pada suatu tingkat percepatan, (3) perubahan demografi yang mengarah pada semua tempat untuk suatu distribusi ulang mengenai kelompok usia, (4) meningkatnya saling ketergantungan berbagai negara, (5) munculnya kepedulian sosial baru di masyarakat dan pendidikan diharapkan memainkan peranan aktif dalam mencapai hal tersebut, (6) perubahan sikap terhadap peranan kebijakan publik dan cara dalam pelayanan publik adalah berkaitan dengan manajemen dan pembiayaan.

Konteks baru pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas memunculkan tema baru pendidikan yang teridentifikasi. Adapun tema tersebut mencakup: (1) perluasan peluang pembelajaran yang membutuhkan strategi baru, (2) jaminan kualitas dan relevansi pendidikan, (3) harapan terhadap kesamaan hak, (4) perspektif dan dimensi baru internasional, dan (5) pencarian pembiayaan" (Papadapoulus, 1998:26).

Dalam dunia baru kontemporer, kompetisi global dengan memanfaatkan perubahan ilmu dan teknologi, memunculkan era modal manusia (*human capital*) dan sosial telah tiba. Ternyata tidak hanya satu alasan saja mengapa akhirnya perubahan terjadi, tetapi perubahan mungkin dapat diidentifikasi dengan beberapa kunci perubahan. Dalam perspektif perubahan, modal manusia (*human capital*) telah dikenali sebagai hal yang sangat penting dan menjadi elemen universal dalam efektivitas organisasi dan kunci sumber keuntungan kompetitif, (Lawler III dan Worley, 2006:5). Dalam spektrum inilah lembaga pendidikan Islam yang mencakup madrasah, pesantren dan sekolah Islam merupakan konstelasi sistem pendidikan nasional yang dituntut untuk semakin berperan penting membangun budaya baru umat Islam. Karena itu ilmu pendidikan tidak bisa memisahkan diri dari sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Dengan kata lain, pendekatan sistemik atas pemecahan masalah kehidupan manusia, mengeleminir klaim suatu ilmu pengetahuan tertentu dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan manusia kontemporer.

Dari segi kemampuan sains, peserta didik di Indonesia secara nasional juga belum begitu menggembirakan meskipun setiap tahun ada sebagian kecil yang menjuarai olimpiade sains. Setidaknya Survey TIMSS (*Trend International Mathematic and Science Survey*) pada bidang matematika dan sains,

dan Singapura pada urutan pertama pada dua bidang tersebut. Kemudian kemampuan membaca, matematika dan sains dari 41 negara, dalam hal ini Indonesia berada pada urutan 39 dan bidang sains pada urutan 38. Pada 2003, dari 36 negara maka Indonesia berada pada urutan 34 (Data Kementerian Pendidikan Nasional, 2009). Fakta ini menggambarkan masih lemahnya daya saing peserta didik Indonesia di pentas global. Jika hal ini diperbaiki, maka daya saing bangsa ke depan akan meningkat seiring dengan upaya-upaya pembenahan pendidikan nasional, terutama kurikulum, tenaga pendidik, manajemen dan kepemimpinan, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Mencermati perkembangan dewasa ini keberadaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Data Departemen Agama RI, tahun 2007/2008, jumlah madrasah di Indonesia mencapai 57.228 terdiri dari 33 % RA, 36 % MI, 22 % MTs, dan 9 % MA, dengan jumlah siswa 6.874.503. sedangkan pesantren 21.521, dan 37.102, dengan jumlah santri 3.818.469, dan Madrasah Diniyah dengan santri 3.557.713 (Ula, Wushto, dan Ulya). Sekarang ini berkembang pula Sekolah Islam Terpadu yang dirangkul dalam Jaringan Sekolah Islam terpadu (JSIT) dengan menampilkan perbedaan dalam tata kelola dan kurikulum". Jumlah Sekolah Islam Terpadu yang tergabung dalam JSIT saat ini lebih dari 200-an sekolah se-Indonesia dan 100 di antaranya dari jenjang TK. Fakta ini secara kuantitatif memiliki potensi besar bagi pengembangan sumberdaya manusia. Adalah hal yang naif jika adanya pandangan yang tidak memperhitungkan potensi madrasah dan pesantren dalam penentuan kinerja pendidikan nasional dan jelas suatu cara pandang yang tidak tepat, bahkan keliru sama sekali. Di samping eksistensi madrasah, sekolah Islam dan pesantren sudah sangat mapan maka jumlahnya pun sangat signifikan dalam pentas pendidikan di Indonesia.

Eksistensi madrasah dan pesantren memang lahir dari masyarakat pinggiran yang kemudian menjadi ciri identitas historis yang sulit dipisahkan dari dinamika dewasa ini. Kenyataan bahwa lebih dari 70% madrasah dan pesantren berada di perdesaan dapat menjadi gambaran betapa faktor geografis menjadi penghambat akses pendidikan bermutu bagi mayoritas peserta didik. Hanya fenomena munculnya sekolah Islam yang sedikit mengisi daerah perkotaan atau pinggiran kota lebih kepada memenuhi harapan kaum muslim urban tentang pendidikan berkualitas.

Meskipun 80 s/d 90 % status madrasah di Indonesia adalah madrasah swasta, apalagi pesantren dan sekolah Islam namun dari angka-angka ini diinterpretasi bahwa eksistensi lembaga pendidikan Islam di Indonesia

sangatlah menentukan kualitas pendidikan nasional. Hal tersebut tidak hanya dapat dimaknai dari besarnya peran masyarakat sebagai sesuatu yang menggunakan, tetapi juga perlu dilihat dari dampak efek domino status tersebut. Lembaga pendidikan Islam di negeri ini masih sulit diidentikkan dengan jaminan kualitas, walaupun sejumlah kecil berhasil menegasikan diri dari kenyataan ini dan tampil sebagai lembaga kompetitif.

Begitupun satu fenomena yang menggelisahkan bahwasanya masih banyak kualifikasi pendidikan tenaga pendidik pada madrasah dan pesantren yang masih di bawah standar yang diharapkan. Faktanya pada lembaga pendidikan Islam ditemukan tenaga pendidik yang belum berpendidikan sarjana strata satu (S1), sebagaimana dituntut standar nasional pendidikan. Setidaknya, guru RA berkualifikasi S1, berjumlah 8,9 % dari 975.118; guru MI berkualifikasi S1, 24, 2 % dari 38.146 orang; guru MTs berkualifikasi S1, 58,4 % dari jumlah 242.175, dan guru MA berkualifikasi S1 77 % dari jumlah 112.410. Padahal tenaga pendidik profesional yang diperlukan setiap lembaga pendidikan dicirikan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial secara terpadu dengan kualifikasi pendidikan S1.

Selain itu, manajemen madrasah, pesantren dan sekolah Islam kebanyakan masih dikelola asal jadi, kalau bukan cenderung serampangan. Terutama karena lemahnya kepemimpinan, mengakibatkan madrasah, pesantren dan sekolah Islam pengelolaannya jalan di tempat, dan lambat berubah kepada keadaan yang lebih baik dengan kualitas tinggi.

Secara nasional menurut Muhaimin dalam Jalal dan Supriadi (2001:8), pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pokok, yaitu: (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, dan, (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi dan kemandirian.

Sebagai sub sistem pendidikan nasional, keberadaan madrasah yang dikelola Kementerian Agama Republik Indonesia dan madrasah serta pesantren yang dikelola masyarakat masih kurang menggembirakan dari berbagai aspek, terutama kualitas guru, manajemen dan kepemimpinan. Dalam hal ini manajemen merupakan proses mengkoordinasikan semua sumberdaya pendidikan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bagaimanapun, tujuan manajemen pendidikan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran siswa sehingga berkualitas (Bush dan Coleman, 2000:20).

Dalam era globalisasi tantangan dunia pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tidak sederhana, tetapi semakin rumit karena terkait bagaimana mengendalikan dampak teknologi yang dikembangkan oleh manusia sendiri. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi dasar bagi kemajuan kebudayaan perlu direspon dengan kekuatan moral yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat terpelajar. Menurut Trier (2001:276) pengembangan pengetahuan individu dan masyarakat semakin penting dalam kerangka inovasi, dan juga sekaligus sebagai tanggung jawab mengendalikan teknologi yang dibuat manusia sendiri.

Hasil studi Bank Dunia tahun 2005, menunjukkan bahwa keunggulan suatu negara adalah ditentukan kemampuan berinovasi mencapai 45 %, networking 25 %, kemampuan teknologi 20 %, kekayaan sumberdaya alam 10 %. Kemampuan berinovasi adalah berkenaan dengan SDM. Dalam hal ini, Singapura dan Finlandia meski sumberdaya alamnya miskin, tapi SDM nya handal dan sangat diperhitungkan di pentas dunia karena kemampuan inovasinya tinggi” (Data Depdiknas, 2009). Sekolah Islam, madrasah dan pesantren merupakan konstelasi pendidikan Islam di Indonesia saatnya mengubah performance kependidikan. Keberadaan lembaga pendidikan Islam ini sangat signifikan dalam pengembangan SDM, dengan memperhatikan kemampuan inovasi, jaringan kerjasama dan keunggulan teknologi.

Secara pedagogik dan kultural, pendidikan menjadi keperluan mendasar (*basic need*) setiap orang. Hanya dengan pendidikan yang baik potensi individu dapat berkembang secara maksimal sehingga menghasilkan kreativitas dan kemampuan inovatif. Bahkan transformasi kebudayaan akan dapat berjalan secara berkesinambungan melalui pendidikan yang dikelola dengan baik, profesional, berkualitas dan akuntabel (Syafaruddin, 2008:14).

Paling tidak ada tiga fokus kebijakan yang dirancang untuk membenahi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Pertama*, mengubah fokus manajemen dan kepemimpinan dari mengontrol menjadi melayani satuan pendidikan yang memudahkan lembaga pendidikan Islam mencapai keunggulan lembaga dan melakukan transformasi. *Kedua*, peningkatan mutu lulusan dan pelayanan pendidikan dengan pembenahan kurikulum untuk mencapai relevansi tinggi sesuai kepribadian yang memiliki keunggulan religious, ilmu dan teknologi secara terpadu. *Ketiga*, pemberian prioritas dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesempatan luas mendapatkan pelayanan pendidikan dengan mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat.

Meminjam pendapat Drucker (1999:80), kebijakan bagi pemimpin perubahan adalah mengorganisasikan peningkatan kualitas. Suatu perubahan lembaga secara internal dan eksternal memerlukan berbagai strategi untuk meningkatkan secara sistematis dan berkelanjutan: produk dan pelayanan, proses produksi, pemasaran, pelayanan, teknologi, pelatihan dan pengembangan orang-orang dan penggunaan informasi. Setiap organisasi memerlukan peningkatan kualitas untuk masa kini dan masa depan. Peningkatan berkelanjutan mensyaratkan keputusan utama, baik bidang yang berkenaan dengan kinerja maupun iklim kerja. Jika kinerja ditingkatkan, maka tentu saja perlu dipahami bagaimana peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini harus dimulai dari peran kepemimpinan mengembangkan visi, misi dan rencana strategi untuk mengarahkan perubahan yang bermakna dalam tubuh organisasi pendidikan Islam.

Keberadaan Kementerian Agama bersama organisasi keagamaan dan komunitas pengelola madrasah, pesantren, dan sekolah Islam harus lebih fokus pada pembenahan manajemen, dan kepemimpinan kelembagaan. Itu artinya, pembenahan lembaga pendidikan Islam dimulai dari perbaikan kualitas SDM (QS:2:249). Karena aspek apapun yang dibenahi, semuanya berpangkal pada perbaikan manajemen dan kepemimpinan yang inheren pada tubuh pimpinan dan personil lembaga pendidikan Islam. Jika manajemen dan kepemimpinan kurang berfungsi secara efektif, kurang inovatif dan tidak fokus iklim organisasi yang transformasional, maka tidak banyak yang diharapkan terhadap peran lembaga pendidikan Islam dalam menciptakan keunggulan umat yang berdaya saing lokal, regional, nasional dan global.

Perlu dicermati para pengelola lembaga pendidikan Islam dewasa ini, tentang kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional yang sudah mulai merancang 260 sekolah rintisan bertaraf Internasional sejak tahun 2005. Pada tahun 2009, diharapkan ada 112 sekolah menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Karena visi mewujudkan sekolah dengan taraf internasional diatur dalam UU Nomor 20/2003, PP Nomor 19/2005. Pemerintah dan pemerintah daerah berusaha mewujudkan satu satuan pendidikan menjadi SBI, atau 112 unit SD, SMP, dan SMA bertaraf internasional, sehingga dapat diarahkan pengembangan SDM memiliki daya saing bangsa. Dalam Pedoman Penjaminan Mutu SBI, tahun 2007; menjelaskan bahwa: SBI merupakan sekolah/ madrasah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan mengacu kepada standar pendidikan pada salah satu negara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dan negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan ketentuan dalam bidang pendid-

dikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional (Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2009).

Setidaknya tahun terakhir daswarsa pertama abad ke-21 ini, bagi pengelola lembaga pendidikan Islam, perlu mencermati, mempercepat implementasi tata kelola yang baik, mengarahkan perubahan madrasah, pesantren dan sekolah Islam sepenuhnya berstandar sesuai Standar Nasional Pendidikan. Bahkan sebagian madrasah, pesantren serta sekolah Islam perlu dirancang menuju standar internasional agar semakin kompetitif. Sejatinnya pada perwujudan tata kelola pendidikan lembaga pendidikan Islam yang baik ditandai dengan kesungguhan dalam memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) mencakup: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan). Penyediaan pembelajaran sains dengan bilingual, pembelajaran berbasis TIK, perpustakaan digital, sehingga memungkinkan akses sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia, kualifikasi akademik kepala sekolah sarjana S2 dengan program studi akreditasi "A", mengikuti pelatihan kepala sekolah, dan mampu berbahasa Inggris merupakan pemenuhan kelengkapan sekolah/madrasah berstandar internasional.

Dengan begitu, keberadaan madrasah, sekolah Islam dan pesantren perlu diarahkan kepada peran lebih signifikan dalam mengarahkan perubahan umat Islam, jika perubahannya difokuskan dengan peningkatan profesionalisme, akuntabilitas tinggi, transparansi, dan dikembangkan oleh kepemimpinan transformasional sebagai lingkungan kebijakan yang kondusif berfokus peningkatan kualitas" (Syafaruddin, 2008:23). Tegasnya, kepemimpinan transformasional lebih cocok dalam mengarahkan perubahan sekolah melalui pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu sekolah (Beare, Caldwell dan Millikan, 1989:8).

Dewasa ini perkembangan pesantren tidak lagi semata-mata memfokuskan pada pendidikan dalam bidang pengetahuan keagamaan, tetapi juga sudah mengembangkan format kelembagaan madrasah, bahkan sampai pendidikan tingi umum dan keagamaan. Sementara itu, keberadaan madrasah merupakan integrasi format pesantren dengan sekolah yang menekankan pendidikan keagamaan (proses transmisi pengetahuan agama) dan pembelajaran pengetahuan umum (yang dihasilkan dari hukum alam; ilmu-ilmu perolehan). Sebagai kekayaan kultural, kini berkembang pula sekolah-sekolah/perguruan Islam bernuansa Islam atau sekolah yang dikelola yayasan dan organisasi keagamaan).

Kontribusi lembaga pendidikan Islam ditandai dari data nasional yang menunjukkan bahwa potensi kelembagaan pendidikan Islam, madrasah, pesantren, dan sekolah Islam sangat besar, dalam kedudukannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Permendiknas Nomor 19 2007 tentang Standar pengelolaan sekolah (perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, dan sistem informasi manajemen sekolah) sebagai penjabaran PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standarisasi pendidikan nasional.

Madrasah sebagai model integrasi sistem pesantren dengan sistem sekolah semakin diminati dalam kerangka menciptakan keseimbangan pembinaan potensi anak menuju kepribadian insan kamil/paripurna. Namun tetap saja ada segmen masyarakat muslim yang memandang bahwa format pendidikan Islam pada madrasah masih belum memenuhi harapan pemenuhan kualitas pendidikan bagi anak secara kompetitif. Apalagi kalau hanya sekedar mengejar target kelulusan dalam Ujian Nasional (UN), sungguh sebagai sikap yang menyederhanakan masalah saja. Belakangan ini bermunculan sekolah Islam terpadu/plus yang memberikan pelayanan pendidikan Islam dengan mengandalkan sarana dan fasilitas lengkap untuk memenuhi praktik berbagai model pembelajaran modern dengan berbagai program pengayaan, pembiasaan, dan keteladanan dalam memaksimalkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bingkai mencapai keunggulan lulusan, patut disyukuri sebagai keragaman format pendidikan sekolah Islam.

Dengan diundangkannya UU nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55/2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan" menempatkan pendidikan di sekolah Islam menjadi strategis dalam menciptakan sumberdaya manusia, generasi beriman dan bertakwa, berilmu dan terampil serta berkarakter mujahid guna mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu artinya, semua format kelembagaan pendidikan yang ditetaskan sejarah dan dari sistem pendidikan Islam, pada saat ini sudah diakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Sasaran dimaksud hanya mungkin dicapai dalam sistem sekolah yang benar-benar efektif.

Karaktersitik sekolah efektif, yaitu; (1) Kepemimpinan yang kuat oleh kepala sekolah, (2) Harapan yang tinggi kepala sekolah dan para guru bagi prestasi pelajar, (3) Menekankan penguasaan pada kemampuan dasar, (4) Lingkungan sekolah yang teratur, (5) Evaluasi terhadap pelajar secara sistematis,

(6) Peningkatan waktu atas tugas pengajaran dan pembelajaran (Owens, 1995:309)". Sejatinya, kepemimpinan yang kuat harus memperoleh prioritas utama. Di sisi lain, dengan kepemimpinan yang kuat tentu pemimpinnya juga harus unggul. Pemimpin unggul tampil secara penuh memberikan iklim, rangsangan dan keteladanan dengan semua dorongan nyata ada pada aktivitas pribadi, atau komunikasi interpersonal" (Shriberg, et al, 1997:68).

Begitupun dalam kerangka mengevaluasi diri, secara keseluruhan perguruan/pendidikan Islam di Indonesia kurang berdaya karena beberapa faktor (Mastuhu, 2006:9-11), antara lain: (1) Umat Islam kurang rukun, kurang ideal sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam, khususnya dalam hal menyelenggarakan pendidikan, (2) banyak di antara mereka yang lebih menghebatkan diri sendiri, ketimbang menghebatkan kehidupan umat, (3) perguruan-perguruan Islam pada umumnya berdiri sendiri-sendiri sebagai milik pribadi, memang dibelakang setiap perguruan ada yayasan yang mem "back up" nya, namun hal ini juga dikuasai oleh keluarga pendiri. Padahal institusi pendidikan dan perguruan, seyogyanya menjadi milik publik (umat), (4) hanya sedikit sekali perguruan-perguruan Islam yang sudah "terbingkai" dalam suatu sistem dan bukan "terbingkai dalam milik pribadi namun hal itu masih dengan kuatnya merujuk sebagai milik golongan dan belum berada dalam bingkai sistem pendidikan Islam di Indonesia sebagai milik umat, paling tidak kerjasama akademik antara berbagai perguruan Islam dalam suatu jaringan sistem belum terbangun atau belum eksis, (5) pendidikan Islam Indonesia, lengkap dengan perguruan-perguruannya, seperti madrasah dan pesantren hampir semuanya tampil dalam corak eksklusif belum inklusif, (6) telah disadari sepenuhnya bahwa "*science and technology*" merupakan bagian essensial dalam ajaran Islam. Dalam Islam "tidak ada agama tanpa ilmu dan tidak ada ilmu tanpa agama". Disamping itu adalah suatu kenyataan bahwa sains dan teknologi merupakan kata kunci untuk mengungkit atau membuka pembangunan kehidupan modern, (7) paradigma keilmuan Islami adalah tumbuh kembangnya sains dan teknologi dalam bingkai ajaran Islam.

Kini momentum kebangkitan pendidikan nasional (pendidikan sekolah Islam) mulai digerakkan oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Permendiknas Nomor 19 2007 tentang Standar pengelolaan sekolah (perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, dan sistem informasi manajemen sekolah) sebagai penjabaran PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standarisasi pendidikan nasional.

Begitu pula momentum ini harus dimanfaatkan sebagai peluang bagi era kebangkitan pendidikan Islam Indonesia. Kalau sekolah-sekolah Islam yang dibangun berbagai yayasan/perorangan sebagai sintesis dari sistem madrasah yang menangkap aspirasi segmen kelas menengah muslim, maka hal itu kita terima yang merupakan kekayaan kreativitas umat Islam dalam membangun pilar kebudayaan umat.

Fenomena menunjukkan beban kurikulum pendidikan Islam terlalu berat (mata pelajaran terlalu banyak) bagi anak-anak didik merupakan masalah khusus, dan lemahnya manajemen/kepemimpinan sekolah Islam, madrasah dan pesantren menyebabkan sistem pendidikan Islam masih tetap tertinggal selain pengaruh faktor eksternal. Apalagi, lemahnya kompetensi sumberdaya guru dan tenaga kependidikan menjadi tambahan beban sistem pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitasnya menjadi berjalan tertatit-tatih.

Hanya saja perlu dikritisi, apakah madrasah, pesantren, dan sekolah-sekolah Islam memang sudah dibangun dalam bingkai filosofi pendidikan Islam dan paradigma sains Islam sebagai konstruksi kurikulum pendidikannya? Sudahkah lembaga pendidikan Islam saat ini mengarahkan perubahan lembaganya dengan kepemimpinan yang kondusif bagi pemberdayaan guru-guru dan tenaga kependidikannya dengan memiliki keseimbangan kepuasan kerja dan kinerja tinggi? Patut diduga, mungkin saja lembaga pendidikan Islam yang menjadi *trend* baru sekarang ini, lebih kepada pemenuhan eksklusivitas dan pencapaian profit/kapitalisasi melalui pendidikan ketimbang menunjukkan kemampuan manajerial edukatif dan keberpihakan kepada umat untuk mengeluarkan lulusan terbaik yang mengungguli lulusan dari sekolah umum lainnya. Ini masih perlu pembuktian melalui penelitian yang meyakinkan. Di negara-negara maju, untuk menunjukkan sekolah yang baik tidak menggunakan kata unggul (*excellent*) melainkan *effective*, *develop*, *accelerate*, dan *essential* (Mohrman, 1994:81). Di dalamnya selain berlangsung manajemen dan kepemimpinan efektif, juga berlangsung pembelajaran dengan strategi-strategi baru; pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran konstruktivisme.

Kehadiran sekolah Islam plus/unggulan dewasa ini selain madrasah dan pesantren diyakini dalam rangka berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa/umat. Jika fenomena ini dianggap sebagai kebangkitan pendidikan Islam, maka patut dilakukan rekonstruksi kurikulum bagi pendidikan dasar dan menengah yang benar-benar menyiapkan peserta didik dengan

nilai-nilai fundamental keIslaman dan kecakapan dasar (membaca, menghitung, menulis). Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan lulusan yang memahami dasar-dasar Islam secara terpadu, dengan motivasi berprestasi tinggi untuk pendalaman penguasaan pengetahuan dan keterampilan hidup di masyarakat dan atau mengikuti pendidikan lanjutan lebih tinggi bagi format pendidikan menengah. Intinya bahwa pendidikan dasar dan menengah lebih mempersiapkan anak-anak dengan kualifikasi pribadi yang baik, berkemampuan dasar, dan kesiapan memasuki sistem kehidupan masyarakat, dan pendidikan tinggi (bahasa, sains, matematik, keIslaman, keterampilan hidup praktis).

Dalam konteks ini, diperlukan kemampuan antisipatif sekolah Islam atas dinamika eksternal (perubahan kebijakan pemerintah dan kemajuan IPTEK) melalui sekolah yang menerapkan manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam transformasional, suatu kepemimpinan yang berbasis kepada visi, misi, tujuan dan program peningkatan mutu menuju perubahan sekolah-sekolah Islam secara akuntabel. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan sumberdaya guru dan tenaga kependidikan profesional dari perguruan tinggi umum dan keguruan Islam yang menjadi penyokong utama kebangkitan pendidikan umat pada sekolah Islam, madrasah dan pesantren (salaf/ asyariyah/modern/ atau kombinasi).

Selain itu, dalam rangka mengantisipasi dinamika eksternal, perubahan peraturan dan perundang-undangan, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, gaya hidup masyarakat, maka madrasah, pesantren dan sekolah-sekolah Islam perlu: (1) melakukan *reorientasi* tujuan dalam kiproahnya, yang terlihat dalam kurikulum dan manajemen lembaga, (2) membangun jaringan kerjasama (*networking*) untuk membangun keunggulan lembaga pendidikan Islam dalam rangka menyediakan dan memanfaatkan bersama laboratorium iptek bagi pembelajaran, (3) menyediakan pusat pengembangan sumberdaya guru dan tenaga kependidikan umat Islam yang mengakomodir keperluan pendidikan dan latihan guru serta tenaga kependidikan profesional.

Mencermati keberadaan dan perkembangan madrasah, sekolah dan pesantren dalam kondisi kontemporer, seharusnya kehadirannya menjadi salah satu lembaga yang merupakan mata rantai dari pendidikan dasar, dan menengah yang mampu menumbuh-kembangkan sains dan teknologi dalam bimbingan dan bingkai wahyu Allah. Kurikulum adalah rancangan program materi pelajaran yang akan disampaikan melalui pembelajaran kepada anak dalam rangka membina potensi sehingga tujuan pendidikan Islam tercapai.

Dalam Islam, menciptakan perubahan perlu proses perencanaan dan evaluasi terhadap keperluan masa depan" (QS.59:18).

Bagaimanapun, tujuan pendidikan Islam sangat tegas dan jelas menentukan isi kurikulum. Segala sesuatu yang ingin diberikan kepada anak sebagai proses pembinaan potensi anak dirumuskan dalam kurikulum pendidikan Islam mencakup tujuan umum, dan tujuan khusus, atau standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Namun, jika sekularisme yang menjadi tujuan pendidikan, maka asas keseluruhan dalam materi pelajaran akan menjadi kufur dan sekuler sehingga unsur-unsur Ilahiyah tidak terdapat di dalamnya. Pendidikan Islam adalah berdasarkan ideologi Islam, sehingga format isi kurikulum atau materi pelajarannya konsisten pada dasar-dasar ajaran Islam. Ada empat dasar ajaran Islam yang secara universal menjadi isi kurikulum pendidikan Islam, yaitu : (1) Tauhid (Keesaan Allah), (2) Risalah (Kerasulan), (3) Akhirat, (4) Khalifah".

Secara tegas dapat dikemukakan bahwa hasil rumusan konperensi pendidikan tersebut berorientasi kepada usaha untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan agama, karena menurut hasil konperensi itu, ilmu terbagi kepada dua bagian. Pertama, ilmu-ilmu *abadi* (*perennial knowledge*) yang berdasarkan wahyu, misalnya al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua, ilmu-ilmu yang diperoleh dari hasil penyelidikan (*acquired knowledge*), termasuk di dalamnya ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu tentang alam sekitar dan aplikasinya (Al-Affendi dan Baloch, 1980:2).

Pembenahan manajemen dan kepemimpinan merupakan keniscayaan. Perlu semakin diarahkan pada fokus pendidikan berbasis keumatan, dan penataan ulang kurikulum pendidikan Islam sebagai rancangan program pendidikan yang berakar pada ajaran Tauhid. Ilmu pendidikan menempatkan diri sebagai pedoman ilmiah yang memandu pengembangan kurikulum pendidikan yang di dalamnya terkandung unsur mengakomodir peran manusia dalam tugas kerisalahan dan kekhalifahan, agar terwujud kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk mewujudkan isi kurikulum pendidikan Islam yang merangkum totalitas tujuan keagamaan, pengembangan akal dan akhlak, pengajaran kebudayaan, dan tujuan pembinaan kepribadian, serta orientasi keunggulan umat, akan dapat dirancang ulang melalui kekuatan manajemen dan kepemimpinan pendidikan yang transformasional berbasis nilai. Penelitian-penelitian kependidikan guna memecahkan masalah, sejatinya memerlukan dukungan berbagai disiplin ilmu dalam memaksimalkan kinerja pendidikan untuk pengembangan sumberdaya manusia bagi menjamin eksistensi kehidupan bangsa.

D. Pendekatan Multi-Displin

Kepedulian terhadap mutu pendidikan sudah ditunjukkan para filosof, politisi, dan para orang tua pada dasawarsa abad ke-21. sejak dari debat mengenai definisi pendidikan, hubungan sekolah dan masyarakat, distribusi pengambilan keputusan dalam spektrum pendidikan, dan hasil peningkatan semua aspek dalam lembah pendidikan (Noll, 2009:xvii). Pertumbuhan pemikiran tentang kemanusiaan dan ilmu perilaku dan sosial membawa perkembangan kelembagaan, norma, dan perspektif kritis yang membentuk fokus kepedulian atas pendidikan. Perspektif ini memungkinkan para ahli dan penlitit untuk menguji berbagai variabel kontekstual, nilai orientasi, filosofis, dan asumsi politik yang menjaga keadaan yang tetap dan usaha-usaha reformasi.

Ada beberapa rekomendasi yang perlu dicermati kalangan ahli pendidikan. Sesungguhnya horizon pendidikan 2020, memberikan penekanan terhadap penyediaan sumberdaya manusia tenaga kependidikan yang mengharuskan penataan ulang manajemen sumberdaya tenaga kependidikan. Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam *"The World Ahead: our Future in The Making"*, sebagaimana dikeluarkan oleh UNESCO, dikemukakan Mayor dan Binde (2001:20), yaitu:

- 1) Memajukan pendidikan seumur hidup untuk semua (*life long education for all*), perlu mendapat prioritas dalam bidang pendidikan orang dewasa, khususnya bagi perempuan melalui pelatihan keterampilan teknik yang intensif dalam bahasa mereka, universalisasi pendidikan dasar, dan pengembangannya,
- 2) Mengembangkan pelatihan berkelanjutan terhadap guru dan penyegaran terhadap keterampilan mereka agar supaya mampu menciptakan konteks interaksi bagi proses pendidikan seumur hidup bagi semua jenjang".
- 3) Merencanakan semua sistem pendidikan bersendi dua (*dual axis*), mendorong semua inisiatif pribadi memperoleh pengetahuan dan memperoleh metode dan menyampaikan pendidikan dasar kepada setiap orang, sebagai sumber pengembangan pribadi, budaya dan identitas etik serta tanggung jawab masyarakat. Pendidikan harus sekaligus membangun masyarakat dan melatih individu; mendefinisikan ulang kelas masyarakat yang seharusnya, dan akhirnya memberikan prioritas dalam totalitas jenjang kurikulum pendidikan.
- 4) Memunculkan dimensi lokal dalam dimensi pandangan dunia yang luas dan dimensi individu dalam kolektivitas, dan dimensi masyarakat, aksentuasi

hubungan interpersonal dalam pertukaran informasi, memberikan ruang lingkup bagi ekspresi kekhususan lokal dan regional dalam jaringan pandangan dunia yang luas untuk mencegah penciptaan hegemoni budaya".

- 5) Merencanakan sistem pendidikan pluralistik, baik dalam keragaman metode, keragaman karir, keragaman tradisi dan instrumen baru, keragaman pelaku, keragaman konteks (sekolah, tapi juga perpustakaan, museum, masyarakat lokal dan pemerintahan, perusahaan dan keluarga), keragaman urutan waktu, (pase pembelajaran anak, tetapi juga kehidupan profesional, waktu senggang, dan pensiun).
- 6) Memperkaya konsep pengetahuan; bergerak dari gagasan pengetahuan melalui akumulasi konsep tentang kesadaran metode dan sasaran. Pembelajaran untuk belajar daripada sekedar pembelajaran saja. Karena itu pelatihan guru adalah menyiapkan orang menjadi begitu akrab dengan teknologi baru, dan kualifikasi baru masyarakat harus diprioritaskan".
- 7) Mendorong semua inisiatif pencapaian pada akses universal terhadap teknologi informasi, universal dalam hal ini tidak hanya masuk ke dalam negara maju juga negara berkembang, dalam rangka upaya mengurangi semua bentuk dikotomi. Berdasarkan pendidikan, tujuan seharusnya adalah membangun jaringan kerja dunia luas untuk memperoleh akses pendidikan kepada semua, tanpa mengabaikan pendidikan jarak jauh atau jenis lain".
- 8) Membangun level kebijakan nasional dan internasional bagi pengembangan inprastruktur komunikasi, baik yang tradisional (perpustakaan, peralatan audio-visual dan komputer), atau berhubungan dengan teknologi baru (multi media, CD Room, berhubungan dengan internet), atau menempatkan penekanan khusus untuk mengurangi keterasingan dan dengan menghadirkan perlakuan khusus inprastruktur baru".
- 9) Transformasikan universitas kedalam pusat keunggulan yang dapat memberikan pendidikan seumur hidup bagi semua orang, berdasarkan kepada Deklarasi Hak Asasi Manusia yang mendorong kepada memperoleh akses pendidikan tinggi secara sama sehingga semua orang dapat mengaksesnya dengan penuh penghargaan".
- 10) Memberikan bantuan dana kepada setiap individu suatu "kupon hadiah" kepada orang yang memberi kemudahan akses dalam rangka pendidikan karir, pengalaman akademik, dan dalam tahun tertentu, khususnya setiap tahun pendidikan

Berdasarkan horizon pendidikan 2020 ini, dapat ditegaskan bahwa pada intinya masyarakat dunia menyadari peran penting pendidikan dalam menciptakan tatanan dunia baru abad XXI, khususnya dengan memperluas akses memperoleh pendidikan yang sama dan berkualitas. Karena itu posisi perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan seumur hidup, khususnya dalam mengembangkan sumberdaya manusia yang diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan merupakan *taken for granted*, harus dilaksanakan dengan penuh komitmen kepada mutu dan mempertinggi derajat kemanusiaan dalam konteks globalisasi.

Tegasnya pendidikan tidak bisa berdiri sendiri memecahkan masalah pendidikan, apalagi dalam menangani masalah kemanusiaan global. Karena bagaimanapun, Ilmu pendidikan bukanlah semata-mata ilmu tentang kurikulum atau metodologi pengajaran belaka. Kajian pendidikan mencakup aplikasi yang terkait banyak perspektif untuk menganalisis tentang apa dan bagaimana pendidikan dalam mencapai tujuan?, dan apa yang dapat dilakukan dan bagaimana sampai di sana?. Setidaknya kajian awal dimulai dari perspektif filosofis, teori dan visi yang membawa jalan ke dalam situasi nyata berlangsungnya pendidikan. Untuk itu aplikasi situasi ini adalah dengan menghadirkan tekanan para politisi, keragaman sosio-kultural, harapan-harapan masyarakat, pengaruh orang tua, kalangan profesional yang memberikan pengujian mendasar keterhubungan antara teori-teori dan cita-cita (Noll, 2009).

Sebagai negara maju, Amerika sendiri mempertanyakan banyak isu dalam pendidikan era kontemporer. Setidaknya pada tataran mendasar ada lima isu teoretis yang mengemuka, yaitu: (1) haruskah sekolah berdasarkan pada pengalaman sosial?, (2) haruskah kurikulum distandarisasi bagi semua?, (3) haruskah behaviorisme menggantikan praktik pendidikan?, (4) apakah konstruktivisme merupakan filosofi pendidikan terbaik?, dan haruskah persaingan global mengarahkan reformasi sekolah? (Noll, 2009:1). Faktanya, ilmu pendidikan menjadi telah menarik perhatian pada ahli ekonomi, begitu pula para pakar teknologi informasi. Ilmu-ilmu yang lain seperti antropologi, neurologi, sosiologi serta filsafat dan ekonomi telah memasuki batas-batas ilmu pendidikan. Bahkan dalam banyak hal, telah terjadi perkawinan yang mesra antara ilmu manajemen dengan praktik pendidikan. Inilah yang dicermati, Peter Senge dengan bukunya yang terkenal *The Fifth Discipline* yang merupakan *best seller* pada tahun 1990-an dan kini telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata gagasan dalam buku ini telah banyak merembes dalam praktik pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen

Senge sebagaimana dicobakan dalam *The Fifth Discipline* telah dicobakan dalam praktik atau penyelenggaraan pendidikan oleh sejumlah sekolah di Amerika Serikat.

Konsekuensi utama bahwa semua organisasi dalam masyarakat masa depan adalah masyarakat pembelajar (*learning society*). Itu artinya, organisasi yang tak mau belajar lagi adalah organisasi yang sudah mati. Sekolah dituntut sebagai organisasi yang terus menerus belajar. Dalam hal ini Senge menggunakan lima prinsip, yaitu: *personal-mastery*, *shared vision*, *mental models*, *team learning* dan *system thinking*. Lima prinsip ini dicobakan di berbagai sekolah di Amerika Serikat yang hasilnya dipaparkan dalam *school that learn*. Dengan demikian, untuk memajukan pendidikan, maka ilmu pendidikan harus membuka diri dengan dukungan ilmu manajemen, psikologi, sosiologi, ekonomi dan politik. Apalagi dalam tingkat praksis pendidikan, upaya-upaya reformasi pendidikan nasional perlu diawali dengan dukungan politik, ekonomi dan manajemen yang baik untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat pembelajar yang diinginkan bersama, sehingga terwujudnya masyarakat madani yang konsisten atas nilai-nilai dasar filsafat Pancasila dapat diwujudkan, secara lebih tercerdasarkan.

Ilmu pendidikan bukanlah semata-mata ilmu tentang kurikulum atau metodologi pengajaran belaka. Faktanya, ilmu pendidikan menjadi telah menarik perhatian pada ahli ekonomi, begitu pula para pakar teknologi informasi. Ilmu-ilmu yang lain seperti antropologi, neurologi, sosiologi serta filsafat dan ekonomi telah memasuki batas-batas ilmu pendidikan. Bahkan dalam banyak hal, telah terjadi perkawinan yang mesra antara ilmu manajemen dengan praktik pendidikan. Inilah yang dicermati, Peter Senge dengan bukunya yang terkenal *The Fifth Discipline* yang merupakan *best seller* pada tahun 1990-an dan kini telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata gagasan dalam buku ini telah banyak merembes dalam praktik pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen yang dihasilkan Senge (1995) sebagaimana dicobakan dalam *The Fifth Discipline* telah dicobakan dalam praktik atau penyelenggaraan pendidikan oleh sejumlah sekolah di Amerika Serikat.

Konsekuensi utama bahwa semua organisasi dalam masyarakat masa depan adalah masyarakat pembelajar (*learning society*). Itu artinya, organisasi yang tak mau belajar lagi adalah organisasi yang sudah mati. Sekolah adalah suatu organisasi yang perlu terus menerus belajar, apalagi sebagai sistem terbuka (*open system*), sekolah menerima pengaruh internal dan eksternal dalam

konteks berpikir sistemik. Karena itu, sekolah, madrasah dan pesantren jangan dibiarkan terlalu lama mandeg. Untuk menuju perubahan institusi, dalam hal ini Senge menggunakan lima prinsip, yaitu: *personal-mastery*, *shared vision*, *mental models*, *team learning* dan *system thinking*. Lima prinsip ini dicobakan di berbagai sekolah di Amerika Serikat yang hasilnya dipaparkan dalam *school that learn*. Formulasi masyarakat pembelajar mengindikasikan pengembangan pendidikan yang mampu mengisi ruang lebih luas bagi pendidikan sepanjang hayat, yang mencakup seluruh aktivitas pembelajaran dalam masyarakat yang terdiri atas; isiatif pelatihan, pendidikan orang dewasa atau kelangsungan pelatihan, dan lingkungan pembelajaran (Belanger, 1998: 262). Ilmu pendidikan menjadi pilar bagi pengembangan format baru pendidikan bagi pengembangan sumberdaya manusia yang diperlukan bangsa ini untuk mencapai kemampuan kompetitif di pentas kebudayaan global.

Penutup

Ilmu pendidikan tidak hanya menjadi pedoman ilmiah dalam konseptualisasi pendidikan, tetapi sekaligus menjadi panduan praktik pendidikan. Untuk itu, ilmu pendidikan perlu bekerjasama dan menerima kontribusi dari ilmu lain dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dan pembelajaran. Penataan ulang sekolah Islam, madrasah dan pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional dalam spektrum pengembangan sumberdaya manusia dengan iklim masyarakat pembelajar, hanya mungkin dicapai bila manajemen pendidikan nasional konsisten pada kebijakan pendidikan berfokus pada mutu berkelanjutan yang didukung manajemen dan kepemimpinan transformasional di sekolah Islam, madrasah dan pesantren.

Kontribusi ilmu pendidikan terhadap perwujudan masyarakat pembelajar (*learning society*) memerlukan pendekatan multi disiplin dengan membuat kebijakan pendidikan nasional yang menjamin formulasi program pendidikan sepanjang hayat, atau pendidikan untuk semua atas dukungan politik dan ekonomi untuk pendidikan yang mencerdaskan. Kebijakan pendidikan juga perlu memberikan ruang lebih luas bagi mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif di masyarakat, tak terkecuali sekolah sebagai organisasi pembelajar, berfokus pada tata kelola yang baik (*good governance*) dalam mengantisipasi globalisasi dengan menawarkan daya saing/keunggulan lulusan dalam skala lokal, nasional, regional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Afendi, Muhammad Hamid dan Nabi Ahmed Baloch, *Curriculum and Teachers Educations*, Jeddah: King University, 1980.
- Al-Djamali, Fadhil, *Menerabas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1993.
- Al Hamdani, Djaswidi, *Pengembangan Kepemimpinan Transformasional pada Lembaga Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa Alia, 2005.
- Al-Attas, Syed Naquib, *Aims and Objective of Islamic Education* (Jeddah: Hodder and Stoughton King Abdul Aziz University, 1979.
- Alam, Zafar, *Islamic Education Theory & Practice*, New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2003.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd, *Mu'jam al-Mufahras li-Al fazh al-Qur'an al-Karim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.
- Ashraf, Syed Ali, *New Horizon in Muslim Education*, Jakarta: Pustaka Mantiq.1989.
- Bush, Tony and Marianne Coleman. *Leadership and Strategic Management in Education*. Terjemahan Fachrurrozi, Yogyakarta: Ircisod, 2000.
- Beare, Caldwell dan Millikan, *Creating Excellent School*, New York: Routladge, 1989.
- Frederico Mayor dan Jerome Binde. *The World Ahead: Our Future in the Making*, 2001. hal.20.
- Drucker, Feter F *Management Challenges for the 21 st Century*, Boston: Butterworth Heineiman, 1999.
- Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2009.
- Data Departemen Agama RI, tahun 2007/2008.
- Data Depdiknas Republik Indonesia, tahun 2009.
- First World Conference on Muslim Education*, 1977.
- Husaini, S. Wakar Ahmed, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* Bandung:

- Pustaka, 1983.
- Langgulong, Hasan, Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologi, Filsafat dan Pendidikan, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989.
- Lawler III, Edward. E dan Christopher G. Worley, *Built to Change: How to Achieve Sustained Organizational Effectiveness*, San Fransisco: Jossey Bass, 2006.
- Mastuhu, Pendidikan Agama Islam Indonesia sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, dalam Jurnal Edukasi Volume 4, Nomor 2 April-Juni 2006.
- Mayor, Frederico dan Jerome Binde. *The World Ahead: Our Future in the Making*, 2001.
- Mohrman, et.al, Susan Albers, *School Based Management: Organizing for High Performance*, San Francisco: 1994.
- Muhaimin, Yahya dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2001.
- Noll, James Wm, *Taking Issues; Clashing Views on Educational Issues*, New Yor: McGraw Hill, 2010.
- Owens, Robert G, *Organizational Behavior in Education*, Amerika: Allyn dan Bacon, 1995.
- Papadapoulus, George S, *Learning for the twenty-first Century: Issues* Paris: UNESCO Publishing, 1998.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas Nomor 19 2007 tentang Standar pengelolaan sekolah.
- Second World Conference on Muslim Education*, Jakarta: 1980.
- Senge, Peter, M, *The Fifth Discipline*, terjemahan Nunuk Ardiani, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafaruddin, Sinopsis Disertasi Kebijakan Peningkatan Kualitas (Penelitian kebijakan Peningkatan Kualitas MAN Model tahun 2005-2007, Jakarta: UNJ, 2008.
- Shriberg, et al, Arthur, *Practicing Leadership*, Canada: John Willey & Sons, Inc, 1997.
- Toffler, Alvin, *Pergeseran Kekuasaan*, Terjemahan Hermawan Sulisty, Jakarta: Panca Simpati, 1990.

- Trier, Uri Peter, *Future Scenarios for Education: Window to the Unknown* dalam *Prospect*, No.119, Paris: UNESCO, 2001.
- UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

RIWAYAT HIDUP

PROF. DR. SYAFARUDDIN, M.Pd.

Data Pribadi:

N a m a : Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.
 Tempat/Tgl Lahir : Padang Mahondang-Asahan, 16 Juli 1962
 Alamat : Jalan Sidomulyo Gang karya No.21 A Tembung
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d
 Jabatan : Guru Besar dalam Mata Kuliah Ilmu Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah IAIN SU, April 2009.
 Istri : Dra. Gusnimar
 Anak : Ahmad Taufik Al Afkary (19 Tahun)
 Dina Nadira Amelia (17 Tahun)
 Ahdiana Fadwani Maulafia (14 Tahun)
 Ayah : Mahmud Siahaan
 Ibu : Nurhani Siregar

Riwayat Pendidikan:

1. SD Padang Pulau- Asahan 1976
2. MTs Pulau Rakyat- Asahan, 1979
3. MAS Pulau Rakyat- Asahan, 1982
4. Sarjana Lengkap Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN SU, 1987
5. Magister (S2) Administrasi Pendidikan, PPS Universitas Negeri Padang 2000.
6. Doktor (S3) Manajemen pendidikan PPS Universitas Negeri Jakarta, 2008.

Riwayat Pekerjaan:

1. Staf Humas pada Biro Rektor IAIN SU, 1990
2. Tenaga Edukatif pada Fakultas Tarbiyah IAIN SU 1993
3. Dosen Tetap Mata Kuliah Ilmu Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah IAIN SU, 1993
4. Ketu Program Studi D2 Pendidikan Agama Islam, 2000.
5. Pembantu Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Tarbiyah IAIN SU, 2008.

Riwayat Pelatihan/workshop:

1. Peserta Orientasi Kehumasan DEPAG di Jakarta, 1990
2. Peserta Program Pengembangan Tenaga Edukatif (PPTE) di IAIN Medan, 1993
3. Peserta Pelatihan Bahasa Inggris di IAIN SU, 1997
4. Peserta Pelatihan Bahasa Inggris di IKIP Padang, 1999
5. Peserta Pelatihan Bahasa Inggris di IAIN SU, 2000
6. Peserta Workshop Rekrutmen dan Pengembangan Karir Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah, 21-23 Maret 2006 di Cipayung Bogor, oleh Puslitbang Agama dan Keagamaan Balitbang Diklat Depag.
7. Peserta Workshop Fasilitator PLPG FT IAIN SU, Brastagi, 2007
8. Peserta Workshop Nasional Intensif Metodologi *Participatory Action Research* untuk Dosen PTAI se-Indonesia di Solo, 16 Mei-5 Juni 2008.
9. Peserta Workshop Disseminasi dan Keberlanjutan Penerapan Hasil Konsorsium Prodi S-1 PGMI, LAPIS (*Learning Assistance Program for Islamic School*) PGMI, Surabaya 27-29 Januari 2009.
10. Workshop TOT Pembelajaran Aktif di Perguruan tinggi ALIHE -1USAID, Yogyakarta, 10-14 Agustus 2009.
11. Workshop TOT Pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggi ALFHE-2, USAID di Batu Malang, Oktober 2009
12. Pelatihan *Educatio Development Center's Center of Online Professional Education*, 1 Juni s/d 31 Juli 2010, dilaksanakan DBE2-EdTech Leaders.

Karya Ilmiah Buku:

1. Filsafat Pendidikan Islam, IAIN Press, 1997
2. Kapita Selekta Pendidikan, IAIN Press, 1999
3. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Grasindo Jakarta, 2002

4. Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan, Grasindo Jakarta, 2004
5. Visi Baru Al-Ittihadiyah, Citapustaka Media Bandung, 2004
6. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Ciputat Press Jakarta, 2004
7. Ilmu Pendidikan: Rekonstruksi Budaya Abad XXI, Citapustaka Media Bandung, 2005
8. Pengantar Filsafat Ilmu, Citapustaka Media Bandung, 2005
9. Manajemen Pembelajaran, Quantum Teaching Press Jakarta, 2005
10. Pendidikan Bermutu Unggul, Citapustaka Media, Bandung, 2006
11. Al-Ittihadiyah: Menjalin Kebersamaan Membangun Bangsa, Hijripustaka Utama, Jakarta, 2006.
12. Psikologi Organisasi dan Manajemen, Thariqi Press, Jakarta, 2007.
13. Ilmu Pendidikan Islam, Melejitkan Potensi Budaya Umat, Hijri Pustakautama, Jakarta 2007.
14. Filsafat Ilmu, Citapustaka Media, Bandung, 2008.
15. Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
16. Pendidikan dan Transformasi Budaya, Citapustaka Media, Bandung, 2009.
17. Kepemimpinan Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, Quantum Teaching Press, 2010.
18. Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Perdana Publishing, 2010.

Karya Ilmiah Jurnal:

1. Visi Baru untuk Perubahan Sekolah, Jurnal Al Ta'lim Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bionjol, 2007.
2. Merancang Keunggulan Daya Saing Global Perguruan Tinggi, Jurnal Kahfi Lembaga Riset dan Pengembangan Manajemen Pendidikan, 2007.
3. Model Manajemen Berbasis Gender; Studi Kasus Pesantren Al Manar Medan, Jurnal Hijri Jurusan KI Prodi Manajemen Pendidikan Islam, 2008.
4. Konsep Ilmu dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam, jurnal Ta'dib, 2010.

Seminar/Orasi Ilmiah/Stadium General:

1. Narasumber Seminar Nasional, Strategi Pengembangan Kurikulum dan Manajemen Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah, di Aula RRI, Oktober 2008.
2. Narasumber, seminar Nasional Paradigma Baru Pendidikan Nasional Berbasis Mutu, HMJ KI IAIN SU, 17 Desember 2008 di Medan.

3. Narasumber, Seminar Nasional, Pendidikan Maju Tanjung Balai, 2020, di Aula IPHI Tanjung Balai, 15 Nopember 2008.
4. Narasumber, seminar Nasional Kupas Tuntas Sistem Pendidikan Sekolah Islam", Garuda Plaza, Medan, 29 Desember 2008, Lembaga Ulil Albab Medan.
5. Narasumber Seminar Nasional Paradigma Baru Pendidikan Berbasis Mutu, 17 Desember 2008, Himpunan jurusan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN SU.
6. Narasumber Seminar Nasional Strategi Pengembangan Sekolah Unggul, Himpunan jurusan Manajemen pendidikan Islam, Medan, 11 Nopember 2009
7. Narasumber Seminar Nasional Manajemen dan Metodologi Pendidikan Agama Islam, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, Kabupaten Serdang Bedagai, April 2010.
8. Narasumber Seminar Internasional Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi, STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe, Februari 2010.
9. Narasumber Seminar Nasional Kebijakan Pendidikan Nasional, STKIP Budi Daya Binjai, Maret 2010.
10. Narasumber Seminar Nasional Pendidikan Agama Islam di Asahan, MGMP PAI Kabupaten Asahan, April 2010.
11. Narasumber Seminar Nasional HMJ Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah IAIN SU; "Pengembangan Strategi Pembelajaran Menuju Pendidikan Indonesia Yang Berkarakter", 7 Juni 2010.
12. Peserta Seminar Internasional Pendidikan dan Temu Karya Dekan FIP/FKIP BKSP/PTN Wilayah Barat Indonesia, di Padang 9 Nopember 2008.
13. Peserta Seminar internasional Strategi pengembangan dan penguatan LPTK, Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 8 Desember 2009.
14. Peserta Seminar Nasional, Pendidikan dan Pembentukan Karakter Bangsa, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah jakarta, 5 Juni 2010.
15. Orasi Ilmiah, Paradigma Baru Pendidikan Tinggi dalam era Globalisasi, pada Wisuda Sarjana II Sekolah Tinggi Teknik Yayasan Sinar Husni Medan, 27 Desember 2008.
16. Narasumber Studium General Pendidikan dan Tantangan Globalisasi, Fakultas Agama Islam Universitas Pancabudi Perdagangan, 8 juni 2009.

17. Narasumber Studium general Pendidikan dalam Konteks Perkembangan Teknologi Informasi, STAIS Al Hikmah Medan, 4 Oktober 2010.

Penelitian:

1. Kepemimpinan Kepala Pesantren Nurul Hakim Deli Serdang, 2000
2. Strategi Manajemen Peningkatan Mutu Guru Sekolah Muhammadiyah Medan, 2002.
3. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SLTP Muhammadiyah 1 Medan, 2003.
4. Manajemen Pesantren Berbasis Gender di Pesantren Al-Kautsar dan Pesantren Al-Manar Medan, 2005.
5. Manajemen Program Akselerasi di sekolah SMA Plus Al-Azhar Medan, 2005.
6. Analisis Kebijakan Peningkatan kualitas Pendidikan Madrasah pada Kanwil Departemen Agama Sumatera Utara, 2007.
7. Kebijakan Peningkatan Kualitas MAN 2 Model Medan (2003-2005), tahun 2008.
8. Manajemen Kurikulum Pendidikan Kelas Unggulan Madrasah Tsanawiyah 2 Medan, 2010.

Organisasi Profesi/Sosial Keagamaan:

1. Wakil Sekretaris Jenderal, DPP Al-Ittihadiyah periode 2004-2009.
2. Dewan Pengurus Korpri IAIN Sumatera Utara, tahun 2008-2012.
3. Ketua Pimpinan Pusat Asosiasi Sarjana Pendidikan Agama Islam, 2010-2015.
4. Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMAPI) Sumatera Utara, 2010-2015.

BAGIAN DUA

PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER

PENDIDIKAN ISLAM DALAM ERA DIGITAL

Dr. Mardianto, M.Pd.

A. Pendahuluan

Globalisasi yang ditandai dengan berbagai kemajuan dalam bidang teknologi informasi, dan komunikasi mendorong terjadinya perubahan baik dalam dunia pendidikan maupun pembelajaran. Secara makro perubahan mendorong terjadinya percepatan *demokratisasi* dan *equity* dalam pembelajaran. Guru atau tenaga pengajar kini tidak lagi merupakan satu satunya sumber dalam proses pembelajaran. Alam yang terbentang dirancang atau tidak dirancang dapat menjadi sumber pengetahuan yang setiap saat menyajikan apa saja yang diinginkan peserta didik.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan beberapa manfaat, yaitu: (a) Semakin cepatnya akses terhadap suatu informasi, (b) Komunikasi dengan berbagai macam orang tidak tergantung oleh geografi, dan (c) Dapat menginternalisasikan suatu ide atau pikiran dalam bentuk teks, graphic, suara dan gambar (Budiargo, 2004).

Mencermati fenomena di atas, pendidikan tidak lagi didefinisikan sebagai proses transfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Definisi ini sangat *personalisme* (kontak antar orang dewasa dan anak menjadi batasan arti pendidikan), dan kini telah ditinggalkan oleh banyak orang. Pendidikan direvolusi oleh teknologi pembelajaran. Dimana peserta didik memiliki keleluasaan dalam hal belajar, kapa saja ia harus belajar, materi apa saja yang harus dipelajari, dengan bantuan apa ia harus belajar. Semua proses pembelajaran dapat *tersaji* seperti outlet air mineral sepanjang jalan.

Begitu juga halnya dengan pendidikan Islam, kini terdapat satu era bahwa pendidikan tidak lagi berpusat pada orang atau pendidik, akan tetapi lebih dari itu kini sedang mengalami apa yang disebut *era digitalisasi* pendidikan. Tulisan berikut ini mencoba memberi beberapa cuplikan fenomena pendidikan telah merambah era digital.

B. Revolusi Pendidikan

Salah satu karya yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah manusia adalah pendidikan. Dengan pendidikan manusia dapat mengukir sejarah, tetapi juga bukan tidak banyak karena persoalan pendidikan yang tidak ditangani dengan cermat dan terencana maka manusia dapat menghancurkan peradaban dalam sejarah hidupnya. Sampai disini dapat ditegaskan bahwa pendidikan selalu beriringan dengan perkembangan kehidupan manusia, dan perkembangan manusia selalu mengubah arti pendidikan dalam diri manusia. Seiring dengan semakin berkembangnya peradaban manusia maka kegiatan pendidikan semakin beragam dalam jenis, bentuk, dan penyelenggaraannya.

Tak dapat disangkal lagi bahwa kebutuhan akan informasi akan senantiasa meningkat dalam era kontemporer. Informasi berupa berita, data, pesan, fakta, pendapat, kritik, dan saran yang diperlukan agar dapat memahami, dan karena komponen-komponen tersebut bermanfaat dalam mengambil keputusan atau bertindak selaras dengan kondisi serta situasi yang berkembang.

Pada perkembangan awal kebudayaan, manusia memperoleh pendidikan dari alam sekitarnya. Dalam perkembangan kemudian ada orang tertentu yang diberi wewenang khusus untuk memberikan pendidikan yang kemudian dikenal dengan sebutan "guru". Namun guru bukanlah satu satunya sumber bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikannya. Guru hanyalah salah satu sumber insani, dan disamping itu masih ada lagi sumber non insani. Sumber sumber insani ini harus pula dilengkapi dengan sumber sumber non insani berupa lingkungan, alat, media dan sebagainya. Peranan guru sebagai penyaji informasi tidak lagi tepat dalam perkembangan ini, karena hal itu dapat dilakukan oleh media (Miarso, 2004:597).

Ketika jumlah penduduk semakin bertambah, sumber daya alam semakin berkurang, kesempatan mendapatkan guru semakin kecil dan sementara pendidikan tetap harus dilaksanakan, maka timbullah kenyataan kegiatan pendidikan selalu tidak sebanding dengan yang diinginkan. Bertambahnya jumlah penduduk memang telah diantisipasi dengan kebijakan "Pendidikan Untuk Semua" *the education of all* (Indonesia sebagai negara anggota UNESCO, telah menyepakati sasaran dan target Pendidikan untuk Semua (PUS) yang harus dicapai pada tahun 2015. Pencapaian sasaran Pendidikan Untuk Semua memerlukan kerjasama berbagai pihak seperti departemen, instansi dan lembaga lembaga masyarakat.

Hal yang lebih penting adalah kesempatan seluruh warga untuk mengakses dunia pendidikan harus dibuka secara lebar. Ini artinya bahwa tidak ada diskriminasi kesempatan, bukan hanya orang yang di kota untuk mengecap pendidikan yang layak, akan tetapi siapa saja di muka bumi adalah mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Harus diakui bahwa perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap perkembangan pendidikan Jarak Jauh. Ashby (1972:9) pernah menulis tentang perkembangan ini dimana menurutnya pendidikan telah mengalami empat revolusi yang sangat dramatis yakni; *revolusi pertama* terjadi pada waktu masyarakat memberikan wewenang pendidikan kepada orang tertentu hingga timbul "profesi guru". *Revolusi kedua* terjadi akibat digunakannya lisan atau tulisan dalam belajar di sekolah maka ada yang disebut "buku pelajaran". *Revolusi ketiga* terjadi dengan ditemukannya mesin cetak yang mengakibatkan pendidikan lebih berbasis pada sumber buku yang tersedia". *Revolusi keempat* terjadi akibat adanya perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat dimana semua bahan, proses dan bentuk pendidikan dapat ditransper lewat peralatan elektronik.

Pendidikan harus tetap dilaksanakan, jumlah penduduk yang semakin bertambah tidak menyurutkan konsep pendidikan harus menghadapi dari tantangan ini. Untuk itu kembali kedaras semula, bahwa pendidikan adalah suatu proses mewariskan menyampaikan nilai, dapat dilaksanakan dimana saja, kapan saja dan untuk siapa saja, maka secara bijak kegiatan pendidikan dapat dilakukan di luar kelas. Jonansen, D.H, et al, dalam *Hand Book of Research for Educational Communication and Technology*, mengemukakan berbagai hasil penelitian tentang perkembangan teknologi pendidikan dapat dengan mudah dibaca. Taksonomi kegiatan pendidikanpun berkembang menjadi empat model yakni sbb:

- Model A : proses pembelajaran yang berlangsung pada tempat dan waktu yang sama (same place/same time).
- Model B : proses pembelajaran yang berlangsung pada tempat yang sama dan waktu yang berbeda: (same place intruction/different time)
- Model C : proses pembelajaran yang berlangsung pada tempat yang berbeda dan waktu yang sama: (different place/same time)
- Model D : proses pembelajaran yang berlangsung pada tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda pula: (different place/different time instruction).

Pembagian ini memang cukup antisipatif, dimana pendidikan tidak lagi harus menggunakan satu tempat yang sama, satu waktu yang sama dalam melaksanakannya. Begitu fleksibelnya kegiatan pendidikan tiada lain untuk mempertahankan bahwa pelayanan kegiatan pendidikan tetap mampu memberikan yang terbaik bagi umat.

Teknologi belajar maupun kebutuhan belajar berubah cepat. Hal ini menuntut pendidik maupun institusi pendidikan untuk cepat menyesuaikan dengan perubahan tersebut (Zuhairi, 2004:28). Apa yang harus dilakukan oleh para perancang pendidikan, tentu mempersiapkan bahan ajar yang tidak tergantung pada pendidik. Pendidik dapat tinggal di rumah, akan tetapi bahan ajar dapat disebar, diperoleh dan dipelajari oleh peserta didik kapan saja, dimana saja oleh siapa saja. Pendidikan Islam sesungguhnya telah lama memiliki sumber dalam bentuk teks yakni Al Qur'an, dan Al Hadits, serta berbagai materi dan informasi lainnya. Formula serta kemasan kemasan yang selalu *up date* dan berubah, tentunya menuntut agar sesuai dengan kebutuhan umat, dan tuntutan zaman.

B. Era Baru Pendidikan Islam

Dalam agama Islam terdapat satu pengakuan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) yang dengan potensinya ia memerlukan bimbingan dan pengarahan untuk menemukan hakikat fitrah menuju kepada *hanif*. Dari sini manusia memerlukan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan untuk membimbing fitrah agar dapat mencapai satu tujuan yang hakiki yakni menjadi *abdun* (hamba). Panduan untuk membimbing dan mengarahkan potensi manusia adalah Al Qur'an. Seperti dijelaskan bahwa: *Dan Al Qur'an ini diwahyikan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang Al Qur'an sampai (kepadanya)*, (QS. 6:19). Al Qur'an memang diturunkan untuk memberikan pembelajaran bagi umatnya agar dapat mengembangkan fitrah secara benar dan optimal. *"Dan demikianlah Kami menurunkan Al Qur'an dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali didalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau agar Al Qur'an itu menimbulkan pengajaran bagi mereka"*. (QS.20:113).

Dalam konsep agama memang setiap individu diwajibkan untuk belajar, tetapi yang lebih utama adalah bila sanggup untuk mengajar. Kewajiban ini sangat sarat dengan perintah agama dimana orang yang memiliki ilmu penge-

tahuan untuk mengajar merupakan tempat terhormat dibanding orang lain. Sadar akan hal di atas, dalam sejarah Islam keberanian Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua mengusulkan pada Abu Bakar untuk menuliskan *mushaf* Al Qur'an agar tidak tercecer atau hilang. Keberanian inilah yang kemudian menjadi warisan umat Islam yang sangat berharga yakni Kitab suci bernama Al Qur'an (Madjid, 1985:4). Dari sinilah kegiatan pembelajaran dalam Islam mengalami revolusi kedua dari pengajaran bersumber pada otoritas seorang Rasul sebagai revolusi pertama bergeser pada sumber autentik.

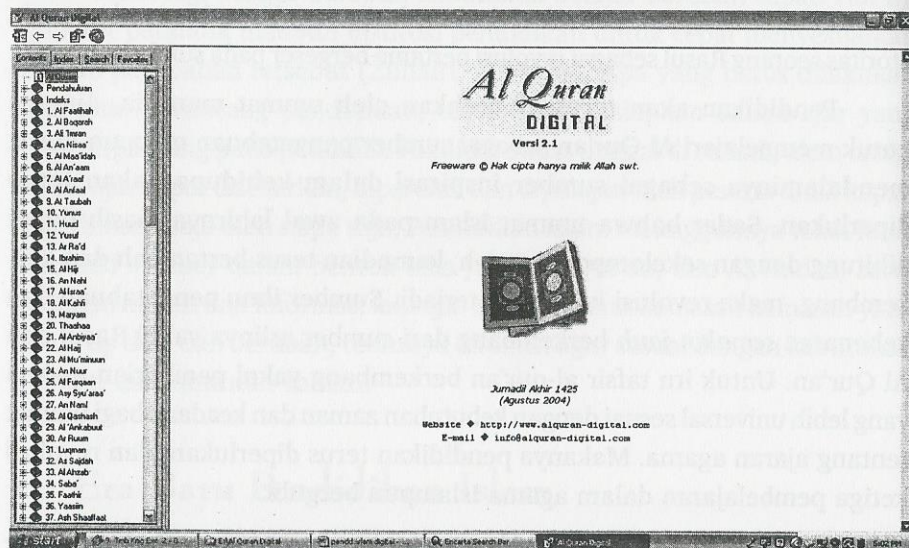
Pendidikan akan terus dibutuhkan oleh umat manusia, dimana untuk mempelajari Al Qur'an sebagai sumber pengetahuan maupun untuk mendalaminya sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan akan tetap diperlukan. Sadar bahwa umat Islam pada awal lahirnya masih dapat dihitung dengan sekelompok jama'ah, kemudian terus bertambah dan berkembang, maka revolusi ketigapun terjadi. Sumber ilmu pengetahuan dan kebenaran *semakin jauh* berkembang dari sumber aslinya yakni Rasul dan Al Qur'an. Untuk itu tafsir al-qur'an berkembang yakni pemberian makna yang lebih universal sesuai dengan kebutuhan zaman dan keadaan bagi umat tentang ajaran agama. Makanya pendidikan terus diperlukan, dan revolusi ketiga pembelajaran dalam agama Islam pun bergulir.

Dari Al Qur'an sampai Al Hadits, bahkan berbagai sumber lain pembelajaran agama Islam kini terus dimanfaatkan, dikembangkan dan dievaluasi setiap saat agar tetap *up date* dengan berbagai kondisi, keadaan, macam ragam tuntutan umat. Sisi lain dari revolusi keempat menurut penulis adalah terjadinya era digital dalam materi pendidikan Islam, berikut ini beberapa komponen di antaranya yakni:

1. Al Qur'an Digital

Kini Al Qur'an dilihat dari materialnya tetap terjaga seperti awal turunnya 14 abad yang lalu. Namun formulasi dan kemasannya telah banyak mengalami perubahan. Kita kenal Al Qur'an dalam bentuk CD dengan formula Holy Qur'an versi 6,31 yang diproduksi oleh Syarikat Program Sark 1991-1996 sangat membantu umat untuk mempelajari Islam sebagai sebuah karya agama. Menurut penulis revolusi keempat pembelajaran dalam agama Islam pun terjadi. Dengan CD Al Qur'an tersebut siapa saja dapat mempelajari Al Qur'an, dimana saja dapat diajarkan, dan kapan saja dapat dilakukan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan umat.

Begitu juga halnya dengan Al Qur'an Digital, yang kini dengan mudah dipindah antar soft ware komputer. Karya anak bangsa ini merupakan satu hasil yang optimal sampai saat ini dimana dengan komputer kita dapat membuka halaman Al Qur'an dari berbagai aspek yang diinginkan. Profile data Al Qur'an Digital dimaksud adalah sebagai berikut:



AL QURAN DIGITAL version 2.1

Program Al Quran ini merupakan help file yang bisa dijalankan di Windows 9x, NT, ME, 2000 atau XP. Untuk Linux dan MacOS, silahkan lihat petunjuknya di: <http://alquran-digital.com/faq.htm>
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan kunjungi: <http://www.alquran-digital.com>
E-mail: info@alquran-digital.com
Versi 1.1 (Rajab 1424 / September 2003)
+ Versi awal dari freeware Al Quran

2. Al Hadits Digital

Dapatkah kita bayangkan sepuluh tahun yang lalu, kita seorang pengajar Ilmu Hadits membawa buku Hadits apakah itu *Subulussalam* dan

atau *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, yang masing masing buku tersebut lebih dari 200 halaman? Alih alih kini dosen Ilmu Hadits hanya membawa sebuah Note Book atau Laptop dapat mengajarkan seluruh Hadits yang pernah di tulis.

Program Software Hadits ini dengan mudah didapatkan tentu bukan monopoli dosen sebagai pengajar untuk memiliki otoritas sebagai penyampai pertama, tetapi siapa saja, mahasiswa, masyarakat lain dengan mudah untuk memperolehnya. Adapun profile Hadits dimaksud adalah sebagai berikut:



Kutubutisah adalah kumpulan 9 Kitab Hadits yang mashur dikalangan umat Islam. Untuk ini dihadirkan agar lebih mudah dalam meneliti lebih jauh dalam bentuk compact disk. Didalamnya memuat mengenai matan hadits, sanad hadits dan biografi sanad, serta keterangan hadits shahih atau dhaifnya sebuah hadits dan lain sebagainya.

9 Kitab Hadits dari Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, An Nasa'i, Ad Daarimi, Ibn Maajah, Ahmad, dan Malik.

Program ini dapat dijalankan pada Windows 311, 95, 98 Arabic y Kualifikasi yang dibutuhkan adalah:

- PC 486DX2 atau yang lebih tinggi
- CD ROM Drive 4X atau yang lebih tinggi
- Memory (RRM) 8 MB atau yang lebih tinggi
- Sound card & Speaker
- Hard disk space 20 MB
- Windows 311 Arab Windows 98 Arab

3. Materi Pembelajaran Digital

Adalah Harun Yahya ilmuwan asal Turki yang memiliki kreativitas dalam menyampaikan berbagai materi dan informasi pendidikan agama. Sebelumnya para siswa menerima pelajaran tentang kejadian manusia lewat cerita, atau dengan termenung membayangkan hubungan antara Surat Al Baqarah ayat 30-39, Ar Rum 20, juga At Tin 5 dengan cerita seorang ibu mengandung dan melahirkan cucu Adam, kini semuanya dapat divisualisasikan yang dengan mudah menangkapnya.

Visualisasi lewat satu teknologi program ini, tentu merupakan satu usaha untuk memberi kemudahan bagi ummat Islam mendalami kemudian memaknai pesan pesan Al Qur'an bagaimana kita diciptakan. Profile dan data program dalam bentuk VCD ini adalah sebagai berikut:



The Miracle of Man's Creation by Harun Yahya ini menceritakan tentang keajaiban Penciptaan Manusia.

Program ini dalam bentuk VCD

- Pernahkah anda memikirkan bagaimana pertamakali anda diciptakan?
- Pernahkah anda mencoba menyelami sebuah kisah yang luar biasa dan penuh keajaiban itu?
- Tidakkah anda ingin melihat seperti apa wujud anda pada awalnya?
- Bagaimana setetes air yang dipancarkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu bentuk lain yang demikian sempurna tanpa cacat?.

Film yang sangat layak disaksikan ini akan mengajak anda berkelana sejenak kembali ke masa lalu. Film ini akan menjelaskan bagaimana anda diciptakan, dan tahap tahap apa saja yang dilalui sampai terbentuk wujud manusia.

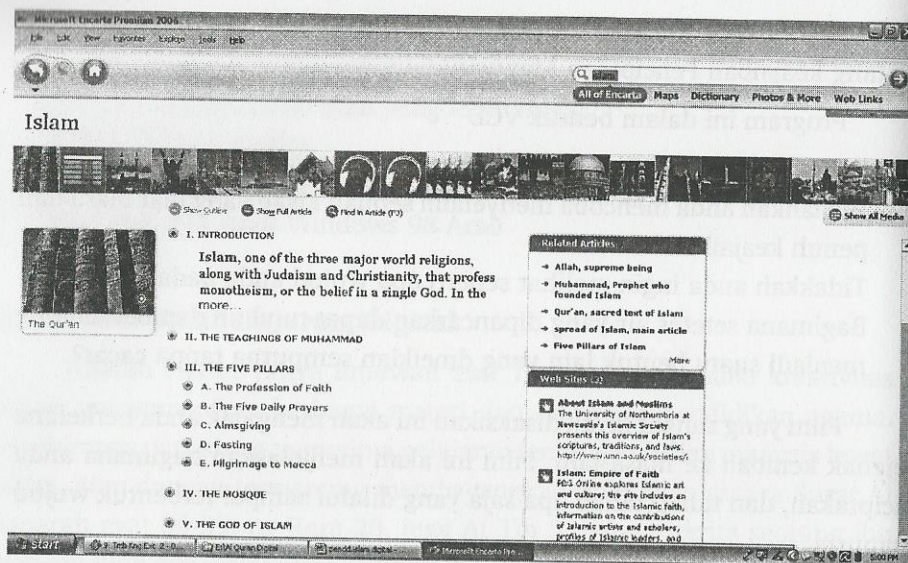
Film ini adalah tentang diri anda sendiri.

4. Encarta Sumber Digital

Islam dipahami sebagai satu konsep ajaran, maka akan tampak berbagai nilai yang memuat aturan normatif menjadi pedoman bagi ummatnya. Islam diartikan sebagai inspirasi untuk berkreasi maka tampak hasil budaya dan karya manusia. Tidak hanya umat Islam, program Encarta yang dikembangkan oleh Microsoft telah berhasil memberikan fasilitas software yang sungguh luar biasa menurut ukuran teknologi pembelajaran saat ini. Program Encarta ini adalah pengembangan Digitalisasi Ensiklopedia Encarta yang telah bertahun tahun dikemas dalam bentuk buku. Kini hadir dalam bentuk software yang dengan mudah kita mendapatkannya.

Materi yang tersaji dalam program ini adalah historical, science, art, games, social, humanisme, dan lain sebagainya. Data yang up to date (bila disambungkan dengan jaringan internet) akan memudahkan kita untuk memperoleh berbagai informasi apa saja yang kita inginkan, bahkan bukan hanya dalam bentuk teks, tetapi audio, bahkan pada bagian tertentu menyajikan fitur tiga dimensi.

Adapun profile dan data program ini adalah sebagai berikut:



(c) (p) 1993-2005 Microsoft Corporation

All rights reserved

Encarta (R) World English dictionary (c) (p) 1998-2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. Developed for Microsoft by bloomsbury Publishing Plc. Translation dictionaries copyright C. Langenscheidt KG Beerlin and Munich 2000.

Macromedia Shockware TM Copyright (c) Macromedia

1995-2001, All Rights Reserved.

Macromedia Flash TM Copyright (c) Macromedia 1996-2003. All Rights Reserved.

Perkembangan teknologi banyak memberikan sumbangan terhadap kegiatan pendidikan, bahkan batasan pendidikan selalu sarat dengan perubahan yang terjadi setiap saat. Pendidikan tidak lagi sebatas ada siswa/ mahasiswa dan dosen pendidik di ruang kelas, mengaji dalam masjid atau belajar klasikal. Kini pendidikan ada dimana mana, kapan saja dan bahkan dapat diakses oleh siapa saja. Formula pendidikan yang dapat memberikan layanan dalam tiga konteks yakni; tempat, waktu dan orang yang tidak terbatas dalam berbagai hal akan memberikan sumbangan yang sangat *spektakuler* khususnya dalam perkembangan zaman.

Islam sebagai agama universal tentu memiliki konsep konsep utama dalam hal pendidikan, nilai nilai agama yang memiliki daya relevansi pada tempat, waktu dan setiap orang bukan hanya teruji dalam sejarah, tetapi kini akan dapat dilihat bagaimana perspektifnya dalam satu bentuk pendidikan

masa kini dan masa depan. Bentuk pendidikan yang dimaksud adalah Pendidikan dengan menggunakan bahan digital dimana tempat, waktu dan orang mempunyai karakteristik yang sungguh berbeda dari pendidikan konvensional. Michale B. Moore (1993-2003. Microsoft Corporation). Dengan begini muncul wacana baru dan kontribusi penting bagaimana menata kembali pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang dapat memberikan tawaran bagi alternatif pendidikan dimasa depan yakni pendidikan digital sebagai satu tantangan.

Di masa depan akan ada lebih banyak inovasi. Bahkan mungkin pada tahun 2025 perangkat keras, perangkat lunak, metodologi dan peralatan saat ini akan dianggap sangat primitif. Tetapi inovasi di masa depan tidak akan sepesat inovasi yang telah terjadi dua puluh tahun terakhir ini. Begitulah yang terjadi pada setiap teknologi baru termasuk didalamnya digitalisasi informasi. Para pengembang aplikasi saat ini sedang mengarahkan perhatian mereka pada era baru yang mungkin saja belum terhayalkan oleh kita disini dan saat ini.

Akankan pendidikan Islam akan tetap bertahan dengan prinsip dan konsep yang lama, tentu tidak, pilihan pilihan dimasa depan hadir didepan kita, berbagai kemudahan telah disajikan dalam bentuk penawaran. Hanya tinggal memutuskan ingin berubah atau mati, begitu Teknologi Pendidikan memberikan solusi. Pendidikan Islam dipercaya bukan harus terjebak dalam dikotomi antara memilih dengan tidak memilih. Digitalisasi pendidikan kaya akan tawaran tawaran yang bermuara pada upaya mempermudah proses pembelajaran. Kemudian nilai nilai yang menjadi pengontrol terhadap pilihan tersebut harus segera dirumuskan bersama, baik oleh perancang pembelajaran, pelaksana, pendidik, bahkan peserta didik.

C. Kekhawatiran

Bila semua nilai pendidikan telah diformat dalam bentuk softcopy, maka semua akan menjadi mudah, semua akan menjadi ringan, dan serba praktis. Bayangkan nilai pendidikan dan pembelajaran akan dengan mudah dikirimkan dari seorang pendidik kepada beribu atau bahkan berjuta peserta didik. Peserta didik tidak perlu menetapkan waktu, tidak perlu jumpa, bahkan ia tidak perlu mencari contoh atau idola (dalam arti fisik). Apa sebenarnya yang terjadi di masa depan.

Pendidikan bukan sekedar pembelajaran, pendidikan juga sarat dengan

penanaman nilai. Dimana nilai membutuhkan piranti emosi, tauladan, panutan, atau bahkan kebencian atas situasi. Era digital dalam pendidikan Islam harus mengakui piranti piranti ini belum seluruhnya dapat dihindarkan. Digitalisasi pendidikan memang lancar memberikan orang pintar dengan belajar, tetapi minim membina orang bijak dengan tauladan.

Paling tidak ada tiga konsekuensi yang harus dihadapi tentang kekhawatiran ini yakni sebagai berikut: pertama, pendidik dalam era digital semakin jauh dari tanggungjawab nilai nilai pendidikan. Artinya kemampuan merancang pembelajaran hampir tidak diimbangi dengan kemampuan atas resiko akibat rancangan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan satu kontrol terhadap teman teman yang menjadikan digital sebagai katalisator pembelajaran. Dimana mereka harus memiliki tanggungjawab besar terhadap nilai akibat dari pembelajaran yang diterima oleh peserta didik.

Kedua, peserta didik yang menjadikan belajar dengan digital adalah dapat mengatasi segala galanya, cenderung berfikir instan, praktis, bahkan semua hampir dapat diselesaikan dengan kalkulasi maya. Efek negatif yang akan terjadi adalah interaksional antar emosi sulit dicari. Bayangkan seorang peserta didik tidak pernah tahu siapa pendidik atau orang yang mempengaruhinya. Akhirnya bukan tidak mungkin do'a seorang guru kepada muridnya tidak pernah ada kesempatan tercipta. Kita harus memberikan catatan tentang hal ini, hikmah belajar bagi seorang murid harus diiringi dengan pengetahuan yang baik dimana ia harus tahu siapa yang memberinya. Dan *berkah dari ilmu yang diterima akan lebih terasa.*

Ketiga, era digital banyak ditandai dengan berbagai temuan yang memberikan kemudahan bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kita lupa, bahwa kesulitan, ternyata adalah juga bagian dari matra pendidikan. Anak yang dengan mudah akan mendapatkan segala galanya, maka ia tidak mendapatkan apa yang disebut tantangan. Daya agresivitas, kemampuan mengatasi masalah, ketangguhan dalam menghadapi tantangan semakin jauh dari proses pembelajaran. Untuk itulah kita mengingatkan, bahwa digitalisasi pendidikan, harus diiringi dengan humanisasi proses pembelajarannya. Sehingga apapun yang terjadi dalam digitalisasi pendidikan Islam khususnya tetap mengacu kepada dimensi keagamaan. kalaulah ini dianggap sebagai salah satu puncak peradaban ilmiah, maka kita perlu tuntunan Ilahi, begitu kata Nadvi (1982).

D. Penutup

Pendidikan adalah bagian dari kehidupan manusia, sampai kapanpun manusia hidup maka pendidikan akan terus menjadi bagian dari upaya mengembangkan kebudayaan manusia. Era pendidikan kini telah mengalami berbagai revolusi, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Berbagai perangkat lunak telah diciptakan oleh para perancang digitalisasi informasi pendidikan, kini saatnya para pengguna seperti halnya pendidik, mahasiswa dan lainnya menyertakan diri sebagai bagian dari era tersebut. Tidak sanggup memberi nuansa dalam era tersebut, akan tergilas oleh sistem yang terjadi. Ingin tetap bertahan tentu tidak sekedar sebagai pemakai, tetapi ditantang untuk berkontribusi dari sekecil apapun yang kita miliki. Sekali lagi maka tidak ada alasan untuk alergi dengan apa yang disebut teknologi dalam pendidikan Islam. *Wallahu'a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Budiargo, Dian, *Media Equation dalam Pembelajaran*, Jakarta, 2004.
- Ashby, Eric, *The Forth Revolution: Instructional Technology in Higher Education*, New York: McGraw Hill, 1972.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al Qur'an*, (Terj. Anas Mahyuddin), Bandung: Pustaka, 1983.
- Heinich R, et all, *Instructional Media and Technologies for Learning*, 5th edition, New York: Mac Millan, 1996.
- Jonansen, D.H, et al, *Hand Book of Research for Educational Communication and Technology*.
- Al Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al Maragi*; Semarang: Toha Putra, 1992.
- Madjid, Nurcholis, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Nadvi, Syed Habibul Haq, *Dinamika Islam*, Bandung: Risalah, 1982.
- Ash Shidiqi, TM. Hasby, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ash Shidiqi, TM. Hasby, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- UNESCO, *Pendidikan Untuk Semua*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2000.
- Miarso, Yusufhadi, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2004

MENIMBANG VISI BARU PENDIDIKAN ISLAM

Drs. Amiruddin. MS. MA.

A. Pendahuluan

Kini semakin disadari bahwa pendidikan Islam mengalami krisis. Ada involusi dalam sistem pendidikan Islam, sehingga selama ini belum melahirkan apa yang disebut sebagai kuantum pendidikan terkait dengan produktivitas keilmuan dan teknologi. Dalam konteks ini, terkesan bahwa dunia pendidikan Islam berjalan di tempat dan tidak ada perubahan paradigma yang signifikan sehingga proses peradaban cenderung mengalami stagnasi.

Di tengah perubahan-perubahan sosial dan budaya yang cepat baik secara kuantitas maupun kualitas, lembaga-lembaga pendidikan Islam sedang dalam masa transisional. Artinya, pendidikan Islam sedang berada pada pilihan-pilihan masa depan yang rumit. Masa depan yang berkaitan dengan nasib eksistensinya sendiri dan pendidikan generasi mendatang. Dapatkah di masa depan yang dekat dan jauh lembaga-lembaga pendidikan Islam masih dibutuhkan oleh masyarakat pendidikan atau justru ditinggalkan? Apakah lembaga pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi pada fungsi-fungsi publik dan pembangunan melalui para lulusannya?

B. Meretas Involusi

Pertanyaan-pertanyaan di atas, memang nampak meragukan masa depan pendidikan Islam, tapi sesungguhnya pertanyaan tersebut mencerminkan adanya kesadaran bahwa dunia pendidikan yang berbasis atau berafiliasi pada agama sekarang ini tidak memiliki daya tarik lagi, demikian pendapat Fachri Ali (Sadzali, 1995:488).

Masyarakat pendidikan kini lebih tertarik pada pendidikan-pendidikan sekuler yang menawarkan masa depan dan pekerjaan yang bergengsi dan

basah. Akibatnya adalah lembaga pendidikan Islam memiliki animo mahasiswa yang rendah dan turun dari tahun ke tahun dengan perkecualian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah mapan dan dinamis.

Sekalipun demikian, optimisme masih diperlukan untuk dijadikan energi dorong bagi gerak transformasi di tubuh pendidikan Islam. Sebab tanpa suatu perubahan, maka sebuah sistem atau institusi akan memfosil ditelan jaman. Itulah sebabnya semua sistem atau institusi apapun di dunia harus melakukan penyesuaian atau akomodasi terhadap perubahan-perubahan sosial. Hal ini terjadi karena revolusi modernisasi melibatkan transformasi semua sistem yang dipakai orang untuk mengatur masyarakat, baik sistem politik, sosial, ekonomi, pendidikan maupun keagamaan.

Saatnya keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu melakukan reaktualisasi terhadap keberadaannya di tengah berbagai tantangan yang berat itu. Dengan peran pendidikan Islam yang kian nyata dalam ikut serta mencerdaskan bangsa dan menjadi garda depan moral bangsa, maka peningkatan peranan dan kontribusinya pada masyarakat dan bangsa secara dinamis harus dilakukan sebagai cara mengevaluasi dan memperbaiki perjalanan pendidikan Islam di Indonesia.

Sebagai pendidikan yang memiliki fungsi ganda: pembangunan moral agama dan keilmuan, pendidikan Islam makin banyak menghadapi tantangan. Sejumlah perubahan kebijakan di bidang pendidikan nasional, telah memberi kontribusi pada bobot masalahnya. Juga pola-pola pandangan masyarakat terhadap pendidikan yang makin materialistik dan sekuler ikut pula menambah tantangan itu. Karena itu, diperlukan berbagai perubahan baik ragam program studinya maupun strategi-strategi pengembangannya (Vaizey dan Debeauvais, 1963:37). Mengapa banyak tantangan yang harus dihadapi pendidikan Islam?.

Hal itu demikian, karena secara internal pendidikan Islam memiliki tuntutan ganda. *Pertama*, berkaitan erat dengan eksistensinya sebagai lembaga keilmuan yang dituntut untuk mengembangkan, mengajarkan, meneliti, dan mengembangkan ilmu Islam sebagai lembaga keagamaan yang sudah pasti mempunyai dasar pemikiran yang seringkali dogmatis. Sehingga, dalam banyak hal bisa menghambat proses-prose pembangunan dan lebih berperan sebagai cagar budaya yang melestarikan ajaran-ajaran agama.

Tetapi kesan semacam ini, sesungguhnya, sudah mulai ditinggalkan banyak kalangan dengan mulainya perubahan-perubahan berarti dari, misalnya, lembaga pendidikan tinggi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri. Walaupun perubahan status ini nampak tidak istimewa, namun perubahan ini memiliki arti simbolik yang berharga, yaitu runtuhnya pemikirannya dikhotomis tentang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang selama ini telah menjadi pandangan umum masyarakat muslim.

Kedua lembaga ini berubah karena tuntutan-tuntutan masyarakat modern yang menginginkan umat Islam dapat memainkan peran-peran sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam kehidupan global. Karena itu, program-program studinya juga lebih kaya dan mencerminkan kebutuhan-kebutuhan pendidikan masa kini. Memang perubahan ini tidak secara otomatis dapat diikuti lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya secara mudah dan serentak. Bukan saja karena faktor anggaran, tetapi juga karena faktor teologis yang melekat pada fungsi lembaga pendidikan agama yang dalam dirinya sendiri tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan prinsip-prinsip doktrial.

Tantangan yang makin kompleks ini memerlukan respon yang jitu, akurat, dan terencana sehingga hasil-hasilnya dapat diprediksi dan bersifat pasti. Artinya, pola-pola perubahan sistem nilai masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pasar, dan fungsi-fungsi pembangunan harus menjadi titik pijak bagi kebijakan-kebijakan pendidikan Islam, sehingga program-program studi yang tersedui tidak lagi hanya bersifat "keagamaan" yang terkesan sebagai cagar budaya saja (Bowles, 1972:98). Saja, tetapi juga mencerminkan keterkaitannya dengan fungsi-fungsi publik dan pembangunan (Drucker, 1972:15).

Ini bukan berarti bahwa pendidikan Islam menjadi lembaga pendidikan sekuler yang lebih mementingkan aspek-aspek duniawiyah saja, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan Islam yang harus mampu mengakomodasi berbagai perubahan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan Islam harus pula menjadi komplementer bagi pendidikan nasional yang menyediakan manusia-manusia tampil dan dapat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Para lulusan pendidikan Islam harus mampu memberikan kontribusi pada kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang. Lebih jauh, pendidikan Islam harus menghapus stigma sebagai lembaga yang memproduksi para da'i dan tukang do'a saja.

Mencermati aspek peran dan kontribusinya bagi umat Islam dan bangsa, pendidikan Islam telah diakui memberikan kontribusi secara signifikan oleh banyak kalangan. Tetapi dari sisi kualitas, pendidikan Islam

harus berjuang terus untuk menemukan format perubahannya ke arah lembaga pendidikan Islam yang bermutu tinggi dan menjadi ujung tombak bagi *agent of Islamization* dan *agent of social change*.

Dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, pendidikan Islam harus mampu memperkuat kapasitas peradaban modern. Keberhasilan peningkatan kapasitas ini akan menentukan peran dan kontribusi secara lebih penting lagi bagi peradaban Islam di masa kini. Karena itu, pendidikan sebagai inti suatu peradaban harus dibangun dengan segenap kekuatannya. Inilah sebabnya, orientasi pembaruan-pembaruan pendidikan Islam harus terus menjadi inti ide segala pemikiran tentang Islam di abad modern dan abad-abad mendatang.

Dalam konteks Pendidikan Islam, perubahan-perubahan tersebut dapat dengan mudah dilakukan mengingat umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas dan banyak menggantungkan pada lembaga lain. Kerjasama-kerjasama mudah dilakukan, dan jaringan input mahasiswa cukup tersedia dari berbagai pesantren yang ada dan tumbuh di Jawa, khususnya, dan Nusantara pada umumnya (Abdullah, 1998:55-71). Hal ini tentu tidak dapat dilakukan oleh STAIN-STAIN di daerah, yang karena letaknya terpencil sulit berkembang dan terisolir dari interaksi produktif di antara lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Bersamaan dengan itu, pendidikan Islam memerlukan inisiatif tinggi untuk membangun kepercayaan pada masyarakat pendidikan. Kepercayaan itu, biasanya secara praktis dicerminkan dari keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu di dalam menempatkan para lulusannya pada posisi-posisi terpendang di masyarakatnya. Hal itu terjadi karena tiga hal. *Pertama*, sistem pendidikan dan kelembagaannya lebih merupakan cerminan keadaan masyarakat. Dalam hal ini keadaan masyarakat yang berlapis-lapis tercermin dalam kenyataan pendidikan sekolah dan perguruan tinggi sebagai suatu sistem. Dari sinilah kemudian setiap tahun masyarakat pendidikan berbondong-bondong untuk masuk ke suatu lembaga pendidikan itu.

Kedua, lembaga pendidikan yang mempunyai kemampuan besar menyalurkan lulusannya sesuai dengan kemampuannya akan dikukuhnya kedudukannya lebih kuat dari pada lembaga pendidikan lainnya. Dalam perspektif ini, maka berlaku dalil bahwa semakin besar kemungkinan suatu lembaga pendidikan tinggi untuk mengantarkan para lulusannya ke posisi kemasyarakatan yang terpendang maka semakin besar arus peserta didik untuk memilih lembaga pendidikan tersebut. *Ketiga*, orientasi alokasi

personil akan berdampak pada munculnya dorongan yang kuat di kalangan anggota masyarakat untuk mencapai tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya (Abdullah, 1998:64-65).

Dengan berbagai inovasi manajemen, anggaran, kurikulum, pengayaan program-program studi, dan strategi pengembangan yang akurat, maka pendidikan Islam diharapkan menjadi lembaga pendidikan alternatif yang secara pasti terus menuju peningkatan mutu. Persiapan-persiapan ke universitas negeri, pembukaan Program Pascasarjana, pembukaan jaringan-jaringan kerja, pembentukan unit-unit usaha, dan berbagai unit lainnya sudah saatnya dilakukan untuk menyangga masa depan pendidikan Islam.

Perpaduan pendidikan agama dan umum justru menjadi kekuatan bagi suatu lembaga pendidikan Islam. Basis-basis keagamaan difungsikan untuk membangun integritas kepribadian sehingga peserta didik/mahasiswa tumbuh menjadi manusia pembangunan yang tangguh. Sementara basis ilmu-ilmu umum berguna untuk memberi ketrampilan dan menyangga kecakapan diri dalam memainkan peran-peran sosial dan pembangunan. Keduanya merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. Hanya saja, mampukah lembaga-lembaga pendidikan Islam melakukan perubahan-perubahan berarti seperti yang dituntut oleh konfigurasi tantangan-tantangan di atas?.

C. Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial

Perubahan sosial dan budaya telah mengubah semua sistem yang dipakai orang, termasuk sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus melakukan pembaruan atau modernisasi agar sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang terus berubah. Karena itu, gagasan program modernisasi pendidikan Islam, misalnya, mempunyai akar-akarnya dalam gagasan tentang "modernisasi" pemikiran dan institusi secara keseluruhan. Dengan kata lain, modernisasi pendidikan, seperti dinyatakan Azra (2000:31), tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan gagasan dan program modernisasi Islam. Ini berarti pemikiran dan kelembagaan Islam, termasuk pendidikan, haruslah dimodernisasi atau diperbarui sesuai dengan kerangka modernitas; mempertahankan pemikiran kelembagaan Islam "tradisional" hanya akan memperpanjang nestapa ketidakberdayaan kaum Muslim dalam berhadapan dengan kemajuan dunia modern.

Dalam kerangka pemikiran ini, pendidikan dalam proses modernisasi

akan mengalami perubahan fungsional dan antar sistem. Perubahan-perubahan tersebut pada tingkat konseptual dapat dirumuskan dengan menggunakan "pendekatan sistem-sistem". Dengan mengutip Don Adam, Azra, mengelaborasi pendekatan sistem ini dalam kajian pendidikan dan modernisasi di mana ditemukan variabel-variabel yang relevan bagi transformasi pendidikan. Variabel-variabel ini dapat pula diterapkan dalam agenda modernisasi pendidikan Islam dalam konteks Indonesia secara keseluruhan. Di antaranya adalah: ideologi normatif, mobilisasi politik, mobilisasi ekonomi, mobilisasi sosial, dan mobilisasi kultural. Variabel-variabel ini penting untuk menjadi bahan bagi reorientasi keilmuan Pendidikan Islam dalam rangka mewadahi modernitas dalam kerangka kurikulum yang sudah disesuaikan.

Pendidikan Islam kini makin berat menghadapi realitas sosial yang makin materialistik dan sekuler. Sistem nilai telah berubah sehingga pandangan masyarakat terhadap pendidikan pun berubah. Karena itu, pendidikan Islam kini dianggap tidak menarik lagi dan tidak menjanjikan harapan-harapan masa depan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya proses peredupan pengaruh dan wibawa pendidikan Islam adalah, terutama sekali, terletak pada pudarnya struktur masyarakat tradisional akibat proses modernisasi dan kapitalisasi. Jadi, realitas sosial kita telah menjadi suatu proses ekspansi dunia material dan teknologi dalam skala yang jauh lebih luas dari hampir-hampir tak berpreseden. Barraclough (1985:53), misalnya, menyebutkan sebagai *"far deeper and wider impact that determined and shaped the typical destiny of the future world"*.

Ini adalah suatu tantangan yang harus direspon. Ini juga berarti secara tidak langsung menuntut para pengelola pendidikan Islam untuk lebih bersikap rasional dan lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat luas (Ali, 1995: 488). Karena *mainstream* pendidikan sekarang adalah mempersiapkan sumber daya manusia di masa mendatang, dan bukan semata-mata sebagai alat untuk membangun pengaruh politik atau alat dakwah dalam arti sempit. Kalau persepsi yang terakhir ini yang diacu dan dijadikan dalih untuk tetap bertahan, maka boleh jadi pendidikan bukan saja menolong masa depan peserta didik, tetapi lebih jauh dari itu dapat dinilai sebagai perbuatan yang merugikan. Karena itu, persoalan dunia pendidikan sebenarnya termasuk peka dan rawan. Pendidikan yang tidak berdasarkan pada orientasi yang jelas dapat mengakibatkan kegagalan dalam hidup secara berantai dari generasi ke generasi.

Pendidikan Islam, terutama pendidikan tingginya, harus mulai melakukan tatapan ulang mengenai definisi, konsep, arah, dan kebijakan pendidikan demi membangun sebuah generasi yang berkualitas dan selaras dengan realitas-realitas sosial-ekonomi-budaya. Hal ini dilakukan agar pendidikan Islam tidak lagi mengartikulasikan tujuan-tujuan transendental saja, tetapi juga berorientasi pada kongkretisasi tujuan-tujuan agama yang membumi, atau berhubungan dengan penyelesaian-penyelesaian masyarakat dalam arti yang luas dan komprehensif.

D. Peran Baru Pendidikan Islam

Semua proses pendidikan adalah suatu kegiatan yang lahir dari suatu pandangan ke masa depan, bahkan membentuk gambaran masa depan. Atau seperti dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwa generasi muda hendaknya dididik sesuai dengan prinsip bahwa mereka akan hidup pada zamannya sendiri, bukan pada zaman kita. Karena itu, pendidikan Islam harus mampu memainkan peran pendidikan yang berorientasi pada kebaikan anak didik di masa depannya (Feisal, 1995:141).

Dengan nada yang sama, Kuntowijoyo menyebut bahwa fungsi pendidikan Islam bersifat kultural yang memiliki fungsi melestarikan, mengembangkan dan mewariskan cita-cita masyarakat yang didukungnya. Jadi, pendidikan Islam bertugas mengontrol dan mengarahkan perkembangan masyarakat melalui evaluasi dan rekomendasi. Dalam arti ini, kata Kuntowijoyo, pendidikan Islam harus mengajukan evaluasi kritis terhadap orientasi perubahan sosial, ekonomi, politik dan bisnis (Kuntowijoyo, 1991:349:350). Keberibadian suatu pendidikan Islam dapat dilihat dalam fungsi ini, karena dalam fungsi seperti itulah cita-cita pendidikan Islam untuk menyelenggarakan masyarakat yang beradab sangat dipertaruhkannya.

Bangunan keilmuan Pendidikan Tinggi Islam telah menerima banyak kritik. Kritik ini terutama ditujukan pada bangunan keilmuannya yang tampak dikhotomis antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sekular. Nampaknya, pandangan dikhotomis ini masih mencerminkan warisan sejarah pendidikan Islam masa lalu. Pendidikan Islam di masa lalu telah terpola pengembangan keilmuan yang bercorak integralistik-ensiklopedik di satu sisi, yang ditokohi oleh para ilmuwan seperti Ibnu Shina, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Rusyd berhadapan dengan pola pengembangan keilmuan

agama yang spesifik-parsialistik di sisi lain yang dikembangkan oleh para ahli hadits dan ahli fiqh (Nashr, 1972:168). Keterpisahan secara diametral antara keduanya dan sebab-sebab lain yang bersifat politis-ekonomis, berakibat pada lemahnya kualitas pendidikan dan kemunduran dunia Islam pada umumnya. Dalam ketiga revolusi peradaban manusia, yaitu revolusi hijau, revolusi industri, dan revolusi informasi, tak satu pun ilmuwan Muslim tercatat namanya dalam lembaga tinta emas pengembang ilmu pengetahuan.

Perkembangan dan pertumbuhan ilmu-ilmu sekuler sebagai simbol keberhasilan perguruan umum dengan berbagai implikasinya pada tataran moral dan etik kehidupan manusia di seluruh dunia di satu pihak, dan perkembangan dan pertumbuhan perguruan tinggi Islam yang hanya menekankan ilmu-ilmu keagamaan dan teks-teks keislaman normatif-klasik dengan berbagai dampaknya pada penciptaan tenaga trampil dalam dunia ketenagakerjaan di lain pihak, menjadikan kedua-duanya mengalami proses pertumbuhan yang tidak sehat serta membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial pertumbuhan yang tidak sehat serta membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial-budaya, sosial-ekonomi, sosial-politik, dan sosial keagamaan di tanah air.

Secara lebih khusus, kenyataan-kenyataan ini menjalar ke sikap ambigu di dalam menyikapi dan memperlakukan ilmu tersebut dalam hirarki keilmuan di IAIN/STAIN. Lembaga pendidikan tinggi Islam seperti nampak sebagai spesial ilmu-ilmu agama dan memproduksi para ulama demikian Muchtarom dalam Sazali (1995:516). Akibatnya, lembaga ini yang menyediakan kotak pekerjaan yang terbatas dan tidak mengeskpansi ke fungsi-fungsi publik dan pembangunan modern, dengan perkecualian Departemen Agama dan lembaga-lembaga lain yang sejenis yang mampu dan mau menampung.

Padahal dalam waktu yang sama, masa depan pendidikan Islam akan sangat ditentukan sejauh manakah sistem pendidikan tersebut bisa terus menerus mengakrabi diri dengan ekspansi dunia material dan teknologi. Karena itu, problem epistemologis harus segera dipecahkan untuk memperoleh posisi legitimasi yang tepat dalam rangka mengembangkan pendidikan Islam yang lebih luas dan ekspansif sebagaimana tercermin dari perubahan status IAIN Jakarta dan Yogyakarta ke Universitas Islam Negeri.

Ini berarti masalah bangunan keilmuan pendidikan Islam bukanlah bersifat statis tetapi dinamis. Keharusan untuk bersikap kritis pada doktrin-

doktrin keagamaan tetap harus dilakukan agar ajaran Islam tetap akomodatif terhadap kebaruan-kebaruan realitas sosial sehingga tidak menghambat percepatan perkembangan pendidikan Islam. Sebab salah satu keterbelakangan dan kemunduran Islam menurut Alatas adalah karena terdapatnya kelemahan kepemimpinan intelektual (Al-Attas, 1995: 170), karena tak adanya kesediaan untuk mempertanyakan ajaran-ajaran Islam dalam hubungannya dengan perubahan sosial.

E. Integrasi Ilmu Pengetahuan

Pendidikan Islam telah sejak lama berada pada pertarungan tanpa henti antara orientasi sekuler dan orientasi syari'ah. Karena itu, dunia pendidikan Islam dilanda dualisme antara kedua pertarungan itu. Kecenderungan berfikir dikhotomis dalam keilmuan telah menyebabkan ilmu-ilmu alam dan sosial dipandang sebelah mata oleh umat Islam sehingga dalam banyak hal peradaban Islam mengalami kejatuhannya secara sistematis. Inilah kemudian menyedot perhatian banyak pemikir muslim untuk melakukan peruntuhan pandangan tersebut.

Di antara tokoh itu, yang paling tegas, adalah Ismail Raji Al-Faruqi (1987) dengan gagasan proyek islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam buku yang sangat bagus ini, ia berpendapat bahwa untuk mengakhiri kemerosotan pendidikan Islam, satu-satunya jalan adalah dengan mengakhiri pandangan dualitas dan dikotomis ilmu: antara ilmu-ilmu umum (sekuler) dan ilmu-ilmu agama selanjutnya mengintegrasikannya sebagai bagian organik dari pancaran wahyu ilahi yang harus pula dipelajari oleh dunia Muslim.

Mencermati sejarah pendidikan Islam klasik, terlihat bahwa dikotomi tidak ada. Banyak ilmuwan muslim yang atas kesadarannya sendiri dan atas semangat Al-Qur'an telah mengembangkan bidang-bidang atau ilmu-ilmu "sekuler", seperti: kedokteran, kimia, astronomi, matematika, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu ini dipandang sejajar dengan ilmu-ilmu agama tradisional seperti tafsir, fikih, hadits, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan lain-lainnya. Bahkan menurut George Makdisi, perhatian besar ulama/kaum intelektual Muslim begitu besar kepada konsep ilmu sehingga membuat mereka dapat menciptakan beribu-ribu definisi ilmu pengetahuan, termasuk juga pembagian dan pengklasifikasian ilmu pengetahuan. Di antara pengklasifikasian-pengklasifikasian ini yang paling terkenal adalah pengklasifikasiannya al Kindi (801-973 M), Al-Farabi (wafat pada 950 M),

Ibn Sina (980-1037 M), Al-Ghazali (1058-1111 M), Al Razi (864-925 M), dan Ibn Khaldun (1332-1404 M). (Maksidi, 1981:24-25).

Sejarah pendidikan Islam yang positif terhadap ilmu pengetahuan ini sesungguhnya dapat secara kokoh memperkuat basis-basis reintegrasi dan reorientasi keilmuan dalam peradaban Islam. Peradaban Islam dalam kerangka modernitas terasa terdistorsi oleh pandangan-pandangan sempit tentang ilmu pengetahuan yang dikotomis antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sekuler, terutama yang direpresentasikan oleh dunia pendidikan Islam melalui kurikulum yang sudah teredusir ke tingkat teologisasi. Inilah yang menurut fazlur Rahman proses tersebut dianggap telah meredusir secara sangat merugikan yang mengakibatkan timbulnya pandangan yang sempit dan juga menyebabkan pendidikan Islam yang ideal menjadi lesu (Rahman, 1994:272). Seorang penulis Turki, sebagaimana dikutip Rahman Katib Chelebi (wafat 10-67 H/1657 M) meratapi kelayuan sains-sains rasional dan bahkan juga teologi tinggi sebagai berikut: "..... Tetapi banyak orang-orang tidak cerdas..... yang pasif laksana batu-batu, membeku dalam peniruan kepada nenek moyangnya. Tanpa berfikir lagi, mereka menolak dan mengingkari ilmu-ilmu yang baru. Mereka dianggap orang-orang terpelajar, padahal selamanya mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang gemar sekali mencemoohkan apa yang mereka sebut sebagai 'sains-sains filosofis', sementara mereka sendiri tak tahu apa-apa tentang langit dan bumi. Seruan al-Qur'an 'Tidaklah mereka merenungkan kerajaan langit dan bumi?' (QS. 7: 184) tak meninggalkan kesan apa-apa pada mereka. Mereka mengira bahwa merenungkan langit dan bumi berarti menatap saja kepada keduanya, bagaikan seekor kerbau" (Rahman, 1994: 273).

Kemunduran sains-sains dalam peradaban Islam sebagai akibatnya oleh pandangan negati para intelektual Islam terhadap posisi teologi sains-sains. Pandangan semacam ini kemudian terlembagakan oleh fatwa-fatwa para ulama sampai akhirnya menginvasi secara sistematis dunia pendidikan Islam.

Dalam konsep pendidikan Islam, struktur keilmuannya menjadi menyempit sekecil ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan segala percabangannya. Pendidikan Islam seolah-olah hanya membatasi diri pada bidang-bidang agama saja, sementara sains-sains yang berkaitan dengan kimia, kedokteran, fisika, penerbangan, teknologi informatika, dan kelautan tak lagi menjadi bagian dari kurikulum pendidikan Islam. Bisa dibayangkan

kalau pendidikan Islam dikonstruksi hanya berurusan dengan ilmu-ilmu Ushuluddin, Dakwah, Syari'ah, Adab, Tarbiyah, dan sejenisnya. Tak heran kemudian ini Islam seperti IAIN-dan STAIN. Mengapa Islam yang universal hanya dibingkai oleh sempitnya wadah pendidikan semacam ini?

Secara prinsip, pembatasan keilmuan hanya pada ilmu agama justru menyesatkan. Dari perspektif doktrin, misalnya, disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda yang artinya: *"Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim; 'Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina'; 'ilmu pengetahuan itu adalah milik orang mukmin yang hilang, di mana saja ia mendapatkannya, maka ia lebih berhak memilikinya dari yang lain'".* Pernyataan-pernyataan Nabi diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah/ 58:11, "Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat". Dari doktrin Al-Qur'an ini ilmu pengetahuan tidak disebut semata-mata ilmu agama tetapi juga ilmu dalam pengertian umum (dalam al-Qur'an kata *'ilm* disebut sebanyak 105 kali lebih banyak dari penyebutan *al-din* sebanyak 103 kali).

Secara lebih luas, istilah ilmu menjadi penting, karena ia termasuk istilah di dalam Al-Qur'an. Dengan mempelajari al-Qur'an orang bisa menarik kesimpulan bahwa ilmu kenyataan kebudayaan, Franz Rosenthal dalam Raharjo (2002:530), melihat bahwa pada zaman abad pertengahan, ilmu telah berkembang menjadi konsep yang sangat sentral dalam masyarakat Muslim. Demikianlah antara lain dinyatakan Rosenthal:

Dalam bahasa Arab biasa, *'ilm* dapat digantikan pengertiannya dengan "pengetahuan". Sungguh pun begitu "pengetahuan" mengandung kekurangan dalam mengeskpresikan semua kenyataan dan perasaan yang terkandung dalam kata *'ilm*. Karena *'ilm* adalah salah satu dari sekian konsep mendominasi dunia Islam dan telah membentuk dan memberi ciri khusus dalam segala kompleksitasnya peradaban Islam.

Menurut Rosenthal: *'ilm* tidak bisa diartikan begitu saja dengan "pengetahuan". Dalam keterangan pendahuluan terhadap bukunya itu, ia hanya mengemukakan fakta yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Ini menimbulkan keingintahuan: bagaimana sebenarnya istilah *'ilm* itu diinterpretasikan oleh para sarjana Muslim, yagn kemudia membawanya kepada studi filologi dan epistimologi. Dari studinya itu, ia mengambil kesimpulan bahwa istilah *'ilm* memang beroleh tempat yang istimewa dalam peradaban Islam, tidak kalah pentingnya dengan istilah-istilah lainnya dilihat dari segi dampaknya terhadap peradaban Islam. Ia menulis, bahwa:

Sebenarnya tidak ada satu konsep pun yang secara operatif menentukan dalam pembentukan peradaban Islam di segala aspeknya, yang sama dampaknya dengan konsep *'ilm*. Hal ini tetap benar, sekalipun di antara istilah-istilah yang paling berpengaruh dalam kehidupan keagamaan kaum Muslim, seperti "tawhid", "al-Din", dan banyak lagi kata-kata yang secara terus-menerus dan bergairah disebut-sebut, tidak satu pun di antara istilah-istilah itu yang memiliki kedalaman dalam makna dan keluasan dalam penggunaannya, yang sama dengan kata *'ilm* itu. Tidak ada satu cabang pun dalam kehidupan intelektual kaum muslim yang tidak pernah tersentuh oleh sikap yang begitu merasuk terhadap "pengetahuan" sebagai sesuatu yang memiliki nilai tertinggi, dalam menjadi seorang Muslim (Raharjo, 531).

Keterangan Rosenthal di atas, cukup memperkuat tradisi dunia ilmu dalam peradaban Islam yang sangat dijunjung tinggi. Dalam operasionalisasinya di dunia pendidikan Islam juga telah menghasilkan banyak ilmuwan-ilmuan terkemuka dan telah memashurkan Islam. Namun setelah perubahan paradigma dan titik penglihatan para ulama belakangan kemudian peradaban Islam mengalami kemunduran secara sistematis. Satu sebab yang paling utama adalah terjatuhnya pemikiran tentang ilmu menjadi terdikotomisasi. Sampai sekarang, keadaan atau krisis pendidikan di dunia Islam belum dapat diselesaikan apalagi gempuran peradaban Barat yang hegemonik telah memaksa umat Islam melakukan beberapa kendala.

F. Penutup

Visi Baru Pendidikan Islam, baik tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus secara dinamis direaktualisasi sesuai dengan semangat jaman. Reaktualisasi ini dilakukan sebagai cara bertahan dari gempuran perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Kebutuhan-kebutuhan publik dan pembangunan memang meminta kualitas dan jenis pendidikan yang berbeda, sehingga pendidikan Islam di samping melestarikan pilar-pilarnya (dasar-dasar agama Islam), tetapi juga harus menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang.

Krisis pendidikan Islam yang kini melanda dunia Islam memerlukan sebuah metode pembaruan dan strategi jitu untuk melangsungkan eksistensinya. Karena itu, visi-visi baru harus dipertajam lagi agar efektivitas dan efisiensinya dapat terpenuhi. Diperlukan kerja keras dunia Islam untuk memberi alternatif-alternatif, cara-cara, dan strategi-strategi baru yang

dibutuhkan oleh bagian dunia Islam yang lain. Tanpa kerja sama ini, suatu bangsa Muslim akan terisolir dari gemuruh perubahan dan akhirnya kehilangan daya hidup untuk terus bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir, *Meneropong Pendidikan Islam Menyongsong Millinium Ketiga*, Jurnal DINIKA Edisi IV/II/1998. Ali, Fachry "Pendidikan Islam di Indonesia Sebagai Fenomena Sosial-Budaya dan Persoalan Masa Depan", dalam Munawir Sadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Alatas, Syed Husein, *Modernization and Social Change*, Sydney: Angus and Robuerston Publisher, 1972.
- Al Faruqi, Ismail R. *Islamization of Knowladge: General Principles and Work Plan*. Herdon, VA: IIT, 1987.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millinium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Barrachlough, Geoffrey, *The Impact of Technical and Scientific Advance. The Industrialism and Imperialism as The Catalyst of a New World*, Great Britain: Penguins Books, 1985.
- Bowles, Samuel, *Unique Education on Reproduction of the Social Division of labour*, dalam Martin Cornoy (ed.) *Schoolong in a Corparate Society, the Political Economic of Education in America*, New York: David MC, Kay Company, 1972.
- Drucker, Petter F. *The Educational Education*, New York: The Free Press of Gencoe, 1972.
- Feisal, Yusuf Amir, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Maksidi, George, *The Rise Of Colleges: Instritutions of Learning in Islam and The West*, Edinburgh: Edingurgh University Press, 1981.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, A.E. Priyono (ed), Bandung: Mizan, 1991.
- Rosenthal, Franz "Knowledge Triumphant: the Concept Of Knowledge in Medieval Islam" dikutip kembali oleh Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina Press, Cet. II 2002.
- Vaizey, Jhon dan Micbeal Debeauvais, *Economic Aspect of Educational Develop-ment*, New York: The Free Press of Glencoe, 1963

ESSENSI METODE DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

HJ. Ira Suryani, M.Si.

A. Pendahuluan

Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan, karena ia menjadi sarana yang membermaksakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami atau diserap oleh anak didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya.

Tanpa metode, suatu materi pelajaran tidak akan dapat berproses secara efektif dan efisien dalam kegiatan belajar-mengajar menuju tujuan pendidikan. Metode pendidikan yang tidak tepat guna akan menjadi penghalang kelancaran jalannya proses belajar mengajar sehingga banyak tenaga dan waktu terbuang sia-sia. Oleh karena itu, metode yang ditetapkan oleh seorang guru dapat berdaya guna dan berhasil guna jika mampu, dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dalam proses pendidikan Islam, metode dapat dikatakan tepat guna bila mengandung nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam. Antara metode, kurikulum dan tujuan pendidikan Islam mengandung relevansi (keterkaitan) ideal dan operasional dalam proses kependidikan. Ini karena proses pembelajaran mengandung makna internalisasi dan transformasi nilai-nilai Islam ke dalam pribadi anak didik dalam upaya membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan yang amaliah mengacu pada tuntunan agama dan tuntunan hidup bermasyarakat.

Tulisan ini dimaksudkan mengurai pengertian metode pendidikan Islam, karakteristik metode pendidikan Islam, dasar-dasar pertimbangan

dalam pemilihan dan penggunaan metode dalam pendidikan Islam, serta metode-metode pendidikan Islam, studi nomenklatur serta diakhiri dengan penutup.

Metode dapat diartikan sebagai cara untuk menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik (peserta didik), (Jalaluddin dan Said, tt:52). Muhammad al-Toumy al-Syaibany mengemukakan beberapa pendapat para ahli pendidikan Islam mengenai definisi metode ini. Al-Abrasy mendefinisikannya sebagai jalan yang kita ikuti untuk memberi paham kepada murid-murid dalam segala macam pelajaran.

Metode adalah rencana yang dibuat untuk digunakan dalam memasuki kelas dan diterapkan dalam kelas selama seseorang mengajar. Ghunaimah menyebut metode sebagai cara-cara yang diikuti oleh guru untuk menyampaikan sesuatu kepada anak didik. Adapun Edgar Bruce Wesley mendefinisikan metode sebagai kegiatan yang terarah bagi guru yang menyebabkan terjadi proses belajar mengajar, hingga pengajaran menjadi berkesan (Syaibany, 1979:551).

Barangkali masih banyak definisi-definisi tentang metode pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidik, namun yang penting kita tangkap adalah makna pokok yang terkandung dalam pengertian metode itu sendiri. Makna pokok yang dapat disimak antara lain bahwa: (1) metode pendidikan adalah cara yang digunakan untuk menjelaskan materi pendidikan kepada anak didik; (2) cara yang digunakan merupakan cara yang tepat guna untuk menyampaikan materi pendidikan tertentu dalam kondisi tertentu dan, (3) melalui cara itu diharapkan materi yang disampaikan mampu memberi kesan yang mendalam pada diri anak didik.

Mengacu kepada kepentingan tersebut, maka metode paling tidak harus disesuaikan dengan materi, kondisi dan keadaan anak didik. Karena itu metode yang digunakan dapat bervariasi. Suatu metode mungkin dinilai baik untuk materi dan kondisi tertentu, tapi sebaliknya kurang tepat digunakan pada penyampaian materi yang berbeda dan suasana yang berlainan.

Dalam sumber asasi ajaran Islam terdapat beberapa terma yang sering dimaknai sebagai metode, diantaranya *thariqah*, *manhaj*, dan *washilah*. Kata *thariqah* terambil dari *tharaqa* (tunggal) dan *tharaiq* (plural), yang berarti angkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan (Ma'luf, 1986:465). Kata *Thariqah* banyak disebut dalam al-Qur'an, setidaknya diulang sebanyak 9 kali. Kata ini selalu muncul dalam

arti jalan, baik dalam konteks objek yang dituju, sifat jalan yang ditempuh, jalan khusus, atau konsekuensi dari mengikuti suatu jalan tertentu.

Berdasar objek yang dituju, kata *thariqah* dihadirkan dalam konteks dimana Allah Swt tidak akan menunjuki jalan orang-orang kafir dan yang melakukan kezaliman, kecuali jalan ke neraka jahannam. Kemudian berdasar sifat jalan yang ditempuh, kata *thariqah* dihadirkan dalam konteks sebuah peristiwa dimana sekelompok jin mendengarkan bacaan al-Qur'an. Setelah itu, mereka kembali kepada kaumnya dan memberi kabar seraya mengatakan bahwa apa yang telah mereka dengar adaah sesuatu yang bisa memimpin mereka kepada kebenaran atau jalan yang lurus (*thariq al-mustaqim*).

Dalam arti jalan khusus, kata *thariqah* dihadirkan dalam kaitannya dengan perintah Allah kepada Musa a.s untuk membuat jalan yang kering di laut. Kemudian dalam arti konsekuensi mengikuti suatu jalan, kata *thariqah* dikaitkan dengan jalan lurus dan balasan kebaikan yang akan diterima oleh siapa saja yang istiqomah dalam mengikutinya. Sedangkan dalam arti instrumen, kata *Tharqah* dihadirkan dalam konteks simbolik atau instrumen untuk menggambarkan kekuasaan dan kebesaran nikmat Allah Swt kepada manusia.

Selain *thariqah*, dalam nomenklatur Islam juga ditemukan terma *washilah* yang juga selalu dimaknai sebagai metode. Kata ini selalu hadir dalam makna menyampaikan, baik dalam arti fisik maupun non-fisik. Dalam arti fisik, misalnya sebagaimana terdapat pada Q.S, Hud [11]:70. Kalimat *la tashilu ilaih* dalam arti ayat ini berkaitan dengan suatu peristiwa dimana Ibrahim a.s menjamu tamunya (para malaikat) dengan hidangan (daging sapi panggang). Namun hidangan itu tidak dijamah oleh para tamunya (*tangan mereka tidak menjamahnya*).

Dalam arti non-fisik, kata *washilah* berarti menyampaikan secara berturut-turut kalam Allah (al-Qur'an) kepada manusia sehingga mereka mendapatkan pengajaran. Kemudian kata *washilah* juga berkaitan dengan sajian atau persembahan yang diperuntukkan oleh orang-orang kafir untuk Allah Swt dan berhal-hala mereka. Maka Allah Swt memaklumkan bahwa apa yang dipersembahkan oleh orang-orang kafir tersebut sama sekali tidak akan sampai kepada Allah Swt (*fala yashilu ila Allah*).

Selain kedua istilah tersebut di atas, dalam tradisi Pendidikan Islam kata *manhaj* dan *suluk* juga digunakan untuk menyebutkan istilah metode pendidikan dalam Islam.

Al-Syaibany mengelompokkan pembagian metode dalam pendidikan Islam, yakni metode yang umumnya pernah digunakan dalam pendidikan Islam antara lain:

- a. Metode induksi (pengambilan kesimpulan)
Metode ini digunakan untuk mendidik agar anak didik dapat mengetahui fakta-fakta dan kaidah-kaidah umum dengan cara menyimpulkan pendapat.
- b. Metode Perbandingan (Qiyasiah)
Metode ini digunakan untuk mendidik agar anak didik dapat membandingkan kaidah-kaidah umum atau teori dan kemudian menganalisisnya dalam bentuk rincian-rincian.
- c. Metode Kuliah
Metode ini digunakan untuk mendidik anak didik agar mere, dapat mengintisarikan materi yang diberikan secara ben; sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- d. Metode Dialog dan Perbincangan
Metode ini digunakan untuk mendidik anak agar mereka dapat mengemukakan kritik-kritik terhadap materi yang diberikan. Kritik dilakukan secara lisan melalui dialog antara guru dan anak didik.
- e. Metode Halaqah
- f. Metode Lawatan untuk Menuntut ilmu.

Selain dari ragam metode, al-Syaibany juga mengemukakan dasar-dasar penyusunan metode pendidikan Islam. Menurut penilaiannya, ada empat yang menjadi dasar pertimbangan penggunaan metode pendidikan Islam, yaitu:

- 1) dasar agama, meliputi pertimbangan bahwa metode yang digunakan bersumber dari tuntunan al-Quran, sunnah Nabi, pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh para sahabat dan para ulama shalaf.
- 2) dasar biologis, meliputi pertimbangan kebutuhan jasmani dan tingkat perkembangan usia anak didik.
- 3) dasar psikologis, meliputi pertimbangan terhadap motivasi, kebutuhan, emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakat dan intelektual anak didik.
- 4) dasar sosial, meliputi pertimbangan kebutuhan sosial di ling-kimgan anak didik.

Al-Syaibany selanjutnya bahwa metode pendidikan Islam merangkum empat tujuan pokok, yakni: (1) menolong anak didik mengembangkan kemampuan individunya; (2) membiasakan anak didik membentuk sikap diri; (3) membantu anak didik bertindak efektif dan efisien; dan (4) membimbing aktivitas anak didik.

Uraian di atas menunjukkan bahwa metode pendidikan Islam memiliki sifat yang luwes, sesuai dengan kebutuhan anak didik dan lingkungan zamannya. Namun demikian yang menjadi pertimbangan pokok, adalah sumbernya tak dapat dilepaskan dari falsafat pendidikan Islam, metode pendidikan Islam disusun atas dasar pertimbangan sumber. Apakah metode yang digunakan itu bersumber dari teks dalam al-Quran yang kemudian digunakan oleh Nabi, para sahabat maupun para ulama yang terlibat dalam kegiatan pendidikan Islam di zamannya.

B. Karakteristik Metode Pendidikan Islam

Sesungguhnya metode pendidikan Islam memiliki karakteristik dan bentuk (macam) metode. Karakteristik dan macam metode ini sesungguhnya tidak banyak berbeda dengan prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Eksistensinya menggambarkan seluruh kepuasan komponen yang terkait dalam proses pendidikan Islam dan merupakan satu kesatuan yang membentuk suatu sistem. Diantara karakteristik metode pendidikan Islam (Arif, 2008:109) adalah:

1. Keseluruhan proses penerapan metode pendidikan Islam, mulai dari pembentukannya, penggunaannya sampai pada pengembangannya tetap didasarkan pada nilai-nilai asasi Islam sebagai ajaran yang universal.
2. Proses pembentukan, penerapan dan pengembangannya tetap tidak dapat dipisahkan dengan konsep *al-akhlak al-karimah* sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam. berkreasi dan mengambil prakarsa dalam batas-batas kesopanan dan akhlak al-karimah.
3. Metode pendidikan bersifat, luwes dan fleksibel dalam artian senantiasa membuka diri dan dapat menerima perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi prosett kependidikan Islam tersebut, baik dari segi peserta didik, pendidik, materi pelajaran dan lain-lain.
4. Metode pendidikan Islam berusaha sungguh-sungguh untuk menyeimbangkan antara teori dan praktek.

5. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya menekankan kebebasan peserta didik untuk berkreasi dan mengambil prakarsa dalam batas-batas kesopanan dan akhlak al karimah.
6. Dari segi pendidikan, metode pendidikan Islam lebih menekankan nilai-nilai keteladanan dan kebebasan pendidik dalam menggunakan serta mengombinasikan berbagai metode pendidikan yang ada dalam mencapai tujuan pengajarannya.
7. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi terciptanya interaksi edukatif yang kondusif.
8. Metode pendidikan Islam merupakan usaha untuk memudahkan proses pengajaran dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Arif, 2008:110).

Seluruh karakteristik tersebut harus diketahui dan dipahami oleh para pendidik muslim. Dalam konteks ini, menurut M. Arifin, persoalan terpenting yang harus dilihat para pendidik adalah prinsip bahwa penggunaan metode dalam proses kependidikan Islam harus mampu membimbing, mengarahkan dan membina anak didik menjadi manusia yang matang atau dewasa dalam sikap dan kepribadiannya, sehingga tergambar dalam dirinya tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Arifin, 1998:299).

Berdasarkan hal ini maka paradigma pembentukan dan penerapan metode pendidikan Islam dalam proses internalisasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang terpuji kepada peserta didik harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, integral dan sistematis.

Untuk memudahkan peserta didik dalam menalar al- 'Ilm yang ditarbiyah, di talim, atau dita'dibkan ke dalam diri mereka, idealnya para pendidik memilih dan menerapkan metode pendidikan yang dapat atau memungkinkan peserta didik mencapai hal itu. Dalam konteks ini, pertimbangan utama yang harus diingat para pendidik bahwa pemilihan dan penggunaan suatu metode adalah untuk menghantarkan peserta didik pada kemampuan melakukan penalaran yang sehat dan cerdas terhadap seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah (at-Ayah), sehingga mereka berkemampuan bevsyahaddh terhadap-Nya. Dalam konteks ini, di antara metode pendidikan yang dapat digunakan adalah metode membaca (iqra'), metode dialog, diskusi, musyawarah, metode perdebatan (muj'dalah), metode mengajukan pertanyaan, metode perumpamaan (amtsal), metode

perbandingan, metode peremmgan, metode analogi (qiyas), dan metode lainnya yang dapat membantu peserta didik melakukan penalaran yang sehat dan cerdas terhadap seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah (al- Ayah), baik yang terdapat di alam semesta maupun pada diri mereka sendiri.

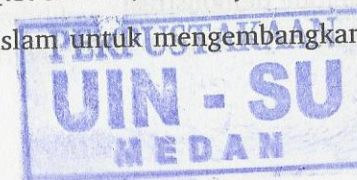
Kemudian untuk memudahkan peserta didik dalam memahami al- 'Ilm yang ditarbiyah, di ta'lim, atau dita'dibkan ke dalam diri mereka, para pendidik juga harus arif memilih dan menerapkan jalan, cara, atau prosedur untuk mencapai hal itu. Dalam konteks ini, penggunaan metode adalah untuk mengantarkan peserta didik pada kemampuan menangkap esensi cahaya (al-huda), petunjuk (hidayah), atau kebenaran (al-haqq) dari Tuhan dan menggunakannya untuk panduan dalam menjalani hidup di dunia ini. Diantara metode yang dapat digunakan para pendidik adalah metode perenungan (tafakkur), metode qishah, metode pengulangan (repetition), dan metode-metode lain yang dapat membantu mempermudah peserta didik dalam memahami al- 'Ilm yang ditarbiyah, di ta'lim, atau dita'dibkan para pendidik ke dalam diri mereka.

Untuk memudahkan peserta didik dalam mensucikan jiwa dengan al- 'Ilm yang ditarbiyah, di ta'lim, atau dita'difkan ke dalam diri mereka, para pendidik juga harus arif dalam memilih dan menerapkan metode yang relevan untuk itu. Dalam konteks ini, di antara metode pendidikan islami yang dapat digunakan pendidik antara lain adalah metode pemeliharaan jiwa, metode pensucian jiwa (tazkiyah al-nafs), metode pemberian nasihat (mau'izah), metode intropeksi atau evaluasi diri (muhasabah al-nafs), metode pemberian peringatan, metode qishah, dan metode lainnya yang dapat atau memungkinkan untuk mengantarkan peserta didik agar berkemampuan mensucikan jiwa dengan al- 'Ilm yang ditarbiyah, di ta'lim, atau dita'dibkan pendidik ke dalam diri mereka.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ditemukan contoh-contoh metode yang bisa dipahami sebagai contoh diantaranya:

- a. Allah Swt menyuruh hamba-Nya untuk mencontoh Rasulullah, sebab sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik (Q.S. al-Ahzab/33:21).
- b. Allah Swt memerintahkan hamba-Nya untuk menyeru manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah, pengajaran yang baik dan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan (Q.S. al-Nahl/16:125).
- c. Allah swt memerintahkan umat Islam untuk mengembangkan sikap

062/H/2017



arif dan bijaksana dalam melakukan dan menyelesaikan suatu aktivitas (berdiskusi dan bermusyawarah) serta bertawakkal. (Q.S. Ali-Imran/3:159 asy-suara/42:38)

- d. Manusia diperintahkan untuk melakukan eksplorasi di muka bumi dan memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah (Q.S. al-An'am/6:11)

Model penyampaian firman Allah Swt yang evolutif dan risalah kenabian Muhammad Saw memperlihatkan bahwa sosialisasi Islam adalah dilakukan melalui pendidikan dakwah yang harus difahami sebagai metode pendidikan Islam dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam konteks ini an-Nahlawi, mengemukakan beberapa metode yang paling penting dalam pendidikan Islam, yaitu:

1. Metode hiwar (percakapan) qur'ani dan nabawi
2. Mendidik dengan kisah-kisah dan perumpamaan (*amtsal*) qur'an dan nabawi.
3. Mendidik dengan pembiasaan diri dan pengalaman.
4. Mendidik dengan mengambil ibrah (pelajaran) dan *mauidhah* (peringatan).
5. Mendidik dengan targrib (membuat senang) dan tarhib (membuat takut), (Nahlawi, 1992:283-284).

Hal senada juga sebagai dikemukakan Abdullah Nashih Ulwani, bahwa pada dasarnya metode pendidikan Islam terdiri atas lima, yaitu:

1. Pendidikan dengan keteladanan
2. Pendidikan dengan pembiasaan dan pelatihan.
3. Pendidikan dengan pengajaran / nasihat.
4. Pendidikan dengan pengawasan/perhatian.
5. Pendidikan dengan ganjaran/hukuman.

Pendapat lain yang lebih diarahkan kepada penggunaan metode pendidikan Islam secara formal adalah sebagaimana yang antara lain di kemukakan oleh Darajat, yaitu:

1. Metode ceramah
2. Metode diskusi
3. Metode eksperimen
4. Metode demonstrasi
5. Metode pemberian tugas

6. Metode sosiodrama
7. Metode drill (latihan)
8. Metode kerja kelompok
9. Metode tanya jawab
10. Metode proyek (Darajat, 1995:289-310).

Berdasarkan pada uraian-uraian tentang metode pendidikan dan pengajaran Islam, maka dapat disinkronisasikan dalam bentuk kesimpulan yang integratif bahwa bentuk-bentuk metode pendidikan Islam yang relevan dan efektif dalam pendidikan/ pengajaran Islam adalah:

1. Metode sikronik-analitik, yaitu metode pendidikan Islam yang memberi kemampuan analitis teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan, mental dan intelektualitas. Teknik elaksanaannya meliputi, ceramah, diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, dan sebagainya.
2. Metode empiris, yaitu suatu metode mengajar yang memungkinkan anak didik mempelajari ajaran Islam melalui proses realisasi sosial. Metode ini tidak menuntut anak didik hanya memiliki kemampuan secara teoritis normatif, tetapi juga adanya pengembangan deskriptif inovasi beserta aplikasinya dalam kehidupan yang nyata.
3. Metode problem solving dan induktif. Metode ini merupakan pelatihan anak yang dihadapkan pada berbagai masalah suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Sedangkan metode induktif dilakukan oleh pendidik dengan cara mengajarkan materi yang khusus menuju kesimpulan yang umum, agar anak didik dapat mengenal setelah terarah pada aspek kognitif.

Hal ini terpenting dari penerapan metode tersebut dalam aktivitas kependidikan Islam adalah prinsip bahwa tidak ada sesuatu metode yang paling ideal untuk semua tujuan pendidikan, ilmu dan mata pelajaran, semua tahap pertumbuhan dan perkembangan, semua taraf kematangan dan kecerdasan, semua guru dan pendidik, dan semua keadaan dan suasana yang meliputi proses kependidikan itu.

Sesungguhnya tidak dapat dihindari bahwa seorang pendidik hendaknya melakukan penggabungan terhadap lebih dari satu metode pendidikan Islam prakteknya di lapangan. Untuk itu sangat dituntut sikap arif menerapkan metode kependidikan yang relevan dengan semua situasi dan suasana yang meliputi proses kependidikan Islam, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal.

arif dan bijaksana dalam melakukan dan menyelesaikan suatu aktivitas (berdiskusi dan bermusyawarah) serta bertawakkal. (Q.S. Ali-Imran/3:159 asy-suara/42:38)

- d. Manusia diperintahkan untuk melakukan eksplorasi di muka bumi dan memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah (Q.S. al-An'am/6:11)

Model penyampaian firman Allah Swt yang evolutif dan risalah kenabian Muhammad Saw memperlihatkan bahwa sosialisasi Islam adalah di lakukan melalui pendidikan dakwah yang harus difahami sebagai metode pendidikan Islam dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam konteks ini an-Nahlawi, mengemukakan beberapa metode yang paling penting dalam pendidikan Islam, yaitu:

1. Metode hiwar (percakapan) qur'ani dan nabawi
2. Mendidik dengan kisah-kisah dan perumpamaan (*amtsal*) qur'an dan nabawi.
3. Mendidik dengan pembiasaan diri dan pengalaman.
4. Mendidik dengan mengambil ibrah (pelajaran) dan *mauidhah* (peringatan).
5. Mendidik dengan targhib (membuat senang) dan tarhib (membuat takut). (Nahlawi, 1992:283-284).

Hal senada juga sebagai dikemukakan Abdullah Nashih Ulwani, bahwa pada dasarnya metode pendidikan Islam terdiri atas lima, yaitu:

1. Pendidikan dengan keteladanan
2. Pendidikan dengan pembiasaan dan pelatihan.
3. Pendidikan dengan pengajaran / nasihat.
4. Pendidikan dengan pengawasan/perhatian.
5. Pendidikan dengan ganjaran/hukuman.

Pendapat lain yang lebih diarahkan kepada penggunaan metode pendidikan Islam secara formal adalah sebagaimana yang antara lain di kemukakan oleh Darajat, yaitu:

1. Metode ceramah
2. Metode diskusi
3. Metode eksperimen
4. Metode demonstrasi
5. Metode pemberian tugas

6. Metode sosiodrama
7. Metode drill (latihan)
8. Metode kerja kelompok
9. Metode tanya jawab
10. Metode proyek (Darajat, 1995:289-310).

Berdasarkan pada uraian-uraian tentang metode pendidikan dan pengajaran Islam, maka dapat disinkronisasikan dalam bentuk kesimpulan yang integratif bahwa bentuk-bentuk metode pendidikan Islam yang relevan dan efektif dalam pendidikan/ pengajaran Islam adalah:

1. Metode sikronik-analitik, yaitu metode pendidikan Islam yang memberi kemampuan analitis teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan, mental dan intelektualitas. Teknik elaksanaannya meliputi, ceramah, diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, dan sebagainya.
2. Metode empiris, yaitu suatu metode mengajar yang memungkinkan anak didik mempelajari ajaran Islam melalui proses realisasi sosial. Metode ini tidak dituntut anak didik hanya memiliki kemampuan secara teoritis normatif, tetapi juga adanya pengembangan deskriptif inovasi beserta aplikasinya dalam kehidupan yang nyata.
3. Metode problem solving dan induktif. Metode ini merupakan pelatihan anak yang dihadapkan pada berbagai masalah suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Sedangkan metode induktif di lakukan oleh pendidik dengan cara mengajarkan materi yang khusus menuju kesimpulan yang umum, agar anak didik dapat mengenal setelah terarah pada aspek kognitif.

Hal ini terpenting dari penerapan metode tersebut dalam aktivitas kependidikan Islam adalah prinsip bahwa tidak ada sesuatu metode yang paling ideal untuk semua tujuan pendidikan, ilmu dan mata pelajaran, semua tahap pertumbuhan dan perkembangan, semua taraf kematangan dan kecerdasan, semua guru dan pendidik, dan semua keadaan dan suasana yang meliputi proses kependidikan itu.

Sesungguhnya tidak dapat dihindari bahwa seorang pendidik hendaknya melakukan penggabungan terhadap lebih dari satu metode pendidikan Islam prakteknya di lapangan. Untuk itu sangat dituntut sikap arif menerapkan metode kependidikan yang relevan dengan semua situasi dan suasana yang meliputi proses kependidikan Islam, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal.

Sebagai salah satu komponen operasional Ilmu Pendidikan Islam, metode harus mengandung potensi yang bersifat mengarahkan materi pelajaran pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai melalui proses tahap, baik dalam kelembagaan formal, nonformal ataupun yang informal. Dengan demikian menurut Ilmu Pendidikan Islam, suatu metode yang baik adalah bila memiliki watak dan relevansi yang senada atau sejiwa dengan tujuan pendidikan Islam itu.

Ada tiga aspek nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam yang hendak direalisasikan melalui metode yang mengandung watak dan relevansi tersebut, yaitu: *Pertama*, membentuk anak didik menjadi hamba Allah yang mengabdikan kepada-Nya semata, dan *kedua*, bernilai edukatif yang mengacu pada petunjuk Al-Quran dan yang *ketiga*, ialah berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai ajaran Al-Quran yang disebut pahala dan siksaan.

Dalam hubungannya dengan watak dan relevansinya antara ketiga aspek tersebut di atas, maka timbullah pola pemikiran tentang model-model proses belajar mengajar di mana suatu metode yang diterapkan oleh guru dalam menggerakkan kegiatan belajar memberi corak hubungan tertentu.

Corak hubungan antara guru dan murid sebagai manusia-didik kita upayakan dari sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis. Penelusuran yang analitis dari dalam kandungan Al-Quran akan menemukan berbagai corak hubungan guru-murid yang prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut (Ihsan dan Ihsan, 2007:164-165):

- 1) Pendidikan Islam mengakui kebenaran adanya fitrah sebagai kemampuan dasar yang dikaruniakan Allah dalam tiap diri manusia. Fitrah tersebut merupakan potensi yang dapat dikembangkan melalui proses kependidikan dengan metode yang tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Keyakinan pendidikan Islam tentang potensi fitrah itu mendorong pengaruh-pengaruh negatif terhadap perkembangan fitrah melalui program-program kegiatan kependidikan yang mengarah pada cita-cita Islami.
- 3) Pendidikan Islam mengupayakan harmonisasi, keserasian dan keselarasan antara masukan-masukan instrumental dengan masukan masukan environmental (pengaruh lingkungan) dalam-proses mencapai tujuan, sehingga produk pendidikan benar-benar sesuai dengan idealitas Islami.

- 4) Pendidikan Islam mendorong guru untuk berikhtiar menghindarkan pengaruh-pengaruh negatif terhadap perkembangan fitrah melalui program-program kegiatan kependidikan yang mengarah pada cita-cita Islami.
- 5) Pendidikan Islam mengusahakan terciptanya model-model proses belajar-mengajar yang bersifat lentur terhadap tuntutan kebutuhan hidup murid (manusia-didik) sebagai hamba Allah dan sebagai anggota masyarakat.
- 6) Pendidikan Islam, dalam segala ikhtiarnya senantiasa berpegang pada pola pengembangan hidup manusia yang berorientasi pada potensi keimanan dan ilmu pengetahuan yang saling memperkuat dalam hidup pribadi manusia muslim.

Adapun prinsip-prinsip metodologis yang dijadikan landasan psikologis untuk memperlancar proses kependidikan Islam yang sejalan dengan ajaran Islam adalah:

- 1) Prinsip Memberikan Suasana Kegembiraan (Nata, 2009:167)
Prinsip ini dapat dijabarkan dari sabda Nabi SAW. kepada sahabat beliau untuk diutus untuk melakukan dakwah kepada Gubernur Romawi di Damaskus, yaitu Mu'azd Ibn Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari, yang artinya: "Permudahlah mereka dan jangan mempersulit, gembirakanlah mereka dan jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan mereka menjauhi kamu."

Dari perintah Allah agar kita menggembirakan orang-orang yang bersabar dalam situasi kehidupan yang serba sulit sebagai suatu ujian kepada manusia, seperti disebutkan dalam Al-Baqarah 155: Artinya: "dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar."

- 2) Prinsip Memberikan Layanan dan Santunan dengan Lemah Lembut, Allah berfirman dalam al-qur'an yang artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka memohonlah ampun bagi mereka." (QS. Ali Imran: 159).
- 3) Prinsip Kebermaknaan bagi anak didik
Berkenaan dengan pentingnya memperhatikan perkembangan akal dan psik anak dalam hadis yang artinya: "Berbicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka."

4) Prinsip Prasyarat

Untuk menarik minat anak didik diperlukan mukadimah dalam langkah-langkah mengajar bahan pelajaran baru yang dapat memadukan perhatian dan minat mereka ke arah bahan tersebut. Pengalaman dan pelajaran yang telah diserap menjadi apersepsi dalam pemikiran mereka dihubungkan dengan hal-hal baru yang hendak disajikan. Ini merupakan jembatan yang menghubungkan pengertian-pengertian yang telah terbentuk dalam pikiran mereka sehingga mempermudah daya tangkap terhadap hal-hal baru yang diajarkan oleh guru.

Di dalam firman-firman Allah yang termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran banyak kita temukan metode (cara) Allah memberikan prasyarat kepada manusia yang menjadi sasaran kitab-Nya, seperti menggunakan kata-kata yang mengandung tanbih (minta perhatian) yang difirmankan pada awal sebuah Surat. Maksud bahwa firman yang hendak disampaikan Allah kepada manusia adalah amat penting karena mengandung permasalahan baru yang harus mereka perhatikan sepenuhnya.

5) Prinsip Komunikasi Terbuka

Guru mendorong anak didik untuk membuka diri terhadap segala hal atau bahan-pelajaran yang disajikan kepada mereka, sehingga mereka dapat menyerapnya menjadi bahan apersepsi dalam pikirannya.

Dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak firman Allah yang mendorong manusia untuk membuka hati dan pikirannya, perasaan, pendengaran, dan penglihatannya untuk menyerap pesan-pesan yang difirmankan Allah kepada mereka. sehingga apa yang mereka serap sebagai pesan-pesan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya.

6) Prinsip Pemberian Pengetahuan yang Baru

Anak didik ditarik minat dan perhatiannya pada bahan-bahan pengetahuan yang baru bagi mereka. Bila tidak mereka tidak tertarik kepada bahan pelajaran. Dalam ajaran Islam terdapat prinsip kebaharuan dalam belajar, baik tentang fenomena-fenomena alamiah maupun fenomena yang terdapat dalam diri mereka sendiri. seperti studi tentang alam sekitar yang mengandung ilmu-ilmu baru misalnya, biologi, fisika, astronomi, mineralogi, botani, kimia, klimatologi, zoologi dan sebagainya; menurut kebaharuan dari hasil studi para ilmuwan di bidang masing-masing, terutama dikaitkan dengan kecanggihan ilmu dan teknologi modern saat ini.

7) Prinsip Memberikan Model Perilaku yang Baik

Anak didik dapat memperoleh contoh perilaku melalui pengamatan dan peniruan yang tepat-guna dalam proses belajar-mengajar, misalnya seperti firman Allah: Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah."

8) Prinsip Praktek (Pengamalan) secara Aktif

Mendorong anak didik untuk mengamalkan semua pengetahuan yang telah diperoleh dalam proses belajar-mengajar, atau pengalaman dari keyakinan dan sikap yang mereka hayati dan pahami sehingga nilai-nilai yang telah ditransformasikan atau diinternalisasikan ke dalam diri manusia didik menghasilkan buah yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat sekitarnya.

Firman Allah yang menunjukkan pentingnya mengamalkan pelajaran yang telah mereka pahami dan hayati ialah seperti ayat-ayat Al-Quran yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa tetapi tidak kamu kerjakan. "(QS. As-Saf: 2 - 3). Dan Sabda Nabi yang menyatakan bahwa pengalaman lebih penting dari penampilan rupa dan bentuk jasmaniah, yang artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan memperhatikan bentuk rupamu dan keindahan bentuk jasmanimu, tetapi Ia memperhatikan hatimu dan amal-amal perbuatanmu."

C. Dasar-dasar pertimbangan penggunaan metode dalam pendidikan Islam

Beberapa pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban untuk penggunaan metode dalam pendidikan islam adalah:

- Apakah metode telah tepat sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan?
Pemilihan metode harus melihat kepada tujuan pendidikan;
- Jenis abilitas yang akan dicapai harus diketahui terlebih dahulu sebelum menetapkan metode yang akan dipergunakan. Apakah abilitas ingatan, pemahaman, aplikasi, analisa, ataukah evaluasi ?

- c. Apakah metode mengajar yang dipilih dan akan dipergunakan telah memperhitungkan waktu yang tersedia untuk proses pendidikan ?
- d. Apakah pemilihan metode pengajaran ditunjang oleh sarana dan alat bantu pengajaran ?

Pertimbangan menggunakan metode sebagaimana dikemukakan di atas, penting artinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam kaitan ini, Djamarah, mengemukakan; jangan dikira bahwa pemilihan metode itu asal-asalan saja, jangan diduga bahwa penentuan metode tanpa harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Sebagai suatu cara, metode tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Karena itu setiap pendidik harus mengenal dan memahaminya, sebab tanpa mengindahkan hal tersebut, metode tidak akan berhasil guna (Djamarah, 1997).

a. Relevansi metode dengan tujuan pendidikan

Pencapaian tujuan pendidikan merupakan hal yang sangat urgen dalam penyampaian bahan pelajaran. Secara hirarki tujuan itu bergerak dari yang rendah hingga yang tinggi. Pendidik harus memilih metode yang sesuai dengan bahan, peserta didik dan tujuan. Sebagaimana dikemukakan Nasution, bahwa; agar dapat dipilih metode mengajar yang serasi, harus diperhatikan tujuan yang ingin dicapai baik tujuan umum maupun khusus. Pendidik dalam melaksanakan tugasnya senantiasa dipengaruhi oleh keyakinan serta pandangan hidupnya, sebagaimana pendapat Arifin, tujuan dan sasaran pendidikan berbeda-beda menurut pandangan hidup masing-masing pendidik, karena itu perlu dirumuskan pandangan hidup Islam yang mengarahkan tujuan dan sasaran pendidikan Islam" (S. Nasution, 1993:83).

b. Relevansi metode dengan bahan/materi pelajaran.

Bahan pelajaran tidak sama untuk setiap pelajaran, baik tentang keluasan maupun sifatnya, oleh sebab itu dalam menentukan metode pengajaran, pendidik harus memperhatikan bahan pelajaran. Djamarah, mengemukakan bahwa; setiap bahan pelajaran memerlukan pendekatan tersendiri, sesuai dengan sifat atau keluasan bahan/materi yang diajarkan, baik materi itu mengandung unsur emosional, pengamatan, keterampilan, tertentu maupun hapalan dan sebagainya". Oleh sebab itu keluasan dan sifat bahan pelajaran yang diajarkan harus dijadikan acuan dalam menentukan metode.

c. Relevansi metode dengan kemampuan pendidik

Faktor yang paling penting dalam menggunakan suatu metode adalah pendidik itu sendiri, karena pendidik merupakan faktor penentu berhasil-tidaknya proses pembelajaran. Menurut Patty, efektif tidaknya suatu metode juga sangat dipengaruhi kemampuan pendidik menggunakan suatu metode, di samping itu kepribadian pendidik memang cukup dominan. Sebab terkadang kepribadian pendidik itulah yang justru menjadi metode dalam penyampaian materi pelajaran. Kepribadian adalah satu integritas pola-pola dan minat yang memberi kecenderungan-kecenderungan khusus pada tingkah laku individu.

d. Relevansi metode dengan keadaan peserta didik

Peserta didik merupakan kelompok individu yang berbeda, kemampuan dan bakatnya, tingkat usia maupun perkembangan fisik dan mentalnya. Terjadinya hal tersebut disebabkan perbedaan latar belakang mereka. Sejak lahir ke dunia peserta didik sudah memiliki kesanggupan berpikir (cipta), kemauan (karsa), perasaan (rasa) dan kesanggupan luhur, yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Kesanggupan-kesanggupan ini tidak sama bagi setiap peserta didik. Selanjutnya dengan adanya faktor luar seperti pengaruh keluarga, metode pengajaran, kurikulum, alam dan sebagainya, semakin menambah perbedaan dalam kesanggupan peserta didik.

Penyesuaian taraf kemampuan peserta didik dengan metode, disebabkan manusia dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya mengalami taraf-taraf pemikiran yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Berpikir secara logis tidak dapat dicapai manusia, jika tidak melalui serangkaian latihan secara kontinyu. Sejalan dengan itu maka para pendidik hendaknya memperhatikan taraf perkembangan pemikiran peserta didik, sehingga pelajaran dapat dicerna dengan baik (Nata, 2000:64).

Aktivitas belajar peserta didik senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh lingkungan dimana peserta didik berdomisili. Di antara faktor eksternal yang paling dominan mempengaruhi adalah lingkungan keluarga. Karenanya peranan orang tua sangat diperlukan dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, apalagi pada masa-masa awal pertumbuhan fisik dan mentalnya,

sebab pada masa ini peserta didik mengalami hambatan sebagai akibat pesatnya pertumbuhan fisik tersebut.

e. Relevansi metode dengan situasi dan kondisi pembelajaran

Situasi atau keadaan dalam berlangsungnya pembelajaran, juga merupakan satu faktor yang harus dipertimbangkan. Situasi yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan peserta didik dan pendidik yang berkaitan dengan kelelahan, semangat dan motivasi. Metode yang dapat dipergunakan pada situasi tertentu belum tentu dapat dipergunakan pada situasi lainnya. Di samping itu sarana dan fasilitas pendidikan yang ada turut menentukan, "lembaga pendidikan yang memiliki alat-alat yang cukup ditambah dengan cara mengajar pendidik yang baik, keterampilan pendidik menggunakan fasilitas dan alat-alat pendidikan atau media pembelajaran yang tersedia, akan menjadikan pembelajaran lebih mudah mencapai tujuan (Purwanto, 1988:105)". Dapat dipahami bahwa menggunakan suatu metode apabila ditopang oleh sarana dan fasilitas yang lengkap akan semakin efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Suatu hal yang harus diingat oleh semua pendidik adalah bahwa tidak satupun dari metode di atas yang bisa digunakan untuk semua bahan dan tujuan pembelajaran. Karenanya, pemilihan dan penerapan metode harus mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut (Al Rasyidin, 2008:179):

1. tujuan dan target pembelajaran yang ingin dicapai.
2. ruang lingkup dan urutan materi/bahan pembelajaran.
3. pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.
4. kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
5. motivasi/ minat peserta didik.
6. kemampuan peserta didik dalam melakukan sesuatu.
7. ukuran kelas dan suasana lingkungan pembelajaran.
8. alokasi waktu atau jam pembelajaran yang tersedia.
9. kemampuan pendidik, dan
10. sarana dan fasilitas pembelajaran yang tersedia.

E. Metode-Metode Pendidikan Islam Studi Nomenklatur

Metode pendidikan Islam, dalam pelaksanaannya dapat dikelompokkan

pada metode pendidikan secara makro dan mikro. Secara makro mencakup segala aktivitas pendidikan yang berimplikasi penanaman nilai-nilai Islami dan skala mikro mencakup aktivitas pembelajaran di dalam kelas.

1) Metode Keteladanan.

Mendidik dengan contoh (keteladanan) adalah satu metode pembelajaran yang dianggap besar pengaruhnya. Segala yang dieontohkan oleh Rasulullah saw. dalam kehidupannya, merupakan cerminan kandungan Alquran secara utuh, sebagaimana firman Allah swt. Yang artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."

Al-Baidhawi. memberi makna *uswatun hasanah* pada ayat di atas adalah perbuatan baik yang dapat dicontoh. Dengan demikian, keteladanan menjadi penting dalam pendidikan, keteladanan akan menjadi metode yang ampuh dalam membina perkembangan anak didik. Keteladanan sempurna, adalah keteladanan Rasulullah saw., yang dapat menjadi acuan bagi pendidik sebagai teladan utama, sehingga diharapkan anak didik mempunyai figur pendidik yang dapat dijadikan panutan.

Rasulullah saw. merepresentasikan dan mengekspresikan apa yang ingin diajarkan melalui tindakannya dan kemudian menerjemahkan tindakannya ke dalam kata-kata. Bagaimana memuja Allah swt, bagaimana bersikap sederhana, bagaimana duduk dalam salat dan doa, bagaimana makan, bagaimana tertawa, dan lain sebagainya, menjadi acuan bagi para sahabat, sekaligus merapakan materi pendidikan yang tidak langsung.

2) Metode lemah lembut/kasih sayang.

Pentingnya metode lemah lembut dalam pendidikan, karena materi pelajaran yang disampaikan pendidik dapat membentuk kepribadian peserta didik. Dengan sikap lemah lembut yang ditampilkan pendidik, peserta didik akan terdorong untuk akrab dengan pendidik dalam upaya pembentukan kepribadian.

3) Metode deduktif.

Menurut Abi Jamrah, metode deduktif (memberitahukan secara global) suatu materi pelajaran, akan memunculkan keingintahuan pelajar tentang

isi materi pelajaran, sehingga lebih mengena di had dan memberi manfaat yang lebih besar (Al Andalusi, 1979:97).

4) Metode perumpamaan

Perumpamaan adalah menggambarkan sesuatu yang bersifat maknawi (al-Jamal, 1952:17) dengan sesuatu yang dzati, sesuatu yang tersembunyi dengan sesuatu yang jelas dan sesuatu yang ghaib dengan sesuatu yang dapat disaksikan untuk membantu akal agar mudah memahaminya." Ibn al-Qayyim mendefinisikan masal sebagai penyerupaan sesuatu dengan yang lain dalam aspek persamaan hukumnya, atau pendekatan yang abstrak pada yang fisik, atau menggambarkan dua hal yang bersifat fisik, yang satu dari yang lain.

F. Penutup

Sejatinya metode pendidikan Islam adalah untuk mendorong manusia atau anak didik untuk lebih mudah memahami materi pelajaran, dan sesungguhnya sang pendidik berkewajiban untuk memilih dan memilih metode yang paling tepat atau sesuai, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai.

Metode pendidikan Islam harus digali, didayagunakan dan dikembangkan dengan mengacu pada karakter dan dengan dasar pertimbangan dalam pemilihan metode, dan tentunya melalui aplikasi nilai-nilai Islam diharapkan proses tersebut dapat diterima., memotivasi peserta didik untuk mengamalkannya dalam bentuk nyata. Sebagaimana Al-Qur'an dan Sunnah mengajarkan lewat metode-metodenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, selanjutnya disebut Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz I Al-Fatiha-Al Baqatrah, Terjemahan Bahrn Abu Bakar, LC, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Al-Maliki, Sayyid Muhammad Alwi, *Keistimewaan-Keistimewaan Al Qur'an*, terjemahan Nur Faizin, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- An-Nahlawi, Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung; CV. Diponegoro, 1992.
- Al-Syaibany, Mohammad al Thoumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta; Bulan Bintang 1979.
- al-Jamal, Muhammad Abdul Mun'im, *al-Tafsir al-Farid li al-Qur'an*, ttp., tp, 1952.
- Arifin, M, *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Arifin, M, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Arif, Arifuddin, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta; Kultura, 2008.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Darajat, Zakiah, *Metode Khusus Pengajaran Agama*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Imam Ibn Abi Jamrah al-Andalusi, *Bahjdt an-Nufus wa Tahallihd Bima'rifati ma Lahd wa ma Alaihi (Syarah Mukhtasar shahih l-Bukhari) Jam'u an Nihdyahfi bad'I al Khairi wa an Nihdyah* Beirut: Darul Jul, 1979, juz 1.
- Ihsan, Hamdani dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung; Pustaka Setia, 2007.
- Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Muhammad, Badrudin ibn Abdullah ibn Bahadur az-Zarkasyi, selanjutnya

disebut az-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz I, Beirut: Dar al-Ihya al-'Arabiyah, 1957.

Nata, Abudin, *Ilmu Pendidikan Islam, Dengan Pendekatan Multidisipliner*, Jakarta; Rajawali Perss, 2009.

Nata, Abudin, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Nasution, S, *Kurikulum dan Pengajaran*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Patty, F, *Pengantar Psikologi Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Purwanto, M. Ngalm, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.

Sudjana, Nana, *Pedoman Praktis Mengajar, Merencanakan dan Melaksanakan Pengajaran*, seri B, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam Depag RI, 1982/1983.

Nisaif, Sairduf, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendektan Historis, Teoritis dan Praktis*, Cet I; Jakarta': Ciputat Press, 2002.

Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. I; Bandung: Pustaka setia, 1999.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, Juz II, Muzahah muhafrasah Mazidah, t.th.

FINANSIAL PENDIDIKAN ISLAM: Menoleh Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam Klasik

Sapri, MA.

A. Pendahuluan

Pendidikan dalam kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi sesuatu yang essensial dalam menjalani kehidupan ini. Karena pentingnya, Islam menempatkan pendidikan pada kedudukan yang penting dan tinggi dalam doktrin Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai ayat dalam Alqur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi.

Urgensi pendidikan Islam tentu sangat erat kaitannya dengan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri yang dipengaruhi banyak faktor. Faktor pendidik oleh berbagai kalangan dianggap faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pendidikan itu di samping faktor-faktor pendidikan lainnya.

Di samping faktor-faktor tersebut, faktor lain yang cukup mempengaruhinya adalah pendanaan atau finansial. Tidak mungkin proses pendidikan itu akan berjalan dengan baik kalau pendanaannya tidak memadai dan mencukupi. Pendanaan itu tidak hanya untuk membangun atau menyediakan fasilitas pembelajaran seperti buku-buku ataupun media, tetapi juga untuk menggaji para guru atau pendidik serta para staf yang bekerja di lembaga pendidikan tersebut.

Dalam sejarah pendidikan Islam klasik, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, *Kuttab*, masjid atau *masjid-khan* mendapat *support* dana yang cukup besar terutama bersumber dari wakaf dan para hartawan. Tidak hanya secara lembaga, para pendidik dan para staf lembaga pendidikan juga mendapat perhatian dari para penguasa/khalifah dan para darmawan dalam mensejahterakan hidup mereka.

B. Lembaga Pendidikan Islam dan Sumber Keuangannya

Sumber-sumber keuangan pendidikan Islam klasik nampaknya terpusat kepada dua hal, pertama lembaga wakaf dan yang kedua para hartawan atau dermawan Muslim yang peduli dengan pendidikan Islam. Untuk itu perlu dijelaskan bagaimana kontribusi wakaf dan para dermawan bagi proses pendidikan Islam sehingga mencapai kejayaan.

Dalam sistem pendidikan Islam klasik, tampaknya antara pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam, yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syariat Islam dan adanya keseimbangan antara ekonomi dengan kemaslahatan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi mempunyai tujuan ibadat dan demi kemaslahatan bersama (Asrorah, 1999:90). Sebagai sebuah sumber keuangan, Ali Yafie menilai bahwa wakaf merupakan subsistem penyediaan dana dalam rangka menangani masalah kemiskinan, yang dapat digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan tertentu, baik yang bersifat umum maupun khusus (Yafie, 1995:174).

Lembaga waqaf ini pada masa klasik berkembang dengan pesat. Tidak hanya sarana pendidikan, tapi juga termasuk sarana peribadatan, perpustakaan, kantor-kantor, serta sarana publik lainnya yang dibangun oleh lembaga waqaf ini (Makdisi, 1981:38).

1. Masjid

Pendidikan Islam awal berlangsung di berbagai tempat, baik di masjid, *kuttab*, masjid-*khan*, *jami'*, maupun di madrasah. Masjid pada masa klasik Islam mempunyai fungsi yang jauh lebih besar dan bervariasi dengan fungsinya sekarang. Dulu, disamping tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial dan politik umat Islam. Lebih dari itu, masjid adalah lembaga pendidikan semenjak masa paling awal Islam (Asari, 2007:44).

Biasanya finansial masjid secara natural tergantung kepada wakaf dan sedekah, sehingga ia lebih mandiri dari pemerintah dan dapat menentukan arah kegiatannya sendiri (Asari, 2007:47). Menurut Stanton, adalah hal yang biasa - bahkan pada abad-abad awal Islam - bagi hartawan

Muslim untuk membantu masjid-masjid - dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat atau - terkadang - untuk mendukung satu pemikiran tertentu. Dalam kaitannya dengan mazhab ortodoks yang empat, orang-orang yang ingin menyebarkan pandangannya, memberikan wakaf kepada masjid-akademi yang berfungsi sebagai tempat pengajaran mazhab tersebut (Stanton, 1994:42).

Berkaitan dengan para murid yang belajar di masjid, wakaf juga menjadi sumber utama bagi murid-murid yang miskin untuk menyelesaikan studi mereka. Ahmad Syalabi mengungkapkan bahwa murid-murid yang miskin mendapat bagian yang cukup banyak dari wakaf para hartawan. Di antara mereka adalah Abu Tammam Ath-Thaiy, yaitu seorang penyair yang terkenal, yang pernah menjadi tukang air "yang rendah hati" di masjid Jami' Amru ibnul 'Ash, dan juga Imam Syafi'i (Syalabi, 1973:291-192). Bahkan Hishamul Muluk memperluas kesempatan kepada para murid-murid yang belajar di sekolah yang dibangunnya, tidak hanya belajar dengan gratis, tapi juga dengan memberikan gaji yang teratur dan tunjangan bagi murid-murid yang miskin, yang diambilnya dari hasil wakaf yang khusus untuk keperluan itu (Syalabi, 1973:293).

Di samping murid, guru juga mendapat perhatian dari badan wakaf dalam rangka melaksanakan tugasnya. Setelah sekolah-sekolah dibangun dan guru-gurunya diangkat, maka guru-guru ini mendapat gaji bulanan yang teratur, yang diambilkan dari kantor perbendaharaan umum, atau dari penghasilan badan-badan wakaf. Gaji-gaji guru tersebut berbeda menurut tingkatan mereka, dan juga tergantung pada hasil yang diperoleh oleh badan wakaf, serta berdasarkan kedudukan dan kemasyhuran guru-guru itu dalam masyarakat (Stanton, 1994:43-44).

Walaupun penghasilan wakaf yang diperoleh tiap tahun berbeda, namun guru-guru tetap mendapat prioritas utama dari badan wakaf, seperti yang dinyatakan Stanton bahwa karena penghasilan satu wakaf bervariasi setiap tahun sesuai dengan gelombang ekonomi, maka prioritas pengeluaran ditentukan dalam dokumen wakaf. Prioritas pertama adalah untuk staf yang kehadirannya sangat esensial terhadap misi lembaga yang bersangkutan, yang terdiri dari *mudarris*, *syaiikh*, *imam*, dan *mu'adzzin*. Prioritas kedua adalah jabatan yang lebih rendah seperti *mu'id* dan *mufid*. Prioritas ketiga adalah beasiswa dan pelayanan bagi para mahasiswanya (Stanton, 1994:43-44).

2. Kuttab

Lembaga pendidikan awal yang juga mendapat dana dari wakaf adalah *Kuttab*. Di antaranya adalah *Kuttab* yang dibangun oleh Abu Nasher Ahmad Ibnu Hamid, seorang Mufti pada masa pemerintahan Syamsul Muluk Ibnu Nizhamul Muluk di Baghdad untuk anak-anak yatim. Untuk *Kuttab* ini ia menyediakan wakaf yang hasilnya dapat dipungut terus menerus (Syalabi, 1973:296).

Dengan adanya wakaf itu maka kehidupan anak-anak yatim tersebut dapat terjamin sampai mereka itu dewasa (*aqil-bailgh*), baik untuk perbelanjaan, pakaian dan makanan mereka, maupun biaya mempelajari sastra, menghafal al-Qur'an dan sebagainya.

3. Masjid-Khan

Lembaga berikutnya yang juga dibiayai dari harta wakaf adalah masjid-*khan*. Istilah *khan* dapat diterjemahkan sebagai penginapan, motel atau yang sejenisnya. *Khan* bisa juga berfungsi sebagai gudang atau pusat perdagangan. Ada pula *khan* yang secara finansial didukung oleh wakaf dan penghasilannya dimanfaatkan untuk kepentingan social (Makdisi, 1981:23). Namun dalam hubungan ini, *khan* yang dimaksud adalah asrama mahasiswa yang berasal dari desa-desa yang jauh yang umumnya belajar fikih.

Badr bin Hasanawayh al-Kurdi (mantan gubernur pada dinasti Buwayhi) adalah tokoh yang paling terkenal sebagai pelopor pembangunan *khan* secara besar-besaran untuk tujuan pendidikan. Tidak hanya itu, ia juga membantu para ilmuwan serta jama'ah haji dalam perjalanan ke Mekah (Makdisi, 1981:29).

Dalam hal ini Badr memanfaatkan ketentuan wakaf untuk mendirikan lembaga ini dan memberikan ketentuan yang menjamin bahwa uang yang dihasilkan oleh harta wakaf digunakan untuk membantu kehidupan mahasiswanya (Stanto, 1994:45).

Kepedulian Badr kepada kelancaran proses pembelajaran di lembaga pendidikan seperti *Khan* ini menunjukka bahwa beliau memang seorang pemerhati pendidikan yang memimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dalam hal ini Badr merupakan sosok yang memahami fungsi harta dalam perspektif universal di mana beliau memanfaatkan wakaf untuk aspek pendidikan.

4. Madrasah

Pada perkembangan selanjutnya adalah munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan yang lebih maju dibanding dengan lembaga sebelumnya. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhnya madrasah adalah karena masjid-masjid telah penuh dengan tempat-tempat belajar dan mengganggu aktifitas pelaksanaan ibadah (Daulay, 2001:108). Madrasah ini oleh Stanton disebut sebagai lembaga pendidikan tinggi (Daulay, 2001:108) yang mengambil masjid-*khan* sebagai model.

Di antara madrasah yang dibangun dan mendapat suntikan dana dari wakaf dalam pengelolaannya adalah Madrasah Al- Mustansiriyah di Baghdad yang didirikan oleh khalifah Al-Mustansir pada abad ke 13 M. Madrasah ini memiliki auditorium tempat memberikan kuliah bagi tokoh-tokoh dari keempat mazhab besar dalam Islam. Di madrasah ini mahasiswa belajar dengan gratis dan bahkan setiap bulan mereka menerima satu dinar emas, di samping mereka mendapat pula pembagian daging dan roti setiap hari. Tidak hanya itu, untuk kelancaran salin-menyalin, perpustakaan madrasah ini juga menyediakan fasilitas kertas dan tinta dari pengelola perpustakaan (Al-Abrasyi, 1970:82-83).

Bangunan madrasah ini merupakan bangunan madrasah terindah di dunia Islam pada waktu itu. Tenaga dan harta yang dipergunakan untuk mendirikan madrasah ini membayangkan kepada kita sampai di mana penghormatan orang pada waktu itu terhadap ilmu dan para ulama. Keindahan dan kemegahan pembangunan gedung itu telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai bangunan yang lain di negeri Islam (Fahmi, 1979:43).

Sumber keuangan madrasah dari wakaf ini juga erat kaitannya dengan motivasi seseorang untuk mewakafkan hartanya. Pada dasarnya seseorang mewakafkan hartanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa syukur atas nikmat yang ia terima. Namun, menurut Hasan Langgulung, selain untuk tujuan tersebut, pemberian wakaf sarat dengan tujuan mencari kehormatan, popularitas dalam masyarakat, atau untuk anak yang takut karena dijual sesudah wafatnya atau takut dihalangi dari padanya dan dijual untuk membayar hutang atau memberi wakaf karena riya (Langgulung, 1992:159).

Pedapat yang sama dikemukakan oleh Jonathan Berkey, yang menyatakan bahwa ada tiga motivasi utama seorang *waqif* (orang yang berwakaf) dalam mewakafkan hartanya yaitu motivasi (pertimbangan)

politik, ekonomi dan faktor kesalehan (Berkey, t.th, 130-136) . Sebagai muslim yang taat, tentu pertimbangan politik atau ekonomi harus dihindari, ketika hendak melakukan “transaksi” wakaf. Oleh karena itu, faktor kesalehan-lah yang harus menjadi motivasi seseorang ketika ia hendak mewakafkan sebagian hartanya dalam lembaga pendidikan khususnya, dan aspek lain pada umumnya.

Menurut Makdisi, bahwa setiap madrasah dalam menentukan materi dan sistem pengajarannya sesuai dengan pemberi wakaf dan begitu juga *mudarris* terikat dengan *waqfiyah* dari lembaga tempat dia mengajar (Makdisi, 1981:80).

Namun di provinsi al-Andalus, semenanjung Iberia, di mana madrasah tidak terkenal dan daerahnya menganut mazhab Malik yang lebih konservatif dan tradisional, hukum wakafnya tidak membenarkan seorang pemberi wakaf untuk mempengaruhi pengangkatan *syaiikh* atau penggantinya, tidak pula untuk mengangkat dirinya sebagai pengelola. Walaupun fikih tetap menjadi bagian inti dari kurikulum, fokus utamanya adalah pandangan-pandangan mazhab Malik. Dan karena hukum wakaf itu, maka tenaga pengajar dan kurikulum berada di bawah kontrol dan keinginan khalifah dan para penasihatnya (Stanton, 1994:48).

Dari beberapa catatan di atas mengindikasikan bahwa sebagian besar para *mudarris/syaiikh* yang mengabdikan pada lembaga pendidikan yang dibangun atas wakaf, baik secara keseluruhan atau sebagiannya, terikat dengan *waqfiyah* yang telah ditentukan oleh *waqif*. Dengan adanya syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen wakaf, baik menyangkut kurikulum, *mudarris*, murid, maupun sistem pengajarannya, *waqif* berhak menentukan di awal segala aktivitas di lembaga tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilihat motivasi seseorang yang berwakaf (*waqif*) dalam mewakafkan hartanya. Pada hakekatnya, motivasi awal seorang *waqif* dalam mewakafkan hartanya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan (*Qurba*), di samping itu juga ada motivasi lain seperti untuk menghindari hartanya dari pajak dan untuk menghalangi seorang anak agar tidak berfoya-foya dengan harta yang berlebih pada orang tuanya.

Dengan diserahkannya harta kepada satu lembaga tertentu dalam bentuk wakaf, kekayaan tersebut berada diluar jangkauan kekuasaan luar atau pemerintah. Meski si pemberi wakaf tidak dapat mengambil keuntungan dari aset wakaf secara langsung, dia tetap dapat mengelola penghasilannya (Stanton, 1994:42).

Madrasah Nizhamiyah yang didirikan oleh Nizhamul Muluk tidak terlepas dari penggunaan harta wakaf, baik untuk para guru, murid, imam, maupun dalam rangka melengkapi fasilitas asrama. Menurut Abdul Mukti, madrasah ini merupakan intitusi negara yang didirikan oleh pemerintah, dan dilihat dari sudut pendidikan modern merupakan pendidikan formal pertama di dunia Islam (Mukti, 2007:191). Pendanaan madrasah ini yang diambil dari harta wakaf ditulis dalam dokumen wakaf. Stanton menjelaskan, dari dokumen ini, bentuk wakaf yang membangun dan membiayai Nizhamiyah adalah:

1. Nizhamiyah merupakan wakaf yang disediakan untuk kepentingan penganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan ushul fikih.
2. Harta benda yang diwakafkan kepada Nizhamiyah adalah untuk kepentingan mazhab Syafi'i dalam fikih dan ushul fikih.
3. Pejabat-pejabat utama Nizhamiyah harus bermazhab Syafi'i dalam fikih dan ushul fikih; ini mencakup *mudarris*, *wa'idh* dan pustakawan.
4. Nizhamiyah harus mempunyai seorang tenaga pengajar bidang kajian al-Qur'an.
5. Nizhamiyah harus mempunyai seorang tenaga pengajar bahasa Arab.
6. Setiap staf menerima bagian tertentu dari penghasilan yang diperoleh dari harta wakaf (Stanton, 1994:50).

Wakaf-wakaf yang telah dilakukan oleh Nizhamul Muluk ditetapkan dalam dokumen wakaf. Dalam dokumen itu dituliskan semua barang-barang yang diwakafkan dalam sebuah daftar wakaf. Di antara barang-barang yang diwakafkan adalah pasar sekolah, beberapa bidang tanah dan biaya-biaya untuk para murid dan guru.

Bila diperhatikan wakaf-wakaf yang telah dikeluarkan oleh Nizhamul Muluk dalam mensukseskan program pendidikan pada madrasah-madrasah yang telah dibangunnya, ini membuktikan bahwa beliau sangat memperhatikan kelancaran proses belajar mengajar dengan memenuhi segala keperluan para guru, murid maupun pegawainya. Beliau tidak hanya memberikan beasiswa belajar dengan gratis baik untuk para guru maupun muridnya, tapi juga beliau memenuhi keperluan keseharian mereka bahkan sampai kepada pakaian, alat-alat tidur dan kendaraan mereka. Dan jika dibandingkan dengan nilai gaji yang sama pada waktu itu dengan apa yang diterima oleh seorang tenaga pendidik sekarang ini, tentu sangat jauh berbeda, karena gaji yang diterima seorang tenaga pendidik sekarang belum bisa memenuhi kebutuhan layaknya pemegang profesi itu.

Jika dihubungkan dengan kemajuan pendidikan Islam, maka tidaklah diherankan lahirnya para tokoh-tokoh atau ilmuwan Muslim yang berkwalitas seperti Al-Ghazali, Syafi'i dan sebagainya dari lembaga-lembaga pendidikan Islam klasik seperti ini. Kesuksesan pelaksanaan pendidikan Islam yang mendapat kontribusi dari harta wakaf yang begitu besar hanya dapat terwujud dengan suatu peradaban yang maju dari berbagai segi atau aspek khususnya aspek ekonomi dan politik yang stabil. Dan yang tak kalah menarik adalah gairah dan motivasi para birokrat maupun para hartawan untuk membantu membiayai pelaksanaan pendidikan tersebut.

Wakaf lain yang tak kalah besarnya adalah wakaf yang diperuntukan bagi Al-Azhar. Lembaga keagamaan ini dapat bertahan sejak zaman klasik sampai sekarang karena didukung oleh wakaf (Asari, 2002:52). Di antara wakafnya adalah memberikan tunjangan kepada para ulama sebagai biaya hidup mereka serta membeli dan mendirikan gedung di samping masjid Jami' Al-Azhar untuk keperluan mereka. Dan pada masa pemerintahan khalifah Al-Hakim, ia menyediakan wakaf-wakaf yang keuntungannya digunakan untuk biaya masjid-masjid dan bahan-bahan kebudayaan. Menurut Al-Maqrizy, Al-Hakim menekankan bahwa pewakafan harta-harta tersebut berlaku abadi untuk selama-lamanya, dan tidak boleh diganggu oleh berlalunya zaman dari masa kemasa (Syalabi, 1973:377-378).

5. Perpustakaan

Objek lain yang juga mendapat suntikan dana wakaf adalah perpustakaan. Menurut Makdisi, perpustakaan merupakan salah satu institusi inklusif yang membahas berbagai ilmu-ilmu asing, yang terdiri dari: *Bait al-Hikmah*, *Khizanat al-Hikma*, *Dar al-Hikma*, *Dar al-'Ilm*, *Dar al-Kutub*, *Khizanat al-Kutub* dan *Bait al-Kutub*. Institusi-institusi ini secara umum dibiayai oleh wakaf. Sedangkan aktivitas-aktivitas yang terjadi di perpustakaan tidak hanya membaca buku (menggali ilmu pengetahuan) juga menyalin buku-buku dan juga diskusi-diskusi (Makdisi, 1981:24-26).

Menurut Athiyah al-Abrasyi, perpustakaan Darul Ilmi yang didirikan oleh Abu Nasr bin Ardasyir tahun 383 H, merupakan suatu pusat kebudayaan (*culture center*) untuk melakukan penelitian, studi, perdebatan-perdebatan dan simposium, berdialog dan bertukar pikiran, di mana bertemu para ahli-penelitian, juru-juru debat, sarjana, ulama dan sasterawan. Para ulama, sasterawan dan filosof ini telah mewakafkan buku-buku atau hasil karya mereka kepada perpustakaan ini untuk diabadikan (Al-Abrasyi, 1970:88).

Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca buku-buku, tetapi juga dimanfaatkan untuk berdiskusi dan melakukan penelitian atas pelbagai permasalahan baik yang menyangkut dengan pengembangan keilmuan maupun masalah kemasyarakatan dan sebagainya. Artinya, perpustakaan telah menjadi lembaga pendidikan yang melakukan proses belajar pembelajaran secara universal.

Fungsi-fungsi lain dari perpustakaan adalah juga menjadi pusat penerjemahan dan ruang penggandaan buku-buku yang telah diterjemahkan, di samping tempat menyimpan buku-buku dari semua bidang dan semua mata pelajaran, baik yang berasal dari bangsa Timur yang ditulis dalam bahasa Sansekerta sampai kepada karya-karya terjemahan bahasa Arab atas buku-buku sains dan filsafat bangsa Yunani (Stanton, 1994:168).

Di setiap perpustakaan dilengkapi dengan ruangan untuk menyelenggarakan *halaqah-halaqah*. Penguasa-penguasa biasanya mengundang para ulama-ulama untuk memanfaatkan perpustakaan mereka untuk mengembangkan keilmuan. Misalnya, Ibnu Sina telah mengembangkan pemikiran dan karyanya dibawah patronase seorang pangeran di daerah propinsinya, yaitu Dinasti Hamadan, bawahan kerajaan Abbasyiyah (Asrorah, 199:69). Di Baghdad, sebuah perpustakaan yang bernama "*Alhazanah Al-Hikmah*" atau "Perpustakaan Ilmu dan Filsafat", menyediakan berbagai fasilitas bagi mereka yang mengunjunginya, antara lain tempat tinggal, buku-buku dan biaya hidup selama mereka berada di perpustakaan ini.

Menurut Stanton, pada mulanya perpustakaan cenderung didirikan di rumah-rumah orang kaya, kalangan bangsawan dan di istana-istana pemerintah. Karena ajaran-ajaran al-Qur'an mengharuskan individu-individu untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan menyediakan kekayaan yang dimilikinya bagi orang lain yang kurang beruntung, maka para hartawan membiayai pembangunan perpustakaan dan sering kali membukanya untuk para ilmuwan dan kadang-kadang untuk umum (Syalabi, 1973:167).

Ahmad Syalabi mengungkapkan bahwa pada umumnya wakaf-wakaf yang menjadi sumber keuangan untuk membelanjai perpustakaan dan melengkapi kebutuhan-kebutuhannya, seperti reparasi bangunan-bangunannya, mendatangkan buku-buku baru, pembayaran gaji para pegawai dan lain sebagainya (Syalabi, 1973:167). Untuk memudahkan proses pengambilan dan mendapatkan wakaf dari kaum muslimin, maka ditunjuk pengawas perpustakaan sekaligus membelanjakan untuk keperluan

pengelolaan perpustakaan tersebut. Begitu juga, tinggi rendahnya gaji pegawai tergantung kepada penghasilan wakaf yang dipungut oleh para pustakawan.

Seperti dijelaskan di atas, bahwa di perpustakaan-perpustakaan yang didirikan oleh umat Islam terdapat proses penerjemahan buku-buku. Bagi mereka yang menerjemahkan buku diberikan upah yang cukup besar. Al-Ma'mun misalnya memberikan emas kepada Hunain Ibnu Ishak seberat buku-buku dalam bahasa asing yang diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab (Syalabi, 1973:167).

C. Manajemen Keuangan

Jika diperhatikan pelaksanaan pengelolaan keuangan lembaga-lembaga pendidikan Islam klasik di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat dua bentuk pengelolaan keuangan:

Pertama, pada kasus madrasah Nizhamiyah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola penguasa, misalnya, pengelolaan keuangan lembaga telah ditata dengan baik dan secara administrasi menunjukkan bahwa manajemen madrasah ini sudah rapi. Hal ini dapat dilihat dari dokumen wakaf pada madrasah tersebut. Melalui dokumen ini nampak bahwa ada beberapa unsur yang terlibat dalam mengelola keuangan madrasah terutama nazir. Dalam pengelolaan wakaf, tidak bisa lepas dari peran nazir wakaf yang bertugas mengurus dan memelihara harta wakaf setelah diserahkan oleh wakif (Al-Munawar, 2005:339).

Kedua, wakaf yang bersumber dari individu-individu para darmawan mulim yang memberikan secara langsung kepada seseorang yang sedang belajar di lembaga pendidikan seperti masjid, *kuttab*, madrasah dan sebagainya atau kepada para guru yang mendidik di lembaga tersebut. Nampaknya, wakaf-wakaf secara individu ini tidak dikelola secara rapi dan teratur, tapi hanya menurut kehendak wakif.

D. Jumlah Biaya

Adapun jumlah biaya yang didapat oleh para guru atau tenaga pengajar serta staf lembaga pendidikan beragam. Ada yang mendapat gaji yang cukup besar dari para darmawan atau orang tua murid dan ada juga besar atau kecilnya gaji tergantung materi yang diajarkan oleh guru tersebut.

Misalnya gaji yang dibayar kepada guru Taman kanak-kanak (*mu'allimul Kuttab*) jumlahnya tidak ditentukan, melainkan semata-mata terserah kepada setiap anak, dan kesanggupan keuangan orang tuanya. Secara umum, gaji tersebut dapat dibagi dalam dua golongan:

Pertama; berhubungan dengan waktu; hal ini maksudnya adalah semua anak membayar sejumlah kecil uang yang dibayarkan setiap minggu atau setiap bulan, ditambah dengan sepotong roti yang diberikan setiap minggu. Di samping itu ada pula sejumlah kecil uang yang dibayarkan pada hari-hari raya atau pada musim-musim tertentu. Dalam keadaan-keadaan khusus sering juga diberikan sejumlah gandum atau jagung sebagai ganti dari pembayaran uang yang biasa dibayarkan setiap minggu atau setiap bulan.

Kedua, berhubungan dengan hasil pelajaran yang telah didapat oleh anak tersebut. Gaji ini dibayar oleh anak-anak yang dalam pelajarannya telah selesai menghafalkan suatu surat dari surat-surat tertentu dalam al-Qur'an atau bahkan sampai hafal semua surat dalam al-Qur'an. Pemberian dari orang tua anak kepada guru meliputi bahan-bahan sandang, uang dan lain-lainnya sesuai dengan keadaan keluarga si anak (Syalabi, 1973:231).

Begitu juga para muaddib (guru pribadi putera para pembesar) mendapat perhatian yang penuh dari para penguasa atau raja. Seorang muaddib Ali ibnul Hasan al-Ahmar (194 H) datang ke istana Chalifah Harun al-Rasyid untuk memberikan pelajaran kepada al-Amin. Sebagaimana biasa, bahwa apabila khalifah memanggil seorang muaddib untuk anak-anak mereka, dan setelah muaddib itu selesai memberikan pelajaran pada hari pertama, maka khalifah memerintahkan supaya segala yang terdapat dalam sidang itu diangkut ke rumah muaddib itu dan dihadiahkan kepadanya berikut alat-alat pengangkutnya (hewan-hewan). Akan tetapi al-Ahmar berkata: Rumahku tak cukup luas untuk menampung barang-barang ini. Aku hanya mempunyai satu kamar yang hanya cukup untuk aku sendiri. Mendengar hal itu, khalifah al-Rasyid memerintahkan supaya dibeli sebuah rumah untuk al-Ahmar, lengkap dengan seorang pelayan perempuan. Selain itu ia juga diberi kendaraan dan seorang pesuruh (Syalabi, 1973:232).

Menurut Ibnu Challikan, bahwa al-Kisai telah diberi gaji yang tinggi lagi teratur. Di samping itu, pada pertama kali menjalankan tugasnya ia telah diberi sepuluh ribu dirham, dan seorang hamba sahaya perempuan yang cantik, lengkap dengan segala kebutuhannya, ditambah lagi dengan seorang pelayan dan seekor keledai tunggangan dengan semua alat-alatnya (Syalabi, 1973:233).

Para *muaddib*, di samping mendapatkan uang, mereka juga mendapatkan tempat tinggal, pembagian bahan-bahan makanan secara tetap dan teratur, serta hadiah-hadiah dan pemberian-pemberian lainnya. Berdasarkan sumber-sumber yang banyak, dapat disimpulkan bahwa rata-rata gaji seorang *muaddib* adalah seribu dirham sebulan. Pada suatu ketika khalifah al-Mutawakkil memberi Ibn Sikkit yang menjadi *muaddib* puteranya- uang sebanyak lima puluh dinar di samping gajinya yang tetap. Gaji bulanan sebanyak itulah yang diterima Ibnu Sikkit ketika ia menjadi *muaddib* bagi putera Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Thahir (Syalabi, 1973:233).

Ahmad Syalabi menjelaskan bahwa suatu hal yang dapat dipastikan bahwa para ulama dan ahli bahasa berada dalam kehidupan makmur. Mereka telah dapat menikmati taraf keuangan yang menyenangkan lantaran para khalifah, sultan-sultan dan para pembesar sangat memperhatikan kepentingan-kepentingannya, hadiah-hadiah dan pemberian lainnya yang tidak putus-putusnya. Misalnya, Chalifah al-Makmun telah memberikan pemberiannya kepada Hunain Ibnu Ishaq yang senantiasa mengalir terus tak henti-hentinya ((Syalabi, 1973:234).

Ketika imam Syafi'i datang ke Mesir ia disambut dengan meriah dan penuh penghormatan oleh Chalifah Ibnu 'Abdul Hakam. Chalifah ini mengeluarkan uangnya sendiri sebanyak 1000 dinar dan diberikanya kepada Imam Syafi'i, ditambah 1000 dinar lagi yang diambilnya dari Ibnu 'Usamah, seorang pedagang, dan 1000 dinar lagi yang diambilnya dari dua orang lainnya. Az-Zadjdadj mendapatkan sampai 300 dinar setiap bulan. Chalifah al-Muqtadir telah memberikan kepada Ibnu Duraid (w.321H) uang sebanyak 50 dinar setiap bulan setelah dia datang ke Baghdad sebagai seorang yang miskin ((Syalabi, 1973:234).

Demikianlah dapat dilihat bahwa gaji para guru masa klasik cukup tinggi yang dibiayai dari wakaf yang dikelola secara baik dengan manajemen yang baik pula. Perhatian yang tinggi dari aparat pemerintah terhadap kesejahteraan guru merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan Islam masa klasik.

E. Penutup

Finansial pendidikan Islam klasik pada umumnya bersumber pada wakaf terutama wakaf tunai baik yang dikelola oleh pemerintah/penguasa

ataupun yang diberikan secara langsung oleh wakif kepada seseorang yang dikehendakinya. Wakaf ini tidak hanya berbentuk uang (wakaf tunai) tapi juga dalam bentuk harta benda seperti kebun, pasar, toko dan sebagainya.

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf pada masa klasik telah berkembang menjadi sebuah lembaga ekonomi yang produktif sehingga hampir semua unsur pendidikan terutama murid, guru dan sarana prasarana mendapat suntikan dari wakaf. Wakaf di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial ekonomi.

Tingginya animo masyarakat muslim pada masa klasik dalam membiayai pendidikan Islam dengan peran wakaf ini telah menghasilkan proses pendidikan yang terbaik pada masanya dengan lahirnya para intelektual Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam al-Ghazali. Tidak hanya secara individu, secara kelembagaan finansial pendidikan Islam klasik melalui wakaf ini telah mendorong semangat masyarakat Islam untuk giat mempelajari ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, M. Athiyah., *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry L.I.S., Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Asari, Hasan., *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian atas Lembaga-Lembaga Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- , *Modernisasi Islam; Tokoh, Gagasan dan Gerakan*, Bandung: Citapustaka Media, 2002.
- Asrohah, Hanun., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Berkey, Jonathan., *The Transmission Of Knowledge In Medieval Cairo: A History Of Islamic Education*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992.
- Daulay, Haidar Putra., *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2001.
- Fahmi, Asma Hasan, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Ibrahim Husein, MA, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Hasan Sulaiman, Fathiyah., *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali*, terj. Fathur Rahman, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Husain, Syed Sajjad dan Syed Ali Ashraf, *Krisis Dalam Pendidikan Islam*, terj. Drs. Fadhlun Mudhafir, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2000.
- Langgulong, Hasan., *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husain, 1992.
- Makdisi, George., *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.
- Mughniyah, Muhammad Jawad., *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Mukti, Abdul., *Konstruksi Pendidikan Islam; Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizhamiyah Dinasti Saljuq*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.

- Mulkhan, Abdul Munir., *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: SI Press, 1994.
- Stanton, Charles Michael., *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, terj. H. Afandi dan Hasan Asari, Jakarta: Logos, 1994.
- Syalabi, Ahmad., *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Muchtar Yahya dan M. Sanusi Latief, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Yafie, Ali., *Menggagas Fiqih Sosial: Dari soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhwah*, Bandung: Mizan, 1995.

STRATEGI MANAJEMEN DAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH

BAGIAN III

EKSISTENSI MADRASAH SWASTA PASCA KELUARNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Dr. Muhammad Syaifudin, M.Ag.

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dan membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Selanjutnya, agar mampu berperan dalam persaingan global, maka manusia Indonesia, sebagai satu bangsa, harus terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas. Dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan harus merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berkenaan dengan hal tersebut, reformasi sebagai suatu gerakan nasional telah mengubah kebijakan pembangunan masa lampau menjadi lebih demokratis, mengakui persamaan derajat manusia, pembangunan yang lebih terdesentralisasi dalam rangka menuju masyarakat madani. Reformasi politik pendidikan nasional merupakan keniscayaan sejarah yang harus didukung oleh semua pihak agar mencapai cita-cita *education for all* secara adil dan berkelanjutan (Azizy, 2004:x).

Salah satu bentuk nyata dari reformasi pendidikan adalah pelaksanaan otonomi pendidikan yang bisa juga disebut desentralisasi pendidikan. Dalam konteks ini, desentralisasi pendidikan dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada level sekolah dengan tetap berpegang kepada standar minimum kompetensi (*basic competencies*) yang berlaku secara nasional.

Pendekatan penyelenggaraan pendidikan harus diubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang menekankan pada peningkatan

partisipasi masyarakat dalam kerangka *community based education* (pendidikan berbasis masyarakat). Desentralisasi pendidikan tidak hanya menyangkut pelimpahan wewenang birokrasi dari pusat ke daerah, melainkan juga mencakup otonomi pada tingkat lembaga pendidikan. Hal demikian akan sejalan dengan konsep manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (*school based management*). Dengan sistem Manajemen berbasis sekolah ini, diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya.

Menurut penulis, satu-satunya lembaga pendidikan yang dianggap telah melaksanakan konsep di atas adalah lembaga pendidikan swasta. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan swasta hidup dan berkembang secara mandiri dengan bantuan partisipasi masyarakat yang ada di sekitarnya. Mengingat luasnya topik pembahasan ini, maka penulis membatasinya pada lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah swasta dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah tentang Yayasan seperti yang termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001. Kajian ini difokuskan kepada dampak berlakunya UU tersebut terhadap keberadaan madrasah swasta.

B. Kebijakan Pemerintah tentang Yayasan dan Eksistensi Madrasah Swasta

1. Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan (antara Solusi dan Permasalahan)

Yayasan merupakan suatu bentuk dari badan hukum, yang pendiriannya pada masa lalu hanya berdasarkan kebiasaan di masyarakat karena memang belum ada peraturan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang keberadaan yayasan. Realitas yang terjadi di masyarakat adalah bahwa banyak yayasan yang secara sungguh-sungguh mempunyai niat baik atau tujuan mulia yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta pendidikan, akan tetapi lemah di bidang administrasi dan keuangan. Pengaturan yayasan identik hanya atas dasar keinginan atau kesepakatan para pendirinya, oleh karena kesamaan visi yang selanjutnya diotentikkan dalam bentuk akta notaris pendiri yayasan. Ada juga yang didaftarkan pada pengadilan negeri. Cukup dengan akta notaris, sebuah yayasan sudah mempunyai status badan hukum.

Menyikapi perkembangan yayasan pendidikan yang demikian pesat dan bersifat tradisional, pemerintah Indonesia berupaya memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sejak tanggal 6 Agustus 2001, Indonesia telah memiliki suatu Undang-undang yang mengatur tentang Yayasan. Suatu perjalanan yang panjang, dimulai dari berbagai naskah akademik Undang-undang yang lahir silih berganti, pembicaraan yang panjang di DPR, akhirnya 45 (empat puluh lima) tahun setelah Belanda memiliki Undang-undang Yayasan, baru kini Indonesia memiliki Undang-undang tentang Yayasan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001.

Seperti diketahui, sebelum lahirnya Undang-undang tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi. Badan hukum Yayasan, di samping untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, telah pula dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semula penciptaan badan hukum ini. Yayasan telah dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, seperti untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus Yayasan, menghindari pajak yang seharusnya dibayar, untuk menguasai suatu lembaga pendidikan selama-lamanya, untuk menembus birokrasi, untuk memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa, dan berbagai tujuan lain.

Pemerintah senantiasa berupaya memberikan kepastian hukum dan terjaminnya ketertiban pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Adapun pokok-pokok pikiran yang diajukan pemerintah dihadapan Rapat Paripurna DPR RI sewaktu UU tersebut masih berupa Draft/RUU Yayasan secara singkat antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan tentang yayasan. Karena kenyataan dalam masyarakat yayasan tumbuh dan berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan, namun belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya (pendirian yayasan selama ini hanya berdasarkan kebiasaan)
2. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta fungsi yayasan sesuai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat yang mendirikan yayasan.
3. Adanya fakta kecenderungan di dalam masyarakat, mendirikan yayasan

dengan maksud untuk berlandung dibalik status badan hukum yayasan, untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas, menghindari pajak yang dapat merugikan pihak ketiga, masyarakat dan negara (Anwar, 2002:1).

Ketiga pokok pikiran tersebutlah yang menjiwai dan menjadi ruh dari UU Yayasan No. 16 Tahun 2001, dan pokok pikiran ketiga itulah yang menjadi ruh yang memiliki sifat reaktif, emosional dan arogan di mata pendiri/pengurus yayasan yang sudah ada dan lama berjalan. Sebagai contoh Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas" (UU No 16 Tahun 2001). Ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang menjadi anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap (UU No. 16 Tahun 2001).

Selanjutnya, Chatamarrasyid Ais mengemukakan reaksi Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Undang-undang Yayasan. Ornop berpendapat bahwa Undang-undang Yayasan harus memiliki suatu paradigma yang terdiri dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kebebasan Berorganisasi
- 2) Prinsip Independensi
- 3) Prinsip Transparansi
- 4) Prinsip Akuntabilitas
- 5) Prinsip Nirlaba/*Non-Profit Oriented* (Ais, 2002:69).

Adapun masalah-masalah yang dapat teratasi dengan adanya Undang-undang Yayasan tersebut meliputi:

- 1) Badan Hukum Yayasan

Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengakhiri perdebatan mengenai apakah Yayasan adalah suatu badan hukum atau bukan. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum (UU No. 16 Tahun 2001).

- 2) Tujuan Sosial dan Kegiatan Usaha Yayasan

Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 dan pasal 3, 7, dan 8 (UU No. 16 tahun 2001), menghapuskan

kontroversi apakah Yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan, dan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha yang dapat memperoleh laba. Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealitas, sosial dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar Yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan pihak lain.

- 3) Siapa Pemilik Yayasan

Menurut Undang-undang Yayasan, bahwa Pendiri Yayasan bukanlah pemiliknya karena ia telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi pemilik badan hukum Yayasan dan Pengurus juga bukanlah pemiliknya karena ia diangkat untuk mengurus organisasi Yayasan (UU No. 16 tahun 2001). Dengan demikian, menurut UU ini, Yayasan adalah milik masyarakat (UU No. 16 tahun 2001) dan bukan milik para Pendiri/ Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas.

- 4) Keterbukaan Yayasan

Dalam hubungan ini, Undang-undang Yayasan nomor 16 Tahun 2001 mengharuskan Yayasan membuat Laporan Tahunan yang dapat diketahui oleh masyarakat dan dilakukan pemeriksaan terhadap Yayasan. Hal ini berarti bahwa Yayasan harus bersikap terbuka dan tidak ada alasan untuk menyembunyikan atau merahasiakan masalah keuangan Yayasan, bahkan masalah kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan.

Sedangkan masalah-masalah yang menjadi polemik dengan adanya Undang-undang Yayasan tersebut meliputi:

- 1) Apa yang dimaksud dengan Tujuan Sosial dan Kemanusiaan?

Undang-undang Yayasan tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Yayasan. Ketidakadaan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, mengakibatkan tujuan tersebut harus dilihat dari kegiatan yang dilakukan.

- 2) Apa yang dimaksud dengan Kesalahan dan Kelalaian Organ Yayasan?

Pasal 39 dan 47 Undang-undang Yayasan memberikan kesan bahwa yayasan harus menganut doktrin "*duty of skill and care*". Artinya, bahwa

yayasan harus senantiasa benar dan tidak boleh melakukan kesalahan. Tentu saja, penerapan doktrin ini tidaklah mudah dalam memilih orang-orang yang akan didudukkan dalam Organ Yayasan. UU ini tidak memberikan ukuran/standar tentang kecakapan (*skill*) yang dibutuhkan untuk Organ Yayasan, dan juga batasan dari suatu perbuatan yang merupakan suatu kelalaian atau kealpaan. Sehingga pada akhirnya, penetapan keahlian dan atau kealpaan yang dilakukan oleh Organ Yayasan bersifat subyektif.

3) Itikad Baik

Pasal 35 dan 42 Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa Organ yayasan dalam melaksanakan tugasnya harus beritikad baik. Artinya, dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, atau kepentingan pihak ketiga tanpa izin atau sepengetahuan Yayasan. Dalam aplikasinya, hal tersebut sering bersamaan sehingga sulit memisahkannya apakah seorang Pengurus Yayasan berbuat untuk kepentingan dirinya atau kepentingan Yayasan.

4) Peraturan Pemerintah

Beberapa pasal dalam Undang-undang yayasan tersebut membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah (Pasal 9, 14, 15, 24, 27, 61 dan 70). Keterlambatan di dalam penerbitan berbagai Peraturan Pemerintah tersebut dapat menghambat perkembangan Yayasan, kepastian hukum, dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.

5) Kontra Prestasi bagi Organ Yayasan

Suatu masalah yang sering dikemukakan, apakah seorang Pengurus dapat memperoleh gaji, upah, atau honor tetap Yayasan. Undang-undang Yayasan dengan tegas menyatakan bahwa Pengurus tidak boleh menerima gaji, upah atau honor tetap Pasal 3 ayat 2 UU No. 16 tahun 2001). Pasal ini perlu mendapat penafsiran bahwa jika Pengurus Yayasan tersebut adalah “pelaksana harian” atau dengan istilah lain “Pengurus Harian”, maka ia dibenarkan menerima gaji, karena ia memberikan seluruh waktunya untuk mengurus Yayasan sehingga ia tidak dapat lagi mengerjakan pekerjaan lainnya. Kalau tidak diberikan gaji, upah atau honor tetap, maka pemerintah yang mengeluarkan UU Yayasan ini dipandang zhalim (Ais, 2002:39-53).

Jika diperhatikan secara seksama, pasal dan prinsip di atas akan

memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaannya. Tetapi pada sisi lain jelas akan memancing reaksi yang keras dan emosional dari pihak yang terkait dengan yayasan dengan komentar bahwa mereka bukan “malaikat” yang tidak memerlukan makan, minum, sandang dan kebutuhan lainnya. Sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di bawah naungan yayasan.

2. Eksistensi Madrasah Swasta

Pendidikan Islam (IKIP Malang, 1981:2), sebagai usaha dan karya manusia, berkembang seiring dengan dinamika dan perubahan pranata sosial. Jika ia mampu mengikuti irama perubahan, maka ia akan “*survive*”. Sebaliknya jika lamban, maka cepat atau lambat ia akan tertinggal dan ditinggalkan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa eksistensi pendidikan Islam merupakan salah satu syarat yang mendasar dalam meneruskan dan mengekalkan kebudayaan manusia (Zuhairini, 1991:152). Hal ini disebabkan karena pendidikan Islam, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, memegang amanat untuk membina dan membangun manusia Indonesia seutuhnya (UUD 1945 Hasil Amandemen). Dan secara yuridis, posisi pendidikan Islam berada pada posisi yang strategis, baik pada UUSPN No. 2 Tahun 1989 maupun UUSPN No. 20 Tahun 2003.

Mencermati pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas tersebut, terlihat bahwa pendidikan agama (Islam) tidak hanya menekankan pada pengembangan IQ, tetapi EQ dan SQ secara harmonis. Artinya, bahwa pendidikan Islam harus mampu melahirkan insan yang beriman-takwa, berakhlak mulia, dan memiliki kualitas intelektual yang tinggi. Upaya mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya melalui lembaga pendidikan Islam yang disebut dengan madrasah (Abu Luwis al-Yasu'i, cet-23, tt, 221).

Pada abad 21, madrasah di Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Pada persimpangan jalan itu, madrasah harus dan dapat mengambil pilihan menempuh jalan tertentu, yang mengandung implikasi dan konsekuensi tertentu. Dengan kata lain, berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit, yang tidak hanya berkaitan dengan persaingan madrasah dengan sekolah umum, tetapi juga dengan eksistensi madrasah itu sendiri di masa depan.

Dilema dan pilihan-pilihan sulit yang dihadapi madrasah banyak berkaitan dengan perkembangan internal madrasah, yang terutama muncul

dari perkembangan pendidikan nasional secara keseluruhan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 2003, dan kemudian penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004, serta Undang-undang Otonomi Daerah yang diikuti dengan otonomisasi pendidikan, misalnya, merupakan landasan dasar kebijakan arah pengembangan pendidikan nasional yang jelas sangat mempengaruhi perkembangan eksistensi madrasah baik dari segi kelembagaan maupun substansi pendidikannya.

Madrasah sebagai institusi pendidikan tidak dapat mengelak dari kebijakan reformasi pendidikan yang bersifat desentralistik. Manajemen berbasis sekolah di lingkungan madrasah merupakan bentuk pengelolaan pendidikan yang ditandai dengan otonomi yang luas pada tingkat madrasah yang disertai semakin meningkatnya partisipasi masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan aspek kelembagaan, madrasah tidak dapat melepaskan diri dari faktor lingkungan pendidikan (Pidarta, 2004:177) yang menjadi salah satu penentu keberhasilan lembaga pendidikan itu sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Lingkungan pendidikan yang dimaksud adalah masyarakat. Ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitarnya. Madrasah merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh warga masyarakat tentang pengembangan putra-putri mereka. Hampir tidak ada orang tua siswa yang mampu membina sendiri putra-putri mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang secara total, integratif, dan optimal seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya lembaga-lembaga pendidikan mengambil alih tugas ini. Lembaga pendidikan memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada masyarakat.

Lembaga pendidikan sesungguhnya melaksanakan fungsi rangkap terhadap masyarakat yaitu memberikan layanan dan sebagai agen pembaru. Dikatakan fungsi layanan karena lembaga pendidikan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat berupa memberikan pendidikan dan pengajaran kepada generasi muda. Sedangkan sebagai agen pembaharu bahwa lembaga pendidikan harus selalu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan agar hasilnya lebih efektif. Selanjutnya dengan mengadakan kontak hubungan dengan masyarakat, akan memudahkan lembaga pendidikan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungannya yang meliputi aspek politik, sosial dan budaya. Lembaga pendidikan lebih mudah menempatkan dirinya di masyarakat dalam arti

dapat diterima sebagai bagian dari milik warga masyarakat serta dapat mengikuti arus dinamika masyarakat lingkungannya. Dengan demikian, lembaga pendidikan tersebut akan dapat bertahan lama dan mempunyai nama baik di hati masyarakat. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang tidak mempunyai nama baik di masyarakat, pada akhirnya akan mati karena tidak ada lagi masyarakat yang simpatik dan mau mengantarkan anaknya ke lembaga pendidikan tersebut.

Sejalan dengan konsep di atas, pemerintah menyerukan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Seruan ini mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan tidak boleh menutup diri, melainkan selalu mengadakan kontak hubungan dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya sebagai penanggung jawab pendidikan.

Selama ini madrasah dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam, baik yang berada di dalam maupun di luar kelembagaan pesantren (Madjid, 1997:19). Keberadaan madrasah, terlepas dari berbagai keterbatasan yang dihadapinya, harus diakui telah turut membina dan mengembangkan SDM kaum muslimin baik dalam bidang pengetahuan agama, maupun pengetahuan umum. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang sebagian besarnya didirikan, diasuh, dibina dan dikembangkan oleh kaum muslimin sendiri, madrasah dalam berbagai jenjang telah berperan besar dalam upaya-upaya meningkatkan kecerdasan dan, bahkan, martabat kaum muslimin.

Berkaitan dengan peningkatan antusiasme keagamaan yang dikemukakan di atas, dalam beberapa tahun terakhir ini, bahkan muncul dan berkembang minat di kalangan masyarakat muslim Indonesia untuk membangun madrasah unggulan dalam berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya sudah jelas, yakni mencapai keunggulan (*excellence*) tidak hanya dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga dalam bidang ilmu-ilmu umum. Tugas yang dipikul madrasah pada akhirnya, adalah mewujudkan anak didik yang memiliki pengetahuan keislaman dan ilmu-ilmu lain; dan sekaligus dapat mengamalkan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan begitu, mereka selanjutnya dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat muslim Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.

Seiring dengan peningkatan minat dan harapan masyarakat muslim umumnya terhadap madrasah, memandang tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa dan dalam upaya untuk meningkatkan penguasaan sains-teknologi, kebijakan pendidikan nasional beberapa tahun terakhir ini

mengharuskan madrasah, khususnya madrasah Aliyah, untuk juga lebih mengembangkan jurusan-jurusan umum, dan keterampilan. Madrasah, dalam konteks ini, dipandang bukan lagi hanya merupakan lembaga transmisi ilmu-ilmu keagamaan Islam, tetapi juga tempat untuk menanamkan apresiasi, dan bahkan juga menaburkan bibit-bibit penguasaan, keterampilan dan keahlian dalam bidang sains-teknologi. Tujuan pokok yang dibayangkan dengan pengembangan madrasah dalam arah ini tidak hanya untuk menciptakan interaksi dan integrasi keilmuan yang lebih intens dan lebih padu antara “ilmu-ilmu agama” dengan ilmu-ilmu umum”, termasuk yang berkaitan dengan penguasaan sains-teknologi. Dalam kerangka ini, anak didik yang dihasilkan madrasah diharapkan tidak hanya mempunyai perspektif keilmuan yang integratif dan komprehensif-antara bidang ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu keduniaan-tetapi juga memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk menghadapi masa industri dan pasca-industri.

Selanjutnya, secara kuantitatif, jumlah madrasah kelihatannya meningkat; berbagai madrasah baru muncul di mana-mana, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera. Kondisi perkembangan madrasah dapat dilihat secara umum sebagai berikut:

- 1) Madrasah swasta lebih banyak dari madrasah negeri dan kebanyakan berada di pedesaan dengan latar belakang pendidikan sosial ekonomi orang tua yang rata-rata rendah.
- 2) Kemampuan pengelolaan (administrasi manajemen) belum seperti yang diharapkan dan tingkat pembiayaan pendidikan masih sangat memprihatinkan.
- 3) Tingkat pendidikan guru kebanyakan belum sepadan dengan persyaratan yang ditetapkan dan apabila dilihat dari kemampuan metodologi masih rendah, ditambah masih kurangnya tenaga kependidikan yang diperlukan.
- 4) Kemampuan mengajar guru madrasah kebanyakan masih menekankan pada pengenalan konsep yang bersifat kognitif dan belum menekankan pada perilaku beragama, etika sosial dan akhlak mulia.

Pada saat ini, di Indonesia, Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 24.979 yang 24.370 atau 97,6 % adalah swasta; Madrasah Tsanawiyah (MTs) berjumlah 8.001 yang 7.499 atau 92,8 % adalah swasta; dan Madrasah Aliyah (MA) 2.928 yang 2.573 atau 88 % adalah swasta. Apabila dilihat

dari jumlah siswa, maka MI swasta yang berjumlah 3.008.868 atau 79,65 % dari seluruh siswa MI yang berjumlah 3.777.734 siswa. MTs swasta mempunyai jumlah siswa 940.515 atau 75 % dari seluruh siswa MTs yang berjumlah 1.241.977 siswa. Sementara MA swasta mempunyai jumlah siswa 268.169 atau 56,68 % dari seluruh siswa MA yang berjumlah 473.111 siswa. Seluruh siswa madrasah (MI, MTs, dan MA) berjumlah 5.633.940 siswa adalah sebagai aset umat, bangsa dan Negara yang sangat besar dan tentunya juga berhak memperoleh pendidikan dengan sebaik-baiknya agar dapat melanjutkan pendidikan dan terjun ke dunia kerja dengan selayaknya pula (Shaleh, 2004:23).

Sesungguhnya hal yang menarik dari perkembangan ini, pada sisi lain, munculnya gejala pertumbuhan madrasah-madrasah unggul dalam bidang materi, metode dan manajemen. Masih dalam konteks perkembangan kuantitatif ini adalah terjadinya perpindahan murid-murid sekolah umum dalam berbagai jenjang ke madrasah di berbagai daerah. Sementara itu, perkembangan fisik bangunan madrasah juga mengalami kemajuan-kemajuan yang cukup *observable*. Banyak madrasah di berbagai tempat, apakah di kota atau di desa, mulai mempunyai gedung-gedung atau bangunan yang megah dan, lebih penting lagi, sehat dan kondusif sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang baik. Dengan demikian, citra yang pernah disandang madrasah yang memiliki bangunan seadanya, atau bahkan sudah hampir rubuh dan tidak sehat semakin memudar. Sehingga predikat madrasah sebagai lembaga pendidikan tradisional lambat laun akan hilang dengan sendirinya.

Fenomena ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kemampuan swadaya dan swadana masyarakat muslim sebagai hasil dari kemajuan ekonomi yang dicapai oleh kaum muslim. Tentu saja semua itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat muslim yang berada di sekitar madrasah yang terinternalisasi dalam sebuah wadah yang disebut “Yayasan”.

Korelasi antara yayasan dengan sekolah atau madrasah (Zuhairani, 1986:71) yaitu bahwa pada masa lalu, kebijakan pemerintah terhadap sekolah-sekolah atau madrasah swasta mengharuskan adanya yayasan yang menaunginya, seperti sekolah-sekolah yang berada di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dengan Akte Notaris Joenoes E. Moegimon No. 103/1986, walaupun kondisi riil sekolah-sekolah tersebut pada awalnya didirikan secara perorangan atau keluarga.

Atas dasar itulah, di berbagai daerah di Indonesia, bermunculan

yayasan pendidikan yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan Islam baik berbentuk sekolah maupun madrasah dengan nama, corak dan ragam sesuai dengan keinginan dan kemufakatan para pendirinya. Pada umumnya yayasan pendidikan Islam yang ada menaungi lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti:

- 1) Taman Kanak-kanak dan atau Raudhatul Athfal
- 2) Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyyah
- 3) Sekolah Menengah Pertama dan atau Madrasah Tsanawiyah
- 4) Sekolah Menengah Umum dan atau Madrasah Aliyah serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- 5) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)

Jumlah madrasah yang didirikan oleh yayasan pendidikan (madrasah swasta) cukup banyak. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Departemen Agama RI Tahun Pelajaran 2003-2004, disebutkan bahwa jumlah madrasah yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah 621 madrasah, dengan perincian sebagai berikut: MI berjumlah 112 yang 56 atau 50 % adalah swasta; MTs 354 yang 248 atau 70 % adalah swasta; dan MA 155 yang 118 atau 76,1 % adalah swasta (Ditjen Bagais, 2004:17). Data ini setidaknya menunjukkan bahwa jumlah madrasah yang didirikan oleh yayasan pendidikan (dalam hal ini diistilahkan dengan madrasah swasta) lebih banyak dari jumlah madrasah yang didirikan oleh pemerintah (dalam hal ini diistilahkan dengan sebutan madrasah negeri), terutama di daerah-daerah pedesaan atau daerah terisolir.

Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan yayasan pendidikan begitu dirasakan oleh masyarakat Islam di Sumatera Barat. Dengan sekolah atau madrasah yang didirikan oleh yayasan pendidikan, masyarakat merasakan manfaat yang besar terutama menyangkut kebutuhan melanjutkan sekolah bagi putra-putri mereka. Apalagi secara realitas bahwa sekolah atau madrasah yang didirikan oleh pemerintah memiliki daya tampung yang terbatas, sehingga bagi anak yang tidak diterima pada sekolah negeri dapat melanjutkan ke sekolah swasta yang ada. Dengan demikian proses pendidikan mereka tidak terputus. Selain itu, bahwa dengan adanya sekolah atau madrasah swasta, terbuka peluang bagi tenaga pendidik dari berbagai disiplin ilmu baik alumni Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP/IKIP) dapat mengabdikan ilmu mereka pada lembaga-lembaga tersebut.

Berdasarkan realitas sejarah, di awal kemerdekaan, madrasah

memang terus hidup secara sederhana dan apa adanya karena tidak mendapat bantuan sepenuhnya dari pemerintah, yang ada hanya sebatas dorongan moral saja. Adanya perhatian pemerintah baru diwujudkan dengan keluarnya peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 tentang pemberian bantuan kepada madrasah. Tetapi hal tersebut tidak terealisasi sejak tahun 1965 dan di masa orde baru dijadikan sebagai bantuan lepas sampai sekarang (Shaleh, 2004:22). Selain itu juga, madrasah swasta hidup dan berkembang didukung oleh masyarakat yang sosial ekonominya rendah. Kebanyakan orang tua siswa madrasah adalah petani, hidup secara tradisional, berpendidikan rendah dan kebanyakan hidup di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Sarana dan prasarana madrasah sangat rendah dan tenaga guru kebanyakan dilatarbelakangi oleh semangat ibadah yang sangat tidak selektif terhadap persyaratan yang diperlukan. Keadaan demikian mengakibatkan madrasah sulit berkembang dan tidak mampu bersaing dengan sekolah lainnya.

Mengenai pendirian madrasah swasta didasarkan atas SK. Menteri Agama No. 5 Tahun 1977 yang pendirian pelaksanaannya dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/69/77. Dalam hubungan ini, madrasah swasta diartikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum, dan diselenggarakan oleh organisasi, yayasan, badan atau perorangan sebagai pengurus atau pemiliknya (Shaleh, 2004:30).

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) tersebut, dapat dipahami bahwa yayasan adalah salah satu lembaga penyelenggara pendidikan yang sah dalam mengelola madrasah swasta. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata yayasan pendidikan yang menaungi madrasah swasta berkembang cukup pesat.

Mengenai eksistensi madrasah swasta dengan lahirnya Undang-undang Yayasan tersebut dapat dijelaskan berikut ini: Tujuan membantu dunia pendidikan, pastilah termasuk di dalam tujuan sosial dan kemanusiaan. Tidakkah dipersoalkan dari mana suatu lembaga pendidikan menerima sumbangan, atau dengan kata lain sumber penghasilannya, tetapi yang penting adalah tujuannya. Persoalannya menjadi lain bila sekolah atau lembaga pendidikan itu diselenggarakan bagi keuntungan para pemiliknya. Tujuannya haruslah bagi promosi pendidikan untuk kepentingan umum dan bukan bagi kepentingan pribadi. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan

bahwa pemasukan “uang sekolah” tidak terkontrol. Yayasan yang memajukan pendidikan haruslah memajukan pendidikan masyarakat pada umumnya atau suatu bagian dari masyarakat yang tidak dipilih berdasarkan alasan-alasan hubungan pribadi, koneksi dengan penyumbang atau pengurusnya. Akan tetapi, mengenai hubungan pribadi (*personal nexus*) antara penyumbang dengan yang disumbang ini ada perbedaan pandangan. Namun, yang paling penting diperhatikan di sini adalah unsur kepentingan umum/manfaat publik (*public benefit*).

Terkait dengan kasus Sumatera Barat, sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, bagaimanapun kebijakan pemerintah dalam melahirkan Undang-undang Yayasan akan berdampak terhadap eksistensi madrasah swasta yang berada di bawah naungannya. Oleh karena keterbatasan penulis dalam mengungkapkan permasalahan tersebut, tentu saja perlu penelitian lebih lanjut.

C. Penutup

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada satu sisi memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaannya. Namun pada sisi lain, hal tersebut menimbulkan persoalan berupa reaksi yang keras dan emosional dari para pemilik dan pengelola Yayasan, karena UU tersebut terlalu mengikat gerak mereka selama ini. Reaksi yang keras dan emosional tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap kelangsungan lembaga pendidikan (dalam hal ini madrasah swasta) yang berada di bawah naungannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung Undang-undang Yayasan tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan madrasah swasta di Indonesia. Dampak tersebut dapat berupa kemajuan dalam berbagai aspeknya, karena dengan UU tersebut, Yayasan menjadi lebih proporsional dalam memberikan hak-hak madrasah yang selama ini dikuasai oleh Pemilik Yayasan. Namun pada sisi lain, UU tersebut menyebabkan para Pemilik Yayasan kurang bergairah dalam mengelola lembaga pendidikan yang dinaunginya, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kemunduran bagi lembaga pendidikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Chatamarrasyid, *Badan Hukum Yayasan: Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Al-Kalaly, As'ad Muhammad, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al-Yasu'i, Abu Luwis, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Munjid Fi al-'Alam*, Cet-23, Beirut: Dar al-Masyriq, tt..
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Anwar, Syaiful, *Makalah Seminar tentang UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan: Problem dan Solusi*, Malang: PP LP Ma'arif NU, 2002.
- Bagian data dan Informasi Pendidikan, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2003-2004*, Jakarta: Ditjen Bagais Depag RI, 2004.
- Echols, John M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Fattah, Nanang, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Isjoni, *Serial Manajemen: Arah Pendidikan Riau (Membangun Kemandirian Sekolah)*, Pekanbaru: Unri Press, 2003.
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Muchsin, *Permasalahan dan Solusi Akibat UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Makalah Rakernas Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Malang, 2002.
- Nakosteen, Mehdi, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat; Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Edisi Indonesia, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Noor, Syakirman M, *Menuju Masyarakat Madani Sebuah Pengantar dalam Indonesia Baru Menuju Masyarakat Madani*, Padang: Baitul Hikmah Press, 2000.

- Pidarta, Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Shaleh, Abdul Rachman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia NO. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.
- Sekretariat Negara RI, *UUD 1945 Hasil Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Shaleh, Abdul Rachman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia NO. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.
- Sekretariat Negara RI, *UUD 1945 Hasil Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Susilo, Madya Eko dan RB. Kasihadi, *Dasar-dasar Pendidikan*, Semarang: Efhar Publisng, 1988.
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Tim Dosen FIP IKIP Malang, *Kapita Selekt-Pengantar Dasar-dasar Kependidikan*, Malang: IKIP Malang, 1981.
- Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1977
- Yatim, dkk., Badri, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam Depag RI, 1999/2000.
- Yunus, Mahmud, *Perbandingan Pendidikan Modern di Negara Islam dan Intisari Pendidikan Barat*, Cet. I, Jakarta: Al-Hidayah, 1979.
- Zuharaini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. II, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1986.

MANAJEMEN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN ISLAM

Dr. Siti Halimah, M.Pd.

A. Pendahuluan

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Islam (LPTKI) merupakan lembaga pendidikan yang mendidik para calon guru dan tenaga kependidikan profesional lainnya. Sebagai lembaga pendidikan profesional sudah semestinya pengelolaan pendidikan di lembaga ini dirancang dan dilaksanakan oleh orang yang ahli dalam bidang profesi kependidikan. Ini perlu diupayakan mengingat pendidikan profesional sulit berhasil bahkan cenderung salah dan keliru apabila tidak dikelola ahli bidang kependidikan. Sesungguhnya: "kesalahan dan kekeliruan di pendidikan guru akan berdampak pada rusaknya satu generasi ke generasi berikutnya (Hamalik, tt, 9). Demikian juga halnya, pesan keagamaan melalui Sabda Nabi saw. menganjurkan, 'agar tidak menyerahkan suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya sebab akan berakibat pada suatu kehancuran'.

Untuk bisa menjamin mutu pendidikan di lembaga pendidikan guru, maka pelaksanaan pendidikan di lembaga ini perlu diatur dengan menetapkan standar minimal sebagaimana termuat dalam buku Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan (SPTK) Abad-21 yang menyatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan di LPTK adalah untuk membentuk, membina, mengembangkan lembaga, program serta manajemen LPTK yang bertujuan untuk bisa melahirkan lembaga tenaga kependidikan yang handal untuk berbagai profesi kependidikan dan ilmu pendidikan dengan kualitas yang dipercayai oleh masyarakat (Depdiknas, 2002:3).

Rumusan tujuan SPTK Abad-21 mengindikasikan tuntutan akan kualitas pendidikan guru yang terstandarisasi secara nasional bahkan internasional, syarat nilai keagamaan dan kebangsaan yang luhur menjadi suatu keharusan. Ini dilakukan agar kualitas calon guru yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk mengemban tugas-tugas pendidikan secara profesional, memiliki sikap dan kepribadian yang utuh.

Fakultas Tarbiyah sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Islam (LPTKI) berupaya merealisasikan visi dan misi SPTK abad-21. Upaya tersebut tercermin dalam tujuan pelaksanaan pendidikan di fakultas Tarbiyah yang bertujuan membentuk sarjana muslim yang berakhlak mulia, menguasai pengetahuan agama Islam serta cabang-cabang pengetahuan dalam bidang pendidikan Islam dan Keguruan. Realisasi dari tujuan tersebut secara rinci diuraikan dalam butir-butir fungsi pendidikan di fakultas Tarbiyah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ketrarbiyahan (pendidikan)
- b. Membina tenaga-tenaga yang ahli dalam pendidikan agama dan umum.
- c. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan agama, menganalisis masalah-masalah pendidikan agama serta keguruan yang berkembang untuk mencari pemecahannya masing-masing sesuai dengan kemajuan IPTEK.
- d. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bidang ketrarbiyahan (pendidikan), (Panduan Akademik IAIN-SU Tahun Akademi 2004-2005, h.50).

Secara umum pendidikan di LPTKI maupun LPTK Umum memiliki kesamaan tujuan yaitu bertekad untuk menghasilkan lulusan tenaga kependidikan profesional dalam berbagai ilmu dan teori pendidikan serta menguasai sejumlah keterampilan keguruan yang memadai, memiliki sikap dan kepribadian yang utuh sebagai seorang pendidik. Namun secara khusus, pendidikan di LPTKI memiliki tujuan pendidikan yang berbeda dari LPTK Umum. Perbedaan tersebut tercermin dari orientasi pendidikan di LPTKI yang syarat dengan muatan normatif dan lebih menekankan pada pembentukan insan *kaffah* merupakan tujuan khusus yang harus dicapai oleh setiap lulusan. Insan *kaffah* tidak lain adalah individu yang berjiwa diri, berkomitmen dan konsisten terhadap keyakinan nilai-nilai Illahiyah yang mempribadi.

Berpedoman pada tujuan tersebut, maka pengelolaan pendidikan di LPTKI selain berupaya membekali para lulusannya dengan sejumlah

kompetensi yang memadai agar bisa bersaing di pasar global, lebih dari itu berupaya membekali setiap lulusannya agar bisa tetap hidup dan bermasyarakat atas dasar tatanan sistem nilai (*value driven*) dan bukan sekedar hidup tanpa arah dan kendali yang jelas.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, pendidikan di LPTKI, maka institusi ini perlu dikelola dengan mengintegrasikan model pendidikan nilai dan keteladanan. Ini perlu diwujudkan dalam setiap proses pembelajaran sehubungan dengan bagi mahasiswa calon guru, selain dituntut untuk sukses membelajarkan dirinya, juga dituntut untuk sukses membelajarkan diri orang lain. Dalam kondisi demikian strategi pendidikan nilai perlu diupayakan yang dilakukan dengan cara: (1) mengintegrasikan pendidikan nilai ke dalam program dan aktivitas pembelajaran; (2) mengintegrasikan pendidikan nilai ke dalam *subject matters*; dan (3) pendidikan keteladanan sebagai *hidden curriculum* ditampilkan dalam bentuk pemberian contoh-contoh teladan dari seluruh pelayan dan praktisi pendidikan.

Pemberian contoh keteladanan dalam pendidikan Islam memiliki peranan penting sehubungan dengan dalam perspektif sejarah keagamaan membuktikan bahwa keberhasilan nabi Muhamamd saw dalam mendidik umat Islam atau generasi muslim awal tidak dapat dilepaskan dari kemampuan beliau dalam memberi dan mempraktikkan keteladanan. Sebagai seorang pendidik, nabi saw. tidak pernah meminta umatnya melakukan sesuatu, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun akhlaq, sebelum beliau sendiri melakukan dan memberi contoh tentang pengamalannya. Perkataannya tidak pernah bertentangan dengan perbuatannya. Seluruh nilai-nilai luhur yang diajarkannya dapat dilihat dalam perilaku kesehariannya. Karenanya, Allah swt dalam al-Quran surah Al Ahzab ayat 21, berfirman yang artinya: 'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dia banyak menyebut Allah'.

B. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Kompetensi (KBK) di LPTKI

Akhir-akhir ini dunia perguruan tinggi telah disibukkan oleh perbincangan agar menyelenggarakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) untuk merespon SK Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Mahasiswa, SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi, serta SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Dalam Kepmendiknas 045/U/2002, menyebutkan bahwa kompetensi yang diharapkan dari lulusan sarjana S1 meliputi:

1. Kompetensi utama, yaitu merupakan *core competencies* yang diharapkan dikuasai oleh lulusan dari bidang studi tersebut yang kemudian disebut sebagai kurikulum inti.
2. Kompetensi pendukung, yaitu merupakan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang *core competencies* yang diharapkan.
3. Kompetensi lain, yaitu kompetensi yang dianggap perlu untuk melengkapi kedua kompetensi di atas.

Berpedoman pada Kepmendiknas tersebut dirumuskan *core competencies* PTAI sebagai berikut:

1. Kompetensi dasar, yaitu merupakan *core competencies* yang diharapkan dikuasai oleh setiap lulusan PTAI dari berbagai program studi apa pun atau disebut kurikulum inti PTAI.
2. Kompetensi utama, yaitu merupakan *core competencies* yang diharapkan dikuasai oleh lulusan program studi tertentu atau disebut kurikulum inti program studi.
3. Kompetensi pendukung, yaitu merupakan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang *core competencies* yang diharapkan.
4. Kompetensi lain, yaitu kompetensi yang dianggap perlu untuk melengkapi ketiga kompetensi di atas (Furchan, dkk, 2005:17-18).

Berbagai kompetensi tersebut di atas diperlukan untuk: (1) memberikan *basic competencies* ilmu-ilmu keislaman sebagai ciri khas dari perguruan tinggi agama Islam, sekaligus sebagai landasan dan pendasaran bagi pengembangan bidang-bidang studi yang dikembangkan pada jurusan/program studi yang ada; (2) memberikan kemampuan adaptasi terhadap ketidakpastian lapangan kerja, sifat pekerjaan, dan perkembangan masyarakat yang semakin tidak menentu; (3) mengantisipasi pekerjaan dengan persyaratan kompetensi yang sifatnya kompetitif dan tidak mengenal batas-batas fisik wilayah, negara dan pemerintah; (4) memfasilitasi proses pendidikan sepanjang hayat, dalam bentuk proses belajar menemukan *method of inquiry* seseorang.

Atas dasar itu, maka pengembangan kurikulum di LPTKI perlu menitik-

beratkan pada pencapaian target kompetensi daripada penguasaan materi semata. Untuk bisa merealisasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dalam keseluruhan proses pembelajaran, maka seluruh praktisi pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan memahami kurikulum jurusan/program studi
- b. Menyusun silabus yang sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi jurusan/program studi
- c. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang disusun
- d. Mengumpulkan berbagai gagasan dengan sesama praktisi mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran
- e. Menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, termasuk didalamnya melakukan penilaian hasil belajar.

Dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran, penerapan manajemen pembelajaran harus dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Dengan pengertian proses pembelajaran perlu diawali dengan proses penyusunan perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk silabus dan rancangan pembelajaran. Kemudian direalisasikan secara konsisten dalam proses pembelajaran di kelas.

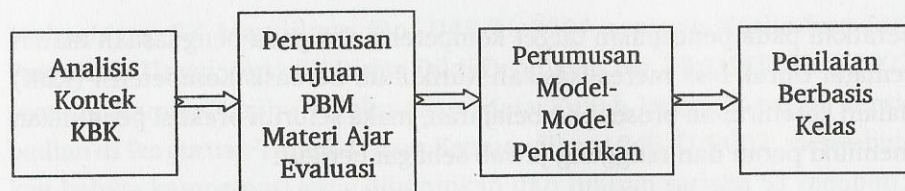
Untuk mendapatkan silabus yang baik, maka dalam menyusun silabus mata kuliah diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Tim pengembang dan perekayasa yang ditugaskan untuk menyusun silabus mata kuliah terlebih dahulu mengumpulkan informasi dan mempersiapkan kepustakaan atau referensi yang sesuai untuk mengembangkan silabus mata kuliah. Pencarian informasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi dan informasi seperti multimedia dan internet.

b. Pelaksanaan

Menurut Muahaimin, dalam menyusun silabus mata kuliah, perlu terlebih dahulu menganalisis seluruh perangkat Kurikulum Berbasis Kompetensi sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut (Muhaimin, 2003:191):



Pertama, memahami keluruhan konteks Kurikulum Berbasis Kompetensi, telaah perangkat kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan mendiskripsikan tentang hakikat Kurikulum Berbasis Kompetensi, struktur kurikulum, dan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi ajar dengan menggunakan perangkat kurikulum dan hasil belajar yang memuat tiga komponen utama, yaitu: kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator hasil belajar.

Ketiga, menentukan langkah-langkah pembelajaran dengan mengacu pada seperangkat kegiatan belajar mengajar yang mendiskripsikan model-model pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung.

Keempat, menentukan cara dan alat penilaian menggunakan perangkat penilaian yang menyajikan dan mendiskripsikan tentang sistem penilaian yang sesuai dengan misi Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Silabus yang disusun oleh tim pengembang perlu memperhatikan desain, pendekatan, ruang lingkup, organisasi materi, organisasi pengalaman belajar, dan alokasi waktu yang sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan komponennya.

c. Perbaikan

Draf silabus setiap mata kuliah perlu dikaji ulang sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Para pengkaji dapat terdiri atas para spesialis kurikulum, ahli materi, ahli metodik atau didaktik, ahli penilaian, psikolog, guru atau instruktur, staf profesional, dan perwakilan mahasiswa.

d. Pemantapan

Pengkajian ulang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki draf awal. Apabila telah memenuhi kriteria cukup baik, maka silabus dapat segera digunakan dan direalisasikan ke dalam kegiatan pembelajaran.

e. Penilaian silabus

Penilaian pelaksanaan silabus perlu dilakukan secara berkala dengan menggunakan model-model penilaian kurikulum yang selama ini banyak digunakan oleh para ahli kurikulum. Diantara model yang dapat digunakan dalam penilaian silabus adalah model "kesesuaian". Model ini menjadi pilihan dikarenakan model ini sangat praktis untuk menggali apakah semua pesan dalam silabus yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan harapannya. Penilaian terhadap silabus dimaksudkan untuk menggali kekuatan dan kelemahan silabus tersebut, baik dari kelayakan dokumen maupun implementasinya.

C. Landasan Pengembangan KBK di LPTKI

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di LPTKI sekurang-kurangnya berpatokan pada empat landasan dasar, yaitu: landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, serta perkembangan ilmu dan teknologi".

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis, berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan, siapa pendidik dan terdidiknya, apa isi pendidikan dan bagaimana proses interaksinya. Atas dasar itu, pengembangan kurikulum di LPTKI perlu mempertimbangkan siapa saja tenaga ahli yang dipandang berkompeten dan ahli dalam bidangnya, bagaimana karakteristik peserta didik yang dikehendaki, materi apa saja yang perlu dikembangkan dan model interaksi pembelajaran yang bagaimana agar tujuan pendidikannya dapat diwujudkan.

Atas dasar berbagai hal tersebut, maka pengembangan KBK di LPTKI, perlu merumuskan beberapa pertanyaan dasar yang perlu dijawab, yaitu:

Pertama, orang yang berkompeten dalam hal apa yang akan dibentuk melalui program pendidikan? Jawaban terhadap pertanyaan ini mengindikasikan bahwa, diperlukannya upaya untuk mengidentifikasi kompetensi, dengan cara menetapkan dan mendiskripsikan ciri-ciri, jenis dan mutu kompetensi yang harus dimiliki lulusan agar mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tugas atau pekerjaan tertentu atau melanjutkan pendidikan.

Kedua, andaikata lulusan yang berkompeten itu harus melaksanakan tugasnya, kemampuan dasar apa dan bagaimana yang dia harus lakukan untuk memperolehnya? Jawaban atas pertanyaan ini mengharuskan agar suatu program studi secara jelas merumuskan tujuan pendidikan, memperlakukan kompetensi yang telah diidentifikasi sebagai tujuan institusional, yang kemudian dirumuskan dalam tujuan-tujuan kurikuler dan tujuan institusional dengan cara menjabarkan kompetensi tersebut.

Ketiga, agar mahasiswa dapat mewujudkan dan mencapai kemampuan dasar tersebut, hal-hal, persoalan-persoalan, masalah-masalah, latihan-latihan apa saja yang perlu dibahas dan dikerjakannya di dalam proses kegiatan pembelajaran? Jawaban terhadap pertanyaan ini menggarisbawahi perlunya menetapkan topik dan sub topik, yaitu mengidentifikasi pokok bahasan (uraian materi pembelajaran) sebagai isi atau pengalaman belajar sebagaimana langkah ketiga di atas.

Keempat, untuk dapat mewujudkan dan mencapai kemampuan dasar dengan berbagai materi pembelajaran dan uraian materinya, maka kegiatan-kegiatan apa yang harus dialami peserta didik dalam proses pembelajaran? Jawaban terhadap pertanyaan ini menggarisbawahi perlunya menyusun pengalaman belajar, yaitu menyediakan pengalaman-pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa untuk dapat mewujudkan dan mencapai kemampuan dasar tersebut di atas, baik pengalaman belajar dalam kelas maupun di luar kelas.

Selain itu, sesuai dengan karakteristik kelembagaannya, maka landasan filosofis pengembangan KBK di LPTKI setidaknya-tidaknya perlu bertolak dari landasan filosofis sebagai berikut:

- 1) *Secara ontologis*, manusia memiliki potensi jasmaniyah, nafsiyah yang mengandung dimensi *al-nafsu*, *al-'aql* dan *al-qalb*, sehingga ia siap mengadakan hubungan vertikal dengan *hablum min Allah*. Manusia diciptakan untuk dapat mengemban tugas di muka bumi, baik sebagai hamba Allah maupun khalifahNya. Untuk dapat mewujudkan fungsi kekhalifahannya, maka seseorang harus: (1) memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan; (2) bisa melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai ilmu dan keterampilan yang dimilikinya; (3) bisa menemukan jati dirinya; dan (4) bisa bekerjasama dengan orang lain, berbuat sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Karena itu, sebagai khalifah manusia dituntut untuk memiliki pandangan hidup sebagai muslim yang dikembangkan dalam sikap hidup dan dimanifestasikan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari.

- 2) *Secara epistemologis*, pengembangan KBK memiliki dasar rasional tertentu, yaitu: (1) siapa yang akan dijadikan peserta didik; (2) apa kompetensi hasil didik, sebagai apa; (3) siapa yang membutuhkan hasil didik, berapa jumlahnya, dan bagaimana jenjang karir yang tersedia di masyarakat?; dan (4) bagaimana proses pendidikan agar tujuan yang diinginkan terwujud? Atas dasar itu, pengembangan KBK dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:
 - a) Lulusan yang kompeten dalam hal apa yang akan dibentuk melalui program pendidikan?
 - b) Andaikata lulusan yang berkompeten itu harus melaksanakan tugas/pekerjaannya, kemampuan-kemampuan dasar apa dan bagaimana yang harus ditempuh?
 - c) Apa indikator-indikator atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah sukses dalam mencapai kemampuan dasar dan hasil belajar yang telah ditetapkan?
 - d) Agar mahasiswa dapat mencapai hasil belajar atau mewujudkan indikator-indikator hasil belajar tersebut, maka hal-hal, masalah-masalah, latihan-latihan apa yang harus dibahas dan/atau dikerjakan oleh mereka dalam kegiatan belajar mengajar? Untuk mengkaji komponen-komponen tersebut, maka perlu mengidentifikasi substansi kajian atau pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai *content* yang perlu dipelajari dan dialami oleh mahasiswa dalam belajarnya.
 - e) Untuk dapat mencapai hasil belajar atau mewujudkan indikator-indikator hasil belajar dengan berbagai pokok bahasan dan sub pokok bahasan tersebut, maka kegiatan-kegiatan apa yang harus dialami mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan bagaimana cara menilai keberhasilannya?
 - f) Apa saja sarana dan sumber belajar, tenaga kependidikan yang seperti apa dan bagaimana, dan berapa biaya yang diperlukan, serta apa peran dan tanggung jawab pimpinan, unit-unit, dan lain-lain untuk mencapai hasil belajar atau untuk mewujudkan indikator-indikator hasil belajar tersebut?
 - g) Berapa jam/sks yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil belajar atau mewujudkan indikator-indikator hasil belajar tersebut?
- 3) *Secara aksiologis*, pengembangan KBK diarahkan pada pengembangan

ke-mampuan menjalankan tugas-tugas pekerjaan tertentu. Tugas/pekerjaan itu bisa berbasis pada: (1) kebutuhan pemerintah dan/atau kebutuhan *users* (para pengguna) jasa hasil didik; (2) kebutuhan pengembangan akademik atau keilmuan; (3) kebutuhan jurusan/program studi; dan (4) kebutuhan individu/peserta didik (mahasiswa).

b. Landasan Psikologis

Landasan psikologis, berkaitan dengan bahwa pengembangan kurikulum perlu mempertimbangkan kondisi psikologis peserta didik yang memiliki perbedaan tahap perkembangan, latar belakang sosial budaya, dan juga faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Dalam keadaan demikian, landasan pengembangan kurikulum di LPTKI perlu mempertimbangkan keragaman intelektual peserta didik dalam mewujudkan bidang keahliannya. Dengan pengertian, proses pembelajaran yang dikembangkan perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam batas rasional kepada seluruh peserta didik untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang dituju.

Selain itu, sehubungan mahasiswa merupakan peserta didik dewasa, maka perlu mempertimbangkan karakteristik belajar orang dewasa. Untuk berhasil membelajarkan orang dewasa, Thompson, dkk (1992:5) menganjurkan, agar pelatihan/pendidikan yang dilakukan dihubungkan dengan masalah dirinya, memberikan pengalaman yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran, memberi pengetahuan dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dengan segera, memberi orientasi pembelajaran yang tertuju pada satu penugasan dan masalah, pemberian motivasi berkaitan dengan masalah insentive dan keinginan diri.

c. Landasan Sosial Budaya

Landasan sosial budaya, dimana pendidikan pada hakikatnya dilandasi oleh tiga sifat dasar penting, yaitu: *Pertama*, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. *Kedua*, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. *Ketiga*, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan dan masyarakat.

Dalam keadaan demikian, pengembangan kurikulum di LPTKI perlu mengembangkan pembelajaran yang mempersiapkan setiap lulusannya untuk dapat membina dan mengembangkan masyarakat Islam dalam

berbagai sektor kehidupan. Karenanya, dalam menyusun kurikulum atau program perlu bertolak dari masalah yang dihadapi dalam masyarakat sebagai isi pendidikan. Selanjutnya, proses atau pengalaman belajar mahasiswa dilakukan dengan berupaya mencari pemecahan terhadap masalah tersebut. Dengan cara ini nilai-nilai ajaran Islam dapat terpelihara dan terinternalisasi dalam setiap bentuk tindakan dan perilaku sosial masyarakatnya.

d. Landasan Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Landasan perkembangan ilmu dan teknologi, dimana pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi akan membawa beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, perkembangan pendidikan menuntut peranannya secara langsung maupun tak langsung memberikan materi/isi atau bahan mengikuti perubahan-perubahan dan tuntutan dari kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam kondisi demikian, pengembangan kurikulum di fakultas Tarbiyah perlu berupaya menyiapkan calon guru yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi dalam pembelajaran agama serta memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai standar mutu nasional dan internasional. Ini perlu diupayakan agar mahasiswa calon guru dapat memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang dapat mendukung terlaksananya proses dan pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam secara efektif dan efisien.

Selain berbagai pandangan di atas, LPTKI sebagai lembaga pendidikan tinggi profesional, perlu mempertimbangkan agar kurikulum bagi pendidikan profesional disusun oleh lembaga profesional tersebut dengan melibatkan seluruh staf akademik yang mengajarkan isi/materi kurikulum. Sebab konten kurikulum bagi pendidikan profesional menurut Jarvis, 'merupakan konstruk dari tubuh profesional itu sendiri (*professional body itself*)', (Jarvis, 198:50). Karenanya, kurikulum perlu didesain dan dikembangkan dengan memiliki ciri khusus terkait dengan tujuan pendidikan profesional yang dituju, kemudian diuji oleh institusi akademik yang mengajarkan silabus tersebut'. Pemikiran tersebut searah dengan kebijakan SPTK Abad ke-21 yang menyatakan: "Sesuai dengan wewenang Rektor dalam menetapkan kurikulum, maka struktur kurikulum tenaga kependidikan di suatu lembaga sepenuhnya menjadi wewenang LPTK masing-masing, dengan tetap berpatokan pada dasar umum, dasar keahlian profesi, bidang spesialisasi, dan keahlian spesialisasi profesi" (Depdiknas, 2003:36).

D. Prinsip Dasar Pengembangan KBK di LPTKI

Pengembangan KBK di LPTKI ditandai dengan berbagai ciri yang secara keseluruhan merupakan upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kurikulum sebelumnya. Di antara ciri tersebut yang perlu mendapat catatan penting adalah kurikulum sebelumnya kurang mengapresiasi 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu *learning to do, learning to know, learning to be, dan learning to live together*.

Selain itu, menurut Furchan, dkk, perubahan kurikulum sebelumnya dengan KBK menurut dapat dipetakan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut (Depdiknas, 2005:43):

Deskriptor Pembeda	Kurikulum Sebelumnya	Kurikulum Sekarang (KBK)
Approach	Content-based	Competent-based
Objektif	Keutuhan penguasaan ilmu	Keutuhan kompetensi berkarya dan <i>method of inquiry</i>
Atribut penguasaan ilmu	Instrumental adaptif pragmatis	Kapabel, komprehensif profesional
Struktur penguasaan ilmu	Tatanan pohon ilmu	Kompetensi dalam spektrum profesi
Struktur pengelompokan	Tidak terinci secara jelas	Terbakukan dalam 4 elemen kompetensi
Kemampuan berkarya	MKU, MKDK, MKK	MPK, MKK, MKB, MPB, MBB
Sifat keberlakuan	Sebagai pedoman penyusunan kurikulum institusional	Sebagai rambu-rambu penyusunan kurikulum institusional

Tabel: 2.1. Perbedaan Kurikulum Sebelumnya dengan KBK

Berdasarkan peta karakteristik pengembangan KBK di atas, maka prinsip yang mendasari pengembangan KBK dapat ditinjau dari berbagai hal sebagai berikut:

Ditinjau dari tujuan pengembangannya, (1) KBK lebih menekankan pada hasil (*outcomes*); (2) *outcomes* merupakan kompetensi yang dapat diukur; (3) Evaluasi keberhasilan belajar terukur melalui penguasaan kompetensi yang telah dicapai (*competency mastery*) oleh mahasiswa; (4) kerelevansian pengembangannya lebih menekankan pada pekerjaan dan tugas-tugas nyata dan dunia kerja; (5) menekankan pada kemampuan berpikir lebih tinggi; (6) lebih menitikberatkan pada pencapaian target kompetensi (*attainment targets*) dari pada penguasaan materi; (7) lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia; (8) memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Ditinjau dari segi pendekatannya, maka pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi lebih mengarah pada pendekatan teknologis dengan berlandaskan pada teori belajar behavioristik. Pendekatan teknologis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Materi yang diajarkan, kriteria evaluasi, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas (*job analysis*) tersebut. Namun, dalam hal operasionalisasinya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan menerapkan pendekatan *eclectic*. Pendekatan *eclectic* dalam operasionalisasi kurikulum sangat dimungkinkan dengan menyesuaikan berbagai kondisi, situasi yang terjadi di masyarakat, dan melayani berbagai kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Pada tataran operasional pengembangannya, KBK menghendaki berbagai pendekatan dan atau strategi. Adanya perubahan kurikulum yang mengacu pada KBK, maka secara langsung menyebabkan perubahan pada strategi pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Jika selama ini penilaian hasil belajar lebih berorientasi pada penilaian individual yang lebih menekankan pada aspek kognitif, maka dalam kerangka pengembangan KBK penilaian harus memberikan porsi yang sama dalam setiap ranah, khususnya ranah afektif dan nilai. Apalagi LPTKI sebagai lembaga pendidikan Islam sudah seharusnya lebih menekankan pada ranah afektif dan nilai, di samping kognitif dan psikomotorik. Konsekuensi dari tuntutan tersebut, maka pengembangan pembelajaran KBK perlu menggunakan strategi yang bervariasi dalam pengumpulan informasi untuk melaksanakan kurikulum secara optimal dan komprehensif.

E. Strategi Pengembangan KBK di LPTKI

Menurut Hamalik (2002:15) strategi pengembangan Kurikulum di pendidikan guru, dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut: (1) perencanaan kurikulum; (2) struktur kurikulum; dan (3) pendekatan metode penyampaian.

a. Perencanaan kurikulum

Sehubungan dengan lembaga pendidikan guru merupakan suatu lembaga pendidikan lanjutan dari SLTA yang bertugas mempersiapkan calon guru agar mampu mengajar pada sekolah lanjutan dan menengah, maka perencanaan pengembangan kurikulumnya harus bertitik tolak pada segi kompetensi apa yang akan dikembangkan dan dibutuhkan sekolah tempatnya bertugas kelak. Atas dasar itu, maka dalam perencanaan kurikulum perlu tersusun tujuan institusional yang terarah pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap. Selain itu, perlu dirumuskan tujuan program dan kurikuler tiap bidang mata kuliah yang terarah pada kompetensi apa saja yang dibutuhkan calon guru agar dapat melaksanakan tugas-tugas profesional sesuai dengan bidang tugas yang akan ditekuninya.

b. Struktur kurikulum

Lulusan fakultas Tarbiyah merupakan lulusan yang akan dipersiapkan untuk mampu melaksanakan pengajaran PAI di SLTP/Tsanawiyah dan SLTA/Aliyah. Karenanya, struktur pengembangan kurikulum pada fakultas tarbiyah selain mempertimbangkan pemilihan mata pelajaran juga perlu mempertimbangkan unsur disiplin keilmuan dan kerelevansiannya dengan kurikulum PAI SLTP/Tsanawiyah dan SLTA/Aliyah serta tuntutan profesi keguruan. Struktur dimaksud diharapkan tetap memperhatikan kemungkinan perluasan, peningkatan, pendalaman, dan penguasaan keahlian kognitif, afektif dan psikomotorik, serta berorientasi pada tujuan pendidikan profesional. Searah dengan tujuan dimaksud dirumuskan kompetensi/sub kompetensi dan performansi yang dituju. Rumusan tujuan tersebut termuat dalam setiap pokok bahasan dan sub pokok bahasan dalam kerangka mendukung kompetensi-kompetensi yang dituju.

c. Pendekatan metode penyampaian.

Pengembangan kurikulum di fakultas Tarbiyah perlu dikembangkan

dengan berbagai pendekatan metode penyampaian. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan bidang studi/kelompok mata kuliah, misalnya:

- Untuk ilmu keguruan, perlu dikembangkan dengan metode ilmu keguruan yang tepat untuk itu dengan cara mengintegrasikan antara teori dan praktek
- Untuk ilmu-ilmu sosial, perlu dikembangkan dengan metode *inquiry* dan *affective technique*.
- Untuk IPA, perlu dikembangkan metode eksperimentasi dan pendekatan *problem solving*.
- Untuk praktek keguruan, perlu dikembangkan secara luas metode *micro teaching* dan latihan *internship*.

Selain mempertimbangkan berbagai hal di atas, strategi pengembangan kurikulum di LPTKI, juga perlu mempertimbangkan karakteristik kelembaga-annya sebagai perguruan tinggi Islam. Dalam konteks tersebut Muhaimin menyarankan agar pengembangan kurikulum di PTAI, perlu:

- a. Mempertimbangkan misinya sebagai lembaga pengembang ilmu atau kajian ilmu-ilmu keislaman yang bersifat rasional, dinamis, analisis kritis, empiris dan antisipatif, sekaligus sebagai lembaga keagamaan yang berusaha membangun sikap dan perilaku beragama yang loyal, memiliki komitmen (pemihakan) terhadap Islam, serta penuh dedikasi terhadap agama yang diyakini kebenarannya, atas dasar wawasan keilmuan keislaman yang dimiliki, dengan tetap menjaga kerukunan hidup beragama yang dinamis.
- b. Mempertimbangkan penyelenggaraan program pendidikan akademik, vokasional dan/atau profesional, mengemban misi untuk menyiapkan calon-calon lulusan yang mampu mengintegrasikan 'kepribadian ulama' dengan 'intelektualitas akademik dan/atau vokasional/profesionalnya' dan mengintegrasikan 'vokasional/ profesional dan/atau intelektualitas akademik' dengan 'kepribadian ulama' sesuai dengan bidang keahlian atau konsentrasi studi yang ditekuni, yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global.
- c. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional berupaya menyiapkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai standard mutu nasional dan internasional; dan

- d. Merupakan lembaga dakwah yang mengemban misi pembinaan dan pengembangan masyarakat Islam dalam berbagai sektor kehidupannya (Muhaiamin, 2003:207).

Keempat pandangan dasar tersebut harus mewarnai setiap pengembangan kurikulum di LPTKI, maka perlu penekanan terhadap:

- (1) upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. yang dilandasi oleh keilmuan yang kokoh;
- (2) upaya pemberian *basic competencies* ilmu-ilmu keislaman sebagai ciri khas dari perguruan tinggi Islam, sudah seharusnya dijadikan sebagai landasan dan pendasaran bagi pengembangan setiap bidang studi yang dikembangkan di jurusan/program studi yang ada;
- (3) upaya penyaluran bakat, minat dan kemampuan dalam mengembangkan bidang-bidang studi atau konsentrasi studi yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat;
- (4) upaya pencegahan timbulnya pengaruh negatif dari perkembangan iptek dan seni serta moral;
- (5) upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya bangsa yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif dan komperatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global; dan
- (6) upaya mewujudkan pendidikan sepanjang hayat.

E. Penutup

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di PTAI perlu mencakup dua hal, yaitu: (1) berfokus pada standar kompetensi dan hasil belajar; (2) mendesentralisasikan pengembangan silabus dan pelaksanaannya. Pengembangan kedua inovasi ini dilaksanakan dengan menganut prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan.

Prinsip kesatuan dalam kebijakan, KBK di PTAI memungkinkan pengembangan standar yang dirumuskan dalam pencapaian prestasi mahasiswa. Standar ini merupakan pernyataan yang jelas tentang kualitas kompetensi mahasiswa berupa hasil belajar (kinerja) yang ditetapkan disertai dengan patokan atau ukuran yang jelas dalam beberapa indikator. Sedangkan prinsip keberagaman dalam tataran operasional, KBK dikembangkan dengan mempertimbangkan desentralisasi pembelajaran yang menuntut perubahan dalam pengelolaan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan kondisi riil yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Blank, W.E. *Handbook For Developing Competency-Based Training*, USA: McGraw-Hill Book Company.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad Ke-21*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2002.
- Furchan, dkk. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Hasan, Hamid, Arah Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), *Makalah* disampaikan dalam siposium Kurikulum Pendidikan. Bandung: 5 Nopember 2001.
- Jarvis, P. *Professional Education*. London: Croom Helm, 1983.
- Muhaimin, Arah Baru *Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2003.
- Panduan Akademik IAIN-SU Tahun Akademi 2004-2005.
- Thomson, David, at.al, *Competency Based Training and Assesment (CBT & A)*, Australia: 1992.

SUPERVISI PENDIDIKAN

Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.

A. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, paradigma tenaga kependidikan sudah seharusnya mengalami perubahan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi atau pengawasan pendidikan. Paradigma lama pendidikan masih mengindikasikan proses pembelajaran tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, jika tidak dimonitoring atau disupervisi. Dalam keadaan ini keberadaan dan fungsi pengawas menjadi sangat penting untuk dioptimalkan kerjanya, sehingga kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan.

Usaha peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, perlu secara terus menerus mendapatkan perhatian dari penanggungjawab sistem pendidikan. Pendidikan akan lebih berhasil apabila dilakukan guru dengan kemauan dan usaha mereka sendiri. Namun seringkali guru masih memerlukan bantuan orang lain, karena ia belum mengetahui atau belum memahami jenis, prosedur, dan mekanisme memperoleh berbagai sumber yang sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan kemampuan mereka. Pengetahuan tentang supervisi memberikan bantuan kepada guru dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan profesional mereka dengan memanfaatkan sumber yang tersedia.

Secara etimologi kata supervisi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, *supervision* yang terdiri dari dua kata, yaitu *super* dan *vision*, yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Supervisi merupakan suatu program yang terencana untuk meningkatkan pembelajaran. Berbagai buku mendefinisikan supervisi berbeda-beda satu sama lain. Boardman dalam Ahmad Rohani (1991) mendefinisikan supervisi sebagai usaha menstimulir, mengkoordinasi dan membimbing secara terus menerus pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan

seluruh fungsi pengajaran, sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat modern. Kemudian Daresh (1989), mendefinisikan supervisi sebagai suatu proses mengawasi kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Wiles (1955) mendefinisikannya sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar.

Menurut Siahaan (2006) jika ditelaah secara seksama dari beberapa definisi tersebut, terdapat benang merah yang sifatnya mengikat dalam meningkatkan mutu pembelajaran dengan tidak meninggalkan unsur-unsur berikut: (1) Tujuan, (2) situasi belajar mengajar, dan (3) supervisor. Ketiga unsur inilah yang menjadi dasar kekuatan supervisi sebagai kegiatan pengawasan dalam pendidikan dan pengajaran di lingkungan persekolahan. Aktivitas supervisi di lingkungan persekolahan bertujuan untuk meng-efektifkan proses administrasi pembelajaran, yang melibatkan semua unsur yang ada di dalam sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah dan juga personil sekolah.

Selanjutnya, Lucio dan McNeil (1978) mengatakan bahwa tugas supervisi mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Tugas perencanaan, yaitu untuk menetapkan kebijaksanaan dan program.
2. Tugas administrasi, yaitu pengambilan keputusan serta pengkoordinasian melalui konferensi dan konsultasi yang dilakukan dalam usaha mencari perbaikan kualitas pengajaran.
3. Partisipasi secara langsung dalam pengembangan kurikulum, yaitu dalam kegiatan merumuskan tujuan, membuat penuntun mengajar bagi guru, dan memilih isi pengalaman belajar.
4. Melaksanakan demonstrasi mengajar untuk para guru.
5. Melaksanakan penelitian.

Sergiovanni dan Starrat (1979) berpendapat bahwa tugas utama supervisi adalah perbaikan situasi pengajaran. Jika dianalisis dari beberapa pendapat tersebut, terdapat perbedaan pandangan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Hal ini terjadi mungkin disebabkan sudut pandang mereka yang berbeda. Namun demikian, kelihatannya ada kesepakatan umum, bahwa kegiatan supervisi pengajaran ditujukan untuk perbaikan pengajaran. Perbaikan itu dilakukan melalui peningkatan kemampuan profesional guru dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa supervisi pendidikan (pengajaran) adalah usaha yang dilakukan oleh supervisor untuk memberikan bantuan kepada guru dalam upaya memperbaiki pengajaran.

B. Substansi Fungsi dan Peran Kesupervisian

Dalam kerangka keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah, supervisi mempunyai kawasan tugas sebagai bagian dari kegiatan sekolah itu secara keseluruhan yang langsung berhubungan dengan pengajaran tetapi tidak langsung berhubungan dengan siswa. Supervisi tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu proses untuk mengawasi dan usaha memperbaiki pengajaran yang terbatas di dalam ruangan kelas, tetapi lebih luas dari itu. Proses pengajaran selalu terkait dengan semua kegiatan pendidikan di sekolah.

Secara umum tujuan pelaksanaan supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan situasi dan proses pembelajaran menjadi lebih baik dan berkualitas. Secara rinci, tujuan pelaksanaan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Membantu guru dalam memodifikasi pembelajaran yang kurang efektif
2. Meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan
3. Membantu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pengelolaan sekolah agar
4. proses dan hasil dapat tercapai dengan optimal
5. Menciptakan kualitas pengalaman pembelajaran dengan mengefektifkan seluruh komponen pendidikan secara simultan
6. Memberikan semangat, agar seluruh tenaga pengelola pendidikan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien
7. Melaksanakan fungsi sebagai pengendali mutu pendidikan (Sofyan, 2005).

Menurut Soetjipto dan Kosasi (2004), kegiatan supervisi pendidikan bertujuan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar mengajar. Kegiatan utamanya adalah membantu guru, tetapi dalam konteksnya yang luas menyangkut komponen tata usaha, sarana, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Sasaran supervisi dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu yang berhubungan langsung dengan pengajaran dan yang berhubungan dengan pendukung pengajaran.

Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan pada tahun 1992, menyarankan agar dibedakan antara supervisi satuan pendidikan dengan supervisi bidang studi atau, jika di sekolah dasar, dengan supervisi kelas. Supervisi satuan pendidikan adalah fungsi langsung dari manajemen pendidikan sedangkan supervisi kelas atau bidang studi secara khusus

terfokus kepada proses belajar mengajar. Sehubungan dengan itu kiranya dapat dipakai istilah supervisi pendidikan dan supervisi pengajaran untuk supervisi pengajaran di kelas atau bidang studi.

Supervisi pendidikan (pengajaran) merupakan pekerjaan profesional yang menuntut persyaratan sebagaimana layaknya pekerjaan profesional yang lain. Bantuan perbaikan situasi belajar mengajar yang dilakukan oleh orang yang bukan dididik atau ditugasi untuk melakukan supervisi itu seharusnya tidak dapat dikategorikan ke dalam kegiatan supervisi pengajaran. (Soetjipto dan Kosasi, 2004).

Tugas supervisor bukan untuk mengadili tetapi untuk membantu, mendorong dan memberikan keyakinan kepada guru bahwa proses belajar mengajar dapat dan harus diperbaiki. Menurut Thaib (2005) bahwa supervisi pengajaran berfungsi untuk mempermudah tercapainya tujuan pendidikan, memberikan bimbingan teknis edukatif dan administratif terhadap guru, sebagai sumber informasi tentang kondisi objektif pelaksanaan pendidikan, sebagai penyeimbang antara rencana dan tujuan pendidikan yang ditetapkan, dan sebagai mediator antara guru dengan kepala sekolah.

Pengembangan berbagai pengalaman, pengetahuan, sikap dan keterampilan guru harus dibantu secara profesional sehingga guru tersebut dapat berkembang dalam pekerjaannya. Kegiatan supervisi dilaksanakan melalui berbagai proses pemecahan masalah pengajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Dengan demikian, ciri utama supervisi adalah perubahan dan peningkatan ke arah efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar *secara terus menerus*.

Program-program supervisi hendaknya memberikan rangsangan terhadap terjadinya perubahan dalam kegiatan pengajaran. Perubahan-perubahan ini dapat dilakukan antara lain melalui berbagai usaha inovasi dalam pengembangan kurikulum serta kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan guru. Perubahan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dielakkan, baik karena tuntutan dari dalam kegiatan belajar mengajar itu sendiri, maupun karena adanya tuntutan lingkungan yang selalu berubah pula. Ada dua jenis supervisi dilihat dari peranannya dalam perubahan itu, yaitu:

1. Supervisi traktif, artinya supervisi yang hanya berusaha melakukan perubahan kecil karena menjaga kontinuitas. Supervisi traktif ini misalnya dapat dilihat dari kegiatan rutin seperti pertemuan rutin dengan guru-guru untuk membicarakan kesulitan-kesulitan kecil,

memberikan informasi tentang prosedur yang telah disepakati dan memberikan arahan dalam prosedur standar operasi dalam suatu kegiatan

- Supervisi dinamik, yaitu supervisi yang diarahkan untuk mengubah secara lebih intensif praktik-praktik mengajar tertentu. Tekanan dalam perubahan ini diletakkan kepada diskontinuitas, gangguan terhadap praktik yang ada sekarang untuk diganti dengan yang baru. Program demikian merupakan program baru yang mempengaruhi perilaku murid, guru dan semua personel sekolah.

Di dalam praktik, kegiatan supervisi tidak selalu berupa jenis kegiatan yang dapat digolongkan pada dua kutub secara mutlak, tetapi seringkali merupakan kegiatan yang berada pada kontinum dua kutub tersebut.

Untuk melaksanakan fungsi dan peran supervisi pengajaran di sekolah, perlu pemahaman tentang landasan dan siapa yang melaksanakan supervisi. Dalam usaha mempertinggi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan proses supervisi pendidikan, kegiatan supervisi perlu dilandasi hal-hal sebagai berikut.

- Kegiatan supervisi pendidikan harus dilandaskan atas filsafat Pancasila. Ini berarti bahwa dalam melaksanakan bantuan perbaikan proses belajar mengajar, supervisor harus dijiwai oleh penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila.
- Pemecahan masalah supervisi harus berlandaskan kepada pendekatan ilmiah dan dilakukan secara kreatif. Ini antara lain berarti bahwa dalam pemecahan masalah harus digunakan kaidah ilmiah seperti berpikir logis, objektif, berdasarkan data yang dapat diverifikasi dan terbuka terhadap kritik.
- Keberhasilan supervisi harus dinilai dari sejauhmana kegiatan tersebut menunjang prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar
- Supervisi harus dapat menjamin kontinuitas perbaikan dan perubahan program pengajaran. Jika supervisi dilaksanakan maka hasilnya harus merupakan suatu peningkatan proses dan hasil belajar siswa
- Supervisi bertujuan mengembangkan keadaan yang *favorable* untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Proses belajar mengajar yang efektif dan efisien hanya akan terjadi jika lingkungan proses itu mendukungnya. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar lingkungan memberikan tantangan kepada siswa untuk belajar lebih baik.

Secara umum sasaran pelaksanaan supervisi pengajaran mencakup supervisi terhadap personil dan supervisi terhadap non personil. Supervisi terhadap personil dimaksudkan sebagai upaya melakukan pengawasan terhadap individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan proses pendidikan di madrasah seperti: kepala madrasah, guru mata pelajaran, guru kelas, guru bimbingan konseling, staf tata usaha, pustakawan dan tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan yang dimaksud supervisi terhadap non personil adalah upaya kepengawasan yang dilaksanakan supervisor terhadap berbagai persiapan dan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang proses pelaksanaan pendidikan seperti: perpustakaan, administrasi sekolah, buku ajar, program perencanaan pendidikan, pelaksanaan sistem pendidikan dan sarana pendidikan lainnya.

Supervisi merupakan bantuan kepada guru dalam perbaikan situasi pengajaran. Dalam kaitannya dengan situasi belajar mengajar ini, tugas seorang supervisor (Harris, 1975) adalah membantu guru dalam hal:

- Pengembangan kurikulum. Kurikulum perlu diperbaiki dan dikembangkan secara terus menerus. Tugas supervisor adalah membantu guru dalam melaksanakan penyesuaian dan perancangan pengalaman belajar dengan keadaan lingkungan dan siswa. Di samping itu supervisor juga membantu dalam menyusun panduan dalam melaksanakan kurikulum, menentukan satuan pelajaran, merancang muatan lokal, dan merancang ko kurikuler serta ekstra kurikuler
- Pengorganisasian pengajaran. Supervisor bertugas membantu pelaksanaan pengajaran sehingga siswa, guru, tempat, dan bahan pengajaran sesuai dengan waktu yang disediakan serta tujuan instruksional yang ditetapkan. Mengelompokkan siswa merencanakan jadwal pertemuan, mengatur ruangan, mengalokasikan waktu pengajaran, merencanakan tim mengajar merupakan contoh-contoh dalam mengorganisasikan pengajaran ini.
- Pemenuhan fasilitas sesuai rancangan proses belajar mengajar. Pengembangan ruang serta peralatan, misalnya harus didasarkan atas pertimbangan sampai seberapa jauh sumbangannya terhadap pencapaian tujuan pengajaran
- Perancangan dan perolehan bahan pengajaran sesuai dengan rancangan kurikulum. Guru harus selalu melakukan titik ulang, evaluasi, dan perubahan tentang bahan pengajaran agar lebih besar sumbangannya terhadap tercapainya tujuan pengajaran.

5. Perencanaan dan implementasi dalam meningkatkan pengalaman belajar dan unjuk kerja guru dalam melaksanakan pengajaran ini. Kegiatan ini meliputi bantuan dalam melaksanakan workshop, konsultasi, wisatakarya serta berbagai macam latihan dalam jabatan.
6. Pelaksanaan orientasi tentang suatu tugas atau cara dalam proses belajar mengajar. Guru perlu dilengkapi dengan informasi yang relevan dengan tugas serta tanggungjawabnya.
7. Pengkoordinasian antara kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan layanan lain yang diberikan sekolah/lembaga pendidikan kepada siswa. Hal ini antara lain kegiatan mengembangkan kebijaksanaan serta menetapkan tata aliran kerja antara berbagai bidang yang memberikan layanan untuk mencapai tujuan instruksional.
8. Pengembangan hubungan dengan masyarakat dengan mengusahakan lalu lintas informasi yang bebas tentang hal yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran.
9. Pelaksanaan evaluasi pengajaran, terutama dalam perencanaan, pembuatan instrumen, pengorganisasian dan penetapan prosedur untuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil pengumpulan data, serta pembuatan keputusan untuk perbaikan proses pengajaran.

Supervisor mempunyai wewenang tertentu sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Wewenang yang dimaksud adalah melaksanakan koreksi, memperbaiki dan membina proses belajar mengajar bersama guru, sehingga proses itu mencapai hasil yang maksimal. Di samping itu supervisor juga berwenang untuk menentukan metode kerja untuk mencapai hasil optimal dalam melaksanakan tugas, menetapkan tingkat kinerja guru beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan kepada kepala sekolah atau pejabat struktural pembina sekolah yang bersangkutan.

C. Implementasi Berdimensi Pencapaian

Tugas kepengawasan pada dasarnya adalah untuk membenahi dan membantu guru agar dapat melakukan proses pembelajaran secara efektif. Keefektifan melakukan tugas pembelajaran oleh guru ini, akan berpengaruh terhadap kemampuan guru meningkatkan daya serap anak menerima pelajaran. Di samping itu, dengan adanya bantuan pengawas ini, maka proses

pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan berlangsung menurut standar pencapaian tujuan pendidikan baik berdasarkan proses maupun hasil yang akan dicapai peserta didik.

Jika ditelaah secara mendasar, kualifikasi yang harus dimiliki seorang pengawas pendidikan adalah kualifikasi yang bersifat normatif dan konstruktif. Umpamanya, setiap pengawas adalah orang yang harus memiliki watak kependidikan, memahami konsep dasar pendidikan, dan cinta terhadap kemanusiaan. Kualifikasi yang bersifat normatif ini untuk mendukung secara kondusif citra pendidikan sebagai sarana efektif untuk pelestarian nilai-nilai budaya sebuah masyarakat yang telah membangun.

Kualifikasi konstruktif adalah kualifikasi yang digolongkan kepada kualifikasi pencerahan. Dikatakan sebagai pencerahan karena proses layanan bantuan yang diberikannya kepada tenaga kependidikan adalah untuk meyakinkan tenaga kependidikan bahwa tujuan pendidikan adalah: (1) anak dapat berkembang sesuai dengan potensinya yang dimilikinya secara proporsional, (2) melalui proses pendidikan itu diyakini akan terjadi proses pematangan manusia oleh manusia yang telah memanusiakan, dan (3) terjadi perubahan tingkah laku (*change of behavior*) dikalangan peserta didik karena terjadinya transfer pengetahuan.

Kualifikasi konstruktif sebagai kualifikasi pencerahan ini, mengharuskan seorang pengawas pendidikan memiliki ciri-ciri:

1. Sadar sebagai tenaga kependidikan yang memiliki etika profesional dalam melaksanakan tugas kepengawasan.
2. Memahami bahwa proses kegiatan kepengawasan cenderung tidak terlihat oleh *stakeholders* pendidikan sehingga kegiatan kepengawasan bukanlah kegiatan yang bersifat populis.
3. Mencintai profesi kepengawasan sehingga tanpa *reserve* sehingga melakukan tugas berdasarkan hati nurani.
4. Tidak berorientasi kepada materi sehingga watak keresian terinternalisasi dalam berperilaku.
5. Memahami secara mendalam fungsi *reward* dan *punishment* dalam proses pendidikan.
6. Menjadikan personil sekolah sebagai mitra dan menjauhi sikap arogan ketika melaksanakan tugas di persekolahan.

Berbagai ciri yang menjadi kualifikasi pengawas atau supervisor

tersebut, mengindikasikan bahwa seorang pengawas selayaknyalah menyadari bahwa apa yang dikerjakannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencaapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran secara komprehensif. Kesadaran itu akan berimplikasi luas terhadap kemampuan peserta didik menerima dan menyerap pembelajaran melalui guru-guru yang terlatih karena adanya fungsi pengawas atau supervisor yang sesuai dengan tugas pokoknya.

Sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung dalam konteks aktivitas manajerial merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan tugas. Oleh karenanya, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, dapat dikatakan akan mempengaruhi pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan secara utuh.

Fasilitas pendukung pelaksanaan tugas, akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja. Fasilitas pendukung dapat berbentuk apa saja yang berkaitan dengan semakin mudahnya pelaksanaan tugas. Umpamanya, fasilitas pendukung sebagai sarana dan prasarana yang bersifat fisik maupun non fisik. Sarana dan prasarana yang bersifat fisik seperti kendaraan, ruang kerja, ruang rapat dan lain-lainnya, sedangkan sarana dan prasarana non fisik seperti peraturan, tata tertib, kode etik dan lainnya.

Para pengawas di wilayah kerja masing-masing pada umumnya memiliki keterbatasan sarana. Karena memang demikianlah kultur yang mempengaruhi kinerja pendidikan secara nasional. Kultur kinerja pendidikan secara nasional masih menganut prinsip *syndrome minimalis*. Suatu prinsip yang cenderung tidak memenuhi manajemen standar kebutuhan pokok sehingga kerap meminimalkan standar sehingga berimplikasi kepada efektivitas pencapaian kinerja.

Syndrome minimalis ini jika dianalogikan tidak jauh berbeda dengan prinsip "tidak ada rotan akarpun jadi". Namun dalam kenyataannya bukanlah diartikan sebagai prinsip pemanfaatan apa adanya untuk mendukung kinerja, tetapi cenderung memang terbiasa untuk tidak memenuhi standar karena memang kurang adanya kesadaran untuk berorientasi kepada kinerja yang tinggi.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki pengawas dalam mendukung kinerjanya, tidak jauh berbeda dengan prinsip *syndrome minimalis*. Sarana yang ada pada mereka bersifat sederhana dan tidak memenuhi standar sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena pengawas pada dasarnya tidak memiliki lembaga kecuali hanya sebagai instrumen

dalam mendukung kinerja manajerial sekolah tetapi berada diluar garis struktur sekolah. Pada saat yang bersamaan, mereka juga tidak memiliki otoritas sebagai lembaga dalam menentukan kebijakan sekolah.

Secara faktual dapat dikatakan bahwa sarana yang mendukung kinerja para pengawas pada umumnya tidaklah memadai. Ruang kerja pengawas pada dasarnya tidak memiliki *privacy* (keleluasaan pribadi), mereka biasanya dikelompokkan dalam satu ruangan sehingga selalu berkumpul dalam jumlah besar. Situasi ini sebenarnya bukanlah situasi yang memungkinkan mereka dapat berkinerja dengan perasaan yang nyaman.

Ruangan pengawas yang cenderung untuk tempat ngumpul-ngumpul ini, merupakan indikasi bahwa pengawas pendidikan memang berada di luar garis organisasi baik secara struktural maupun lini. Karenanya, fasilitas yang mereka peroleh pun di kantor cenderung tidak bersifat *privacy*. Fasilitas yang mereka miliki biasanya antara lain seperti: (1) ruang kerja sekaligus berfungsi sebagai ruang rapat, (2) meja kerja, (3) perpustakaan seadanya, (4) kipas angin, dan (5) papan tulis.

Sarana dan prasarana di atas adalah fasilitas standar untuk mendukung pelaksanaan tugas para pengawas. Hanya saja sarana yang paling mereka butuhkan adalah kendaraan roda dua untuk dapat sampai ke lokasi wilayah kerja yang menjadi wilayah pengawasan masing-masing. Walaupun sebenarnya mereka telah memiliki kendaraan roda dua milik pribadi, para pengawas berpendapat bahwa kendaraan dinas adalah bagian dari sarana dan prasarana yang harus diberikan kepada mereka.

Namun, alasan klasik yang selalu mereka terima ketika mengajukan kendaraan roda dua sebagai sarana dan prasarana pendukung tugas, adalah karena tidak adanya dana dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota tidak menjadikan kendaraan roda dua sebagai bagian dari fasilitas yang harus diberikan kepada para pengawas. Keinginan pengawas yang tidak terpenuhi ini membuat para pengawas menjadi kecewa. Alasan kekecewaan ini menurut para pengawas beralasan. Alasan yang mereka kemukakan adalah karena para pengawas diwajibkan melakukan monitoring ke berbagai sekolah yang menjadi wilayah tugasnya. Wilayah tugas mereka sangat luas dan jauh dengan kondisi geografis yang cenderung memerlukan kendaraan dinas dan bukannya kendaraan pribadi milik pengawas itu sendiri.

Namun, berbekal komitmen yang tinggi terhadap tugas pokoknya, para pengawas ketika melakukan monitoring memanfaatkan milik pribadi setiap saat. Situasi yang demikian berlangsung hingga saat ini. Namun

demikian, para pengawas tetap melaksanakan tugas karena memang itulah tanggung jawabnya.

D. Penutup

Supervisi pendidikan (pengajaran) adalah usaha yang dilakukan oleh supervisor untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki pengajaran. Secara umum tujuan kegiatan supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaran menjadi lebih baik dan berkualitas. Untuk itu supervisor harus dapat membantu, mendorong dan memberikan keyakinan kepada guru bahwa proses belajar mengajar dapat dan harus diperbaiki.

Supervisi pendidikan berfungsi untuk mempermudah tercapainya tujuan pendidikan, memberikan bimbingan teknis edukatif dan administratif terhadap guru, sebagai sumber informasi tentang kondisi objektif pelaksanaan pendidikan, sebagai penyeimbang antara rencana dan tujuan pendidikan yang ditetapkan, dan sebagai mediator antara guru dengan kepala sekolah. Di samping itu, supervisi pengajaran memiliki peran yang strategis dalam memberikan rangsangan terhadap terjadinya perubahan dalam kegiatan pengajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar.

Dalam pelaksanaannya, supervisi pendidikan mencakup dua hal, yaitu supervisi terhadap personil dan supervisi terhadap non personil. Supervisi terhadap personil dimaksudkan sebagai upaya melakukan pengawasan terhadap individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan proses pendidikan di madrasah seperti: kepala madrasah, guru mata pelajaran, guru kelas, guru bimbingan konseling, staf tata usaha, pustakawan dan tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan yang dimaksud supervisi terhadap non personil adalah upaya kepengawasan yang dilaksanakan supervisor terhadap berbagai persiapan dan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang proses pelaksanaan pendidikan seperti: perpustakaan, administrasi sekolah, buku ajar, program perencanaan pendidikan, pelaksanaan sistem pendidikan dan sarana pendidikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harris, Ben M., *Supervisory Behavior in Education*, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1975.
- Rohani, H.M. Ahmad, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Siahaan, Amiruddin, Asli Rambe, dan Mahidin, *Manajemen Pengawas Pendidikan*, Jakarta: Quantum Teaching, 2006.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sofyan, Ahmad dkk., *Peningkatan Supervisi dan Evaluasi pada Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta: Depag RI, 2005.
- Thaib, M. Amin., *Kepengawasan Kependidikan*, Jakarta: Depag RI, 2005.

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA.

Prof. Dr. H. Fachruddin, M.A.

A. Pendahuluan

Permasalahan utama pendidikan Indonesia dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang, jenis dan satuan pendidikan termasuk didalamnya pendidikan Islam. Baik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Berbagai data menunjukkan bahwa pendidikan pada beberapa tahun terakhir ini masih belum menunjukkan perubahan yang menggembirakan meskipun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa sekolah dan madrasah menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan. Beberapa siswa dari kota kota besar di Indonesia berhasil menyabet medali perak dan perunggu dari kejuaraan olimpiade matematika di Madrid bulan Juli 2008 tahun ini.

Semua pihak sesungguhnya telah menyadari kondisi pendidikan Nasional ini dan telah terbangun suatu pandangan visi bahwa pendidikan adalah kunci sukses pembangunan dan kemajuan suatu bangsa (Fergelind, 274, 1999). Keinginan untuk memposisikan pendidikan sebagai lokomotif penggerak pembangunan dan kemajuan telah lama dikumandangkan dan mengedepankannya sebagai panglima meminjam istilah Tilaar (2002) telah pula dicanangkan. Berbagai upaya pun telah dilaksanakan mulai dari pembaharuan paradigma pendidikan dan menjabarkannya dalam perangkat perundangan yang menjadi frame work pembaharuan/reformasi pendidikan nasional sampai kepada pelaksanaan pelatihan untuk guru dan peningkatan sarana fasilitas. Namun sebahagian besar masih tetap jalan ditempat dan sebahagian lainnya masih memberi hatinkan. Agaknya kenyataan inilah

yang mengge lisahkan semua pihak. Tulisan yang disampaikan pada suatu seminar menggagas peningkatan mutu pendidikan nasional ini adalah suatu bentuk dari kegelisahan dan keterpanggilan untuk secara produktif berpartisipasi memberikan solusi melakukan manajemen pemberdayaan dalam peningkatan mutu pendidikan tersebut.

Tulisan ini memulai pembahasan dengan menngenal apakah itu manajemen pemberdayaan. mendeteksi berbagai faktor involusi dalam pendidikan, selanjutnya melihat ragam upaya reinventing peningkatan mutu pendidikan dan kemudian dari analisis yang ada dilakukan upaya menkonstruksi manajemen pemberdayaan yang mungkin dilakukan ke depan.

B. Manajemen Pemberdayaan

Manajemen menjadi sangat penting untuk menjalan organisasi mencapai tujuan secara efektif. Pada dasarnya manajemen adalah cara pengelolaan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya secara baik dan benar. Penyerderhanaan makna ini tentunya tidak boleh menjadikan maknanya menyempit karena itu ada baiknya ditampilkan beberapa pandangan para ahli manajemen. Menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan organisasi dan untuk menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas (Stoner & Freeman, 1992:4) Robbin menyatakan manaje men adalah proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. (Robbin dan Coulter, 1996:6) sedangkan Dubrin menyatakan manajemen sebagai proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi *planning* dan *decision making*, *organizing*, *leading* dan *controlling*. Pemanfaatan sumber daya secara optimal sebagaimana diisyaratkan dalam manajemen sesungguhnya menghendaki adanya suatu kompetensi yang optimal pula pada seorang manejer untuk mengelola sumber daya baik meliputi: sumber daya pekerja (*human resources*), keuangan (*financial resources*), barang dan bangunan (*phsycal resources*) dan data(*informational resources*) (Andrew J.Dubrin, 1990:13)

Dewasa ini manajemen telah berkembang sedemikian pesatnnya sehingga terdapat ragam manajemen sesuai dengan perkembangan dan konteks spesifiknya antara lain kita mengenal, manajemen kewirausahaan,

manajemen resiko, manajemen konflik, manajemen stress, manajemen partisipatif, manajemen kinerja. Pada tulisan ini dikemukakan manajemen pemberdayaan. Untuk memahami lebih dekat manajemen pemberdayaan lebih dahulu harus disamakan persepsi bahwa manajemen jenis ini adalah manajemen yang diterapkan untuk pemberdayaan. Pemberdayaan bermakna memberikan keberdayaan atau kekuatan (*give to power*) menghadapi berbagai perubahan dan pengaruh perubahan sehingga dalam kondisi apapun dapat berjalan secara optimal efektif efisien mencapai tujuan. Pemberdayaan sesungguhnya adalah artikulasi dari kebutuhan untuk adanya perubahan baik dipengaruhi oleh kekuatan eksternal ataupun internal. Kreitner dan Kinicki menyatakan kekuatan eksternal itu antara lain, (1) *demographic characteristics*. Dewasa ini terdapat trend bahwa tenaga kerja makin beragam dan terdapat peluang untuk mengembangkan usaha dalam keberagaman itu secara efektif karenanya organisasi perlu mengelola keberagaman itu secara efektif jika menginginkan mendapat kontribusi dan komitmen maksimum dari perkerjanya. (2) *Technological Advancements*, perubahan terjadi karena tersedianya teknologi informasi menjadi daya dorong perubahan yang terbesar untuk perubahan karena itu tidak ada alasan untuk tidak berubah bersama kemudahan teknologi itu. (3) *Market Changes* perubahan pasar disebabkan berbagai faktor, ekonomi, politik, serta perubahan global lainnya, menyebabkan semua organisasi harus merubah dan mengupayakan perubahan untuk dapat berdaya menghadapi perubahan pasar itu. (4) *social and political pressures*, terjadi karena perubahan kekuasaan, konflik kepentingan, persaingan bisnis, dan lain sebagainya. Sedangkan kekuatan internal antara lain adalah: (1) *Human resources problems/prospect*. Pada ketenagaan ini masalah dapat timbul karena mispersepsi dikalangan pekerja, ketidakpuasan kerja, dan lain sebagainya. Organisasi harus mampu merespon masalah ini dengan berbagai pendekatan seperti mendesain pekerjaan, konflik peran, memberi penghargaan prestatif dan partisipasi aktif pekerja. (2) *Managerial behavior/decisions* adanya konflik antara pimpinan dan bawahan. Perlu upaya untuk interpersonal training ataupun bentuk lain reorganisasi struktural.

Pada dasarnya perubahan terdiri dari dua bentuk perubahan terencana dan perubahan tidak terencana. Menurut Greenberg dan Baron (1997:550) perubahan terencana adalah:

- 1) *Changes in products or service* (perubahan dalam produk atau jasa).
- 2) *Changes in organizational size and structure* (perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi)

- 3) *Changes in administration system* (perubahan dalam sistem administrasi).
- 4) *Introductions of new technologies* (introduksi teknologi baru)

Sedangkan perubahan tak terencana meliputi:

- 1) *Shifting employee demographics* (pergeseran demografis pekerja)
- 2) *Performance gap* (kesenjangan kinerja)
- 3) *Government regulation* (peraturan pemerintah)
- 4) *Global competitions* (kompetisi global)
- 5) *Changing economic conditions* (perubahan kondisi ekonomi).
- 6) *Advances in technology* (kemajuan dalam teknologi)

Perubahan yang terencana dapat mengalami kendala disebabkan perubahan tak terencana. Manajemen perubahan mempertimbangkan berbagai kekuatan internal dan eksternal perubahan termasuk pula kemungkinan efek dari perubahan tak terencana. Untuk meningkatkan mutu pendidikan tentulah perlu didekati dengan mengembangkan prinsip prinsip kerja manajemen pemberdayaan ini.

C. Faktor-Faktor involusi dalam system pendidikan

Reformasi dibidang pendidikan yang paling mendasar telah dilakukan adalah melakukan review terhadap sistem pendidikan nasional. Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya involusi atau penurunan mutu pendidikan dan tidak terjadi peningkatan secara merata, antara lain

Pertama: penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan *production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Dilaksanakan dengan hanya melihat dari aspek in-put yang baik akan menghasilkan out-put yang baik. Pada hal sub-sistem proses juga sangat menentukan out-put pendidikan yang baik.

Kedua: penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik sehingga sekolah sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang berakibat sekolah kehilangan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaga termasuk untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Ketiga; minimnya peranserta masyarakat, partisipasi pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana bukan pada dukungan proses pendidikan yaitu pada pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas (E.Suparman, 2, 2007).

Keempat peran guru hanya sebatas tenaga pengajar bukan pembelajar, akibatnya pembelajaran sama sebagai proses pump sistem bukan suatu proses production sistem dimana pengalaman belajar secara optimal diolah menjadi kompetensi dan mampu berkembang dan diaplikasikan untuk kepentingan kehidupan dan peningkatan kualitas hidup.

Kelima, kurikulum diposisikan sebagai acuan baku, tidak diposisikan sebagai frame work yang dapat dan harus dikembangkan secara kreatif.

Keenam, evaluasi cenderung dilakukan pada menilai hasil seyogianya dilakukan secara simultan antara penilaian hasil dan proses.

Dalam memenej pemberdayaan peningkatan mutu Keenam faktor ini harus lah dicermati secara akurat dan komprehensif dalam bentuk melakukan reinventing. Untuk selanjutnya dari pencermatan itu dapat disusun upaya untuk melakukan empowering

D. Upaya re-inventing peningkatan mutu pendidikan

Sampai saat ini ada beberapa upaya yang terus menerus dilakukan antara lain melakukan reformasi yang mendasar dengan mereview undang undang sistem pendidikan nasional no 2 tahun 1989 menjadi UUSPN no 20 tahun 2003 serta melengkapi dengan UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP No 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan dan peraturan menteri tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis berbagai pentarapan aturan tersebut.

Berlandaskan aturan tersebut telah dilakukan pendidikan dan pelatihan tenaga guru, program peningkatan kualifikasi guru, pendidikan profesi, sertifikasi guru dalam jabatan, akreditasi sekolah. penyediaan dan perbaikan sarana/ prasarana pendidikan, peningkatan mutu manajemen sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, dengan mengadakan tunjangan profesi dan tunjangan fungsional bagi yang belum tersertifikasi, bantuan bantuan lainnya untuk peningkatan mutu serta pengembangan dan perbaikan kurikulum.

Dalam rangka re inventing manajemen peningkatan mutu ini pendekatan *education production function*, sub system in put dan proses harus mendapat penekanan yang signifikan. Dipihak lain untuk proses yang berkualitas diperlukan guru yang dengan kualifikasi sesuai dan berkualitas,

berkompetensi yang baik meliputi kompetensi akademik, sosial, personal dan professional. Untuk itu pelaksanaan sertifikasi, pendidikan lanjut, dan pendidikan profesi menjadi kebutuhan yang utama. Program ini jelas pekerjaan luar biasa mengingat pendidik di negara ini jumlahnya sangat besar baik guru negeri maupun swasta.

Seiring dengan itu masalah kesejahteraan dan jaminan hidup perlu mendapat perhatian. Berbagai pihak harus memiliki komitmen agar dapat mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru yang jelas selama ini sangat rendah, bahkan ada yang menyebutkan dibawah upah minimal regional. Kreitner dan Kinichi (2001:671) memasukkan masalah kesejahteraan atau penghargaan ini (*nonreinforcing reward system*) sebagai faktor kesepuluh dari resistensi untuk berubah.

Selanjutnya guna mengoptimalkan peran lembaga pendidikan dilakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (*school based management*) suatu sistem pengelolaan sumber daya sekolah secara serasi mandiri dan melibatkan stake holder yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional.

Penerapan MBS akan memunculkan profil sekolah mandiri antara lain

1. Pengelolaan sekolah akan desentralistik
2. Perubahan sekolah akan lebih didorong oleh motivasi daripada diatur oleh luar sekolah
3. Regulasi pendidikan menjadi lebih sederhana
4. Peranan pengawas bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi, dari mengarahkan menjadi memfasilitasi dan dari menghindari resiko menjadi mengelola resiko.
5. akan mengalami peningkatan manajemen.
6. dalam bekerja akan menggunakan *team work*.
7. pengelolaan informasi akan mengarah ke semua kelompok kepentingan sekolah
8. manajemen sekolah akan lebih menggunakan pemberdayaan dan struktur organisasi akan lebih datar sehingga akan lebih sederhana dan efisien.

Di antara masalah terjadinya involusi pendidikan adalah sistem kurikulum yang hanya bersifat subjek akademik menekankan pencapaian

5. Memiliki evaluasi yang kontiniu dan komprehensif terhadap berbagai aspek akademik dan non akademik.

Keempat: Dalam jangka panjang diperlukan sistem pendidikan tenaga keguruan yang lebih komprehensif. Beberapa pola /model yang banyak dipertimbangkan adalah

terselenggarakannya sekolah guru yang sejak dini mendidik bakat dan minat, kepribadian dan wawasan serta ketrampilan keguruan dan keilmuan yang mampu untuk tiap jenjang dan jenis kependidikan. Untuk tenaga pendidik dari non keguruan dikembangkan pendidikan profesi keguruan sedangkan untuk pendidikan tinggi dikembangkan pendidikan tinggi keguruan dan sarjana saintek yang direkrut menjadi guru atau memilih profesi keguruan maka kepada mereka sebaiknya mengikuti pendidikan keguruan.

Kelima: dalam menjamin mutu (quality –assu rance) para guru perlu dibekali dengan kemampuan untuk melakukan *classroom action research* yaitu penelitian tindakan kelas dengan demikian mereka bisa melakukan perbaikan mutu pembelajaran yang dilaksanakannya..

Keenam: upaya untuk meningkatkan mutu haruslah dimulai dengan peningkatan kualitas ketenagaan itu sendiri. Sebagai pekerjaan profesi maka upaya untuk melakukan penilaian kinerja dan adanya pengakuan profesi menjadi suatu tuntutan utama. Dalam hal ini berbagai organisasi profesi keguruan agama haruslah meberikan sumbangan yang positif bagi pemberdayaan tenaga pendidik Islam. Selanjutnya program sertifikasi guru dalam jabatan perlu diintensifkan agar dapat memacu para pendidik memperbaiki kualitas diri dan kompetensi.

Ketujuh, Mengaitkan kompetensi dengan kompensasi/gaji adalah suatu hal yang wajar. Karena itu kesejahteraan guru dalam upaya peningkatan mutupendidikan harus dipandang menjadi suatu paket. Dengan kata lain peningkatan mutu pada dasarnya terkait dengan kesejahteraan dan demikian sebaliknya.

Ketujuh prioritas ini dalam mewujudkannya harus dilakukan dalam prinsip kerja manajemen perubahan yang dimulai dengan adanya perubahan prilaku dan budaya organisasi para pendidik.

E. Penutup

Sebagai sub sistem pendidikan nasional pendidikan Islam yang terselenggara dalam satuan pendidikan agama dalam bentuk Madrasah dan di sekolah serta pendidikan keagamaan tentu perlu mengembangkan manajemen pemberdayaan dalam peningkatan mutu ini dengan berbagai langkah strategis yang dikemukakan.

Perencanaan Perubahan sebagai prinsip dasar manajemen pemberdayaan haruslah dijalankan lebih intensif untuk dapat menerapkan police lanjut dari program continous improvement (peningkatan berkelanjutan) sebagai inti dari manajemen pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dubrin, Andrew J, *Essensial of Management*, Ohio: South Western Publishing Co, 1990.
- Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Buku 1 dan 2, Jakarta.
- Davies, Brent and Linda Elison, *Strategic Direction and Development of the School*, Routledge, New York, 1999.
- Eman, Suparman, *Manajemen Pendidikan Masa Depan*. html file, download 7/16/2008.
- Fergelind, Saha, dalam Albach, *Comparative Education*, Mac Milan London, 1988.
- Greenberg, Jerald and Robert A Baron, *Behavior in Organization*, New Jersey, Printice Hall International, Inc, 1997.
- Robbin, Stephen P, *Organization Behavior*, New Jersey, Prentice Hall International Inc. 2003.
- Stoner, James A and R. Edward Freeman, *Management*, New Jersey, Printice Hall, 1992.
- Tilaar, H.A.R, *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2002.

INTEGRASI PERENCANAAN STRATEGIK DENGAN PENINGKATAN MUTU LULUSAN

Candra Wijaya, M.Pd.

A. Pendahuluan

Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Karena itu, perencanaan akan menentukan adanya perbedaan kinerja (*performance*) satu organisasi dengan organisasi lain dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. Menurut Mondy & Premeaux (1995:138) perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Berarti di dalam perencanaan akan ditentukan apa yang akan dicapai dengan membuat rencana dan cara-cara melakukan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para manajer di setiap level manajemen.

Selanjutnya Terry (1973:192) mengemukakan "*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities, believe necessary to achieve desired results*". Pendapat di atas menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur pokok dalam kegiatan perencanaan yaitu: (1) pengumpulan data, (2) analisis fakta dan, (3) penyusunan rencana yang konkrit.

Dalam dinamika masyarakat, organisasi beradaptasi kepada tuntutan perubahan melalui perencanaan. Menurut Johnson (1973:51) bahwa: "*the planning process can be considered as the vehicle for accomplishment of systems change*". Tanpa perencanaan satu sistem tak dapat berubah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan lingkungan yang berbeda. Dalam sistem terbuka, perubahan dalam sistem terjadi apabila kekuatan lingkungan menghendaki atau menuntut bahwa diperlukan suatu keseimbangan baru untuk diciptakan dalam organisasi tergantung pada

rasionalitas pembuat keputusan. Bagi sistem sosial, satu-satunya wahana untuk perubahan inovasi dan kesanggupan menyesuaikan diri ialah pengambilan keputusan manusia dan proses perencanaan.

Dalam perencanaan ada tujuan khusus. Tujuan tersebut secara khusus sungguh-sungguh dituliskan dan dapat diperoleh semua anggota organisasi. Dan perencanaan mencakup periode tahun tertentu. Jelasnya, ada tindakan program khusus untuk mencapai tujuan ini, karena manajemen memiliki kejelasan pengertian sebagai bagian yang mereka inginkan. Johnson, dkk (1973) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan perencanaan disusun berbagai visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang pada tingkat awal menggunakan pengambilan keputusan (*decision making*) yang juga merupakan inti dari manajemen.

Mengapa manajer membuat perencanaan? Sungguh perencanaan memberikan arah, mengurangi pengaruh perubahan, meminimalkan pengulangan dan menyusun ukuran untuk memudahkan pengawasan. Dengan kata lain proses perencanaan merupakan langkah awal kegiatan manajemen dalam setiap organisasi, karena melalui perencanaan ini ditetapkan apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Akan tetapi sebelum sampai pada langkah-langkah ini diperlukan data dan informasi yang cukup serta analisis untuk menetapkan rencana yang konkrit sesuai kebutuhan organisasi.

Sementara menurut Siagian (1985) suatu proses perencanaan harus dapat menjawab lima pertanyaan pokok, yaitu: (1) Apa yang akan dikerjakan dalam satu kurun waktu tertentu, (2) Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan, dan kepada siapa bertanggung jawab, (3) Prosedur, mekanisme dan metode kerja yang bagaimana yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar terintegrasi dengan baik, (4) Adakah jadwal kegiatan yang jelas dan harus ditaati, dan (5) Apa alasan yang benar-benar data dipertanggung jawabkan tentang mengapa berbagai kegiatan harus dilaksanakan.

Menurut Winardi (1990), fungsi perencanaan mencakup aktivitas-aktivitas manajerial yang mendeterminasi sasaran-sasaran dan alat-alat yang tepat untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa elemen-elemen perencanaan itu terdiri dari: (1) sasaran-sasaran, (2) tindakan-tindakan, (*actions*), (3) sumber-sumber daya, dan (4) implementasi.

Johnson, dkk (1973:49) walaupun semua fungsi manajemen saling terkait yang dilaksanakan manajer, namun setiap fungsi kegiatan organisasi harus dimulai dari perencanaan. Dijelaskan pula bahwa "*planning is the process by which the system adapts its resources to changing environmental and internal forces*". Dimaksudkan bahwa perencanaan adalah suatu proses dengan mana sistem menyesuaikan berbagai sumber daya yang ada untuk mengubah lingkungan dan kekuatan internal. Sesungguhnya fungsi perencanaan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menyajikan suatu sistem keputusan yang terpadu sebagai kerangka dasar bagi kegiatan-kegiatan organisasi.

Perencanaan telah berkembang sebagai hasil dari banyak perubahan-perubahan penting baik dalam lingkungan tertentu organisasi harus bekerja maupun dalam kegiatan internal organisasi. Perencanaan di masa depan menjadi kegiatan manajer yang meningkat kepentingannya dalam industri, sosial dan lingkungan politik berkembang semakin kompleks dan semakin besar menekankan fungsi perencanaan akibat banyak ketidakpastian di masa depan. Perencanaan dapat membangun usaha-usaha koordinatif. Memberikan arah kepada para manajer dan pegawai tentang apa yang akan dilakukan. Bila setiap orang mengetahui di mana organisasi berada dan apa yang diharapkan memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan, maka akan meningkat koordinasi, kerjasama dan tim kerja.

Konsep tentang sistem dalam perencanaan memerlukan pandangan organisasi sebagai suatu integrasi dari berbagai macam sub sistem pembuatan keputusan. Fungsi utama perencanaan manajemen puncak adalah salah satu rancangan sistem mencakup: (1) penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, prosedur-prosedur dan hubungan organisasi di atas landasan sistematis untuk pedoman pembuatan keputusan dan perencanaan pada pelbagai macam tingkatan organisasi, dan (2) pengaturan bagi rangkaian informasi ke dan dari pusat-pusat perencanaan ini.

Elemen perencanaan yang mesti dipenuhi para manajer dalam pekerjaannya, yaitu:

1. Sasaran

Sasaran adalah rencana terpadu sebab kondisi khusus masa depan yang diimpikan para perencana akan terwujud dengan memuaskan, sasaran juga mengacu kepada suatu kondisi masa depan dan kondisi kepuasan.

2. Tindakan-Tindakan

Tindakan adalah kekhususan untuk mencapai sasaran. Pekerjaan utama adalah mengarahkan pada pencapaian sasaran organisasi

3. Sumberdaya

Adapun sumberdaya adalah tuntutan yang diperlukan dalam melakukan tindakan. Suatu rencana harus khusus jenis dan jumlah sumberdaya yang diperlukan. Sumberdaya khusus benar-benar harus dialokasikan, termasuk penganggaran biaya dengan mengidentifikasi sumber dan tingkat keperluan harus mengisi ruang kegiatan tindakan.

4. Implementasi

Akhirnya adalah rencana harus termasuk cara dan tujuan dilaksanakan sesuai dengan maksud tindakan. Pelaksanaan mencakup tugas-tugas dan perintah terhadap personal untuk merencanakan rencana-rencana yang ditetapkan. Perencanaan memberikan arah, mengurangi pengaruh lingkungan, peningkatan produktivitas dan membolehkan para manajer mengorganisasikan, memimpin, mengawasi dan aktivitas langsung yang penting untuk mencapai sasaran organisasi. Kebutuhan akan perencanaan mencakup semua level perusahaan atau organisasi, tetapi yang paling penting adalah level tinggi, karena paling potensial mempengaruhi keberhasilan organisasi secara lebih besar.

5. Misi

Misi adalah suatu bagian tujuan berkelanjutan, atau alasan bagi adanya perusahaan. Dalam hal ini misi adalah pernyataan yang secara luas dari sasaran dasar dan ruang lingkup suatu unit organisasi. Pernyataan misi organisasi memberikan arah dan bimbingan bagi individu, kelompok dan manajer melalui organisasi. Misi mungkin tidak begitu dibutuhkan publikasi secara eksternal, tetapi seharusnya dipahami oleh para manajer semua level. Pernyataan misi harus dibangun bagi perusahaan ke dalam dan bagi unit bidang dalam perusahaan.

6. Sasaran

Begitu misi dapat dipahami maka sasaran khusus dapat dikembangkan. Sasaran adalah keinginan akhir dan hasil akhir suatu aktivitas. Sasaran disusun setiap level manajer dalam organisasi, baik level terendah organisasi, seharusnya konsisten dengan sasaran yang dirumuskan pada level tertinggi. Sasaran menurut Siagian (1997:34) seharusnya memiliki empat karakteristik dasar, yaitu: (1) sasaran harus dinyatakan dalam tulisan, (2) sasaran harus terukur, (3) sasaran harus spesifik sebagai

suatu yang memerlukan alokasi waktu, dan (4) sasaran harus menantang tetapi dapat dicapai.

Sasaran harusnya juga bersifat khusus dalam jangka waktu. Individu membutuhkan dan ingin mengetahui kapan suatu sasaran harus dicapai. Demikian juga suatu sasaran bahwa tanpa batas waktu pencapaiannya tertentu tidak menantang. Akhirnya sasaran yang terlalu mudah mencapainya memberikan kepuasan yang sedikit bila dicapai. Sementara di lain pihak, sasaran yang tidak tercapai adalah lebih membuat pekerjaan frustrasi dari pada mendorong mereka. Karena itu, sasaran harus menantang tetapi dapat dicapai. Sasaran dikembangkan pada setiap level manajemen. Hal ini disusun oleh manajemen puncak harus konsisten dengan misi keseluruhan dari perusahaan. Dan sasaran yang ada level rendah manajemen harus berada dalam garis manajemen level bawah. Orang-orang melakukan dengan tanggung jawab pengembangan sasaran organisasi.

Proses perencanaan harus dapat menjawab sejumlah pertanyaan dan dipusatkan oleh para manajer dalam organisasi. Pertanyaan-pertanyaan itu mencakup; apa yang hendak dilakukan organisasi, kapan akan dilakukan, bagaimana melakukannya dan siapa yang bertanggung jawab melakukan suatu kegiatan yang direncanakan. Semua itu bermuara kepada penentuan dan penetapan cita ideal tentang masa depan organisasi dan keharusan anggotanya dalam mewujudkan cita ideal tersebut, baik berbentuk visi, misi, strategi, kebijakan maupun tujuan dan sasaran organisasi.

Mondy dan Premeaux (1995:38) menjelaskan "*strategic planning is the process by which top management determines overall organizational purpose and objectives and how they are to be achieved*". Sebagai salah satu jenis perencanaan, maka keberadaan perencanaan strategis mencakup spektrum kegiatan yang luas dan memerlukan waktu yang lama dalam mewujudkannya dan harus didukung sumber daya yang baik. Di dalam perencanaan strategis harus dirumuskan misi (*mission determination*) sebagai sebuah perencanaan jangka panjang tentang tujuan yang akan dicapai organisasi.

Barron dan Gadrner (1986:31), menjelaskan bahwa: *Strategic planning –development of a framework for strategic decision making-is widely recognized as critical to company performance and essential in today's rapidly changing business environment*. Pendapat di atas menegaskan bahwa perencanaan strategik merupakan pengembangan kerangka pengambilan

Dalam konteks organisasi lembaga pendidikan, untuk menyusun rencana kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan banyak data, pertimbangan-pertimbangan dan pemikiran-pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Oleh karena itu kegiatan perencanaan sebaiknya melibatkan setiap unsur sekolah baik guru maupun pegawai dan orang tua siswa serta tokoh masyarakat yang tertarik dan peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Untuk saat sekarang ini, setiap lembaga pendidikan memerlukan adanya perencanaan strategik, dengan menyusun misi, visi, tujuan, sasaran, metode, program dan kegiatan. Hal itu dimaksudkan sebagai perencanaan jangka panjang untuk menjawab tantangan eksternal sekolah yang semakin dinamis dan kompleks. Di sini diperlukan analisis kekuatan, kelemahan (faktor internal organisasi), dan peluang serta ancaman/tantangan (faktor eksternal). Akhirnya akan diketahui dimana posisi sekolah saat ini, mau ke mana sekolah dan apa masalah krusial yang dihadapi, lalu dibuatlah perencanaan strategik menjangkau masa depan yang lebih baik.

Semua rencana kebutuhan bersumber dari antisipasi terhadap perkembangan zaman dan masalah yang akan dihadapi oleh *output* sekolah di masa depan. *Output* (lulusan) lembaga pendidikan harus siap menghadapi perkembangan masyarakat modern, masyarakat belajar yang mampu mendidik diri sendiri sepanjang hayat, yang terbuka terhadap perubahan namun memiliki pandangan hidup yang mantap.

Di sini fungsi perencanaan strategik kependidikan harus dilaksanakan oleh para manajer pendidikan. Menurut Rusyan (1992:32) ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan yaitu: (1) Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai/personil lembaga pendidikan, (2) Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan, (3) Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil, (4) Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk pelaksanaan lainnya, (5) Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana/skala pengkajian, (6) Memilih para staf (pelaksana), administrator dan melakukan pengawasan, (7) Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), pola pengisian staf dan formulir laporan kemajuan, (8) Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan tempat, (9) Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana, (10) Menghemat

ruangan, alat-alat perlengkapan, bahan dan perbekalan lainnya, (11) Menentukan staf dan memberi tugas, (12). Mendidik dan melatih agar dapat melaksanakan tugas dan mencapai hasil yang optimal.

C. Langkah-Langkah Perencanaan Strategik

Dalam proses penyusunan perencanaan strategik menurut Barron (1986:3-4), paling tidak ada empat langkah perencanaan strategik, yaitu: (1) Analisis pasar industri, Analisis ini termasuk dalam analisis faktor eksternal yang mencakup; pelanggan dan pesaing, perkiraan antara penyediaan dan kebutuhan, atau antara pasar, aturan-aturan dan politik, (2) Analisis internal organisasi, yakni suatu analisis yang diarahkan terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan di dalam lingkungan internal. Peninjauan kembali terhadap kekuatan organisasi mencakup ; manajemen aset, aliran dana, dan ketersediaan sumber daya modal, (3) Formulasi strategi, dimana pengembangan strategi dan alokasi sumber daya. Pengembangan alternatif strategi melalui peluang pasar dan kemampuan internal serta sumber daya, (3) Pelaksanaan Strategi, Pemilihan dan pelaksanaan strategi untuk membantu manajemen dalam mengembangkan rencana pelaksanaan, langkah-langkah aksi, jadwal bagi keterpaduan strategi ke dalam pelaksanaan unit-unit. Disini dibuat rencana dan aktivitas khusus yang akan dilaksanakan sesuai biaya, ketersediaan SDM, waktu, penanggung jawab dan lain-lain.

Keempat langkah di atas sebenarnya merupakan langkah yang paling sederhana untuk dilalui dalam menyusun dan menetapkan perencanaan strategik organisasi. Analisis pasar industri termasuk analisis eksternal yang berisikan analisis faktor peluang dan tantangan, analisis internal menyangkut kekuatan dan kelemahan, sedangkan formulasi strategi merupakan penepatan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program. Setelah ditetapkan komponen-komponen tersebut, barulah perencanaan tersebut dilaksanakan yang kemudian nanti dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Mengacu kepada pendapat Bryson (1988:55), bahwa ada 8 langkah perencanaan strategik, yaitu: (1) Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategik, (2) Mengidentifikasi mandat organisasi, (3) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi, (4) Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman, (5) Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan, (6) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi,

(7) Merumuskan strategi untuk mengolah isu-isu, (8) Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Perencanaan strategis memiliki proses yang panjang dalam perumusan dan penetapannya. Namun mengingat posisinya yang sangat penting bagi masa depan organisasi, maka proses ini dijalani dan disiapkan sesuai potensi organisasi sehingga muncul suatu konsep perencanaan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan jangka panjang bagi sebuah organisasi. Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan sumber daya/waktu pelaksanaan menjadikan organisasi memiliki arah yang jelas untuk menjawab perubahan.

Untuk memastikan bahwa perencanaan strategik itu dapat tercapai berdasarkan keinginan normatif dari para perencana dalam organisasi, beberapa hal harus diperhatikan, yaitu:

1. Fungsi Perencanaan Strategik

Asumsi utama perencanaan strategik, bahwa suatu organisasi harus memberikan respon terhadap dinamika perubahan lingkungan. Ada beberapa alasan yang berkenaan dengan masalah ini bahwa banyak hal yang tak dapat diprediksi dari lingkungan eksternal. Karena itu, Lontos (1994) menjelaskan bahwa perencanaan strategik menekankan atas pemahaman bagaimana lingkungan berubah dan akan berubah serta dalam membuat keputusan pengembangan organisasi yang menjadi respon terhadap perubahan itu". Kelalaian melihat perubahan atau kegagalan melakukan perubahan akan berakibat kepada rendahnya kinerja organisasi sehingga berpengaruh terhadap produktivitas dan keefektifan menjalankan fungsinya. Hanya saja perubahan pasti akan membawa dampak, tergantung bagaimana manajer atau pimpinan organisasi tersebut melakukan pekerjaannya. Perencanaan strategik menurut Bryson (1988:11-12) memberikan manfaat bagi organisasi, yaitu: (1) berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, (2) memperjelas arah masa depan, (3) menciptakan prioritas, (4) membuat keputusan dengan mengingat konsekuensi masa depan, (5) mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan, (6) menggunakan keleluasan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi, (7) membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi, (8) memecahkan masalah utama organisasi, (9) memperbaiki kinerja organisasi, (10) menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif, dan (11) membangun kerja kelompok dan keahlian.

Fungsi yang disebutkan di muka menggambarkan betapa implikasi perencanaan strategik bagi sebuah organisasi harus dapat dirumuskan dengan baik dan dilaksanakan dengan tepat. Semua fungsi tersebut memproyeksikan kinerja organisasi yang baik, pemenuhan harapan *stakeholders*, perkembangan organisasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia organisasi. Intinya adalah kualitas tinggi, produktivitas tinggi, efektivitas program dan tercapainya kepuasan. Sesungguhnya perencanaan strategis itu merupakan prosedur dan alat. Karena itu, keterlibatan pihak terkait dalam membuat perencanaan strategis sangat menentukan untuk keberhasilan organisasi. Bryson (1988: 13) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan manajemen puncak, untuk mencapai fungsional perencanaan strategik agar berhasil, yaitu: (1) Mengarahkan tindakan-tindakan, (2) Membagi bangunan visi berdasarkan nilai, (3) Bersikap terbuka, proses partisipasi yang meluas dan pembagian rasa kepemilikan bagi staf, (4) Memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, (5) Fokus yang sensitif terhadap lingkungan eksternal organisasi, (6) Berdasarkan kualitas data, 7) Keterbukaan untuk menjawab status quo, dan (8) Suatu kunci efektivitas manajemen.

Bagaimanapun, aktivitas pokok perencanaan strategik yang akan dicapai adalah penyusunan tujuan (memilih apa yang diinginkan di masa depan), dan mengembangkan pendekatan untuk mencapai tujuan ini. Untuk itu, bagi kemajuan sebuah organisasi sangat diperlukan sekali adanya perencanaan strategik yang benar-benar berfungsi merespon perubahan lingkungan eksternal bagi pencapaian tujuan organisasi yang dirasakan masyarakat. Ketajaman menganalisis apa yang benar benar dibutuhkan masyarakat menjadi suatu kebutuhan tersendiri untuk menjawab tantangan ke depan.

2. Integrasi Perencanaan Strategik dengan Peningkatan Mutu Lulusan

Apa yang dapat dipahami dari konsep mutu (*quality*)? Dalam konteks ini, mutu menggambarkan sifat dasar kebaikan, keindahan dan kebenaran". Membuat sesuatu sesuai harapan pelanggan berarti bermutu. Dengan kata lain, harus melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan (*fit for their purpose*). Dalam kaitan ini, ada ukuran spesifikasi suatu barang, atau mencapai keinginan pelanggan. Ini maksud bermutu. Sallis (1993:24) mengajukan definisi mutu adalah kepuasan terbaik dan tercapainya kebutuhan/keinginan pelanggan. Arcaro (1999) menyebutkan mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan".

Bertolak dari pendapat Hoy (2000:15) bahwa: *Quality is often defined in term of outcomes to match a customer's satisfaction*". Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa mutu adalah ukuran terhadap sesuatu yang diharapkan tercapai dari suatu produk atau layanan bagi para pelanggan yang ada. Kepuasan orang tua, masyarakat, dan pihak terkait (*stakeholders*) terhadap lulusan berkualitas dan pelayanan sekolah yang baik merupakan kata kunci mutu sekolah yang diandalkan. Kesesuaian hasil dengan kepuasan pelanggan adalah indikator mutu setiap sekolah.

Menurut Tampubolon mutu adalah "paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan atau kebutuhan yang tersirat, masa kini dan masa depan" (Tampubolon, 1992:108). Selanjutnya Tampubolon mengemukakan dalam "pemahaman umum, mutu dapat berarti mempunyai sifat yang terbaik dan tidak ada lagi yang melebihinya. Mutu tersebut disebut *absolute*, dan di lain pihak mutu dapat berarti kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang disebut mutu *relative*." Mutu *absolute* juga mengandung arti: (1) sifat terbaik itu tetap atau tahan lama, (2) tidak semua orang dapat memiliki, dan (3) eksklusif. Mutu *relative* selalu berubah sesuai dengan perubahan pelanggan, dan sifat produk selalu berubah sesuai dengan keinginan masyarakat.

Deming sebagaimana dikemukakan Arcaro (2005:8) ada beberapa prinsip pokok mutu yang dapat diterapkan dalam bidang pendidikan adalah: (1) Anggota dewan sekolah dan administrator harus menetapkan tujuan mutu pendidikan yang akan dicapai, (2) Menekankan pada upaya pencegahan kegagalan pada siswa, bukannya mendeteksi kegagalan setelah peristiwanya terjadi, (3) Asal diterapkan secara ketat, penggunaan metode kontrol statistik dapat membantu memperbaiki *out comes* siswa dan administratif.

Selanjutnya dijelaskan juga Juran dalam Arcaro (2005:9) mutu adalah: (1) Meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir, (2) Perbaikan mutu merupakan proses berkesinambungan, bukan program sekali jalan, (3) Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator, (4) Pelatihan massal merupakan prasyarat mutu, (5) Setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan. Transformasi menuju sekolah bermutu terpadu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staf, siswa, guru dan komunitas. Prosesnya diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu

untuk wilayah dan setiap sekolah serta departemen dalam wilayah tersebut. Visi mutu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, mendorong keterlibatan total komunitas dalam program, mengembangkan sistem pengukuran nilai tambah pendidikan, menunjang sistem yang diperlukan staf dan siswa untuk mengelola perubahan, serta perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat produk pendidikan menjadi lebih baik.

Saat membicarakan mutu pendidikan, seringkali yang dibicarakan adalah perbaikan peringkat kenaikan kelas atau nilai rapor juga nilai kelulusan. Problematika yang dihadapi saat ini adalah apakah ada lembaga-lembaga yang memberi penghargaan terhadap institusi pendidikan di Indonesia. Pertanyaan lainnya, apakah lembaga pendidikan di Indonesia pada semua jenjang telah memperhatikan, menerapkan, dan menjaga kualitasnya untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, baik tingkat regional maupun global. Kemudian, ada dua hal yang selalu menjadi pertanyaan mendasar untuk memahami kualitas dalam setiap situasi, yaitu apa produknya dan siapa pelanggannya.

Sallis (1993) menjelaskan bahwa Jepang memiliki satu kata untuk pendekatan kualitas berkelanjutan, yaitu "Kaizen" yang artinya peningkatan yang dilakukan tahap demi tahap. Esensi kaizen adalah sebuah proyek kecil yang membangun kesuksesan dan kepercayaan dengan membangun dasar bagi pengembangan selanjutnya. Juran menegaskan bahwa cara terbaik untuk menangani proyek besar adalah dengan membagi proyek ke dalam bagian-bagian manajemen yang lebih kecil yang dapat dicapai secara rasional. Pendekatan peningkatan kualitas tersebut prosesnya tidak mesti mahal, tetapi tepat karena penggunaan uang yang tidak tepat tidak akan menghasilkan kualitas yang tepat pula. Tiang penopang *Total Quality Management* (TQM) menurut Bill Creech adalah produk, proses, organisasi, kepemimpinan, dan komitmen. Tiap program TQM harus memenuhi kriteria orientasi mutu dan pola pikir mutu, berciri humanistik yang kuat, pendekatan desentralisasi dengan memberi delegasi wewenang pada semua tingkat organisasi, serta penerapannya secara utuh dan menyeluruh (holistik), sehingga metode, teknik, dan piranti TQM dilakukan di setiap bagian organisasi (Sagala, 2004:49).

Peningkatan mutu lulusan sekolah hanya mungkin dilaksanakan manakala ada perencanaan yang terpadu dan berjangka panjang dalam sebuah sekolah. Karena itu, konsep sistem mutu menjadi bagian integral

dalam pelaksanaan perencanaan strategik sekolah dalam rangka pencapaian mutu lulusan sekolah yang handal. Sebuah sistem mutu harus di desain dengan melibatkan langkah-langkah kegiatan berikut: (1) mengetahui apa yang dilakukan, (2) mempelajari, memperbaiki dan menyempurnakan metode dan prosedur, (3) mencatat apa yang dilakukan, (4) melakukan apa yang telah direncanakan untuk dilaksanakan (5) mengumpulkan bukti keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan dan menyebarluaskannya.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa lulusan merupakan produk pendidikan pada kenyataannya memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar. Hal ini menurut Permadi dalam Mulyasa (2004:226) karena lulusan peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya adalah individu yang perilaku dan perbuatannya sesungguhnya bukan hanya dipengaruhi ilmu dan perbuatannya sesungguhnya bukan hanya dipengaruhi ilmu dan keterampilan yang diperolehnya selama pendidikan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk motivasi kerja, sikap dan latar belakang budaya serta pengaruh lingkungan.

Dengan demikian pendidikan yang bermutu tidak dapat hanya dilihat dari kualitas lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan).

Menurut Field (1994:55), aktivitas manajemen kendali mutu di sekolah terdiri dari: (1) standar mutu produk, (2) standar dalam proses pekerjaan, (3) standar prosedur kerja (model pembelajaran), (4) pengukuran jaminan (standar tes), (5) Poin kendali (tes mata pelajaran yang dibuat guru), (6) prosedur kendali (validasi tes dan Administrasi), (7) proses kemampuan (jawaban pelajar atas permasalahan), (8) proses aliran kegiatan belajar, (9) Pemeriksaan dan ujian, (10) audit kualitas mutu, (11) audit mutu proses, (12) sistem pencatatan mutu, (13) program penyediaan mutu, (14) kendali mutu dengan statistik, (15) biaya mutu, (16) klasifikasi dari karakteristik tujuan".

Untuk melakukan kendali mutu dengan mencegah prestasi rendah, tidak naik kelas, tidak lulus, atau keluar dari sekolah sebelum waktunya, pimpinan sekolah harus memperhatikan kegiatan yaitu: (1) peninjauan ulang (audit kurikulum atau pembelajaran), (2) tindakan perbaikan (pembelajaran remedial), (3) sistem audit mutu (akreditasi), (4)

memperkuat hubungan orang tua dengan sekolah, (5) tes penempatan pelajar, (6) pengembangan produk/program baru, (7) pengembangan proses baru (perbaikan program pengajaran) (Field, 1994:56).

Agar sekolah atau madrasah tetap bertahan dan mampu merespon kebutuhan masyarakat pada setiap zaman, maka ia harus memiliki strategi peningkatan kualitas dan cara pengukurannya yang efektif. Strategi tersebut pada dasarnya bertumpu pada kemampuan memperbaiki dan merumuskan visinya setiap zaman yang dituangkan dalam rumusan tujuan pendidikan yang jelas. Tujuan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam pendidikan yang aplikabel, metode dan pendekatan yang partisipatif, guru yang berkualitas, lingkungan pendidikan yang kondusif serta sarana prasarana yang relevan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Inti dari strategi tersebut bertolak dari pandangan terhadap pendidikan sebagai alat untuk membantu atau menolong masyarakat agar eksis secara fungsional ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan ajaran Islam (Nata, 2003:171-172).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mutu lulusan sebuah sekolah dapat dilihat dari prestasi akademik yang dicapai, mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, berkepribadian yang baik, dan cepat memperoleh pekerjaan yang sesuai keahliannya.

D. Penutup

Perencanaan merupakan akar bagi organisasi, tanpa adanya perencanaan tidak mungkin organisasi berdiri dengan tegak. Manajer yang baik adalah manajer yang mampu membuat perencanaan berdasarkan kebutuhan organisasi, dan perencanaan yang dibuat tentu saja berdasarkan studi yang mendalam sehingga seluruh perencanaan tidak lari dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan target organisasi.

Menentukan perencanaan organisasi memang menjadi kewenangan dan tanggungjawab *top manager*, namun perlu disadari bahwa ketika perencanaan telah selesai maka selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dikalangan organisasi sehingga seluruh jajaran organisasi mengerti dan mengetahui apa yang telah direncanakan dan siapa saja yang harus melakukan rencana itu.

Seluruh jajaran organisasi selayaknya mengetahui apa yang direncanakan organisasi, dan *top manager* selayaknya melakukan sesuatu

yang bersifat simpati sehingga muncul empati dikalangan jajaran organisasi untuk secara bersama-sama konsisten dan berkomitmen dalam menjalankan seluruh perencanaan tersebut. Terdapat berbagai hal yang mengakibatkan perencanaan mengalami hambatan ketiuka akan dilaksanakan. Hambatan itu bukan hanya karena masalah kesiapan sumber daya organisasi, tetapi juga karena masalah-masalah kesiapan sumber daya dalam memahami makna perencanaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro, Jerome S, *Pendidikan Berbasis Mutu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Barron, Thomas C, *The Role of Consultants*. dalam James R.Gadrner,dkk. *Handbook of Strategic Planning*, New York: John Willey Sons, 1986.
- Beare, Hedley, dkk, *Creating Excellent School*, New York: Routlege, 1989.
- Bryson, John M, *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organiztions*, San Francisco: Jossey-Bass, 1988.
- Hoy, Charles, dkk, *Improving Quality in Education*, London: Longman Publishing. 2000.
- Johson, R.A, dkk, *The Theory and Management System*, Tokyo: Mc Graw Hill Kogakusha. 1973.
- Mondy, R.W and Premaux, S. R.1995, *Management*, New Jersey: Prentice Hall, 1995.
- Mulyasa, E, *Menjadi Kepala Sekolah Profesioanal Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Robbins, S.P, *Management, Concepts and Practices*, New Jersey: Prentice Hall. 1984.
- Rusyan, Tabrany, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Wijaya. 1992.
- Sagala, Saiful, *Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, Jakarta, PT Nimas Multima. 2004.
- Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, Kogan Page Educational Management Series. Philadelphia, London. 1993.
- Siagian, Sondang. P, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Gunung Agung. 1997.
- State of Arizona Governor Hull Office of the Governor, *Strategic Planning Handbook*. 1988.
- Tampubolon, Daulat P, *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Terry, George, R, *The Principle of Management*, Illionis. 1973.

ANTARA MENDIDIK DAN MENGAJAR

PEBELAJARAN YANG MENDIDIK

Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.

A. Pendahuluan

Proses pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, adalah upaya yang harus berlangsung secara terus-menerus yang memungkinkan peserta didik itu mencapai perkembangan yang maksimal. Secara filosofis, pendidikan memiliki kewajiban yang bersifat normatif untuk menjadikan peserta didik menjadi dirinya, melalui berbagai proses pendidikan dan pembelajaran sehingga memunculkan jati diri peserta didik yang sesungguhnya.

Pendidikan dalam konteks ini, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menjadikan peserta didik sebagai manusia yang sempurna. Konotasi sempurna disini merupakan wujud dari tanggung jawab pendidikan melalui pendidikannya agar setiap peserta didik tumbuh dan berkembang berdasarkan kodrat yang dimilikinya. Karenanya, tanggung jawab proses pendidikan akan memberikan ruang yang luas bagi pendidik untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam proses tersebut.

Pendidikan bagaimanapun akan menentukan arah hidup dan kehidupan peserta didik. Menjadi kegalauan yang bersifat komprehensif jika pendidikan tidak mampu menciptakan sesuatu yang memungkinkan peserta didik mendapatkan arah yang lebih baik dalam hidup dan kehidupan masa depannya. Dengan demikian, pendidikan yang diselenggarakan selayaknyalah mampu terlaksana dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

Pembelajaran mendidik dapat dimaknai dari segi prinsip, proses dan hasil. Dari segi prinsip diharapkan pendidikan mampu diselenggarakan berdasarkan tujuan, baik tujuan yang bersifat normatif (peserta didik menjadi berubah) maupun yang bersifat intelektual (cerdas dan beriman). Pembelajaran mendidik dalam konteks proses diselenggarakan berdasarkan kebutuhan peserta didik dan karenanya harus dilayani secara individual

oleh para pendidik dan sistem manajemen yang mumpuni. Sedangkan dalam konteks hasil, dapat dimaknai terjadinya kemampuan peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan lingkungannya berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Jika mengacu kepada makna prinsip, proses dan hasil tersebut, maka pembelajaran yang mendidik merupakan keharusan yang tidak dapat diabaikan. Untuk itulah, diperlukan suatu manajemen yang benar-benar mampu mengakomodasi seluruh kepentingan peserta didik. Dalam kaitan ini, manajemen pembelajaran harus mengacu kepada hal-hal berikut:

1. terdapatnya guru yang memiliki kompetensi profesional
2. manajemen sekolah/madrasah yang mengacu kepada mutu
3. kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masa depan peserta didik
4. manajemen persekolahan/madrasah yang bersifat visioner
5. sarana dan fasilitas yang memadai dan dapat dimanfaatkan warga persekolahan secara maksimal dan alami
6. kegiatan ekstra-kurikuler yang memacu kreativitas peserta didik, dan
7. keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung seleuruh program sekolah/madrasah.

Secara faktual, sebenarnya apa yang terdapat dalam ítem-ítem diatas telah dimiliki oleh sekolah/madrasah. Persoalan yang muncul dalam melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik itu pada dasarnya karena ketidakkonsistenan sehingga tidak diperoleh komitmen yang bersifat komunal dikalangan warga sekolah/madrasah. Belum lagi karena adanya budaya yang kemiskinan kreativitas dalam proses pembelajarn dan ditambah dengan sistem pengawasan yang tidak menjadi berjalannya apa yang diharapkan.

Karenanya, pencapaian tujuan pembelajaran yang mendidik tidak secara utuh atau komprehensif diperoleh. Apalagi, guru sebagai garda terdepan dalam membelajarkan peserta didik, masih mengalami hambatan yang bersifat budaya ketika melaksanakan proses pembelajaran. Padahal, gurulah sebenarnya yang akan menentukan kemana arah pendidikan dan pembelajaran itu.

Sebagaimana keluhan berbagai pihak, pembelajaran yang mendidik ternyata mengalami berbagai masalah. Masalah-masalah itu terkait dengan komitmen untuk menyadari arti pendidikan secara luas. Bukan hanya diartikan sebagai proses menjadikan peserta didik menjadi tahu akan

segalanya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana peserta didik menjadi berubah dan dapat menyesuaikan diri dengan lngkungannya, tanpa mengabaikan potensi dan kompetensi yang telah dimilikinya.

Sejalan dengan kondisi kontekstual yang dirasakan peserta didik pada saat ini, tentu saja pembelajaran yang mendidik itu perlu dilakukan dengan mengutamakan keterampilan pendidik atau guru. Hanya guru yang memiliki keterampilanlah yang dapat melakukan pembelajaran yang mendidik. Hanya guru yang memiliki komitmen dan sadar profesilah yang membuat pembelajaran mendidik itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, diperlukan pemahaman guru terhadap apa yang harus dilakukannya seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan pada saat ini.

Berbagai perubahan yang terjadi saat ini, menjadikan peserta didik tidak mandiri dan gamang dengan keadaan yang dihadapinya, cenderung lemah mengenali kondisi riil lingkungannya. Keadaan ini seharusnya cepat diantisipasi guru, guru selayaknya mengenali berbagai fenomena yang terjadi pada peserta didik, sehingga memungkinkan guru melakukan sesuatu secara benar dan tepat.

Kekurangan rata-rata anak sekarang karena tak memiliki kemampuan yang tidak diberikan sekolah. Tak bisa kalau disuruh menjahit sendiri kancing baju yang copot, menyalakan komor, atau menceplok telur. Tak berani menjadi berbeda (*lateral thinking*). Banyak sekali ragam pengetahuan dan keterampilan diranah yang tersembunyi dibalik kecerdasan formal yang tidak dikembangkan sekolah, padahal besar manfaatnya buat kehidupan. Tak cukup dengan memperluas wawasan diluar ilmu yang seolah berikan. Anak harus melakoninya (Hendrawan Nadesul, *Kompas*, Senin, 4 Februari, 2008, hal. 14).

Kekurangan yang bersifat krusial ini, mengganggu tujuan dan prinsip pendidikan secara konseptual dan akan meningkatkan kejenuhan berbagai upaya dalaam memberikan pendidikan yang berkualitas terhadap peserta didik. Perilaku yang berlebihan dalam memberikan perlindungan kepada anak atau peserta didik, merupakan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Namun demikian, memang diperlukan upaya yang bersifat menyeluruh agar hal itu tidak terjadi dan dapat dielemenisasi secara proporsional.

B. Mengenali Karakter Belajar Peserta Didik

Setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri, hal ini tentu saja sejalan dengan prinsip bahwa setiap peserta didik adalah manusia utuh yang membawa minat, bakat, dan keinginan tertentu yang dapat dipastikan berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan ini bukan sesuatu yang aneh, tetapi justru menunjukkan bahwa karakteristik setiap manusia tidaklah sama secara individual.

Dalam pembelajaran, telah diidentifikasi perbedaan gaya atau tipe belajar peserta didik, perbedaan itu dapat dibagi kepada tiga hal, yaitu gaya atau tipe belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Dalam *Quantum Learning*, dikemukakan oleh Bobbi de Porters dan Mike Hernacki, bahwa peserta didik memiliki tiga tipe, yaitu tipe visual (senang membaca daripada mendengar), tipe auditorial (senang mendengar daripada mencatat atau membaca), dan tipe kinestetik (senang dalam aktivitas bergerak dan berinteraksi dalam kelompok). Untuk lebih jelasnya karakteristik ketiga tipe tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

No	Visual	Auditorial	Kinestetik
1	Rapi dan teratur	Berbicara kepada diri sendiri saat berekreasi	Berbicara dengan perlahan
2	Berbicara dengan cepat	Mudah terganggu oleh keributan	Menanggapi perhatian fisik
3	Perencanaan dan pengaturan jangka panjang yg baik	Menggerakkan bibir & mengucapkan apa yg sedang dibacanya	Menyentuh orang utk mendapatkan perhatian orang
4	Mementingkan penampilan, baik dalam berpakaian maupun presentasi	Senang membaca dengan keras dan mendengarkan	Berdiri dekat, ketika berbicara dengan orang
5	Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka	Dapat mengulangi kembali, baik nada, suara, berirama	Berorientasi pada fisik dan gerak
6	Mengingat apa yang dilihat dari pada apa yang didengar	Kesulitan dalam menulis, hebat dalam berbicara	Mempunyai perkembangan otot awal yang besar
7	Mengingat dengan asosiasi visual	Berbicara dengan irama yg berpola	Belajar melalui praktek
8	Biasanya tidak terganggu oleh keributan	Biasanya pembicara yang fasih	Menghafal dengan cara berjalan dan melihat

9	Mempunyai masalah terhadap instruksi verbal, kecuali ditulis, dan sering meminta untuk mengulang	Lebih suka musik daripada seni	Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca
10	Pembaca yang cepat dan tekun	Belajar dengan mendengar dan mengingat apa yg didis kusikan daripada yg diingat	Banyak menggunakan isyarat tubuh
11	Lebih suka membaca daripada dibacakan	Suka berbicara, berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar	Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama
12	Mencoret-coret tanpa arti baik dalam rapat atau waktu nelson	Mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan visual	Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi
13	Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain	Lebih pandai mengeja dgn keras daripada menulisnya	Kemungkinan tulisannya jelek
14	Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat	Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik	Ingin melakukan segala sesuatu
15	Lebih suka menyampaikan demonstrasi drpd berpidato		Menyukai permainan yang menyibukkan
16	Lebih suka seni daripada musik		

Perbedaan karakter belajar peserta didik diatas tentu saja merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, oleh karenanya, diperlukan pola pembelajaran yang memungkinkan perbedaan karakter atau gaya belajar diatas dapat diselaraskan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi karakter belajar peserta didik itu, dapat dilakukan melalui pola narasi (pengisahan).

Pola narasi menurut Winkel (1987:178-179) adalah prosedur didaktik yang tercakup dalam istilah "memberikan ulasan", seperti menyampaikan informasi, memberikan penjelasan, memberikan uraian (ceramah), menceritakan suatu kisah, mengutarakan suatu masalah dan memberikan suatu demonstrasi. Kegiatan tenaga pengajar terutama bersifat verbal, sehingga siswa harus mendengarkan, biarpun digunakan berbagai media audio visual untuk menunjang ulasan verbal, seperti papan tulis, peta, model, gambar atau foto dan lain sebagainya. Sambil memberikan ulasannya, guru

berdiri di depan siswa. Untuk melibatkan siswa, guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan dan siswa pun diberi kesempatan untuk mengajukan satu-dua pertanyaan.

Jika ditelaah secara mendasar, dapat dilihat bahwa dalam pembelajaran yang mendidik, peserta didik selayaknyalah ditempatkan dalam kondisi yang memungkinkan ia dapat memperoleh pendidikan dan pembelajaran secara tepat. Kondisi yang aman, nyaman dan memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang, merupakan kondisi yang menjadi tuntutan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

John Dewey (Suryobroto, 1997:85) menekankan juga bahwa dalam proses pendidikan anak adalah yang utama, dan bukan mata pelajaran yang utama. Dia menekankan lagi bahwa guru seharusnya menjadi penunjuk (*guide*) bagi anak, dan bukan merupakan kamus berjalan bagi anak. Dalam karyanya yang terkenal "*Democracy and Education*" dia melukiskan bahwa pendidikan adalah merupakan kegiatan penyediaan kondisi yang menjamin pertumbuhan, atau kehidupan yang memadai, tanpa memandang umur. Disini lebih kami tunjukkan bahwa pendidikan merupakan kegiatan membantu pertumbuhan anak, sehingga kebutuhan anak adalah seharusnya yang utama.

Pandangan Dewey diatas, dianggap sebagai pandangan yang bersifat universal, dimana kondisi peserta didik yang nyaman dan aman untuk belajar, sebagai bagian dari upaya untuk tumbuh dan kembangnya potensi yang dimiliki peserta didik, menjadi perhatian utama dalam proses pembelajaran yang dialami peserta didik. Karenanya, disamping karakteristik belajar peserta didik diatas (*visual*, *auditorial* dan *kinestetik*), masih terdapat hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengelompokan kepribadian peserta didik.

Pollard (Karli, 2003:26-27) mengelompokkan kepribadian siswa dalam 5 kelompok besar yaitu:

1. *Impulsivity/Reflexivity* (Kaagan, 1964): Gambaran *impulsivity* adalah orang yang tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas tanpa berpikir lebih dahulu sedangkan *reflexivity* adalah orang yang sangat mempertimbangkan tugas tersebut tanpa berkesudahan.
2. *Extroversion/Introversion* (Eysenk, 1969): Gambaran *extroversion* adalah orang yang ramah, terbuka bahkan kadang-kadang tergantung dari perlakuan teman-teman sekelompoknya sedangkan *introversion* adalah

orang yang tertutup dan sangat pribadi malah kadang-kadang tidak mau bergaul dengan teman-temannya.

3. *Anxiety/Adjustment* (Finlayson, 1977): Gambaran *anxiety* adalah orang yang merasa kurang dapat bergaul dengan teman, guru atau tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik sedangkan *adjustment* adalah orang yang merasa dapat bergaul dengan guru, teman atau dapat menyelesaikan masalah dengan baik.
4. *Vacillation/Perseverance* (Brookover, 1965): Gambaran *vacillation* adalah orang yang konsentrasinya rendah sering berubah-ubah, dan cepat menyerah dalam pekerjaan sedangkan *perseverance* adalah orang yang mempunyai daya konsentrasi kuat dan terfokus serta pantang menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan.
5. *Competitiveness/Collaborativeness* (Johsons & Johnson, 1975): Gambaran *competitiveness* adalah orang yang mengukur prestasinya dengan orang lain dan sukar bekerja sama dengan orang lain sedangkan *collaborativeness* adalah orang yang sangat tergantung pada orang lain dan tidak dapat bekerja sendiri.

Berdasarkan pengelompokan kepribadian siswa di atas, seharusnya pendidik semakin mudah memahami serta mengidentifikasi setiap peserta didik yang menjadi tanggungjawabnya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pengenalan yang mendasar atas peserta didik, merupakan jalan awal bagi pendidik untuk melakukan proses pembelajaran. Pengenalan karakter dan kepribadian peserta didik, menjadi modal dasar bagi pendidik untuk melakukan interaksi yang bersifat komunikatif, sehingga berimplikasi positif dalam melaksanakan proses pembelajaran dan skenario yang telah ditetapkan pendidik.

C. Menyiapkan Peserta Didik untuk Belajar

Pembelajaran yang mendidik dapat dimaknai sebagai proses pembelajaran yang berlangsung antara peserta didik dengan pendidik dalam suasana yang menungkinkan peserta didik tumbuh dan berkembang secara proporsional, dengan mengacu kepada tujuan pendidikan secara ideografik dan nomotetik. Pembelajaran yang mendidik ini bukan hanya melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pendidik saja sebagaimana lazimnya, tetapi juga terkait dengan kelengkapan secara keseluruhan yang dimiliki

persekolahan, yang memungkinkan persekolahan itu dapat melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara utuh untuk mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan secara ideografik adalah untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik secara proporsional, sedangkan tujuan pendidikan secara nomotetik adalah agar peserta didik tumbuh dan berkembang berdasarkan tujuan lembaga pendidikan (Tilaar, 1994). Melalui proses pencapaian tujuan secara ideografik dan nomotetik ini, diharapkan akan terjadi proses pendidikan dan pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran yang mendidik inilah yang dalam konteks lebih luas merupakan upaya agar anak sebagai peserta didik dapat tumbuh dan berkembang mencapai tujuan pendidikan sebagaimana pilar-pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*).

Proses pembelajaran yang mendidik ini memang menuntut seorang guru benar-benar profesional dalam mengajar. Sulit untuk memastikan akan terjadi pembelajaran yang mendidik jika guru tidak memahami bagaimana mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Dalam proses pembelajaran, sebenarnya konsep yang tepat itu adalah *mengajar belajar* dan bukannya *belajar mengajar*.

Istilah *mengajar belajar* dan *belajar mengajar* bisa saja diperdebatkan secara etimologi (asal kata), tetapi dalam konteks pencapaian tujuan belajar, sebaiknya pendidik memang menguasai bagaimana peserta didik siap untuk belajar sehingga mengikuti proses pembelajaran berdasarkan skenario yang telah ditentukan oleh pendidik. Sebagai contoh atau ilustrasi, Bobbi De Porter dan Mike Hernachi memiliki sebuah eksperimen proses pembelajaran, yang dikenal dengan teori *Suggestology* atau *Suggestopedia*.

Dalam konsep ini sugesti sangat mempengaruhi situasi dan hasil belajar. Mengapa demikian? karena tugas utama dari setiap program belajar ialah *membuat pembelajar tergugah*, terbuka dan siap untuk belajar. Dalam hal ini setiap detail apapun memberikan sugesti positif atau negatif. Oleh karena itu tenaga kependidikan harus mampu memberikan sugesti yang positif agar tujuan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ada kecenderungan sebagian siswa memiliki asumsi negatif tentang belajar, asumsi ini cenderung menciptakan pengalaman yang negatif. Oleh karena itu pengalaman yang negatif ini harus diubah menjadi pengalaman yang

positif. Beberapa metode dalam menciptakan sugesti positif perlu ditanamkan kepada siswa. Misalnya mendukung peserta nyaman belajar, menciptakan suasana yang kondusif, menata kelas secara baik dan lain sebagainya (Suprarti dan Aziz, 2004:17).

Pembelajaran yang mendidik lazimnya menempatkan peserta didik sesuai dengan tuntutan proses pembelajaran. Sebagai subjek dalam proses pembelajaran, peserta didik harus dikenali dan dimuliakan sebagai anak yang siap untuk tumbuh dan berkembang, baik berdasarkan potensinya, seperti kecerdasan, bakat, minat, maupun ke mampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Tidaklah berlebihan jika pendidikan kita menganut prinsip atau filsafat konstruktivisme, yang memiliki kecenderungan pandangan bahwa peserta didik tumbuh dan berkembang tidak semata hanya karena proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran, tetapi juga secara signifikan dipengaruhi oleh kemampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan bagaimana peserta didik itu mengambil keputusan terhadap apa yang dialaminya selama proses pendidikan dan pembelajaran itu.

Filsafat konstruktivisme pada dasarnya memiliki pandangan bahwa pendidikan memberi kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang, persekolahan dianggap sebagai instrumen efektif dalam mengembangkan potensi peserta didik secara proporsional. Setiap peserta didik tentu saja memiliki perbedaan dalam berbagai hal, perbedaan inilah yang perlu dipahami pendidik sebagai sesuatu yang unik.

Proses pembelajaran yang mendidik tentu saja menempatkan peserta didik sebaik-baiknya agar peserta didik merasakan manfaat dari proses pendidikan itu. Sebagai ilustrasi akan dikemukakan bagaimana sebaiknya menempatkan peserta didik dalam pembelajaran. Dorothy Law Nolte memberikan pandangan yang baik bagaimana setiap pendidik menempatkan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ia mengingatkan sebagai berikut:

- Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki
- Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi
- Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah
- Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali diri
- Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri
- Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian

Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah
 Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri
 Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri
 Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai
 Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar menyintai
 Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar memotivasi diri
 Jika anak dibesarkan dengan tidak banyak dipersalahkan, ia belajar menjadi diri sendiri
 Jika anak dibesarkan dengan jujur, ia terbiasa melihat kebenaran
 Jika anak dibesarkan dengan rasa cinta, ia telah belajar menyayangi orang lain dan dirinya

Pemahaman tentang bagaimana memperlakukan peserta didik dalam proses pembelajaran di atas, merupakan salah satu proses untuk menjadikan proses pendidikan dan pembelajaran benar-benar menganut prinsip pembelajaran yang mendidik. Proses pembelajaran yang mendidik itu dapat juga diistilahkan sebagai proses pembelajaran prosedur didaktik.

Oleh Winkel (1987:178) menjelaskan bahwa prosedur didaktik dapat dengan berbagai cara, misalnya bila dikatakan: perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh tenaga pengajar, yang menyangkut penyajian mata pelajaran, supaya siswa dapat mencapai tujuan instruksional tertentu. Maka, kiranya lebih tepatlah kalau proses didaktik diartikan sebagai berikut: kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pengajar selama proses belajar mengajar berlangsung, supaya siswa mencapai tujuan instruksional dengan cara seefektif mungkin. Kegiatan-kegiatan ini juga mencakup penentuan media pengajaran yang sesuai, bentuk pengelompokan siswa yang sesuai dan materi pelajaran yang cocok.

Kesiapan peserta didik dalam belajar, merupakan tuntutan yang dibebankan kepada pendidik. Tugas pendidik ketika akan berlangsung skenario pembelajaran di dalam kelas, adalah menciptakan suasana yang memungkinkan peserta didik siap untuk belajar dan memungkinkan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran itu berdasarkan tujuan-tujuan yang telah dipersiapkan oleh pendidik.

Walaupun Kurikulum 2004 secara ketat menuntut penguasaan kompetensi, namun guru di kelas harus mampu melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Konsep belajar menyenangkan itu dikenal dng istilah *Edutainment*, yaitu suatu proses pembeljrn yg didesain

sedemikian rupa sehingga muatan dik & hiburan dikombinasikan secara harmonis, sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan biasanya dilakukan dengan humor, permainan (*game*), bermain peran (*role-play*) dan demonstrasi.

Adapun bentuk-bentuk *edutainment* menurut Sutrisno (2005:31-35) adalah:

- (1) Humanizing the Classroom, artinya memanusiawikan ruang kelas. Dalam hal ini guru hrs memperlakukan siswanya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Guru harus mampu mendorong siswa untuk: (a) menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah, (b) mencari konsep dan identitas diri, (c) memadukan kesadaran hati dan pikiran.
- (2) Active Learning, artinya pembeljrn aktif. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Pernyataan Confucius yang dijadikan credo oleh Silberman dapat dijadikan acuan pembelajaran aktif;

What I hear, I forget
 What I hear and see, I remember a little
 What I hear, see, and ask questions about or discuss with someone else, I begin to understand
 What I hear, see, discuss, and do, I acquire knowledge and skill
 What I teach to another, I master.
- (3) The Accelerated Learning, maksudnya pembelajaran yang dipercepat. Pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan dan memuaskan. Dalam hal, ini guru ketika mengelola kelas harus menggunakan *Somatic* (belajar dng bergerak dan berbuat); *Auditory* (belajar dng berbicara dan mendengarkan); *Visual* (belajar dengan mengamati dan menggambarkan); *Intellectual* (belajar dengan pemecahan masalah dan melakukan refleksi).
- (4) Quantum Learning, artinya cara penggabungan bermacam2 interaksi, hubungan dan inspirasi yang ada di dalam dandi sekitar momen belajar. QL mengasumsikan bahwa siswa, jika mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu, akan membuat loncatan prestasi yang tidak bisa terduga sebelumnya. Belajar dalam hal ini harus mengasyikkan dan berlangsung dalam suasana gembira, sehingga pintu masuk untuk informasi baru akan lebih besar dan terekam dengan baik.
- (5) Quantum Teaching, artinya mengubah suasana belajar yang monoton

dan membosankan ke dalam suasana belajar yang meriah dan gembira dengan memadukan potensi fisik, psikis dan emosi siswa menjadi satu kesatuan yang integral.

Proses pembelajaran yang menggunakan berbagai pendekatan diatas, merupakan inovasi dalam pola pembelajaran yang dapat menghasilkan efektivitas belajar. Karenanya, berbagai pola atau pendekatan diatas, merupakan pendekatan yang layak untuk dilaksanakan atau diterapkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik, akan memberikan peluang yang besar dan luas bagi peserta didik untuk dapat menyerap materi pembelajaran secara utuh.

Seluruh inovasi pendidikan dan pembelajaran yang saat ini banyak ditawarkan untuk diterapkan, adalah untuk memberikan keberhasilan yang efektif dalam pembelajaran di dalam kelas. Inovasi pembelajaran itu merupakan model-model pembelajaran yang dianggap efektif untuk diterapkan dan hasilnya akan berguna bagi hasil pembelajaran itu. Diantara model2 mengajar (Mukhtar, 2003:132-135) yang dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas agar peserta didik lebih siap untuk belajar, adalah:

1. *Model pemrosesan informasi*, guru menjelaskan bagaimana siswa selaku individu memberi respons yang datang dari lingkungannya.
2. *Model pribadi*, diorientasikan kepada perkembangan diri siswa selaku individu. Penekanannya diarahkan kepada pembentukan realitas yang unik.
3. *Model interaksi sosial*, menekankan hubungan siswa dengan lingkungannya di sekolah, terutama di dalam kelas. Pada model ini siswa dihadapkan tuntutan situasi yang lebih bersikap demokratis.
4. *Model perilaku*, siswa diarahkan kepada suatu pola belajar yang lebih terfokus pada hal-hal yang spesifik.

Keempat model di atas seharusnya hanyalah sebagian dari model-model lain yang harus dikuasai oleh pendidik agar proses pembelajaran di kelas membuat peserta didik lebih siap untuk belajar. Oleh karenanya, guru atau lembaga pendidikan perlu menginventarisir dan mengidentifikasi apa-apa saja yang dapat dikonstruksikan model-model pembelajaran itu, agar memberikan kontribusi signifikan bagi kesiapan peserta didik dalam belajar.

D. Moral dan Etika dalam Pendidikan dan Pembelajaran

Guru kencing berdiri murid kencing berlari, adalah adagium yang tetap aktual dalam konteks pendidikan. Adagium ini mengindikasikan bahwa moral dan etika merupakan tanggung jawab pendidikan, oleh karena itu bagaimana proses pendidikan memperlakukan peserta didiknya, akan menentukan bagaimana moral dan etika peserta didik itu setelah selesai mengikuti pendidikan.

Menurut Azizy (2002:22-23) bahwa Moral dapat diartikan dengan "menyangkut baiknya buruknya manusia sebagai manusia"; kemudian moralitas dapat diartikan dengan "keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap-sikap moral seseorang atau masyarakat". Sebutan moral mengacu pada "baik-buruk" seseorang sebagai manusia, yang beraarti mengacu kepada perilaku, bukan pada fisi. Jadi, bukan sifat lahiriah seperti seorang yang "ganteng (bagus)" atau "cakep (cantik)". Sangat mungkin terjadi seseorang itu cantik, tetapi moralnya buruk atau bahkan jahat. Sedangkan etika pada dasarnya identik dengan *philosophy of moral*, atau "pemikiran sistematis tentang moralitas", dimana yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendalam dan kritis".

Memang terdapat perbedaan antara moral dan etika, tetapi perbedaan itu pada dasarnya adalah untuk saling memperkuat sehingga sehingga manusia diharapkan memiliki keduanya dalam kehidupan sehingga memudahkannya untuk dapat menyesuaikan diri. Setiap orang bagaimanapun dituntut untuk memiliki moral dan etika, sebab moral dan etika ini yang akan dapat menjadi perekat akibat adanya perbedaan antara sesama manusia.

Agar setiap orang bermoralitas, maka diperlukan etika. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas. Yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Etika mau menyediakan orientasi (Suseno, 1987: 15). Lebih lanjut Suseno (1987: 15-16) mengemukakan bahwa ada sekurang-kurangnya empat alasan mengapa etika pada zaman kita semakin perlu.

Pertama, kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moralitas. Setiap hari kita bertemu orang-orang dari suku daerah dan agama yang berbeda-beda, Kesatuan tatanan normatif sudah

tidak ada lagi. Kita berhadapan dengan sekian banyak pandangan moral yang sering saling bertentangan dan semua mengajukan klaim mereka pada kita. Mana yang akan kita ikuti? Yang kita peroleh dari orang tua kita dulu?. Moralitas tradisional desa? Moralitas yang ditawarkan melalui media masa?

Secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrokan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Situasi itu berlaku pada zaman sekarang juga, bahkan bagi kita masing-masing. Yang dipersoalkan bukan hanya apakah yang merupakan kewajiban saya dan apa yang tidak, melainkan manakah norma-norma untuk menentukan apa yang harus dianggap sebagai kewajiban.

Kedua, kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan itu terjadi di bawah hantaman kekuatan yang mengenai semua segi kehidupan kita, yaitu gelombang modernisasi. Dalam transformasi ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya itu nilai-nilai budaya tradisional ditantang semuanya. Dalam situasi ini, etika mau membantu agar kita jangan kehilangan orientasi, dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang boleh saja berubah dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap yang dapat kita pertanggungjawabkan.

Ketiga, tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya dan moral yang kita alami ini dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi mereka sebagai obat penyelamat. Etika dapat membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan objektif, dan untuk membentuk penilaian sendiri, agar kita tidak terlalu mudah terpancing. Etika juga membantu agar kita jangan naif atau ekstrim. Kita jangan cepat-cepat memeluk segala pandangan yang baru, tetapi juga jangan menolak nilai-nilai hanya karena baru dan belum biasa.

Keempat, Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang disatu pihak menemukan dasar kemampuan mereka dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut, dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik secara proporsional, namun pengembangan potensi yang dikedepankan tidak hanya aspek intelegensi saja, tetapi juga berkaitan dengan emosi, sikap

sosial serta lainnya yang memungkinkan anak didik atau peserta didik tersebut dapat menyesuaikan diri di masyarakatnya. Pendidikan memberikan kesempatan kepada pendidik dan peserta didik secara simultan untuk dapat menelaah nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, telaah yang dilakukan untuk menentukan apakah sesuatu itu dianggap benar atau tidak dan sekaligus untuk menentukan apakah ia harus dijadikan acuan atau tidak dalam bertindak laku.

Adakalanya pelanggaran atau pengabaian terhadap moral dan etika tersebut dilakukan karena sistem yang dibangun cenderung memberikan kesempatan untuk melanggar atau mengabaikannya. Seperti yang terjadi ketika sentralisasi dijadikan sistem dalam birokrasi pemerintahan, khususnya birokrasi pendidikan sebelum lengsernya rezim Orde Baru, berbagai pelanggaran moral dan etika terjadi secara sistematis, dan ini merupakan implikasi dari sistem sentralisasi. "Birokrasi pusat cenderung menekankan proses pendidikan secara klasikal dan bersifat mekanistik. Dengan demikian proses pendidikan cenderung diperlakukan sebagaimana sebuah pabrik. Akibatnya pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan, khususnya guru dan murid sebagai individu yang memiliki "kepribadian" tidak banyak mendapat perhatian" (Zamroni, 1996:108).

Situasi ini mengakibatkan menurunnya moral dan etika para pengelola pendidikan, yang oleh S. Bellen dikatakannya berimplikasi kepada berbagai hal, antara lain (1) kemandirian guru menjadi hilang, (2) sekolah berubah fungsi menjadi penarik biaya, (3) otonomi guru dan kepala sekolah menjadi tidak ada, (4) pejabat pendidikan cenderung berorientasi kepada yang bernilai uang, dan (5) pada umumnya buku paket tidak berisi proses belajar mengajar yang menganut prinsip belajar aktif (Republika, 17 April 1998). Terjadinya situasi ini ternyata tidak terlepas dari sistem yang dikembangkan birokrat, sehingga selalu terjadi berbagai tindakan yang melanggar moral dan etika, seperti perilaku yang menghalalkan kolusi, terjadinya konspirasi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar, korupsi dalam berbagai bentuk maupun nepotisme terjadi tanpa ada perasaan sungkan.

Bagaimana dengan guru sebagai tenaga pendidik yang harus memiliki komitmen yang kuat dan besar terhadap moral dan etika? Pada dasarnya pekerjaan guru sebagai sebuah profesi dilandasi moral atau etika, sehingga guru memiliki kode etik, kode etik inilah yang akan menentukan bagaimana guru berperilaku dalam kehidupan profesionalnya. Kode etik

guru adalah (1) berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, (2) memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, (3) berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, (4) menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar, (5) memelihara hubungan baik dengan orangtua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan, (6) secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, (7) memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial, (8) secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian, (9) melaksanakan segala kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kode etik sebagai landasan moral dan etika guru tersebut akan menentukan citra pendidikan secara keseluruhan, namun kode etik guru tersebut tidak akan efektif dijalankan jika satuan atasan yang menjadi pembina guru tidak menunjukkan moral dan etika yang benar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa guru berada pada posisi subordinat dalam birokrasi pendidikan. Walaupun ia dipuja sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi perilaku dan perlakuan yang diberikan kepadanya sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia adalah pahlawan. Padahal untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia peranan guru bersifat strategis dan sifatnya krusial. Apalagi dalam pembentukan moral, peran guru sangat besar seperti yang dikemukakan oleh Pieter (1989) dalam Bahrin (1994:31) "*basically, teacher is a moral teacher*". Sedangkan Suseno (1991) mengemukakan bahwa dalam hal moralitas, anak didik belajar bukan saja dari apa yang dikatakan, melainkan pula dari bagaimana dan siapa yang mengatakannya. Dalam hal ini tentu saja kata "bagaimana" dan "siapa" tersebut adalah kembali kepada sosok seorang guru. Oleh karena itu pendidikan moral atau etika anak didik secara efektif akan diperoleh dari guru.

Pekerjaan sebagai guru memang menghadapi tantangan yang cukup besar, karena profesi sebagai guru dapat dikatakan tidak terlalu menjanjikan masa depan yang dapat hidup lebih memadai atau dapat memenuhi kebutuhan secara memadai, keadaannya hanya cukup untuk bertahan hidup. Namun demikian mengapa banyak orang yang menjadi guru? Jika kita berpikir positif mengapa seseorang menjadi guru tentunya tidak terlepas

dari idealisme yang dimilikinya. Idealisme yang dimiliki oleh seseorang akan menentukan profesi apa yang akan digelutinya. Idealisme tersebut akan menentukan keberanian seseorang untuk tetap bertahan dengan keyakinannya dan memegang teguh keyakinan tersebut walaupun dengan keteguhan itu ia tidak akan menemukan pemenuhan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya.

Sekali lagi mengapa orang berani mengambil resiko untuk hidup sederhana dan apa adanya, seperti berprofesi sebagai seorang guru. Mungkin filsafat hidup guru cenderung kepada prinsip "Uang bukanlah segala-galanya, walaupun segala-galanya memerlukan uang". Dan juga tidak terlepas dari nilai yang dijadikan dasar dalam hidup seseorang atau guru tadi, dimana nilai itu pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu (1) nilai terminal, merujuk ke keadaan akhir dari eksistensi yang sangat diinginkan, dan inilah tujuan yang ingin dicapai hingga akhir hayat, dan (2) nilai instrumental, merujuk ke modus perilaku yang lebih disukai, atau cara untuk mencapai nilai-nilai terminal (Robbins, 2001:132), tipologi nilai terminal dan nilai instrumental tersebut dapat dilihat bagan berikut:

Nilai Terminal	Nilai Instrumental
Suatu hidup nyaman (hidup makmur)	Ambisius (kerja keras, bercita-cita tinggi)
Suatu hidup yang menggairahkan (hidup aktif, merangsang)	Berpikiran luas (berpikiran terbuka)
Rasa berprestasi (kontribusi lama)	Kapabel (mampu, efektif)
Suatu dunia damai (bebas dari perang dan konflik)	Riang (senang, efektif)
Suatu dunia yang indah (keindahan alam dan seni)	Bersih (rapi, teratur)
Kesamaan (persaudaraan, kesempatan yang sama untuk semua)	Berani (tegak mempertahankan keyakinan)
Keamanan keluarga (merawat orang lain)	Memaafkan (bersedia mengampuni orang yang dicintai)
Kemerdekaan (ketidakbergantungan, pilihan bebas)	Membantu (bekerja untuk kesejahteraan orang lain)
Kebahagiaan (kepuasan)	Jujur (tulus, tidak bohong)
Harmoni batin (bebas dari konflik batin)	Imaginatif (berani, kreatif)
Cinta yang dewasa (kekariban seksual dan spiritual)	Bebas (berdikari, mencukupi-diri)
Keamanan nasional (perlindungan terhadap serangan)	Intelektual (cerdas, reflektif penuh renungan)
Kesenangan (hidup santai dan dapat dinikmati)	Logis (konsisten, rasional)
Keselamatan (hidup abadi dan terselamatkan)	Mencintai (penuh kasih sayang, lembut)
Hormat kepada diri (menghargai diri)	Patuh (menurut, penuh hormat)
Pengakuan sosial (respek, pengakuan)	Sopan (santun, budi bahasa)
Persahabatan sejati (perkawinan karib)	Tanggung jawab (handal, dapat bergantung)
Bijaksana (pemahaman akan kehidupan yang matang)	Kendali-diri (disiplin-diri, tenang)

Nilai terminal dan instrumental memang diperlukan dalam hidup dan kehidupan oleh profesi apapun, tidak terlepas dengan profesi keguruan. Karena profesi keguruan memang memerlukan sikap yang betul-betul memiliki nilai moral dan etika yang mendasar, maka nilai tersebut harus

tetap aktual dalam kehidupan guru. Namun demikian sistem yang dibangun juga harus secara kondusif memungkinkan bagi tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan nilai secara benar dan konsekwen. Sebab jika sistem birokrasi yang dibangun tidak kondusif bagi guru untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut, maka pendidikan tidak akan efektif mengembangkan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa secara menyeluruh. Itulah sebabnya mengapa dalam pidato menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2002, Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar menegaskan peningkatan mutu sebagai target pada periode reformasi (1998 – sekarang), peningkatan mutu akan dilandasi kekuatan akhlak dan budi pekerti, serta kecakapan untuk hidup. Sebelumnya pada rapat koordinasi kesejahteraan rakyat pada 28 Maret 2002, akan dilakukan sesegera mungkin terobosan untuk mengakhiri segala bentuk “kompromi” dan perilaku tak terpuji pada praktik pendidikan (Kompas, 3 Mei 2002). Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa telah muncul kesadaran bersama untuk memerangi berbagai tindakan yang mengarah kepada pelanggaran moral dan etika dalam dunia pendidikan, dimana sebelumnya selalu terjadi secara terang-terangan sehingga menjadi budaya dalam organisasi pendidikan.

Untuk mengatasi hal itu tawaran pendidikan nilai memang perlu menjadi perhatian utama dalam dunia pendidikan. Brotosiswoyo (Sindhunata, 2000:110), Pendidikan nilai ditujukan, terutama, pada penanaman nilai-nilai untuk menangkis pengaruh nilai-nilai negatif atau yang cenderung mendorong nilai-nilai negatif, dalam artian moral yang merupakan akibat arus globalisasi. Untuk memerangi kecenderungan materialisme, konsumerisme, dan hedonisme.

Permasalahan dalam pendidikan nilai menurut Brotosiswoyo, (Sindhunata, 2000:111), adalah pada tingkat pendidikan mana pendidikan atau pelajaran agama atau budi pekerti bagi pendidikan nilai itu bisa dimulai sesuai dengan kematangan intelektual dan pengetahuan keagamaan peserta didik, apalagi dengan tujuan saling mengenal iman masing-masing. Selanjutnya dikemukakan bahwa pertama, tidak semua segi iman dapat dijelaskan dan difahami oleh kemampuan rasional dan intelektual manusia, kedua, berbagai segi iman dari agama berbeda tidak dapat didamaikan. Sebab itu, fokus budi pekerti dalam pengertian di atas adalah mendiskusikan, menemukan dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, seperti cinta kasih sesama, persamaan, keadilan, hak azasi manusia, dan kepentingan umum, di samping nilai-nilai lain yang sudah disebutkan dalam menghadapi kemungkinan dampak globalisasi.

Sementara itu bagaimana agar guru tersebut memiliki moral dan etika dalam melaksanakan tugasnya? Pertanyaan ini sebenarnya tidaklah sukar untuk dijawab, sebab profesi guru memang menuntut agar guru dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan profesi keguruannya. Oleh karena itu tuntutan yang harus dipenuhi guru agar ia dapat dikatakan sebagai guru yang memiliki moral dan etika jika ia: (1) memegang teguh kode etik guru, dan (2) menguasai kompetensi guru. Jika kedua unsur ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan profesi keguruan tersebut, sepertinya guru tersebut telah layak untuk dikatakan sebagai guru yang memiliki moral dan etika.

Apakah hanya itu saja yang dapat menjadikan seorang guru akan memiliki moral dan etika dalam melaksanakan tugasnya? Untuk kesempurnaan melaksanakan tugasnya tersebut, berbagai upaya telah dan akan dilakukan oleh pemerintah, seperti adanya rencana renumerasi baru terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya. Jika rencana renumerasi tersebut semakin dapat meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan lainnya, diharapkan tidak akan terjadi lagi pelanggaran atau pengabaian moral dan etika ketika fungsi dan tugas keguruan dijalankan. Renumerasi bukan hanya dalam bentuk materi saja, tetapi juga yang bersifat nonmateri, agar terjadi keseimbangan dalam melihat fungsi pendidikan sebagai preservasi manusia sekaligus sebagai upaya memanusiakan manusia oleh manusia yang telah memanusia.

E. Keprofesionalan Guru sebagai Dasar Proses Pembelajaran yang Mendidik

Keprofesionalan guru akan terbentuk jika memiliki standar kompetensi. Ruang lingkup standar kompetensi guru yang meliputi 3 komponen kompetensi: *Pertama*, komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran yang mencakup: (1) penyusunan perencanaan pembelajaran; (2) pelaksanaan interaksi belajar mengajar; (3) penilaian prestasi belajar peserta didik; (4) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian. *Kedua*, Komponen kompetensi pengembangan potensi yang diorientasikan pada pengembangan profesi. *Ketiga*, Komponen kompetensi penguasaan akademik yg mencakup: (1) pemahaman wawasan kependidikan; (2) penguasaan bahan kajian akademik (Depdiknas, 2004:9). Rincian komponen kompetensi guru dapat dilihat pada tabel berikut:

Komponen Pengelolaan Pembelajaran	
KOMPETENSI	INDIKATOR
1. Penyusunan rencana pembelajaran	1. Mampu mendeskripsikan tujuan/kompetensi pembelajaran 2. Mampu memilih/menentukan materi 3. Mampu mengorganisir materi 4. mampu menentukan metode/strategi pembelajaran 5. Mampu menentukan sumber bel/media/alat peraga pembelajaran 6. Mampu menyusun perangkat penilaian 7. Mampu menentukan teknik penilaian 8. Mampu mengalokasikan waktu
2. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar	1. Mampu membuka pelajaran 2. Mampu menyajikan materi 3. Mampu menggunakan metode/media 4. Mampu menggunakan alat peraga 5. Mampu menggunakan bahasa yang komunikatif 6. Mampu memotivasi siswa 7. Mampu mengorganisir kegiatan 8. Mampu berinteraksi dengan siswa secara komunikatif 9. Mampu menyimpulkan pembelajaran 10. Mampu memberikan umpan balik 11. Mampu melaksanakan penilaian 12. Mampu menggunakan waktu
3. Penilaian prestasi belajar peserta didik	1. Mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran 2. Mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda 3. Mampu memperbaiki soal yang tidak valid 4. Mampu memeriksa jawaban 5. mampu mengklasifikasikan hasil-hasil penilaian 6. Mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian 7. Mampu mengolah hasil penilaian 8. Mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian

	9. Mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil penilaian 10. Mampu menyimpulkan hasil penilaian secara jelas dan logis
4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik	1. Menyusun program tindak lanjut hasil penilaian 2. Mengklasifikasikan kemampuan siswa 3. Mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penelitian 4. Melaksanakan tindak lanjut 5. Mengevaluasi hasil tindak lanjut 6. Menganalisis hasil eval program tindak lanjut hasil penilaian

Komponen Kompetensi Pengembangan Potensi

5. Pengembangan profesi	1. Mengikuti informasi perkembangan IPTEK yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah 2. Mengalibahasakan buku pelajaran/karya ilmiah 3. Mengembangkan berbagai model pembelajaran 4. Menulis makalah 5. Menulis/menyusun diktat pelajaran 6. Menulis buku pelajaran 7. Menulis modul 8. Menulis karya ilmiah 9. Melakukan penelitian ilmiah (<i>action research</i>) 10. Menemukan teknologi tepat guna 11. Membuat alat peraga/media 12. Menciptakan karya seni 13. Mengikuti pelatihan terakreditasi 14. Mengikuti pendidikan kualifikasi 15. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum
-------------------------	--

Komponen Kompetensi Penguasaan Akademik

KOMPETENSI	INDIKATOR
6. Pemahaman wawasan	1. Memahami visi dan misi 2. Memahami hubungan pendidikan dan pengajaran

	3. memahami konsep pendidikan dasar dan menengah 4. Pemahami fungsi sekolah 5. Mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil pendidikan 6. Membangun sis yg menunjukkan keterkaitan dik & luar dik
7. Penguasaan bahan kajian akademik	1. Memahami struktur pengetahuan 2. Menguasai substansi materi 3. Menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa

Kompetensi diatas menuntut suatu pelaksanaan yang benar-benar sesuai dengan perubahan kurikulum (Kurikulum 2004). Kurikulum 2004 ditandai dengan ciri-ciri berikut:

1. Lebih menitik beratkan pencapaian target kompetensi dari pada penguasaan materi,
2. Lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan & sumber daya pendidikan yg tersedia,
3. Memberikan kebebasan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan Kurikulum 2004 (Mulyasa, 2004:26-28), guru harus memperhatikan hal-hal berikut: (a) mengurangi metode ceramah; (b) memberikan tugas yang berbeda bagi peserta didik; (c) mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta disesuaikan dengan mata pelajaran; (d) memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran; (e) menghubungi spesialis, bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan; (f) menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan laporan; (g) memahami bahwa peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan yang sama; (h) mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak bekerja dengan masing-masing pada setiap pelajaran; dan (i) mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan pembelajaran.

Agar Kurikulum 2004 dapat diimplementasikan secara efektif dan meningkat kualitas pembelajaran, guru perlu memiliki hal-hal berikut: (a) menguasai/memahami kompetensi dasar dan hubungannya dng kompetensi

lain dng baik; (b) menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi; (c) memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan dan prestrasinya; (d) menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar dan membentuk kompetensi peserta didik; (e) mengeleminasi bahan-bahan yang kurang penting dan kurang berarti dalam kaitannya dengan pembentukan kompetensi; (f) mengikuti perkembangan pengetahuan mutakhir; (g) menyiapkan proses pembelajaran; (h) mendorong peserta didik untuk memperoleh hasil yang lebih baik; dan (i) menghubungkan pengalaman yang lalu dengan kompetensi yang akan dikembangkan.

Sedangkan karakteristik guru yang berhasil mengembangkan pembelajaran secara efektif dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) respek dan memahami dirinya, serta dapat mengontrol dirinya (emosi stabil); (b) antusias dan gairah terhadap bahan, kelas, dan seluruh kegiatan pembelajaran; (c) berbicara dengan jelas dan komunikatif (dapat mengkomunikasikan idenya terhadap peserta didik); (d) memperhatikan perbedaan individual peserta didik; (e) memiliki banyak pengetahuan, inisiatif, kreatif dan banyak akal; (f) menghindari sarkasme dan ejekan terhadap peserta didik; serta (g) tidak menonjolkan diri, dan menjadi teladan bagi peserta didik.

Berbagai tuntutan yang harus dipenuhi pendidik sebagai bagian dari tuntutan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, bukan hanya semata untuk kepentingan keprofesionalan guru dalam mengajar, tetapi lebih dari itu adalah untuk memelihara kebiasaan yang baik dalam pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran yang mendidik tidak akan tercapai secara utuh dan menyeluruh tanpa didukung secara kondusif oleh keterampilan setiap pendidik dalam melaksanakan interaksi dengan peserta didiknya di dalam maupun diluar kelas.

F. Kualitas Kinerja Manajemen Kelas Guru

Penilaian terhadap kinerja guru harus dilengkapi dengan instrumen, isi instrumen tersebut sebaiknya terdiri dari dua kategori, yaitu sifat dan sikap dalam bekerja serta hasil kerja yang telah dilakukannya. Sedangkan indikator-indikator kinerja guru yang akan dinilai menurut Rebores (1987) menyangkut dengan kualitas adalah: (a) kinerja pengajaran, (b) kinerja profesional, (c) kinerja personal.

(1) Kualitas Kinerja Pengajaran

- (a) Merencanakan dan mengorganisasikan pengajaran: (1) Pelajaran direncanakan dengan baik, (2) Seperangkat sasaran yang pasti dan partisipasi siswa (3) Memberikan tugas yang jelas, (4) Memahami pedoman dan menggunakan pedoman itu dalam proses belajar-mengajar, (5) Menyiapkan pembelajaran baik kepada kelompok maupun individual.
- (b) Kemampuan menjelaskan dan mengajukan pertanyaan: (1) mengajukan pertanyaan yang membangkitkan daya pikir, (2) Memberikan penjelasan yang jelas tentang bahan ajar, (3) Menghadapkan siswa pada beberapa pandangan, (4) Sadar akan penolakan dan penerimaan pendapat siswa.
- (c) Menstimuli belajar melalui aktivitas yang inovatif dan sumber belajar: (1) Menggalakkan diskusi kelas, siswa bertanya, dan demonstrasi siswa, (2) Menggunakan bermacam-macam alat peraga dan sumber belajar
- (d) Menunjukkan pengetahuan dan antusias terhadap mata pelajaran yang diajarkan: (1) Menunjukkan pengetahuan tentang mata pelajaran yang diajarkan, (2) Antusias.
- (e) Menyiapkan suasana kelas yang kondusif untuk belajar: (1) Menjaga lingkungan yang sehat dan fleksibel untuk belajar, (2) Menjaga peralatan dan bahan pembelajaran
- (f) Memelihara catatan yang sesuai dan teliti: (1) Memelihara catatan tentang kemajuan siswa
- (g) Mempunyai hubungan yang baik dengan siswa: (1) Memahami dan bekerja dengan siswa sebagai individu, (2) Menggalakkan hubungan yang saling menghormati dan bersahabat, (3) Menggunakan bahasa yang positif dng siswa dan jauh dari rasa ejekan
- (h) Berinisiatif pengelola kelas dengan disiplin yang baik: (1) dikembangkan aturan tata tertib siswa dan guru selalu mengawasinya, (2) Dikembangkan aturan keselamatan dan guru selalu mengawasinya

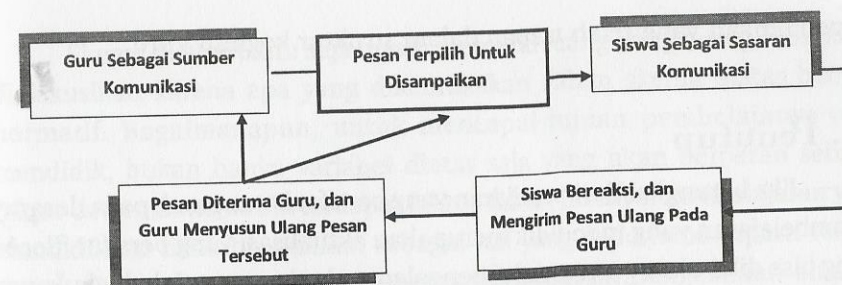
(2) Kualitas Kinerja Profesional

- (a) Pengakuan dan penerimaan tanggung jawab di luar kelas: (1) Berpartisipasi dalam aktivitas sekolah, (2) Kadang-kadang dengan sukarela mengerjakan tugas tambahan, (3) Ikut menjadi panitia di sekolah,
- (b) Hubungan di dalam sekolah: (1) Bekerja sama dengan baik dan menyenangkan dengan kawan sekerja, administrasi, dan dengan

personel lainnya.

- (c) Hubungan dengan masyarakat luar: (1) Bekerja sama dengan baik dan menyenangkan dengan orang tua siswa, (2) Menjalankan hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat,
 - (d) Pertumbuhan profesional dan visi: (1) Memenerima kritik yang membangun, (2) Ber-partisipasi dalam seminar, workshop, dan belajar, (3) Mencoba metode dan bahan baru,
 - (e) Pemanfaatan pelayanan staf: (1) Memanfaatkan layanan yang tersedia dengan baik (perpustakaan),
 - (f) Mengerti pola pertumbuhan dan perilaku siswa pada tahap-tahap perkembangan dan dapat menguasai situasi yang terjadi: (a) Tidak berharap akan adanya kesamaan perilaku siswa, tetapi masing-masing siswa mempunyai perbedaan individu,
 - (g) Sopan santun: (1) Menjaga penggunaan data yang rahasia, (2) Mendukung profesi mengajar
- (3) Kualitas Kinerja Personal
- (a) Kesehatan dan gairah: (1) Mempunyai rekord kehadiran yang baik, (2) Selalu gembira, (3) Menunjukkan sikap yang humor,
 - (b) Berbicara: (1) Artikulasi bicaranya baik, menggunakan grammar dengan benar, (2) Dapat didengar dan dimengerti oleh siswa seluruh kelas, (3) Berbicara pada tingkat pengertian siswa,
 - (c) Cara berpakaian dan kerapian: Selalu rapi,
 - (d) Ketepatan dalam memenuhi tugas: (1) Hadir di kelas tepat pada waktunya, (2) Menjalankan tugas tepat pada waktunya, (3) Membuat laporan tepat pada waktunya.

Untuk merealisasikan seluruh aktivitas manajemen kelas yang menjadi tanggung jawab guru, dibutuhkan kemampuan pendidik untuk melakukan proses komunikasi. Dalam konteks proses pembelajaran sebagai kegiatan komunikasi kelas (pendidik dan peserta didik), pada dasarnya berlangsung proses penyampaian pesan. Sedangkan sasaran dalam proses berkomunikasi kelas adalah peserta didik, yang menjadi sumber pesan adalah guru, dan yang menjadi medianya adalah bahasa baik verbal (membaca, mendengar, menulis dan mengucapkan) dan non verbal (bahasa isyarat/gestur). Menurut Rosyada (2004:151), alur komunikasi kelas digambarkan sebagai berikut:



Alur komunikasi kelas sebagai aktivitas manajemen kelas ketika guru melaksanakan proses pembelajaran, dilakukan berdasarkan siklus yang baku sehingga guru dapat mengontrol proses pembelajaran. Kontrol proses pembelajaran ini akan mempermudah guru melakukan evaluasi apakah yang dilaksanakannya sudah sesuai dengan tuntutan manajemen kelas. Jika semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, maka manajemen kelas yang dilaksanakan guru telah memenuhi syarat yang bersifat aplikatif terhadap kinerja guru baik sebagai pendidik, pengajar, pelatih dan pembimbing.

Menurut (Depdiknas, 2004:9) totalitas kompetensi mengandung unsur-unsur yang dapat ditampilkan dan yang tidak dapat ditampilkan. Unsur-unsur yang dapat ditampilkan perlu dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Indikator-indikator kompetensi itu berisi indikator yang bersifat esensial atau indikator inti dari masing-masing unsur kompetensi. Indikator dalam perwujudan kompetensi ini berguna utk mengembangkan alat penilaian dalam rangka mengukur tingkat pencapaian eksplisit, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, yang selanjutnya akan berdampak pula terhadap proses dan hasil pembelajaran.

Ketika di depan kelas, guru menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian sekaligus objek penyidikan. Para murid melihat guru dari atas sampai bawah. Karena itu, mengajar merupakan sesuatu yang pribadi, yang tidak dapat digantikan begitu saja. Mengajar itu melibatkan guru sebagai sosok yang menyeluruh, bukan hanya sebagai seseorang yang mencoba menyampaikan sepotong pengetahuan (Amanda Putri Witdarmono, *Kompas*, Sabtu, 24 November 2007, hal. 7)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang mendidik itu terkait erat dengan keterampilan guru dalam melaksanakan tugas keguruannya secara konsisten dengan diiringi komitmen yang tinggi. Pembelajaran yang mendidik memberikan ruang yang luas bagi guru untuk berinovasi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta paradigma

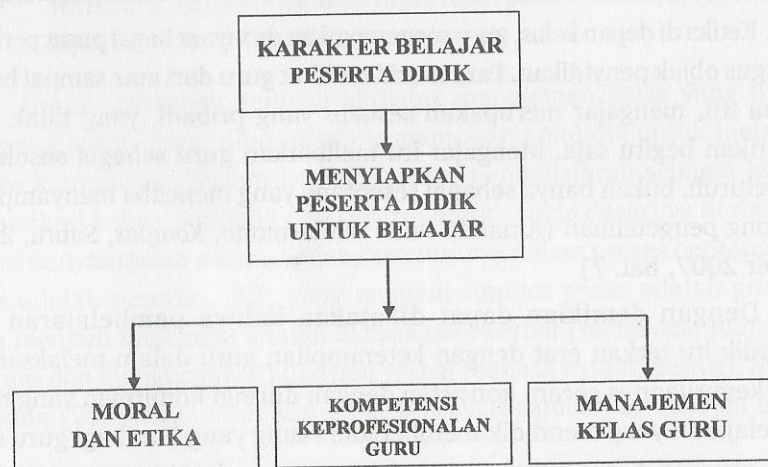
kependidikan yang telah mapan dalam struktur kognitif guru.

G. Penutup

Jika berangkat dari pemikiran yang bersifat konseptual, pada dasarnya pembelajaran yang mendidik merupakan aktualisasi yang bersifat filosofis yang bisa dilakukan guru melalui pengalaman batin yang telah dilakukannya selama ini. Pengalaman batin inilah yang akan menentukan suasana batiniah guru untuk dapat melaksanakan tugas keguruan tersebut. Setiap guru memiliki kemampuan untuk menentukan melaksanakan strategi, metode, teknik, model, dan kiat dalam pembelajaran.

Hanya saja, harus diingat berdasarkan pengalaman empiris guru itu, bahwa setiap guru akan menentukan pola pembelajaran berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya selama ini ketika berinteraksi dengan peserta didiknya. Pengalaman selama berinteraksi inilah yang akan menentukan pola guru dalam melakukan proses pendidikan dan pembelajaran. Karenanya, guru diberi kewenangan untuk menentukan strategi, metode, teknik, model, dan kiat dalam pembelajaran.

Kewenangan itulah yang akan memberikan kesempatan bagi guru untuk memastikan prosedur pembelajaran yang diinginkannya tetapi tetap berada dalam koridor pembelajaran yang mendidik. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis selama ini, terdapat prosedur yang bersifat konsisten tetapi elastis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mendidik, yaitu seperti tertera pada skema berikut ini:



Skema di atas tentu saja masih memiliki ruang yang cukup luas untuk didiskusikan karena apa yang dikemukakan dalam skema diatas bersifat normatif. Bagaimanapun, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mendidik, bukan hanya variabel diatas saja yang akan berperan sebagai faktor determinan, masih terdapat faktor-faktor lainnya. Pembelajaran yang mendidik itu tidak bisa dilihat sebagai hal yang sederhana seperti tertera dalam skema di atas, tetapi memang berdasarkan pengalaman empiris, pembelajaran mendidik itu bisa di mulai dari hal-hal yang sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizsiy, A.Qodri, *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial*, Semarang, Aneka Ilmu, 2002.
- Nadesul, Hendrawan, *Kompas*, Senin, 4 Februari, 2008.
- Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi*. Alih Bahasa Hadyana Pujaatmaka. Prentice Hall. Inc. Jakarta, 2001.
- Suseno, Franz, Magnis. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius. Yogyakarta, 19876.
- Winkel, W.S. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Gramedia. Jakarta, 1991.
- Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Socieity, dan Globalisasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Tilaar, HAR, *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Witdarmono, Amanda Putri, *Kompas*, Sabtu, 24 November 2007.

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TERDESENTRALISASI

Dr. Indra Jaya, M.Pd.

A. Pendahuluan

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sistem desentralisasi, dan salah satu aspek yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan. Pertanyaan mendasar yang semestinya harus kita pikirkan adalah: "Apakah dengan melaksanakan desentralisasi dalam bidang pendidikan akan mampu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan di daerah?" dan "Apakah sistem sentralisasi dalam bidang pendidikan selama ini tidak mampu untuk menciptakan *output* dan *outcome* pendidikan yang berkualitas?"

Berkenaan dengan kedua pertanyaan di atas "Apakah sudah ada *re-search* yang telah dilakukan sehingga mampu untuk menjawab kedua pertanyaan mendasar tersebut?". Inilah persoalan yang seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa kita. Seringkali bangsa ini memutuskan dan menetapkan suatu ketetapan, namun belum diketahui akibat dari ketetapan tersebut – dampak positif dan dampak negatifnya.

Untuk menyahuti persoalan-persoalan yang timbul akibat pelaksanaan desentralisasi dalam bidang pendidikan, maka dalam tulisan ini akan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan dan usaha yang semestinya dilakukan oleh elemen-elemen di daerah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut.

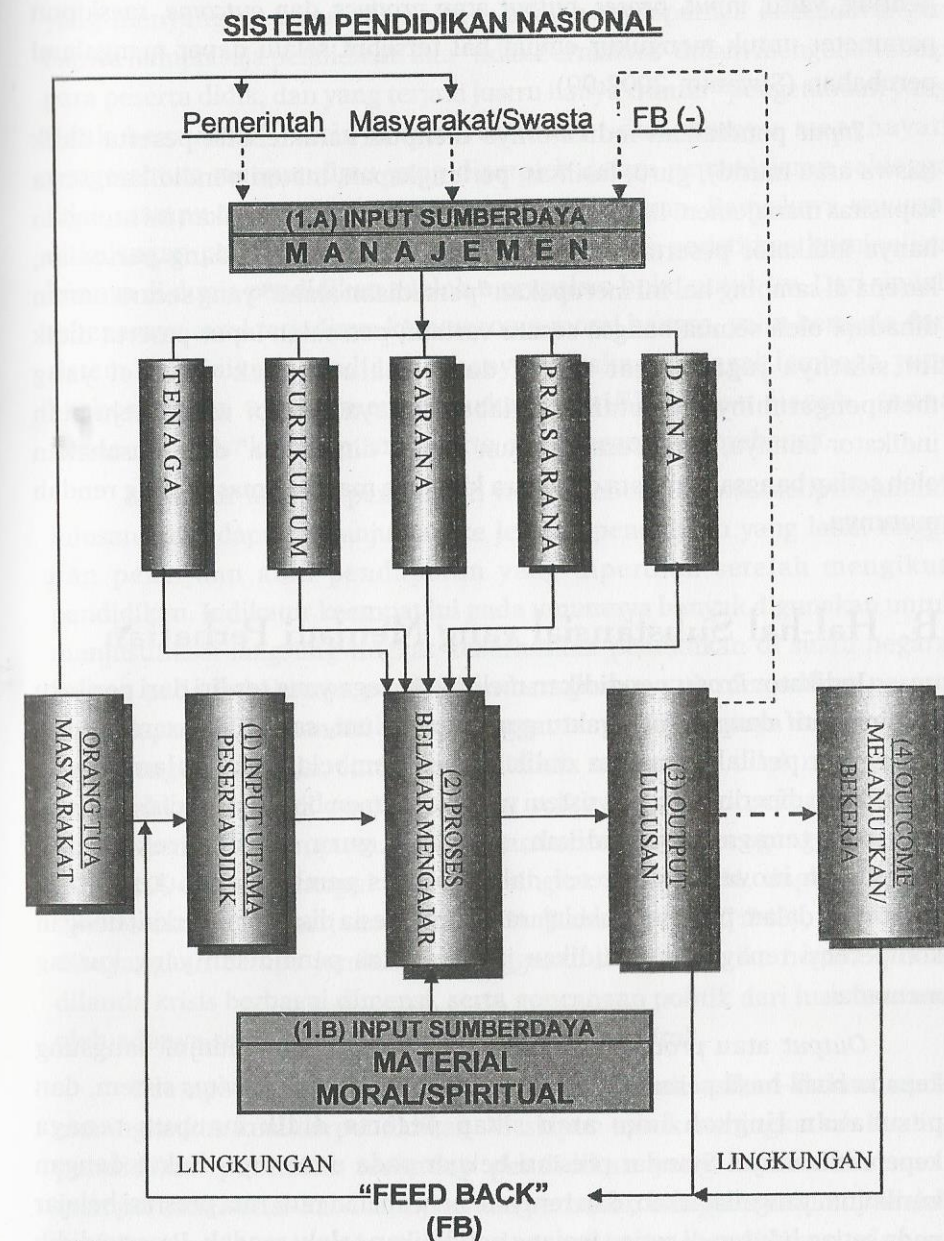
Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan dapat dicermati dari paradigma pendidikan sebagai sebuah sistem dan urgensi pendidikan dalam konteks desentralisasi. Sedangkan usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah dilakukan melalui pendekatan

system “pendidikan membebaskan pendidikan”.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik (manusia) agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, estetis, dan demokratis, serta memiliki rasa kemasyarakatan dan kebangsaan. Singkatnya bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha berdasarkan atas kesadaran dan terencana yang dilakukan untuk memanusiakan manusia.

Dengan tujuan tersebut maka dapat digambarkan pula fungsi pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Persolan di atas tidaklah semudah seperti apa yang dibayangkan, karena pendidikan merupakan persoalan yang sangat kompleks, banyak aspek yang terkait di dalamnya. Secara makro pendidikan memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya atau budaya masyarakatnya. Budaya masyarakat yang kuat dan dinamis akan menghasilkan pendidikan yang maju dan berkualitas tinggi, sebaliknya budaya masyarakat yang lemah dan statis akan menghasilkan pendidikan yang rendah kualitasnya. Tetapi bagaimanapun juga, ketika sebuah bangsa mulai dihadapkan oleh kondisi yang sangat kritis, maka merupakan sebuah kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk segera memperbaiki kondisi kritis tersebut. Untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pendidikan biasanya dengan melihat pendidikan sebagai sebuah sistem (Pongtuluran, 1989). Sebagai gambaran, bentuk sistem pendidikan Nasional Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Sistem Pendidikan Nasional

Dari gambar di atas maka dapat dirinci menjadi 4 (empat) indikator penting, yaitu, *input*, *proses*, *output* atau *product*, dan *outcome*, meskipun parameter untuk mengukur empat hal tersebut selalu dapat mengalami perubahan (Suyanto, 2002:99).

Input pendidikan indikatornya meliputi karakteristik peserta didik (siswa atau murid), guru, fasilitas, perlengkapan, materi pendidikan, serta kapasitas manajemen. Dari sejumlah indikator input pendidikan ini mungkin hanya indikator peserta didik yang relatif tidak mengundang persoalan, karena di samping hal ini merupakan “persediaan alami” yang secara umum dihadapi oleh semua bangsa secara variatif, persoalan *input* peserta didik ini sifatnya juga sangat relatif dan terlalu banyak variabel yang mempengaruhinya, terutama variabel budaya. Tetapi untuk sejumlah indikator lainnya, yang secara umum dapat “direkayasa” dan diusahakan oleh setiap bangsa, ternyata di negara kita juga masih termasuk yang rendah mutunya.

B. Hal-hal Substansial yang Menjadi Perhatian

Indikator *Proses* pendidikan meliputi tenaga yang terdiri dari perilaku administratif dan alokasi waktu guru, kurikulum, sarana, prasarana, dan dana, dan perilaku peserta didik proses pembelajaran. Dalam proses pendidikan diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan kondisi kondusif terhadap tenaga kependidikan, terutama guru, agar mereka dapat melakukan inovasi dan kreasi dalam proses pembelajaran. Lemahnya kreativitas dalam proses pembelajaran di Indonesia disamping terkait dengan kompetensi tenaga kependidikan juga fasilitas pendidikan yang kurang memadai.

Output atau *product* pendidikan indikatornya menunjuk langsung kepada hasil-hasil peserta didik, prestasi belajar, produktivitas sistem, dan perubahan tingkah laku atau sikap peserta didik maupun tenaga kependidikannya. Standar prestasi belajar pada umumnya diukur dengan kurikulum yang diajarkan, dan ternyata pencapaian rata-rata prestasi belajar pada setiap lulusan di setiap jenjang pendidikan selalu rendah. Peserta didik yang mencapai nilai dengan kriteria baik ke atas pada umumnya tidak mencapai 25 % dan selebihnya bernilai cukup atau sedang, sehingga apa yang disebut dengan “belajar tuntas” hanyalah sebagai impian belaka (Tilaar, 2001:129-133).

Tetapi yang lebih menarik perhatian dalam kaitannya dengan *output* yang menyangkut perubahan sikap, adalah terdapatnya kecenderungan bahwa hampir saja pendidikan kita “tidak bermakna” dalam mengubah sikap para peserta didik, dan yang terjadi justru hanya tranfer “pengetahuan yang tidak bermakna”, artinya peserta didik tidak mampu menghayati pengetahuan maupun ilmu yang diperoleh dalam pembelajaran sehingga tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Banyaknya tawuran di kalangan pelajar dan mahasiswa dan sejumlah peristiwa kriminalitas lainnya di dunia pendidikan adalah merupakan bukti untuk itu. Dari sinilah sebenarnya awal terjadinya kemerosotan moral bangsa, yaitu bermula dari sistem pendidikan. Pendidikan hanya dimaknai sebagai lembaga yang berkompeten untuk mengeluarkan sertifikat atau ijazah, tanpa memperhatikan kemampuan peserta didik secara komprehensif.

Indikator kualitas pendidikan yang disebut *outcome* meliputi jumlah lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan pekerjaan atau pendapatan yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan. Indikator keempat ini pada umumnya banyak digunakan untuk menjustifikasi langsung tingkat keberhasilan pendidikan di suatu negara, karena pada hakekatnya pendidikan bertujuan untuk menjadikan peserta didik dapat hidup mandiri tidak menggantungkan hidupnya dengan orang lain. Dengan kata lain, *outcome* pendidikan seharusnya tidak mengganggu, atau bahkan menjadi penyebab akibat sulitnya mencari pekerjaan karena tidak memiliki kemampuan. Sebagai gambaran, tingkat pengangguran tahun 1993/1994 saja mencapai rata-rata; tingkat SMU 7,3 %, tingkat Diploma 9,49 % dan tingkat sarjana S1 12,14 % (Rahardjo, 1997:248), maka dapat dibayangkan berapa jumlah pengangguran saat ini ketika negara sedang dilanda krisis berbagai dimensi, serta goncangan politik dari luar terutama oleh adanya serangan Amerika Serikat terhadap Irak.

Keempat elemen itulah yang perlu direalisasikan dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun untuk meningkatkan kualitas pendidikan penilaian terhadap pendidikan yang berkualitas mesti memperhatikan hal-hal di atas, namun perhatian kita pada umumnya selalu terfokus pada masalah *output* dan *outcome* pendidikan, dengan mengabaikan dua hal lainnya yakni *input* dan *proses*. Kecenderungan semacam ini merupakan penilaian yang terjadi dalam masyarakat secara umum, yang mungkin dipengaruhi oleh sikap dan perilaku kehidupan yang semakin pragmatis. Tetapi di kalangan masyarakat terdidik seharusnya

melakukan penilaian pendidikan secara komprehensif, bahkan lebih dari empat indikator tersebut.

Apa yang diharapkan dari pendidikan berkualitas memang harus disesuaikan dengan tuntutan global yang sedang dihadapi oleh manusia. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, pendidikan harus memiliki prioritas agar peserta didik dapat memiliki kemampuan dan kekuatan yang relevan tuntutan globalisasi itu. Sehubungan dengan itu, tidaklah salah bila peningkatan kualitas pendidikan harus diarahkan kepada tiga kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu;

1. Penguasaan Bahasa Asing

Bahasa Asing, terutama bahasa Inggris, merupakan bahasa komunikasi dan ilmu pengetahuan yang paling populer. Hampir semua ilmu pengetahuan dan teknologi ditulis dalam bahasa tersebut. Oleh sebab itu bangsa yang ingin maju harus menguasai bahasa tersebut secara baik. Penguasaan bahasa asing harus ditekankan semenjak pendidikan dasar, dan ketika selesai pendidikan menengah atas diharapkan peserta didik telah mampu berbahasa secara baik. Kondisi penguasaan bahasa Asing di negara kita saat ini memang sangat ketinggalan. Kemampuan berbahasa Inggris SDM Indonesia yang paling jelek jika dibandingkan dengan Singapura, Philipina, Malaysia dan Thailand, bahkan juga masih kalah bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Selatan seperti India dan Pakistan (Rahardjo, 1997:222).

2. Penguasaan Iptek

Dominasi iptek dalam kehidupan global tidak dapat dibendung lagi. Bangsa yang unggul adalah bangsa yang memiliki kemampuan Iptek. Bahasa yang dikuasai pada dasarnya hanya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan bangsa lain dan untuk menguasai Iptek lebih baik. Dalam hal ini kita dapat melihat bangsa Jepang misalnya, meskipun dengan sumber daya alam yang sangat terbatas namun dengan penguasaan Iptek yang baik, maka dapat menguasai perekonomian dunia. Tetapi kelihatan bahwa negara kita justru kurang responsif dalam mempersiapkan generasi dengan kemampuan Iptek yang tinggi ini, terbukti dengan seringnya penanganan puncak urusan Iptek diserahkan pada personel yang tidak menguasai sama sekali dengan masalah Iptek. Sementara orang-orang yang memiliki kemampuan Iptek memadai justru tidak diperhatikan bahkan dipinggirkan.

Begitu pentingnya masalah penguasaan Iptek dalam menghadapi

perkembangan Ilmu dan Teknologi yang semakin maju ini, maka UNESCO, sebuah lembaga dunia di PBB, mengembangkan program "Melek Ilmu dan Teknologi untuk Semua", dengan proyek besar yang diberi nama "Project 2000 + ; An International Project on Scientific and Technological Literacy for All", yang dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda abad 21 (Rahardjo, 1997:51).

3. Apresiasi dan Penguatan Budaya

Realitas kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari budayanya. Budaya merupakan identitas manusia yang paling hakiki. Nilai budaya umat manusia ada yang berasal dari tradisi yang diwarisi secara turun-temurun dan ada pula yang berasal dari nilai-nilai agama. Keduanya dapat menyatu, dan nilai-nilai tersebut selalu dipertahankan. Oleh sebab itu masalah budaya bagaimana-pun keadaannya, tidak dapat diabaikan. Kemajuan Iptek tidak akan bermakna tanpa identitas budaya yang dipegang erat. Manusia dapat menghayati makna kehidupan dengan budayanya, termasuk dalam hal ini keyakinan (agama). Bangsa barat maju dengan nilai budayanya. Di Timur bangsa Jepang, dan Korea Selatan (yang mulai tumbuh), juga maju dengan budayanya (Anh, 1985).

Budaya bangsa secara natural memang ada yang bernilai apresiatif terhadap perkembangan dan kemajuan, tetapi ada juga yang tidak. Nilai budaya yang didasarkan pada agama-agama *sawawy* atau agama wahyu (*revealed religion*) umumnya bersifat apresiatif terhadap perkembangan dan kemajuan ummat manusia. Tetapi sebaliknya budaya yang didasari dengan nilai-nilai agama *ardhy* atau budaya (*cultural religion*) sering bertentangan dengan fithrah kemajuan manusia, dalam hal ini budaya mistik misalnya. Apresiasi terhadap budaya ini memang perlu, karena kecenderungan yang berkembang di kalangan bangsa Indonesia justru budaya dimaknai dengan makna yang amat sempit. Budaya hanya diberi makna "seni", dan bahkan yang lebih fatal lagi "seni"-pun juga dipahami sangat pragmatis, yaitu sebatas hal-hal yang dapat menghibur dan menggembirakan (*fun*), yang bersifat sensual semata, sehingga citra budayanya hilang dan bahkan cenderung melanggar etika moral maupun agama. Hal seperti ini justru akan melemahkan bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu apresiasi budaya dan penguatan budaya harus menjadi prioritas dalam mewujudkan kualitas pendidikan, untuk menyembadani agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas diri. Apa yang kita inginkan dari strategi penguatan budaya ini

adalah sebuah sistem pendidikan yang mampu menghasilkan manusia dengan daya saing dan berwawasan Iptek yang tinggi, bermoral dan berbudaya yang kokoh (Rahardjo, 1997:266).

Pada akhirnya budaya yang apresiatif dan kuat akan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas secara timbal balik dan berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi saat ini, diperlukan strategi-strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di antaranya adalah;

1. Perbaikan Manajemen

Aspek managerial dalam pendidikan di Indoensia hingga akhir masa Orde Baru selalu diabaikan. Manajemen melibatkan berbagai macam unsur penting, seperti Sumber Daya Manusia, dana, kebijakan sistem, dan lain-lain. Dengan bergulirnya kebijakan desentralisasi pendidikan, maka peluang untuk memperbaiki manajemen pendidikan terbuka lebar. Dana pendidikan-pun juga lebih banyak tersedia (Komisi VI DPR-RI, 31 Des, 2001). Hanya saja masalah Sumber Daya Manusianya yang masih menyisakan pertanyaan besar. Rendahnya kompetensi managerial, mentalitas dan kreativitas di kalangan para pengelola pendidikan adalah masalah yang amat serius.

2. Perbaikan Mutu Guru

Guru merupakan potret keberhasilan pendidikan yang paling nyata. Ungkapan lama yang mengatakan "guru" yang berarti digugu dan ditiru (dipatuhi dan dicontoh) bagaimana-pun, masih tetap berlaku. Sehingga guru saat ini, di samping sebagai tumpuan harapan untuk keberhasilan pendidikan terkadang juga sekaligus sebagai "rujukan" utama untuk menumpahkan kegagalan pendidikan. Hal ini dapat dimaklumi karena di samping masih tetap eksisnya ungkapan di atas pada masyarakat kita, baik secara emosional maupun faktual guru merupakan atribut yang selalu menjadi rujukan para siswanya, baik tentang keilmuan, etika-moral maupun prilakunya. Tetapi sampai saat ini perhatian terhadap guru masih belum memadai, bahkan profesi guru cenderung menjadi profesi yang rendah kelasnya. Hal ini dapat ditunjukkan misalnya, para peserta didik yang memilih untuk profesi guru biasanya yang memiliki kemampuan akademik menengah ke bawah, sementara yang memiliki kemampuan akademik tinggi lebih memilih profesi bidang lain seperti kedokteran, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Oleh sebab itu pembuatan kebijakan yang dapat menaikkan citra guru perlu dilakukan, terutama yang menyangkut jaminan pendapatan, etika profesi, dll.

Potret guru yang diharapkan di masa mendatang adalah yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, inovatif, kreatif, berakhlak mulia dan memiliki kewibawaan, sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran yang dinamis.

3. Sarana Pendidikan dan Sumber Belajar

Kelengkapan sarana pendidikan dan sumber belajar kita termasuk yang paling rendah mutunya. Jarang sekali sekolah yang memiliki perpustakaan lengkap dengan pengelolaan bagus. Apalagi laboratorium bahasa maupun IPA sangat jarang dimiliki oleh sekolah. Kalaupun ada sangat jarang digunakan, di samping karena peralatannya yang kurang, tenaga pengelolanya-pun juga sulit didapat. Inilah problem besar yang harus diselesaikan oleh dinas pendidikan daerah terutama yang mau tidak mau harus dipenuhi. Kebijakan manajemen berbasis apapun tidak akan bermakna tanpa adanya kelengkapan sarana dan sumber belajar. Sungguh amat disayangkan, karena ternyata masalah sarana dan sumber belajar ini selalu diabaikan dalam membicarakan masalah peningkatan kualitas pendidikan, sehingga standar mutunya-pun belum dirumuskan secara jelas. Hasil-hasil dari komisi reformasi pendidikan nasional yang seharusnya dapat melihat masalah pendidikan secara komprehensif ternyata juga luput dari membicarakan masalah instrumen ini (Supriadi, 2002), pada hal tidak mungkin akan dapat belajar efektif tanpa sarana seperti laboratorium IPA atau bahasa.

4. Inovasi Proses Pembelajaran

Penerapan metode pembelajaran pada hakekatnya tidak terlepas dari input pendidikan, terutama guru dan sarana pendidikan termasuk sumber belajar. Pendekatan belajar CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) ternyata telah "*mati suri*" akibat tidak siapnya guru dan sarana serta sumber belajar, sehingga hasilnya justru menjadi "*Cah Bodo Soyo Akeh / anak bodoh makin banyak*", karena yang dilakukan guru tetap saja Catat Buku Sampai Habis ("CBSA").

Inovasi proses pembelajaran di samping harus menjadi kesadaran dan komitmen para guru dan pimpinan lembaga pendidikan, juga harus menjadi program prioritas pemerintah, karena program pembelajaran yang inovatif akan dapat memunculkan peserta didik yang merdeka, mandiri, kreatif dan inovatif.

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran yang inovatif itu, Delors sebagaimana dikutip oleh Hidayat Syarief, mengatakan bahwa penyelenggaraan proses pembelajaran harus mampu melaksanakan keempat pilar belajar, yaitu; 1). *Learning how to know*, 2). *Learning how to do*, 3). *Learning how to live together*, dan 4). *Learning how to be* (R ahardjo, 1977)

Dalam pilar-pilar pembelajaran yang ditawarkan oleh Delors ini kelihatan jelas bahwa peserta didik diharapkan dapat mengetahui bagaimana caranya untuk mengetahui sesuatu, bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu, bagaimana caranya agar pengetahuan yang didapatkan itu dapat digunakan untuk hidup bersama, dan bagaimana caranya agar pengetahuan yang didapatkan itu dapat digunakan untuk memposisikan diri atau beradaptasi untuk hidup mandiri di manapun berada. Jadi terlihat jelas bahwa pilar-pilar tersebut mengarahkan peserta didik untuk kreatif dan inovatif. Ibarat seseorang yang memberikan joran pancing disertai bagaimana cara penggunaannya sehingga orang yang diberi tersebut dapat menggunakan dengan sendirinya, bukan hanya menggambarkan bagaimana keadaan joran pancing itu. Untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan kandungan 4 pilar di atas, maka Soedjarto mengemukakan agar guru memiliki kompetensi terhadap 3 hal, yaitu;

- a. Tidak hanya mengetahui ilmu pengetahuan sebagai product, tetapi yang lebih penting adalah sebagai proses. Guru harus memahami disiplin ilmu pengetahuan yang ditekuni sebagai *ways of knowing*. Oleh sebab itu, lebih dari sarjana pemakai ilmu pengetahuan, seorang guru harus menguasai *epistemologi* dari disiplin ilmu tersebut, karena masalah utama dalam kurikulum di bidang disiplin ilmu sebagai sumber mata pelajaran bukanlah banyaknya pengetahuan, tetapi yang terpenting justru kedalamannya terhadap disiplin ilmu itu sebagai proses dan sebagai *ways of knowing*.
- b. Mengenal peserta didik sebagai pribadi yang sedang dalam proses perkembangan baik cara pemikirannya, sosial dan emosionalnya, maupun moralnya. Penguasaan antara pengetahuan sebagai proses dengan pemahaman terhadap perkembangan peserta didik akan memungkinkan untuk mewujudkan pilar *learning how to know* yang *transferable*.
- c. Memahami pendidikan sebagai proses pembudayaan, sehingga mampu memilih model belajar dan sistem evaluasi yang memungkinkan

terjadinya proses sosialisasi berbagai kemampuan, nilai, dan sikap dalam proses mempelajari berbagai disiplin ilmu dan pelajaran lainnya (Supriadi, 316-317).

Disamping faktor yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan ditinjau dari pendidikan sebagai sebuah sistem, dapat juga ditinjau dari aspek lainnya, diantaranya yaitu:

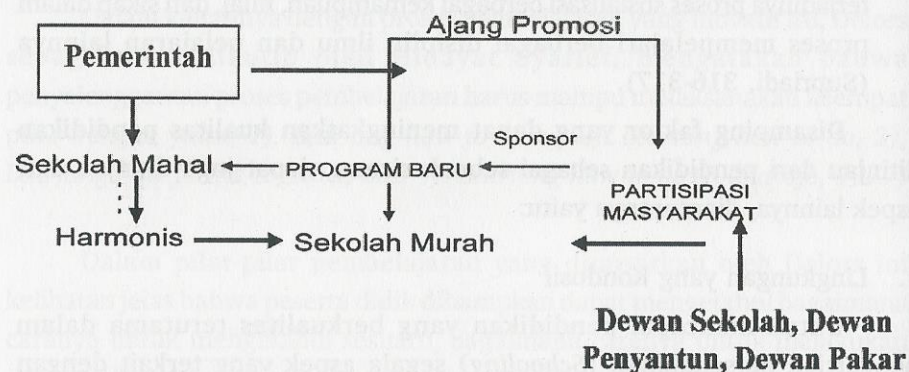
1. Lingkungan yang Kondusif

Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas terutama dalam pengertian persekolahan (*Schooling*) segala aspek yang terkait dengan lingkungan mesti diperhatikan, seperti keamanan, ketertiban, kebersihan, letak geografis – terkait dengan transportasi dan informasi. Lingkungan yang tidak aman, seperti di daerah yang dilanda konflik (Aceh, Poso, Ambon, dan sebagainya) tidak akan memungkinkan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, demikian pula dengan unsur ketertiban, kebersihan, dan letak geografis.

2. Dukungan dari pemerintah, dan masyarakat

Sebagai bagian dari *stakeholders* (pemerintah dan masyarakat) pendidikan maka seharusnya pihak-pihak tersebut memberikan dukungan untuk terselenggaranya proses pembelajaran yang optimal. Dukungan ini diperlukan di era otonomi pendidikan yang jelas memerlukan dukungan pemerintah dan DPRD setempat. Rasionalnya adalah setiap kebijakan daerah tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah jelas memerlukan dukungan DPRD secara politik. Pelaksanaan otonomi pendidikan merupakan salah satu kegiatan pendidikan dalam pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah tentu memerlukan dukungan politik dari DPRD setempat. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999. Kewenangan penuh itu dirumuskan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya”.

Dalam paradigma baru diharapkan masyarakat luas dapat memberikan masukan kepada lembaga pendidikan dalam menentukan kompetensi-kompetensi tertentu yang akan ditransferkan kepada peserta didik, seperti dewan sekolah, dewan penyantun, dan dewan pakar. Secara jelas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah

3. Nilai-nilai budaya lokal yang mendukung

Jika pendidikan dapat dianggap sebagai wujud penyembuh dari reformasi budaya maka wujud wujud itu adalah bagaimana cara kita dalam menanam nilai nilai budaya etnik daerah di kelas tanpa ada pergesekan antar etnik. Usaha peradaban bangsa Indonesia zaman dulu telah dilakukan para pendiri perguruan Taman Siswa dan Muhammadiyah yaitu dengan memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan, kemudian menjadi bahasa Indonesia, namun belakangan ini peradaban bangsa Indonesia sangat menurun drastis disebabkan oleh budaya global, untuk itu perlu dicari strategi lain.

Persoalan persoalan di atas merupakan sebagian dari sekian banyak kesulitan untuk pembentukan peradaban bangsa Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Namun usaha membina kekuatan hubungan antar suku dapat saja dilakukan asal ada keinginan. Timbul pertanyaan, usaha apakah yang dilakukan pendidikan agar bangsa Indonesia dapat bersatu dalam kerangka negara peradaban bangsa Indonesia ?

Hubungan antar etnik dapat ditumbuh kembangkan diantaranya melalui pendidikan, tepatnya melalui strategi pengajaran multietnik, untuk itu, agar pengajaran ini dapat diterima semua suku dan efektif, perlu dibahas, konsep, model, dan strategi pengajaran multi etnik. Sasaran utama strategi ini adalah siswa, karena sekolah merupakan wadah pembinaan siswa dapat digunakan sebagai sarana pembentukan peradaban bangsa Indonesia.

C. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di daerah

Pada saat ini mutu sumber daya manusia Indonesia jauh tertinggal dengan negara negara yang sedang berkembang pada umumnya, terutama di tingkat daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini terjadi, dimulai dari faktor sarana dan prasarana yang juga termasuk di dalamnya perangkat *hardware* dan *software* dalam bidang pendidikan samapai kepada faktor reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum yang dalam masa perkembangannya tidak linier lagi. Untuk faktor reformasi tidak dibahas lagi dalam tulisan ini.

Menurut laporan UNDP tahun 2002 tentang *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia, bahwa Indonesia berada pada peringkat 110 dari 173 negara yang diteliti dan masih jauh di bawah negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunai Darussalam. Daya saing sumber daya manusia Indonesia di kawasan Asia berada pada peringkat 45 di antara 48 negara, daya saing ekonomi pada peringkat 41 dari 46 negara (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berada pada peringkat 40 di antara 46 negara (*The World Economic Report*, 1996). Lebih memprihatinkan lagi kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke 12 dari 12 negara di Asia, setingkat di bawah negara Vietnam pada peringkat 11 (*PERC The Political and Economic Risk Consultancy*, September 2001), selain itu masalah tingginya jumlah buta aksara, terbatasnya layanan dan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta masih tingginya angka putus sekolah masih ditemukan di berbagai jenjang pendidikan.

Dalam konteks tersebut di atas, maka sistem pendidikan menjadi tantangan dan peluang bagi guru selaku tenaga kependidikan yang diharapkan dapat berperan untuk membelajarkan siswanya. Isu kritis yang terjadi di masyarakat akademisi saat ini adalah bahwa pendidikan di daerah saat ini belum cukup didukung oleh guru yang bermutu, profesi guru kurang diminati oleh sebagian besar peserta didik dengan kualitas unggul yang akan melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi tujuan, sehingga lembaga pendidikan kesulitan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berprestasi untuk menjadi guru yang profesional dan berkualitas unggul.

Seiring dengan kondisi itu, secara formal ternyata mutu guru kita amat rendah, terutama mutu guru yang terdapat di tingkat daerah. Dari sisi kewenangan hanya sedikit guru SD, SL.TP, SMU, dan SMK yang memenuhi persyaratan akademis untuk mengajar siswa di depan kelas. Data Balitbang

Depdiknas (2001) menyatakan dari 1.054.859 guru SD negeri di daerah, ternyata hanya 446.827 atau 42,4 % yang layak mengajar, yakni memenuhi persyaratan akademis akan kewenangannya. Itu berarti, sebagian besar (57,6 %) guru SD negeri di daerah tidak layak mengajar.

Sedangkan guru SD Swasta di daerah menunjukkan lebih buruk lagi, sebesar 60,6% guru SD swasta di tingkat daerah ternyata sama sekali tidak layak mengajar di depan kelas. Gambaran serupa juga terjadi pada satuan SLTP, SMU, dan SMK. Persoalan lain, kesesuaian bidang studi, sebagai contoh guru bidang studi Matematika dan IPA, tingkat ketersediaan guru hanya sekitar 30 % dari yang seharusnya. Dengan demikian, kita tidak perlu terkejut bila pendidikan di daerah banyak kita temukan realitas bahwa banyak guru yang harus mengajar bukan pada bidangnya. Guru yang berlatar belakang ekonomi harus mengajar Matematika, Guru yang berlatar belakang bahasa Inggris harus mengajar IPA, dan sebagainya. Akibat dari kondisi ini guru kurang memiliki kepercayaan diri atau rendah diri dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan tidak merdeka serta terkungkung oleh keilmuan yang dimilikinya. Padahal peran guru sangat strategis dalam upaya untuk membelajarkan siswanya. Kiranya sudah harus segera mendapatkan perhatian dalam mendukung orientasi baru pendidikan di daerah.

Memperhatikan deskripsi di atas, maka sistem pendidikan kita perlu untuk memberikan alternatif penyempurnaan yang akan mengantarkan kepada proses pendidikan.. jika dalam kenyataannya kita belum mampu untuk menghadirkan sosok guru di daerah yang sesuai dengan latar belakang keilmuannya, maka alternatif solusi yang harus ditempuh adalah pendidikan dalam konteks pembebasan. Dalam konteks ini, pedagogi kritis berupaya untuk membuka pencerahan bagi orientasi baru pendidikan di Indonesia. Sebab jika tidak dilakukan alternatif pendekatan dan model pembelajaran yang inovatif serta membuka peluang lahirnya pendidikan yang membebaskan pendidikan, maka pendidikan kita akan "bisu", dan proses pendidikan akan kehilangan maknanya.

Dalam konteks permasalahan berkaitan dengan berbagai pemikiran dan upaya untuk membenahi sistem pendidikan di daerah dan membebaskan siswa dari berbagai intervensi yang mungkin terjadi, baik yang direncanakan maupun tidak. Dengan demikian kiranya akan dibahas secara tuntas permasalahan sebagai berikut: (1). Bagaimana hakikat pendidikan membebaskan pendidikan? (2). Bagaimana menjadi guru yang merdeka ?

1. Bagaimana Hakikat Pendidikan Membebaskan Pendidikan?

Gerakan pembebasan merupakan proses humanisasi karenanya ia berkaitan erat dengan kebutuhan dan aspirasi manusia seperti; pengakuan identitas pribadi, partisipasi kerja, memperlakukannya sebagai subyek, serta berusaha membangkitkan kesadaran kritis secara individu maupun secara kolektif. Ini penting ditekankan untuk menjaga terjadinya pembiasaan arti hakiki dari pembebasan. 1) Pembebasan tidak identik dengan 'memberi pertolongan' sebab jika itu substansinya, maka akan melahirkan ketergantungan di kalangan rakyat. Hal ini menyebabkan tatanan sosial yang oppresif harus diubah dengan dilandasi oleh kesadaran kritis untuk berubah secara demokratis. 2) Yang perlu diperhatikan dalam gerakan pembebasan adalah dalam diri setiap individu maupun kelompok itu harus diakui bahwa mereka memiliki kekuatan atau potensi internal sebagai penentu perubahan.

Pendidikan sebagai usaha membebaskan manusia, bukan alat untuk menindas manusia, artinya: dalam bentuk konteksnya, tindakan manusia, perjuangannya selalu disinergikan untuk mengelaborasi dunia natural dan untuk menciptakan dunia kultural serta sejarah membentuk suatu totalitas (Tilaar, 2002).

Hakikat dari pendidikan membebaskan pendidikan, meliputi hal hal sebagai berikut (a) Proses pendidikan akan bergeser dari pendidikan terminal ke pendidikan seumur hidup. Sejak awal pendidik harus mengajarkan para siswa agar senang belajar apa saja, di mana saja. (b) Peran guru akan bergeser dari "transfer" pengetahuan ke "eksplorer" pengetahuan, (c) Pola dan cara mengajar harus mulai berubah dengan memperlakukan peserta didik sebagai subjek belajar dan mengajak mereka lebih aktif dan dapat berdialog dengan siswanya.

Pendidikan yang manusiawi harus dilakukan secara dialogis, hakikat dialogis adalah "kata" tetapi kata bukan yang hanya sekedar alat dialogis, tetapi kata menemukan dua dimensi yaitu refleksi dan tindakan. Apabila dalam dialog salah satu diabaikan berarti ada yang dirugikan. Dialog adalah bentuk perjumpaan antara sesama manusia dengan perantara kata. Dialog tidak boleh menjadi suatu alat dominasi seseorang terhadap orang lain. Dominasi dalam dialog adalah dominasi terhadap dunia oleh mereka yang mengikuti dialog, yakni penguasaan dunia atas dunia pembebasan manusia. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam dialog antara guru dengan peserta didik: (1) Dapat berlangsung dengan adanya rasa cinta kasih yang

mendambakan dari guru terhadap peserta didik maupun antar sesama peserta didik. (2) dalam dialog tidak mungkin dilakukan tanpa kerendahan hati (3) adanya keyakinan yang mendalam terhadap diri manusia, keyakinan terhadap diri manusia, keyakinan pada kemampuan manusia untuk membuat kembali, untuk mencipta dan mencipta kembali, keyakinan pada fitrahnya untuk menjadi manusia seutuhnya bukan manusia istimewa/elite, tetapi kehadiran sesama manusia. (4) Dialog dapat terjadi karena adanya harapan. Harapan berakar dari ketidak sempurnaan manusia (5) Dialog tidak akan terjadi kecuali melibatkan kreativitas berfikir kritis, pemikiran melihat suatu hubungan tak terpisahkan antara peserta didik dan dunia tanpa melakukan dikotomi antara guru dan peserta, demikian pula antara peserta didik dengan peserta didik lainnya (Aghar, 1993:56).

2. Bagaimana Menjadi Guru Yang Merdeka

Pada umumnya mereka yakin bahwa tanpa guru yang bermutu tidak mungkin diraih keberhasilan pendidikan secara optimal sebab tidak semua peran guru dapat digantikan dengan media pembelajaran. Peran guru dapat menghidupkan suasana interaksi yang manusiawi antara guru dan siswa atau antara siswa dengan siswa lainnya (Kompas, 16 Juli 2002).

Bagaimana halnya dengan Indonesia, profesi guru masih menjadi problematik yang harus dicari jalan pemecahannya, sehingga guru benar-benar dapat dengan sepenuhnya menjalankan tugas yang diembannya dengan penuh pengabdian dan menjunjung tinggi profesionalisme.

Paulo Freire memberikan kritik terhadap kelemahan-kelemahan sistem persekolahan pendidikan yang "teacher centered program". Sistem pendidikan tersebut dapat menurunkan martabat manusia dan memperkuat penindasan. Ia menggambarkan bahwa dalam praktik sistem pendidikan semacam itu lebih bersifat: (a) guru mengajar, murid diberi pelajaran, (b) guru mengetahui segala macam, murid tidak mengetahui apa apa, (c) guru berpikir, murid yang dipikirkan, (d) guru berbicara, murid mendengarkan dengan tenang, (e) guru mengenakan disiplin, murid yang dikenakan disiplin, guru memilih dan melaksanakan pilihan, murid hanya menyetujui, (g) guru berbuat, murid hanya memiliki ilusi melakukannya melalui perbuatan guru, (h) guru memilih isi program, murid menyesuaikan, (i) guru merancukan kekuasaan pengetahuan dengan kekuasaan profesi yang ia letakkan dalam pertentangan dengan kebebasan murid, dan (j) guru adalah subjek dalam mengajar, murid adalah objek (Prihartono, dkk:2000).

Kritik Paulo Freire di atas diungkapkan oleh Shodiq A. Kuntoro dengan menambahkan pendidikan semacam inilah yang membuat anak menjadi pasif, tidak berani mengatakan perasaannya, verbalisme, bermental sakit, rendah diri, tidak kritis, dan tidak produktif. Untuk menghadapi sistem pendidikan yang tidak demokratis tersebut diperdukan seorang guru/pendidik yang mampu menumbuhkan sikap skeptis, kritis, sabar, percaya diri, kreatif, dan berani mengemukakan perasaannya. Dengan demikian, untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal baik guru maupun siswa harus sama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, guru merasa bebas dan siswa juga merasa bebas/merdeka dari himpitan untuk menyetarakan kata hati, perasaan, dan ideologinya (Kuntoro, 1999).

Menjadi guru sebagai pendidik yang membebaskan mengacu pada hal-hal berikut.

- a) Guru perlu mengubah pedagogi ke arah pendidikan kreatif sehingga menghasilkan siswa yang memiliki kreativitas. Kreativitas memerlukan kebebasan karena proses kebebasan akan dapat menjadi jendela dan jalan untuk mencapai siswa, untuk melihat kondisi mereka sendiri, serta untuk mencerahkan menuju tujuan yang lebih baik.
- b) Guru harus menunjukkan sikap antusiasme sehingga siswa akan memiliki minat tinggi untuk belajar secara kritis.
- c) Guru harus menciptakan suasana di mana siswa dan guru bersama-sama belajar, sama-sama memiliki kognitif, selain sama-sama memiliki perbedaan.
- d) Guru berusaha menjadikan pendidikan sebagai wahana yang demokratis, yakni pendidikan yang membuka, pendidikan yang menantang, menumbuhkan tindakan kritis terhadap upaya mengetahui dan membaca realitas.
- e) Guru diharapkan mampu mencerahkan realitas dengan menggunakan format kuliah yang dialogi sehingga guru yang membebaskan tidak melakukan sesuatu kepada siswa tetapi melakukan sesuatu bersama dengan siswa.
- f) Guru yang membebaskan selain menferampilkkan siswa untuk masuk lapangan kerja juga harus mengajarkan kekritisn terhadap pelatihan yang diberikan.
- g) Guru yang membebaskan harus mampu memotivasi siswa sehingga mampu menyerap tema-tema dan bahan-bahan pembelajaran dari konteks sosial yang menarik perhatian kritis terhadap realita.

- h) Guru yang demokratis tidak pernah mentransformasi otoritasnya sehingga menjadi otoriter, meskipun guru tetap memegang otoritas karena tanpa otoritas akan sulit membentuk kebebasan siswa. Misalnya, otoritas diterapkan pada siswa yang melampaui batas otoritas. Berarti guru harus menerapkan demokrasi, kebebasan, dan otoritas bersama sama.
- i) Guru berbeda dengan siswa bukan karena pendidikan atau pelatihan yang sudah dijalannya, tetapi karena ia mampu memimpin transformasi yang tidak akan berlangsung di kelas begitu saja.
- j) Dialog yang membebaskan bukan sekedar teknik yang akan membantu mendapatkan hasil. Dialog merupakan momen ketika manusia memerlukannya untuk merefleksi realitas yang dihadapi. Kelas dialogis menuntut adanya disiplin yang tinggi dan tidak permisif.
- k) Kelas dialogis memerlukan massa kritis partisipan untuk mendorong agar proses berlangsung serta melibatkan siswa yang masih enggan bicara namun bersedia menjadi pendengar.
- l) Pendidikan dialogis disituasikan pada budaya, bahasa, politik, dan tema tema yang dipahami siswa tetapi yang mengandung problematis untuk didiskusikan.
- m) Pengajar tidak perlu menentang kurikulum atau program, tetapi yang dilakukan adalah menentang otoritarisme dan cara cara elit di dalam pengorganisasian perkuliahan.
- n) Guru perlu memahami karakter siswa sehingga ia akan dapat memperbaiki efektivitas pengajaran.
- o) Guru yang dialogis bisa disebut guru yang memiliki seni sehingga menciptakan suasana kelas yang hidup karena pada dasarnya siswa itu bukan pembisu, tetapi selalu memiliki masalah yang ingin disampaikan.
- p) Guru perlu menciptakan metode dialogis yang mampu menentang logika dominasi, menentang hubungan sosial pembelajar yang menghambat demokrasi dan pemikiran kritis.

D. Penutup

Problematika pendidikan nasional bukan hanya masalah rendahnya mutu guru, penghargaan yang diberikan, dan masalah masalah teknis belaka, tetapi merupakan masalah yang kompleks. Permasalahan sistem pendidikan di Indonesia merupakan refleksi dari perubahan besar dalam masyarakat

kita. Pada kenyataannya pandangan masyarakat terhadap pendidikan masih kurang, begitu pula komitmen pemerintah belum terwujud secara optimal dalam mengembangkan sistem pendidikan dan mempersiapkan guru sebagai "pilar" utama dalam mengangkat derajat kehidupan berbangsa.

Pemerintah dan masyarakat sangat mengharapkan pendidikan yang membebaskan pendidikan dan mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Sekolah janganlah dijadikan "benteng kekuasaan" yang mematikan kreativitas siswa dan menjadikan dirinya terbelenggu oleh "aturan" yang dipaksakan. Oleh karena itu guru dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, kreatif dan inovatif sesuai bidangnya, sehingga dapat menghasilkan yang terbaik mutunya, yang berarti pula dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini tercermin oleh guru yang merdeka, sebagaimana yang diidamkan oleh pedagogi kritis. Untuk itu guru harus belajar terus menerus sepanjang hayat, meningkatkan kemampuan profesionalnya agar tetap eksis di masyarakat dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.

Untuk dapat mendukung terciptanya guru yang bermutu diperlukan adanya sebagai berikut: (1) Sistem rekrutmen dengan insentive yang dapat menarik lulusan pendidikan guru yang secara akademik dan kompetensi (personal, sosial, dan profesional) memenuhi syarat, (2) Sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) pada program pra jabatan (in-service) dan program dalam jabatan, dilakukan secara sistematis dan sistemik sebagai wujud upaya dalam rangka peningkatan kualitas guru, (3) Iklim organisasi yang dapat memungkinkan terjadinya proses pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap profesional sebagai guru pendidik, (4) Sistem penempatan dan pembinaan guru yang adil, merata, profesional, dan terus menerus secara berkesinambungan, (5) Pemberian jaminan kesejahteraan guru yang memungkinkan guru dapat memusatkan perhatian sepenuhnya sebagai tenaga pendidik yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- A . Kuntoro S. ., *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*. Rineka Cipta Jakarta: 1999
- Aris Pongtuluran, *Sistem Pendidikan Nasional*. 1989.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002
- Engineer, Eli Aghar. (*Paulo Freire, Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta 1993: LkiS.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi (Eds.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2001
- H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional; Kajian Pendidikan Masa Depan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Ikhanuddin Syarif dan Dodo Murtadlo (Eds.), *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru; 70 Tahun Prof. DR. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed.*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002
- KI Supriyoko, "*Pendidikan Tanpa Guru Bermutu*", dalam harian Kompas, 16 Juli 2002.
- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *RUU Sistem Pendidikan Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, 31 Desember 2001
- M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional; Menjawab Tantangan Kualitas Sumber Daya Manusia Abad 21*, PT. Intermasa, Jakarta, 1997
- Prihartono, Agung dkk.. *Paulo Freire, Pofitik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2000.
- Prihartono, Agung dkk.. *Paulo Freire, Pofitik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2000.
- Tilaar, H.A. R. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Grasindo. Jakarta, 2002
- To Thi Anh, *Nilai Budaya Timur dan Barat: Konflik atau Harmoni*, Gramedia, Jakarta, 1985.

PERFORMANCE ASSESSMENT (Penilai Unjuk Kerja)

Rusydi Ananda

A. Pendahuluan

Beberapa hari setelah mengembalikan pekerjaan siswanya yang sudah dinilai, seorang guru didatangi oleh orang tua peserta didik. Mereka minta agar guru itu mempertimbangkan nilai yang sudah diberikan, dan juga menaikkan nilai itu. Karena tidak puas mendengar alasan dan tanggapan sang guru tersebut, maka mereka mengajukan protes kepada kepala sekolah yang menyelidiki masalah itu. Dalam laporannya, kepala sekolah menulis, setelah mewawancarai guru itu secara informal, menjadi jelas bahwa guru itu tidak memakai prosedur evaluasi yang standar dan agaknya satu-satunya pembelaan guru itu adalah: "saya sudah mengajar selama lebih dari 25 tahun. Saya tahu beda antara pekerjaan yang nilainya A dan nilainya C+". Kepala sekolah itu menyimpulkan bahwa tugas yang diberikan guru itu menarik dan memang mencapai tujuan mata pelajaran tersebut, metode menilai guru itu cacat, tidak akurat dan kurang bagus.

Peristiwa di atas berkaitan dengan menilai. Dalam hal ini menilai hasil belajar bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Kompetensi peserta didik, dapat diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi tujuan pembelajaran, karena kompetensi peserta didik pada hakikatnya juga merupakan tujuan pembelajaran. Perbedaan kompetensi yang akan dicapai merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangan dalam menentukan teknik penilaian hasil belajar.

Kompetensi peserta didik dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kompetensi pada ranah kognitif, kompetensi afektif dan kompetensi ranah psikomotorik. Sekalipun kenyataannya tiga ranah tersebut tidak dapat dipisahkan, tetapi untuk kepentingan praktik penilaian, sangat membantu. Dengan memahami karakteristik kompetensi masing-masing ranah, dapat

membantu menentukan teknik penilaian yang tepat sesuai dengan objek yang akan dinilai.

Kompetensi dapat juga dilihat dari aspek-aspek yang terkandung dalam kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai. Masing-masing aspek tersebut membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan penilaian.

Beragam teknik dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar salah satu diantaranya adalah *performance assessment* (penilaian unjuk kerja).

Slavin (2009) menjelaskan *performance assessment* (penilaian unjuk kerja) adalah ujian yang melibatkan peragaan pengetahuan atau kemampuan yang sesungguhnya ke dalam kehidupan nyata. Sedangkan Muijs dan Reynolds (2008) menjelaskan *performance assessment* adalah mengukur hasil belajar atau unjuk kerja secara langsung dan bukan menggunakan tes tertulis. Selanjutnya Trianto (2009) menjelaskan *performance assessment* adalah suatu penilaian berdasarkan tugas jawaban terbuka (*open ended task*) atau kegiatan *hands on* yang dirancang untuk mengukur kriteria siswa terhadap seperangkat kriteria tertentu.

Trespeces sebagaimana dikutip Setiadi (2008) menjelaskan *performance assessment* merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas dan situasi dimana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan pengaplikasian pengetahuan yang mendalam serta keterampilan di dalam berbagai macam konteks. Jadi boleh dikatakan bahwa *performance assessment* adalah suatu penilaian yang meminta peserta tes untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Performance assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran dan membantu untuk mengarahkan pembelajaran selanjutnya. Melalui proses *Performance assessment*, peserta didik belajar tentang hasil-hasil kegiatan dan pembelajaran yang telah dilaluinya. Keuntungan lain dari *Performance assessment* adalah membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan peserta didik dan dunia nyata. Melalui *performance assessment* akan membantu tenaga pengajar memusatkan pada hasil-hasil pendidikan secara nyata. Sebagai peserta didik yang sedang belajar, hal itu akan menjadikannya kompeten dalam pemecahan masalah, yakin dengan kemampuannya dalam berpikir logis dan dapat mengkomunikasikan idenya

dengan jelas. Peserta didik akan mengakui bahwa mereka telah menerima pembelajaran dan mengakui bahwa pembelajaran tersebut bermanfaat untuk kehidupan mereka. *Performance assessment* digunakan tenaga pengajar untuk melihat apakah peserta didik mendapat pemahaman yang nyata tentang apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka dapat kerjakan.

B. Substansi *Performance Assessment*

Maertel dalam Setiadi (2008) menjelaskan dua ciri-ciri dasar dari *performance assessment* yaitu: (1) peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan kemampuannya dalam mengekspresikan suatu aktivitas (perbuatan), dan (2) produk dari *performance assessment* lebih penting daripada perbuatan (*performance*)nya.

Sedangkan Santrock (2008) menjelaskan ciri-ciri dari *performance assessment* adalah: (1) *performance assessment* mencakup penekanan pada “melakukan” aktivitas terbuka dimana tidak ada jawaban benar dan objektif, (2) *performance assessment* bisa menilai pemikiran level tinggi, (3) *performance assessment* bersifat realistis.

Performance assessment dilakukan bukan dimaksudkan untuk menguji ingatan faktual, melainkan untuk mengakses penerapan pengetahuan faktual dan konsep-konsep pada suatu masalah atau tugas yang realistis. *Performance assessment* meminta peserta menjelaskan “mengapa atau bagaimana” dari suatu konsep atau proses, oleh karena itu *performance assessment* bertujuan untuk mengetahui apa yang diketahui peserta didik dan apa yang dapat mereka lakukan. Untuk itu tugas yang dilakukan peserta didik pada *performance assessment* harus bermakna, realistis atau sesuai dengan kehidupan nyata dan dapat mengukur penguasaan siswa.

Trianto (2009) menjelaskan manfaat *performance assessment* adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkompetisi dengan dirinya daripada orang lain.
2. Dapat menyatu dengan pembelajaran.
3. Membuat pembelajaran lebih relevan dengan dunia nyata.
4. Memberikan informasi yang lebih lengkap kepada tenaga pengajar tentang pemahaman, kesulitan dan kemajuan belajar peserta didik.

Selanjutnya Muijs dan Reynolds (2008) menjelaskan manfaat *performance assessment* adalah tenaga pengajar dapat mengamati perilaku peserta

didik di dalam situasi realistis dan bukan di dalam situasi artifisial. Metode yang dapat digunakan dalam melakukan *performance assessment* yaitu:

1. Metode holistik

Metode holistik digunakan apabila pemberi skor (*rater*) hanya memberikan satu buah skor atau nilai (*single rating*) berdasarkan penilaian mereka secara keseluruhan dari hasil unjuk kerja peserta tes.

Santrock (2008) menjelaskan bahwa jika tujuan *performance assessment* lebih global dan perlu penilaian umum maka metode holistik yang tepat untuk digunakan. Berikut contoh rubrik dengan menggunakan metode holistik:

Rubrik holistik "Penulisan Atas Pertanyaan"

4 – sangat baik

Jawaban yang disajikan sangat lengkap dan akurat. Kebanyakan dari jawaban didukung oleh informasi tertentu dari buku bacaan, termasuk kutipan. Struktur kalimat beragam. Susunan kalimat pada umumnya akurat, termasuk pada ejaan, penggunaan huruf kapital dan pembubuhan tanda baca.

3 – baik

Jawaban pada umumnya lengkap dan akurat. Jawaban didukung oleh informasi tertentu dari buku bacaan. Struktur kalimat beragam. Susunan kalimat pada umumnya akurat termasuk pada ejaan, penggunaan huruf kapital dan pembubuhan tanda baca.

2 – perlu perbaikan

Jawaban sepenuhnya atau sebagian akurat. Jawaban kemungkinan perlu didukung oleh informasi yang lebih spesifik dari buku bacaan. Struktur kalimat beragam, dengan beberapa penggunaan cuplikan kalimat. Susunan kalimat memerlukan perbaikan, termasuk pada ejaan, penggunaan huruf kapital dan pembubuhan tanda baca.

1 – lemah

Jawaban tidak akurat atau tidak ada sama sekali. Struktur kalimat kebanyakan tidak lengkap. Susunan kalimat memerlukan perbaikan yang signifikan

2. Metode analitik

Metode analitik digunakan apabila pemberi skor (*rater*) memberikan penilaian pada berbagai aspek yang berbeda yang berhubungan dengan unjuk kerja yang dinilai. Beberapa cara menilai atau menskor kemampuan *performance assessment* peserta tes dengan menggunakan metode analitik adalah dengan cara menggunakan *checklist* dan *rating scales*.

Santrock (2008) menjelaskan bahwa jika tujuan *performance assessment* lebih spesifik terhadap beberapa aspek dari tampilan unjuk kerja maka metode analitik yang tepat untuk digunakan.

Untuk membantu tenaga pengajar dalam melakukan metode *performance assessment* baik metode holistik maupun metode analitik dapat dilakukan dengan merekam proses tampilan unjuk kerja peserta didik dengan menggunakan kamera video. Penggunaan kamera video memberikan kemudahan: (1) tenaga pengajar tidak perlu memberikan skor secara langsung selama kegiatan berlangsung sehingga tenaga pengajar dapat mengawasi pelaksanaan tampilan unjuk kerja siswa secara baik, (2) tampilan unjuk kerja siswa dapat diperiksa dengan lebih rinci dan secara lebih andal melalui rekaman yang dapat diputar ulang, dan (3) peserta didik dapat juga menyaksikan dan menilai sendiri tampilan unjuk kerjanya.

C. Penyusunan *Performance Assessment*

Kemp (1994) menjelaskan pertimbangan awal yang harus diperhatikan dalam penyusunan *performance assessment* yaitu:

1. Apakah proses, hasil atau keduanya akan dinilai.
Pada waktu peserta didik melaksanakan suatu tugas, kepercayaan diri, kecermatan, ketepatan dalam melaksanakan tugas biasanya merupakan hal-hal yang penting. Hal ini merupakan penilaian *proses* dari suatu tugas yang mungkin mencakup berbagai unsur seperti mengikuti urutan tindakan atau langkah yang benar, menggunakan alat yang benar dan bekerja dalam waktu yang telah ditentukan.
Penilaian *hasil* bertumpu pada hasil akhir dari suatu upaya dengan perhatian tertuju pada mutu dan barangkali pada jumlah dari hasil atau tindakan akhir yang merupakan akibat dari penerapan proses.
2. Kendala atau keterbatasan apakah yang harus dikenali ketika merencanakan *performance assessment*.

Suasana ketika tugas dilaksanakan secara normal harus dipertimbangkan sebelum membuat *performance assessment*. Unsur seperti ukuran dan kerumitan tugas, biaya untuk bahan atau pelayanan yang dibutuhkan, faktor keselamatan, keamanan dan waktu yang diperlukan untuk menguji dapat membantu tenaga pengajar menentukan apakah harus digunakan situasi ujian yang nyata atau situasi tiruan.

3. Apakah kendala waktu ujian merupakan keadaan tiruan atau keadaan nyata.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ditunjukkan oleh jawaban atas pertanyaan sebelumnya, maka tenaga pengajar akan menjadi siap untuk memutuskan apakah ujian dapat dilaksanakan dalam keadaan nyata atau apabila tidak layak dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih disederhanakan atau tiruan.

Santrock (2008) menjelaskan kriteria umum dalam menyusun *performance assessment* yaitu:

1. Menentukan tujuan yang jelas.

Pastikan dalam setiap *performance assessment* memiliki tujuan yang jelas dan keputusan yang jelas dapat diambil dari penilaian tersebut. Tujuan itu bisa bermacam-macam seperti memberi nilai, mengevaluasi kemajuan peserta didik.

2. Mengidentifikasi kriteria unjuk kerja yang dapat diamati.

Kriteria unjuk kerja adalah perilaku spesifik yang harus dilakukan peserta didik secara efektif sebagai bagian dari penilaian. Kriteria unjuk kerja akan membantu tenaga pengajar menentukan apa-apa yang perlu dikerjakan peserta didik.

3. Memberi setting yang tepat.

Setelah mendefinisikan kriteria unjuk kerja secara jelas, maka selanjutnya adalah penting untuk menentukan setting dimana tenaga pengajar akan mengamati tampilan unjuk kerja peserta didik, di dalam kelas (*in door*) atau di luar kelas (*out door*). Penentuan setting ini menjadi penting dan disesuaikan dengan tuntutan target tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

4. Menilai unjuk kerja.

Menilai unjuk kerja tampilan siswa dengan menggunakan rubrik yang berisikan kriteria yang dipakai untuk menilai unjuk kerja, dan nilai yang harus diberikan.

Majid (200) menjelaskan kriteria dalam menyusun *performance assessment* perlu diperhatikan beberapa kriteria berikut:

1. Mengarah pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai.
2. Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pikiran dan pemahamannya.
3. Memberikan kesempatan untuk menilai proses-proses yang ada dalam tugas.
4. Realistik, menarik dan merangsang untuk berpikir.
5. Menekankan kedalaman dan penguasaan materi.
6. Menuntun peserta didik untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah yang diberikan.

Rahayu (2007) menjelaskan langkah-langkah penyusunan *performance assessment* adalah:

1. Tentukan penampilan atau tugas yang akan dinilai:
 - a. Langkah-langkah apa saja yang harus dikerjakan peserta didik untuk menyelesaikan tugas.
 - b. Aspek mana saja yang perlu dalam penampilan peserta didik.
 - c. Temukan unsur-unsur penting dalam penampilan peserta didik,
 - d. Karya apa saja yang mungkin dikerjakan peserta didik
2. Susun aspek-aspek penting dari penampilan peserta didik:
 - a. Langkah-langkah penting diambil untuk terselesainya tugas.
 - b. Langkah apa yang ditekankan dalam pembelajaran.
 - c. Langkah khusus yang dapat ditemukan peserta didik untuk menyelesaikan tugas.
3. Batasi jumlah standar penilaian sehingga semuanya dapat teramati selama penampilan siswa.
4. Nyatakan standar penilaian dalam bentuk tindakan yang dapat diamati
5. Susun urutan standar penilaian sesuai dengan urutan pengamatan.

Selanjutnya Majid (2005) menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun *performance assessment* adalah:

1. Melakukan identifikasi terhadap langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir (*output*) yang terbaik.
2. Menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir (*output*) yang terbaik.

3. Membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur jangan terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melaksanakan tugas.
4. Mendefinisikan kriteria kemampuan-kemampuan yang akan diukur berdasarkan kemampuan siswa yang harus diamati (*observable*) atau karakteristik unjuk kerja yang dihasilkan.
5. Urutan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati.
6. Periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan sebelumnya oleh orang lain.

Setiadi (2008) menjelaskan langkah-langkah membuat *performance assessment* adalah:

1. Identifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang mempengaruhi hasil akhir (*output*) yang terbaik.
2. Tuliskan perlakuan kemampuan-kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir (*output*) yang terbaik.
3. Usahakan untuk membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua kriteria dapat diamati (*observable*) selama peserta didik melaksanakan tampilan unjuk kerja.
4. Definisikan dengan jelas kriteria kemampuan-kemampuan yang dapat diukur berdasarkan kemampuan peserta didik yang harus dapat diamati.
5. Urutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati.
6. Kalau ada, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh tenaga pengajar lainnya.

Dalam menyiapkan atau menyusun rubrik, Santrock (2008) menjelaskan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Masukkan skala poin yang mungkin digunakan dalam *performance assessment*. Angka tinggi biasanya diberikan untuk tampilan unjuk kerja yang terbaik demikian seterusnya.
2. Beri deksripsi untuk masing-masing kriteria guna meningkatkan reliabilitas dan menghindari penilaian yang biasa.
3. Tentukan apakah rubrik tersebut akan bersifat generik, genre spesifik, atau tugas spesifik. Jika generik, rubrik dapat digunakan untuk menilai

unjuk kerja yang lebih luas seperti komunikasi. Apabila genre spesifik, rubrik tersebut berlaku pada tipe unjuk kerja yang lebih spesifik seperti narasi sebagai bentuk komunikasi. Jika tugas spesifik, rubrik itu akan ditetapkan untuk satu tugas seperti pidato tentang satu topik tertentu.

4. Tentukan apakah rubrik itu akan longitudinal atau tidak. Tipe rubrik ini menilai kemajuan penguasaan materi pendidikan dari waktu ke waktu.

Dengan mengikuti langkah-langkah penyusunan *performance assessment* maka dihasilkanlah suatu rubrik penskoran. Rubrik penskoran adalah seperangkat standar penilaian yang digunakan untuk menilai kerja peserta didik dan mengakses unjuk kerja peserta didik. Rubrik penskoran ini harus merujuk dan menekankan penilaian pada tujuan proses pembelajaran. Kriteria khusus untuk rubrik tertentu dapat dikembangkan tenaga pengajar berdasarkan standar-standar unjuk kerja yang akan dinilai dalam satu kegiatan. Saat peserta didik menyelesaikan tugas unjuk kerjanya, hasilnya dibandingkan dengan rubrik *performance assessment* dan penskorannya berdasarkan tingkatan terbaik yang diperoleh peserta didik.

Rubrik merupakan panduan yang membantu tenaga pengajar, khususnya dalam pengaksesan aspek multidimensional dari suatu *performance assessment* sehingga tenaga pengajar dapat membuat perbedaan hasil belajar yang lebih halus daripada sekedar mengidentifikasi suatu jawaban benar dan tidak benar. Penggunaan rubrik juga memungkinkan penskoran lebih reliabel, konsisten dan tidak biasa. Rubrik-rubrik untuk tugas *performance assessment* merupakan rubrik analisis tugas spesifik yang dikemas untuk tiap tugas dengan menetapkan sejumlah kategori tugas spesifik dengan kategori yang satu tidak tergantung dengan kategori yang lain.

Kemp (1994) menjelaskan ragam bentuk rubrik *performance assessment* yaitu: (1) daftar cek (*check list*), (2) skala penilaian (*rating scales*), dan (3) catatan anekdot. Daftar cek (*check list*), adalah sebuah daftar periksa yang digunakan untuk menentukan apakah urutan yang runtut dalam tata cara atau sejumlah tindakan yang berhasil ditampilkan peserta didik.

Penilai menunjukkan “ya – tidak” atau “dilakukan – tidak” untuk setiap unsur yang dinilai. Terdapat dua kelemahan pada *check list* yaitu: (1) penilai hanya bisa memilih dua pilihan yang absokut yaitu teramati dan tidak teramati, jadi tidak ada nilai ditengahnya, misalnya apabila sebenarnya kemampuan peserta tes tersebut ada ditengahnya, dan (2) sukar untuk

menyimpulkan kemampuan peserta tes dalam satu skor, misalnya untuk mengurutkan kemampuan beberapa siswa.

Berikut contoh rubrik dengan menggunakan daftar cek yang lazim digunakan dalam (*check list*):

Rubrik "PIDATO"
(Menggunakan *Chek List*)

1. Ekspresi Fisik (*Physical Expression*)

- _____ (1) Berdiri tegak melihat audience
- _____ (2) Merubah ekspresi wajah sesuai dengan perubahan pernyataan
- _____ (3) Mata melihat kepada audience

2. Ekspresi Suara (*Vocal Expression*)

- _____ (1) Berbicara dengan kata-kata yang jelas
- _____ (2) Nada suaranya berubah-ubah sesuai dengan pernyataan
- _____ (3) Berbicara cukup keras untuk didengar oleh audience

3. Ekspresi Verbal (*Verbal Expression*)

- _____ (1) Memilih kata-kata yang tepat untuk menegaskan arti
- _____ (2) Tidak mengulang-ulang pernyataan
- _____ (3) Menggunakan kalimat yang lengkap untuk mengutarakan satu ide
- _____ (4) Menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang penting

Rubrik "PRAKTEK SHALAT"
(Menggunakan *Chek List*)

No	Aspek Yang Dinilai	Ya	Tidak
1.	Niat		
2.	Berdiri tegak		
3.	Takbiratul Ihram		
4.	Membaca Surah al-Fatihah		
5.	Rukuk dengan tumakninah		
6.	Iktidal		
7.	Sujud dua kali dengan tukmaninah		
8.	Duduk antara dua sujud		
9.	Tasyahud awal		
10.	Tasyahud akhir		
11.	Membaca shalawat pada tasyahud akhir		
12.	Salam		
13.	Tertib		
Skor yang dicapai			
Skor maksimum			

Skala penilaian (rating scales) yaitu penilaian dengan memberikan angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai. Oleh karena itu hanya tingkah laku dapat diamati dan diukur secara objektiflah yang dimasukkan ke dalam skala penilaian dengan memberikan rentang nilai tertentu dari mulai tertinggi sampai terendah. Suatu pembatasan yang penting dari penggunaan skala penilaian adalah biasa pribadi yang mungkin diberikan penilai dengan memposisikan peserta didik tertentu karena beberapa alasan. Di samping itu dituntut kecermatan dari tenaga pengajar dalam mengamati perilaku yang ditampilkan peserta didik kemudian di *cross check* rubrik skala penilaiannya. Skala penilaian (*rating scales*) setidaknya mempunyai tiga tipe yaitu: (1) *numerical rating scale*, (2) *graphic rating scale*, dan (3) *descriptive rating scale*. Berikut contoh rubrik *numerical rating scale*, *graphic rating scale*, dan *descriptive rating scale*:

Rubrik "PIDATO"

(Menggunakan *numerical rating scale*)

Untuk setiap kemampuan berilah lingkaran pada nomor:

1. Apabila peserta didik selalu melakukan
2. Apabila kadang-kadang
3. Apabila jarang
4. Apabila tidak pernah

No	Prilaku Yang Diamati	Skala Penilaian			
Ekspresi Fisik (<i>Physical Expression</i>)					
1	Berdiri tegak melihat audience	1	2	3	4
2	Merubah ekspresi wajah sesuai dengan perubahan pernyataan	1	2	3	4
3	Mata melihat kepada audience	1	2	3	4
Ekspresi Suara (<i>Vocal Expression</i>)					
	Berbicara dengan kata-kata yang jelas	1	2	3	4
2	Nada suaranya berubah-ubah sesuai dengan pern	1	2	3	4
3	Berbicara cukup keras untuk didengar oleh audie	1	2	3	4
Ekspresi Verbal (<i>Verbal Expression</i>)					
1	Memilih kata-kata yang tepat untuk menegaskan arti	1	2	3	4
2	Tidak mengulang-ulang pernyataan	1	2	3	4
3	Menggunakan kalimat yang lengkap untuk mengutarakan satu ide	1	2	3	4
4	Menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang penting	1	2	3	4

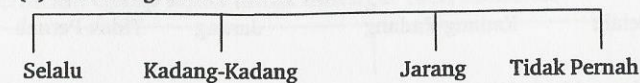
Rubrik "PIDATO"

(Menggunakan *graphic rating scale*)

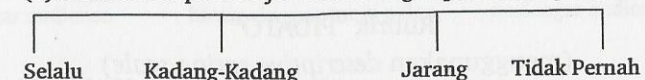
Tulislah X pada garis dimana kemampuan siswa teramati

1. Ekspresi Fisik (*Physical Expression*)

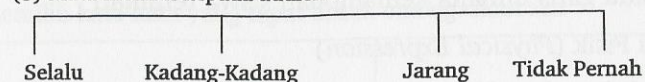
(1) Berdiri tegak melihat audience



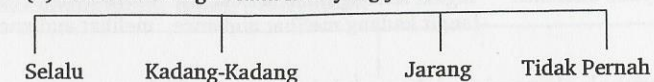
(2) Merubah ekspresi wajah sesuai dengan perubahan pernyataan



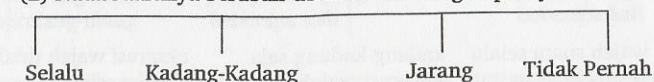
(3) Mata melihat kepada audience

2. Ekspresi Suara (*Vocal Expression*)

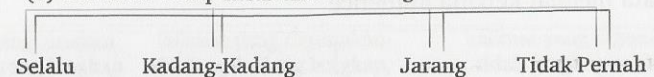
(1) Berbicara dengan kata-kata yang jelas



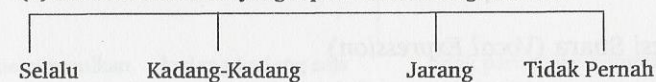
(2) Nada suaranya berubah-ubah sesuai dengan pernyataan



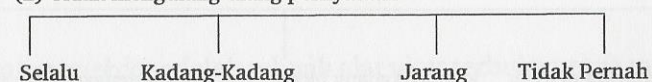
(3) Berbicara cukup keras untuk didengar oleh audience

3. Ekspresi Verbal (*Verbal Expression*)

(1) Memilih kata-kata yang tepat untuk menegaskan arti



(2) Tidak mengulang-ulang pernyataan



(3) Menggunakan kalimat yang lengkap untuk mengutarakan satu ide

Selalu	Kadang-Kadang	Jarang	Tidak Pernah
--------	---------------	--------	--------------

(4) Menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang penting

Selalu	Kadang-Kadang	Jarang	Tidak Pernah
--------	---------------	--------	--------------

Rubrik "PIDATO"

(menggunakan *descriptive rating scale*)

Tulislah X pada garis dimana kemampuan siswa teramati

1. Ekspresi Fisik (*Physical Expression*)

(1) Berdiri tegak melihat audience

berdiri tegak, selalu melihat pada audience	kadang-kadang berdiri tegak, kadang melihat kelangit-kadang melihat audience	tidak pernah berdiri tegak maka tidak pernah melihat audience
---	--	---

(2) Merubah ekspresi wajah sesuai dengan perubahan pernyataan

ekspresi wajah suara selalu berubah sesuai dengan	kadang-kadang saja ekspresi wajah berubah	ekspresi wajah tidak pernah selama pidato
---	---	---

(3) Mata melihat kepada audience

mata selalu melihat kepada audience	mata kadang-kadang melihat kelangit-langit, kadang melihat audience	mata tertunduk ke lantai saja maka mata tidak melihat audience
-------------------------------------	---	--

2. Ekspresi Suara (*Vocal Expression*)

(1) Berbicara dengan kata-kata yang jelas

selalu berbicara dengan kata-kata yang jelas terdengar audience	kadang-kadang bicara jelas terdengar, kadang-kadang tidak terdengar	bicara dengan suara pelan maka audience tidak jelas mendengarkan kata-kata
---	---	--

(2) Nada suaranya berubah-ubah sesuai dengan pernyataan

Nada suara selalu berubah sesuai dengan pernyataan	kadang-kadang suara berubah, kadang-kadang tidak pernah	suara selalu datar pada setiap pernyataan
--	---	---

(3) Berbicara cukup keras untuk didengar oleh audience

selalu bicara dengan suara keras sehingga terdengar audience	kadang-kadang bicara dengan suara keras, kadang bicara dengan suara pelan	selalu berbicara dengan suara pelan maka tidak terdengar audience
--	---	---

3. Ekspresi Verbal (*Verbal Expression*)

(1) Memilih kata-kata yang tepat untuk menegaskan arti

selalu memilih kata-kata yang tepat untuk menegaskan arti	kadang-kadang memilih kata-kata yang tepat, kadang-kadang tidak	kata-kata yang dipilih tidak tepat maka arti tidak tegas
---	---	--

(2) Tidak mengulang-ulang pernyataan

tidak pernah mengulang pernyataan yang sama secara berulang-ulang	kadang-kadang mengulang pernyataan yang sama beberapa kali	selalu mengulang pernyataan yang sama beberapa kali
---	--	---

(3) Menggunakan kalimat yang lengkap untuk mengutarakan satu ide

selalu menggunakan kalimat yang lengkap selama berpidato	kalimat yang digunakan kadang-kadang lengkap, kadang-kadang tidak lengkap	kalimat yang digunakan tidak lengkap sehingga mengaburkan satu ide
--	---	--

(4) Menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang penting

selalu menyimpulkan pokok pikiran yang penting	kadang-kadang saja menyimpulkan pokok pikiran yang penting	tidak pernah menyimpulkan pokok pikiran yang penting
--	--	--

Catatan anekdot adalah sebuah alat ukur terbuka untuk menilai unjuk kerja peserta didik. Dipersiapkan sebuah formulir ikhtisar yang mencantumkan tingkah laku yang diamati. Di samping uraian unjuk kerja, tafsiran tentang

apa yang dilakukan dan saran untuk perbaikannya dapat disertakan dalam catatan anekdot. Catatan tertulis harus dibuat ketika mengamati tampilan unjuk kerja peserta didik atau catatan-catatan pendek harus dibuat untuk kemudian diperpanjang dalam bentuk catatan lengkap, segera setelah penilaian selesai dilakukan.

Santrock (2008) menjelaskan strategi untuk menilai rubrik dalam *performance assessment* sebagai berikut:

1. Sesuaikan tipe rating dengan tujuan penilaian. Jika tujuannya lebih global maka gunakan skala holistik sedangkan apabila tujuannya memberikan tanggapan spesifik maka gunakan skala analistik.
2. Bicarakan kriteria dengan peserta didik sebelum instruksi. Hal ini harus dilakukan untuk mendorong peserta didik menggunakan deskripsi tersebut sebagai standar kerja mereka.
3. Buat rubrik dari atas, mulai dari deskripsi contoh unjuk kerja. Bahkan jika tidak ada peserta didik yang mencapai level contoh unjuk kerja maka rubrik ini harus didasarkan pada level yang tinggi sebagai patokan penilaian.
4. Susun bahasa rubrik untuk masing-masing kriteria atau nilai secara hati-hati.
5. Rubrik harus autentik.
6. Tunjukkan contoh kepada peserta didik.
7. Ambil langkah yang tepat untuk meminimalkan kesalahan penilaian.

Sebelum rubrik *performance assessment* digunakan sebaiknya rubrik tersebut diujicobakan terlebih dahulu melalui kegiatan validator (merujuk kepada ahli dibidang kajian keilmuan dan kebahasaan) dan uji empirik kepada kelompok peserta didik tertentu. Ujicoba dimaksudkan untuk melihat: (1) keterbacaan rubrik, (2) keefektifan setiap bagian alat ukur yang terdapat dalam rubrik, dan (3) estimasi waktu yang digunakan dalam melaksanakan *performance assessment*.

C. Evaluasi dan Sumber Kesalahan Melakukan *Performance Assessment*

Untuk mengevaluasi apakah *performance assessment* dikatakan berkualitas baik, Popham dalam Setiadi (2008) menjelaskan kriterianya sebagai berikut: (1) *Generability*, (2) *Authenticity*, (3) *Multiple*, (4) *Teachability*, (5) *Fairness*, (6) *Feasibility*, dan (7) *Scorability*

Generability, artinya adalah unjuk kerja peserta tes dalam melakukan tugas yang diberikan sudah memadai untuk digeneralisasikan kepada tugas-tugas lain. Semakin dapat digeneralisasikan tugas-tugas yang diberikan dalam rangka penilaian keterampilan tersebut atau semakin dapat dibandingkan dengan tugas yang lainnya, maka semakin baik tugas tersebut. Hal ini terutama dalam kondisi apabila para peserta tes diberikan tugas-tugas dalam penilaian keterampilan yang berlainan. *Authenticity* berarti tugas yang diberikan tersebut sudah serupa dengan apa yang sering dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Multiple artinya apakah tugas yang diberikan kepada peserta tes sudah mengukur lebih dari satu kemampuan-kemampuan yang diinginkan. *Teachability*, artinya tugas yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya usaha mengajar tenaga pengajar. *Fairness* artinya tugas yang diberikan sudah adil untuk semua peserta tes. Jadi tugas-tugas tersebut harus sudah dipikirkan tidak biasa untuk semua kelompok jenis kelamin, suku bangsa agama atau status ekonomi. *Feasibility* artinya tugas-tugas yang diberikan dalam *performance assessment* memang relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor-faktor seperti biaya, tempat atau alat. *Scorability* artinya tugas yang diberikan nanti dapat diskor dengan akurat dan reliabel.

Terdapat tiga sumber kesalahan dalam penskoran dalam melakukan *performance assessment* yaitu:

- (1) masalah dalam instrumen artinya pedoman penskoran tidak jelas sehingga sukar untuk digunakan oleh penilai. Selain itu komponen-komponen yang harus dinilainya juga sukar untuk diskor, umumnya karena komponen-komponen tersebut sukar untuk diamati. Hal yang demikian tentunya akan mengakibatkan hasil penskoran yang tidak valid dan tidak reliabel,
- (2) masalah prosedural, artinya prosedur yang digunakan dalam penilaian unjuk kerja tidak baik sehingga juga mempengaruhi hasil penskoran. Masalah yang biasanya terjadi adalah penilai harus menskor komponen-komponen yang terlalu banyak. Bagi penilai sebenarnya semakin sedikit komponen yang harus dinilai semakin baik tetapi pembuat pedoman penskoran tetap harus membuat pedoman penskoran yang dapat mewakili semua komponen-komponen penting yang mempengaruhi kualitas hasil akhir, dan
- (3) masalah penilai yang bias, artinya penilai cenderung untuk sukar

menghilangkan masalah "*personal bias*" sewaktu melaksanakan penilaian.

Santrock (2008) menemukan dua faktor utama kesalahan dalam *performance assesment* yaitu: (1) *personal bias*, dan (2) *hallo effect*. *Personal bias* muncul ketika tenaga pengajar cenderung memberi peserta didik dengan nilai tinggi atau nilai rendah, sedangkan *hallo effect* terjadi ketika kesan umum tenaga pengajar terhadap peserta didik mempengaruhi nilai pada unjuk kerja tertentu, misalnya jika tenaga pengajar menyukai peserta didik maka tenaga pengajar mungkin memberi nilai lebih tinggi ketimbang peserta didik lainnya yang lebih layak menerima. *Hallo effect* juga terjadi ketika rating tenaga pengajar atas dimensi sebuah rubrik mempengaruhi dimensi rubrik lain.

D. Penutup

Kemampuan guru melakukan penilaian yang bersifat unjuk kerja merupakan kemampuan normatif yang harus bisa dilakukan oleh guru secara profesional. Penilaian unjuk kerja yang lazim disebut dengan *performance assesment* itu, bukan hanya untuk melihat apakah peserta didik telah mampu menangkap substansi dari materi ajar yang diberikan oleh guru (ranah kognitif), tetapi lebih dari itu adalah untuk memastikan bahwa peserta didik telah mengerti dan secara aktual dapat melaksanakan sebuah proses pembelajaran tidak hanya dalam ranah kognitif semata, tetapi juga dalam ranah motorik (tentu saja tanpa mengabaikan ranah afektif). Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan agar guru melakukan keseimbangan antara materi yang diajarkannya dengan mengukur keberhasilan proses pembelajaran tersebut.

Karenanya, *performance assesment*, akan memberikan ruang yang cukup luas bagi guru dan peserta didik untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran berdasarkan skenario yang telah ditetapkan oleh seorang guru telah tercapai secara efektif dan proporsional dikalangan peserta didik itu yang pada dasarnya memiliki perbedaan dalam menyerap materi pembelajaran sesuai dengan kapasitas dan potensi masing-masing bahkan juga sangat terkait dengan karakteristik belajar peserta didik tersebut.

Penggunaan penilaian yang bersifat proporsional antara materi yang diajarkan dengan pengukuran keberhasilannya, merupakan sebuah

keniscayaan yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran sehari-hari. *Performance assesment* merupakan instrumen yang akan mengefektifkan guru dalam memastikan bahwa penilaian yang dilakukannya akan mampu mengukur kinerja belajar peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemp, J.E. *The Instructional Design Process*. Terj. Asril Marjohan. *Proses Perancangan Pengajaran*. Bandung: ITB. 1994.
- Majid, A. *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005.
- Muijs, D dan Reynold D. *Effective Teaching Theory and Practice*. Terj. Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Rahayu, E.B. dalam Noehi Nasoetion dkk. *Evaluasi Pembelajaran Matematika*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2007.
- Santrock, J.W. *Educational Psychology*. Terj. Tri Wibowo BS. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008.
- Setiadi, H. dkk. *Assessment Berbasis Kelas*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Slavin, R.E. *Educational Psychology Theory and Practice*. Terj. Marianto Samosir. Jakarta: Indeks. 2009
- Trianto. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

BAGIAN LIMA

EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

MENGEMBANGKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL MELALUI PENDIDIKAN

Drs. Syahrums, M.Pd.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam melestarikan sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan. Proses pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik, namun lebih diarahkan pada pembentukan sikap, perilaku, mengingat perkembangan komunikasi, informasi dan kehadiran media cetak maupun elektronik tidak selalu membawa pengaruh positif bagi peserta didik. Tugas pendidik dalam konteks ini membantu mengkondisikan peserta didik pada sikap, perilaku atau kepribadian yang benar, agar mampu menjadi *agents of modernization* bagi dirinya sendiri, lingkungan, masyarakat dan siapa saja yang dijumpai tanpa harus membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Pendidikan diarahkan pada upaya memanusiakan manusia, atau membantu proses *hominisasi* dan humanisasi, maksudnya pelaksanaan dan proses pendidikan harus mampu membantu peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi (bermoral, berwatak, bertanggungjawab dan bersosialitas). Untuk mewujudkan capaian tersebut, implementasikan pendidikan nasional harus didasarkan pada fondasi pendidikan yang mengembangkan manusia unggul harus dilakukan secara fundamental dan populis dengan mendasarkan pada sistem nilai yang dimiliki.

Era globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia berlangsung sangat cepat yang menimbulkan dampak global pula yang sekaligus menuntut kemampuan manusia unggul yang mampu mensiasati dan

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang sedang dan akan terjadi. Globalisasi akan semakin membuka diri bangsa dalam menghadapi bangsa-bangsa lain. Batas-batas politik, ekonomi, sosial budaya antara bangsa semakin kabur. Persaingan antar bangsa akan semakin ketat dan tak dapat dihindari, terutama dibidang ekonomi dan IPTEK. Hanya negara yang unggul dalam bidang ekonomi dan penguasaan IPTEK yang dapat mengambil manfaat atau keuntungan yang banyak. Globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan adanya persetujuan GATT pada putaran Uruguay di Marrakesh yang telah diratifikasi WTO yang dilanjutkan dengan kesepakatan APEC di Bogor tahun 1994 dan di Osaka tahun 1995 yang mengupayakan terbentuknya kawasan perdagangan bebas di Asia-Pasifik pada tahun 2020, dan terbentuknya kawasan perdagangan bebas (AFTA) ASEAN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003. Globalisasi tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, namun juga terjadi hampir di seluruh bidang kehidupan manusia, bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hankam, budaya. Bahkan perkembangan global yang paling cepat adalah bidang teknologi informasi. Penguasaan teknologi informasi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh masyarakat yang akan memenangkan persaingan di kompetisi global. Kondisi tersebut menuntut sumber daya manusia yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif. Manusia global adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa (bermoral), mampu bersaing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki jati diri. Salah satu wahana yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul adalah melalui pendidikan

Kemajuan teknologi, ketersediaan modal, barang, sumber daya manusia (SDM) akan mengalir deras dari berbagai belahan dunia yang tidak mungkin dapat dihindari oleh negara manapun. Terkait dengan kondisi tersebut, tuntutan akan reformasi pendidikan ("revolusi pendidikan") sangat diperlukan, mengingat model pendekatan pendidikan kita selama ini dinilai cenderung bersifat indoktrinatif, dogmatis, gaya bank, dan opresif birokratis, orientasi pendidikan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi pendidikan yang mendambakan keunggulan individu, masyarakat dan bangsa di tengah-tengah era otonomi daerah, era demokratisasi, era teknologi informasi dan kehidupan global. Akibatnya kualitas SDM yang dihasilkan dari lembaga pendidikan kita relative sangat rendah dan tertinggal dengan negara-negara tetangga.

Sementara kualitas pendidikan yang diandalkan sebagai wahana dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia masih memprihatinkan. Harian KOMPAS tanggal 5 September 2001 memberitakan bahwa Abdul Malik Fajar pada saat itu selaku Mendikbud juga mengakui kebenaran penilaian bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih terburuk di kawasan Asia. *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* melakukan survei yang hasilnya dari 12 negara yang disurvei menyebutkan bahwa Indonesia menduduki urutan 12, sedangkan Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang, Taiwan, India, Cina dan Malaysia. Sedangkan berdasarkan hasil survei dari *human development indeks* tahun 2002, kualitas SDM kita berada di peringkat ke 110 dari 173 negara yang disurvei. Secara kuantitatif masih banyak anak-anak kita yang tidak mendapat layanan pendidikan secara memadai.

Sebagai gambaran tentang kondisi tersebut adalah: (1) Sekitar 16,17 juta anak usia dini (0-6 tahun yang terlayani pendidikannya baru 7,16 juta (27,36%). Apabila dirinci, usia 0-3 tahun dari 13,50 juta, yang terlayani di bina keluarga Balita atau yang sejenisnya baru 2,53 juta (18,59%), Usia 4-6 tahun berjumlah 12,67 juta, yang tidak terlayani pendidikannya 4,63 juta (36,54%), yakni: di TK ($\pm 1,6$ juta), di RA ($\pm 0,4$ juta), di kelompok Bermain ($\pm 4,800$ anak), di Penitipan Anak ($\pm 9,200$ anak), dan di SD/MI ($\pm 2,6$ juta), (EFA Indonesia, 2001), (2) Buta huruf usia 10-44 tahun ada 5,9 juta (4,8% dari total penduduk usia 10-44 tahun, dan buta huruf usia 45 tahun ke atas ada 12,7 juta (31,2% dari total penduduk usia 45 tahun ke atas) (EFA Indonesia, 2001).

Berangkat dari kondisi tersebut, perubahan orientasi pendidikan harus segera dilakukan reformasi ("revolusi") secara mendasar (*mind set pelaku*) pada semua komponen dalam sistem pendidikan. Perubahan orientasi pendidikan tidak hanya berfokus pada perubahan kurikulum semata, namun yang terpenting saat ini adalah adanya "revolusi" sikap mental, pola pikir dan perilaku pelaku pendidikan (aparatur, pengelola dan pengguna pendidikan) secara mendasar. Kebijakan ini dilakukan agar dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, memperhatikan kebutuhan daerah, mampu mengembangkan seluruh potensi lingkungan dan potensi peserta didik serta lebih mendorong peran aktif dari masyarakat. Untuk mendukung pencapaian kondisi tersebut, pengelola pendidikan hendaknya memiliki pemahaman konsep pendidikan yang komprehensif.

Kurniawan (1999) lebih lanjut merinci berbagai tantangan pendidikan menghadapi ufuk globalisasi diantaranya: *Pertama*, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan (*continuing development*). *Kedua*, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat, dari masyarakat tradisional-agraris ke masyarakat modern-industrial dan informasi-komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan SDM. *Ketiga*, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. *Keempat*, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang Iptek, yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi.

Semua tantangan tersebut menuntut adanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing di bidang-bidang tersebut secara komprehensif dan komparatif yang berwawasan keunggulan, keahlian profesional, berpandangan jauh ke depan (*visioner*), rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai kebutuhan dan daya tawar pasar. Kemampuan-kemampuan itu harus dapat diwujudkan dalam proses pendidikan Islam yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, unggul dan profesional, yang akhirnya dapat menjadi teladan yang dicita-citakan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

B. Strategi Mengembangkan SDM Unggul Melalui Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana, terprogram dan berkesinambungan membantu peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal, baik aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotorik. Aspek kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Aspek afektif berkenaan dengan sifat yang terdiri dari lima aspek yakni: penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian,

organisasi, dan internalisasi. Aspek psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak yang terdiri dari enam aspek, yaitu: gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif.

Pengembangan potensi peserta didik merupakan proses yang disengaja dan sistematis dalam membiasakan/mengkondisikan peserta didik agar memiliki kecakapan dan keterampilan hidup. Kecakapan dan keterampilan yang dimaksud berarti luas, baik kecakapan personal (*personal skill*) yang mencakup; kecakapan mengenali diri sendiri (*self awareness*) dan kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*), kecakapan sosial (*social skill*), kecakapan akademik (*academic skill*), maupun kecakapan vokasional (*vocational skill*). Kegiatan pendidikan pada tahap melatih lebih mengarah pada konsep pengembangan kemampuan motorik peserta didik. Terkait dengan proses melatih ini, perlu dilakukan pembiasaan dan pengkondisian anak dalam berpikir secara kritis, strategis dan taktis dalam proses pembelajaran. Peserta dilatih memahami, merumuskan, memilih cara pemecahan dan memahami proses pemecahan "*masalah*". Berangkat dari kondisi tersebut, maka *budaya instant dalam pembelajaran* yang selama ini dibudayakan harus ditinggalkan, menuju proses pemberdayaan seluruh unsur dalam sistem pembelajaran.

Sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan, perlu diupayakan suatu sistem pendidikan yang mampu membentuk kepribadian dan ketrampilan peserta didik yang unggul, yakni beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang kreatif, cakap, terampil, jujur, dapat dipercaya, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Untuk mewujudkan manusia yang unggul perlu diberikan landasan pendidikan yang kokoh. Bangsa kita sebenarnya telah memiliki pilar pendidikan yang sangat fundamental, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, *Ing Ngarso Sun Tulodho*, *Ing Madyo Mbangun Karso*, *Tut Wuri Handayani*, namun implementasinya dalam pendidikan kita masih rendah.

Pemerintah, sebagai pemegang kebijakan pendidikan seharusnya memberikan sumbangan yang besar dalam mensukseskan program pendidikan. Sebab di antara kelemahan-kelemahan sistem pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya *political will* pemerintah dalam menangani permasalahan pendidikan ini. Menurut Arief Rahman (2002), setidaknya ada sembilan titik lemah dalam aplikasi sistem pendidikan di Indonesia:

1. Titik berat pendidikan pada aspek kognitif
2. Pola evaluasi yang meninggalkan pola pikir kreatif, imajinatif, dan inovatif
3. Sistem pendidikan yang bergeser (tereduksi) ke pengajaran
4. Kurangnya pembinaan minat belajar pada siswa
5. Kultur mengejar gelar (*title*) atau budaya mengejar kertas (ijazah).
6. Praktik dan teori kurang berimbang
7. Tidak melibatkan semua *stake holder*, masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah
8. Profesi guru sekedar profesi ilmiah, bukan kemanusiaan
9. Problem nasional yang multidimensional dan lemahnya *political will* pemerintah.

Untuk mengantisipasi berbagai kelemahan pendidikan tersebut, diperlukan kerjasama pelbagai pihak. Tidak hanya institusi pendidikan tetapi pemerintah juga harus serius dalam menangani permasalahan ini agar SDM Indonesia memperoleh rating kualitas pendidikan yang memadai. Untuk itu hendaknya dilakukan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, orientasi pendidikan harus lebih ditekankan kepada aspek afektif dan psikomotorik. Artinya, pendidikan lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter peserta didik dan pembekalan keterampilan atau *skill*, agar setelah lulus mereka tidak mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan daripada hanya sekedar mengandalkan aspek kognitif (pengetahuan). *Kedua*, dalam proses belajar mengajar guru harus mengembangkan pola *student oriented* sehingga terbentuk karakter kemandirian, tanggung jawab, kreatif dan inovatif pada diri peserta didik. *Ketiga*, guru harus benar-benar memahami makna pendidikan dalam arti sebenarnya. Tidak mereduksi sebatas pengajaran belaka. Artinya, proses pembelajaran peserta didik bertujuan untuk membentuk kepribadian dan mendewasakan siswa bukan hanya sekedar *transfer of knowledge* tapi pembelajaran harus meliputi *transfer of value and skill*, serta pembentukan karakter (*character building*). *Keempat*, perlunya pembinaan dan pelatihan-pelatihan tentang peningkatan motivasi belajar kepada peserta didik sehingga anak akan memiliki minat belajar yang tinggi. *Kelima*, harus ditanamkan pola pendidikan yang berorientasi proses (*process oriented*), di mana proses lebih penting daripada hasil. Pendidikan harus berjalan di atas rel ilmu pengetahuan yang substantif. Oleh karena itu, budaya pada dunia pendidikan yang berorientasi hasil (formalitas), seperti mengejar gelar atau titel di kalangan praktisi pendidikan dan pendidik hendaknya ditinggalkan. Yang harus dikedepankan dalam pembelajaran kita

sekarang adalah penguasaan pengetahuan, kadar intelektualitas, dan kompetensi keilmuan dan keahlian yang dimilikinya.

Keenam, sistem pembelajaran pada sekolah kejuruan mungkin bisa diterapkan pada sekolah-sekolah umum. Yaitu dengan menyeimbangkan antara teori dengan praktek dalam implementasinya. Sehingga peserta didik tidak mengalami titik kejenuhan berfikir, dan siap manakala dituntut mengaplikasikan pengetahuannya dalam masyarakat dan dunia kerja. *Ketujuh*, perlunya dukungan dan partisipasi komprehensif terhadap praktek pendidikan, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap dunia pendidikan terutama masyarakat sekitar sekolah, sehingga memudahkan akses pendidikan secara lebih luas ke kalangan masyarakat.

Kedelapan, profesi guru seharusnya bersifat ilmiah dan benar-benar "profesional", bukan berdasarkan kemanusiaan. Maksudnya, guru memang pahlawan tanpa tanda jasa namun guru juga seyogianya dihargai setimpal dengan perjuangannya, karena itu gaji dan kesejahteraan guru harus diperhatikan pemerintah. *Kesembilan*, pemerintah harus memiliki formula kebijakan dan konsistensi untuk mengakomodasi semua kebutuhan pendidikan. Salah satunya adalah memperhatikan fasilitas pendidikan dengan cara menaikkan anggaran untuk pendidikan minimal 20-25 % dari total APBN. Di sini diperlukan *political will* kuat dari pemerintah dalam menangani kebijakan pendidikan.

Jika kita mau jujur, berbagai kelemahan pendidikan kita seperti disebutkan di atas, pada dasarnya bertitik tolak pada lemahnya sumber daya manusia (SDM) yang ada. Padahal, SDM merupakan faktor utama yang menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, di samping faktor sumber daya alam (SDA) (hayati, non hayati, buatan), serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan negara-negara Barat adalah didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan hal itu berhubungan dengan pendidikan sebagai wahana pembentukan SDM.

Permasalahan lemahnya SDM Indonesia pada dasarnya berawal dari rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya keahlian dan manajemen serta kurangnya penguasaan teknologi. Lemahnya SDM menyebabkan Indonesia kurang mampu bersaing dengan negara-negara lain, padahal secara fisiografis Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan alam melimpah tetapi sayangnya tidak dikelola dengan baik karena kualitas SDM-nya yang kurang mendukung. Sistem pendidikan sangat bergantung pada mutunya, seperti juga halnya barang dikatakan berkualitas dan mempunyai nilai jual yang

tinggi karena memiliki mutu yang bagus. Ironis memang jika kita melihat nasib institusi pendidikan di Indonesia berdasarkan mutu pendidikan yang berada pada urutan terakhir di antara 12 negara Asia yang diteliti oleh *The Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2001, jauh di bawah Vietnam (6).

C. Peningkatan Kualitas SDM Indonesia Saat ini

Hasil survei PERC pada dasarnya mengacu pada tingkat kualitas lulusan pendidikan, dengan argumentasi, untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas tentunya sistem pendidikannya pun harus berkualitas. Sistem pendidikan yang tidak berkualitas mempengaruhi rendahnya SDM yang dihasilkan, yang pada gilirannya tidak mampu membawa bangsa ini “duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi” dengan bangsa lain. Lemahnya SDM pendidikan sebagai eksekutif sistem pendidikan yang tidak berkualitas, memunculkan fenomena masyarakat pekerja (*worker society*) bak jamur di musim hujan. Ini tentu berbeda dengan sistem pendidikan yang baik, yang memproduksi *employee society*.

Dalam konteks ini, Alvin Toffler dalam buku *The Future Shock* (1972) mengatakan, *employee* dan *worker* itu berbeda. (1) *employee* memiliki ciri untuk terus meningkatkan kemampuan teknis termasuk keterampilannya, sedangkan *worker* menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang tetap; (2) *employee* dapat mengendalikan alat (mesin), sedangkan *worker* relatif dikendalikan oleh mesin; (3) mesin berkhidmat kepada *employee*, sedangkan *worker* berkhidmat kepada mesin; (4) *employee* pada dasarnya tidak perlu diawasi hanya perlu pembagian tanggung jawab, sedangkan *worker* harus diawasi melalui garis organisasi; dan (5) *employee* memiliki sarana produksi yaitu informasi, sedangkan *worker* tidak memilikinya. Oleh karena itu, orientasi *employee society* harus dikedepankan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja ahli di bidang penguasaan teknologi. Karena pada milenium ketiga ini kita dihadapkan pada perubahan besar di bidang ekonomi, iptek dan sosial budaya.

Kita seharusnya belajar dari Jepang dan Korea Selatan. Walaupun kedua negara tersebut miskin sumber daya alam (SDA), tetapi karena dukungan SDM yang kuat, kedua negara Asia Timur itu menjadi *pioneer* ekonomi dunia, khususnya di kawasan Asia. Dalam konteks ini, masyarakat Jepang menurut H.D. Sudjana (2000) memiliki lima karakteristik khusus dalam sikap dan perilaku yang dipandang sebagai akar kekuatan bangsanya, yaitu:

Pertama, emulasi. Yaitu hasrat dan upaya untuk menyamai atau melebihi orang lain. Orang Jepang, baik selaku perorangan atau sebagai warga negara memiliki dorongan untuk tidak ketinggalan oleh orang, kelompok, atau bangsa lain. *Kedua, consensus.* Yaitu kebiasaan masyarakat Jepang untuk berkompromi, bukan konfrontasi. Budaya kompromi ini menimbulkan rasa keterlibatan masyarakat yang kuat terhadap kepentingan bersama. Budaya inilah yang menjadi pengikat kuat yang menjadi pengikat dasar (*root binding*) kehidupan masyarakat Jepang. *Ketiga, futurism.* Yaitu mempunyai pandangan jauh ke depan, masyarakat Jepang mempunyai keyakinan bahwa harkat individu akan naik apabila seluruh kelompok atau bangsa naik. Oleh karena itu kemajuan dan keberhasilan kelompok, masyarakat dan bangsa sangat diutamakan dalam upaya meningkatkan kemajuan individu. *Keempat, kualitas.* Mutu adalah jaminan kualitas. Artinya dalam setiap proses dan hasil produksi di Jepang, mutu menjadi faktor penarik (*full factors*), dan *Kelima, kompetisi.* Artinya sumber daya manusia dan produk bangsa Jepang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam tata kehidupan dan tata ekonomi global.

Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, diperlukan strategi pengembangan pendidikan, antara lain: (1) Mengedepankan model perencanaan pendidikan (partisipatif) yang berdasarkan pada *need assessment* dan karakteristik masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi, (2) Peran pemerintah bukan sebagai penggerak, penentu dan penguasa dalam pendidikan, namun pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator, fasilitator dan pemberdaya masyarakat, (3) Penguatan fokus pendidikan, yaitu fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan *stakeholders*, kebutuhan pasar dan tuntutan teman sebangsa, (4) Pemanfaatan sumber luar (*out sourcing*), memanfaatkan berbagai potensi sumber daya (belajar) yang ada, lembaga-lembaga pendidikan yang ada, pranata-pranata kemasyarakatan, perusahaan/industri, dan lembaga lain yang sangat peduli pada pendidikan, (5) Memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah, bahkan baik dari lembaga di dalam negeri maupun dari luar negeri, (6) Menciptakan *soft image* pada masyarakat sebagai masyarakat yang gemar belajar, sebagai masyarakat belajar seumur hidup, (7) Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu: lembaga-lembaga pendidikan baik jalur pendidikan formal, informal maupun jalur non formal dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses informasi dalam mengembangkan potensi diri

dan lingkungannya (misal; penggunaan internet, multi media pembelajaran, sistem informasi terpadu, dsb)

Konsep dan teori pengembangan SDM pada dasarnya mencakup pengembangan suatu uraian yang rinci dari tugas-tugas yang tercakup dalam suatu pekerjaan, dengan menentukan hubungan dari suatu pekerjaan tertentu dengan pekerjaan lain, dan memastikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan bagi seorang anggota organisasi untuk melakukan itu dengan sukses (Robbins, 2003:257).

Mengacu kepada konsep dan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa pengembangan SDM pada dasarnya dilakukan agar setiap personil organisasi menjadi orang yang terampil dalam melaksanakan tugas pokoknya, melalui pemahaman yang mendasar terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan organisasi dan harus dicapai dengan hasil maksimal dan optimal.

Pengembangan SDM oleh karenanya, ditentukan oleh bagaimana strategi yang ditetapkan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya, dan pada saat yang bersamaan mempersiapkan personil organisasi secara proporsional untuk dapat berkinerja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Sejalan dengan hal itu, maka upaya yang dilakukan oleh organisasi agar tercipta mutu SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, adalah dengan melakukan beberapa proses yang berorientasi kepada efektivitas.

Proses yang efektif untuk meningkatkan mutu SDM itu dilakukan melalui: (1) seleksi, (2) perekrutan, (3) penempatan, (4) pembinaan, dan (5) promosi yang berkelanjutan dengan memperhatikan pengalaman kinerja personil tersebut, dan juga bagaimana ia menyelesaikan tugas sehari-hari. Namun yang tak kalah penting adalah memperhatikan bagaimana komitmennya terhadap organisasi.

Secara konsepsional untuk menemukan efektivitas kinerja organisasi dalam rangka meningkatkan mutu organisasi, dilakukan dengan tiga langkah:

1. Analisis pekerjaan. Mengembangkan suatu penggambaran yang rinci dari tugas-tugas yang tercakup dalam suatu pekerjaan, menentukan hubungan dari suatu pekerjaan tertentu dengan pekerjaan-pekerjaan lain, dan memastikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan bagi personil organisasi untuk melakukan pekerjaan itu dengan sukses.
2. Uraian jabatan. Suatu pernyataan tertulis mengenai apa yang dilakukan

oleh pelaksan pekerjaan, bagaimana itu dilakukan, dan mengapa dilakukan.

3. Spesifikasi pekerjaan. Menetapkan kualifikasi minimum yang dapat diterima yang harus dimiliki seorang personil organisasi untuk melakukan suatu tugas tertentu dengan sukses.

D. Strategi yang Tepat untuk Memperbaiki SDM di Bidang Pendidikan.

Mencermati salah satu pernyataan menarik, yaitu: *"Give people a hand-out or a tool, and they will live a little better. Give them an education, and they will change the world.* Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Dengan menyadari pentingnya pendidikan tersebut diharapkan setiap negara akan dapat menetapkan strategi yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Bank Dunia strategi sektor pendidikan diperlukan agar produk pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan siap menghadapi tantangan ke depan.

Pendidikan, bagaimanapun harus diberdayakan secara proporsional. Oleh karena itu desentralisasi pendidikan yang dianut saat ini harus diterapkan secara konsekwen. Desentralisasi pendidikan saat ini memiliki paradigma baru, yaitu dari yang bersifat birokratis menuju demokratis. format paradigma dari yang bersifat birokratis menuju demokratis dalam pendidikan, terlihat pada tabel berikut:

No	Aspek	Paradigma pendidikan birokratis hirarkis	Paradigma pendidikan demokratis
1	Perencanaan	<i>Top-down</i>	<i>Bottom-up</i>
2	Pelaksanaan	Didasarkan instruksi-petunjuk	Didasarkan atas profesionalitas
3	Standar	<i>Output</i> dan proses : Nasional-makro	<i>Output</i> Nas. Makro, Proses lokal Mikro
4	Target	Nasional-makro	Level sekolah-wilayah terbatas
5	Pemahaman tujuan-target	Didasarkan atas pedoman dari pusat	Didasarkan atas kondisi sekolah
6	Sistem insentif	Seragam dan kepatuhan	Sistem prestasi
7	Umpan balik Orangtua	Tidak diperlukan, kecuali bagi peserta didik yang bermasalah	Diperlukan secara teratur
	Orientasi	Pengembangan intelektual (NEM)	Pengembangan aspek intelektual, personal dan sosial
9	Persepsi terhadap input	Masukan peserta didik diperlukan sebagai <i>raw input</i> yang menentukan hasil akhir	Masukan peserta didik bukan berupa <i>raw input</i> , melainkan klien yang memerlukan pelayanan jasa sekolah
10	Evaluasi	Dilaksanakan pada titik-titik waktu tertentu dan bersifat seragam	Dilaksanakan sepanjang waktu dengan menekankan kebutuhan sekolah
11	Kontrol sekolah	Oleh atasan	Oleh Orangtua peserta didik dan masyarakat sekitar
12	Pengambilan keputusan	Ada ditangan kepek dengan perkenan atasan	Rapat guru, Orangtua peserta didik dan kepala sekolah
13	Peran Orangtua siswa dan masyarakat	Terbatas menyediakan dana	Terlibat dalam seluruh proses pendidikan, kecuali menentukan nilai

Untuk dapat melaksanakan peralihan dari pendidikan birokratis hirarkis menuju demokratis, diperlukan adanya *good governance* (tata kelola yang baik). Dalam konteks ini *Good governance* yang dimaksud disini adalah yang memiliki niat baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya dan mengabdikan untuk masyarakat serta amanah terhadap seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Arti *good* dan *good governance* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

E. Penutup

Untuk melacak akar kelemahan SDM Indonesia ini bisa dilihat melalui wahana pendidikan. Dari sini secara logis dimunculkan pemikiran, untuk dapat bersaing dengan bangsa lain dalam memperebutkan lapangan kerja, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah sektor pendidikan. Pendidikan harus benar-benar diberdayakan oleh kita semua, sehingga nantinya, pendidikanlah yang akan mampu memberdayakan masyarakat secara luas.

Masyarakat yang terberdayakan oleh sistem pendidikan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam konteks persaingan global. Konsekuensinya, pendidikan harus dikonseptualisasikan sebagai suatu usaha dan proses pemberdayaan, yang benar-benar harus disadari secara kolektif, baik oleh individu, keluarga, masyarakat, lebih-lebih oleh pemerintah sebagai investasi masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Imron, Ali.j, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk, dan Masa Depan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Kurniawan, Khaerudin, "Arah Pendidikan Nasional Memasuki Milenium Ketiga", Suara Pembaharuan, Januari 1999.
- Rachman, Arief, *Kualitas Pendidikan Harus Dimaksimalkan*, Media Indonesia, 30 Mei 2002.
- Salam, Solihin, *Wajah Nasional*, Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam, 1990.
- Sudjana, HD., *Manajemen Program Pendidikan*, Bandung: Falah Production, 2000.
- Tilaar, H.A.R., *Kajian Kritis Sistem Pendidikan Nasional*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Mencari Paradigma Baru Pendidikan Nasional Memasuki Milenium III" dalam HUT PGRI di Jogjakarta.
- Toffler, Alvin, *The Future Shock*, terj. Hermawan Sulisty, Jakarta: Pantja Simpati, 1992.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

PERAN IBU DALAM PENGEMBANGAN POTENSI KEAGAMAAN ANAK

Dr. Masganti Sit, M.Ag.

A. Pendahuluan

Ibu dalam bahasa Arab disebut "*umm*". Umm tidak hanya berarti ibu dalam kamus Bahasa Arab tetapi juga bermakna kepala atau pimpinan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang artinya: "... Seorang perempuan adalah pimpinan di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya..." (H.R, Bukhari-Muslim)

Di dalam Islam peran ibu sangat besar dalam menciptakan generasi Islam yang beriman kepada Allah SWT. Salah satu kebaikan yang dilakukan seorang ayah kepada ibunya menurut Islam adalah memilihkan ibu yang beriman untuk anak-anaknya. 'Ulwan mengungkapkan bahwa: "*Ibu itu merupakan sekolah. Barang siapa menyiapkannya berarti dia telah menyiapkan bangsa yang berbibit dan berakar (kokoh)*" (Abdullah Nashih 'Ulwan, 1401 H:33). Pernyataan ini muncul dari penelaahan 'Ulwan terhadap kewajiban seorang muslim untuk memilih pasangan hidup dengan kriteria agama yang kuat. Rasulullah bersabda dalam pemilihan jodoh bagi seorang muslim sebagai berikut: "Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah agamanya; maka terbebaslah tanganmu (H.R. Bukhari dan Muslim).

Pada hadis lain juga dijelaskan pula jika seorang laki-laki muslim menikahi perempuan karena hartanya sebagai alasan utama, maka ia akan selalu merana karena dihinakan (Al-Thabrani dari Anas). Sejalan dengan hadis tersebut 'Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya: "Pilihlah tempat penyemaian bagi benih kalian, dan nikahlah yang kufu (Ibnu Majah, ad-Daruquthni dan al-Hakim).

Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya. Hal ini telah dimulai sejak proses pembuahan

terjadi. Selama 9 bulan di dalam rahim ibu anak menerima berbagai interaksi dengan ibunya. Anak memakan makanan yang dimakan ibunya, anak merasakan emosi yang dirasakannya ibunya, bahkan anak juga akan merasakan kenikmatan beribadah yang dialami ibunya ketika dia masih dalam kandungan.

Anak juga mengalami komunikasi yang intensif dengan ibunya melalui bahasa lisan atau bahasa pikiran. Pada saat anak terlahir ke dunia dia juga masih menjalani interaksi yang sangat dekat dengan ibunya. Dia tidur di pelukan ibunya, minum air susu ibunya, dan lebih merasa damai jika bersama ibunya. Dalam hubungan yang sangat intensif ini akan terjadi pengaruh yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikhis anak terutama perkembangan keagamaan anak.

Di dalam makalah ini akan dibahas perkembangan agama pada anak menurut pendapat beberapa ahli dan bagaimana para ibu mengembangkan potensi keagamaan anak. Penelaahan masalah ini dipandang penting dari tiga sisi: pertama dari sisi kepentingan ibu sebagai individu yang paling dekat dengan anak sekaligus memiliki tanggung jawab terhadap keimanan anak di samping berbagai aspek perkembangan lainnya pada anak. Kedua, dari sisi kepentingan anak. Tiada bekal yang lebih berharga bagi anak untuk mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat melebihi bekal keimanan dan ketakwaan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 133 difirmankan Allah bagaimana cemasnya Nabi Ya'kub terhadap keimanan anaknya setelah dia wafat. Sehingga dia bertanya kepada anak-anak: "Apa yang kamu sembah sepeninggalaku." Anak-anaknya menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Isma'il dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." Ketiga, dari sisi pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu: "... pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003).

B. Potensi Beragama Anak

Islam menjelaskan bahwa potensi beragama telah dibawa manusia sejak lahir. Potensi tersebut dinamai "fitrah" yaitu sebuah kemampuan yang ada dalam diri manusia untuk selalu beriman dan mengakui adanya Allah Yang Maha Esa sebagai pencipta manusia dan alam. Namun di dalam Islam

juga dijelaskan bahwa potensi tersebut hanya akan berkembang bila anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang memberi kesempatan tumbuh kembangnya potensi beragama anak.

Muttahhari menyatakan meskipun konsep dalam pengertian para ulama berbeda-beda namun mereka memegang prinsip yang sama mengenai "fitrah". Prinsip tersebut menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan membawa "fitrah", Islam adalah agama fitrah, dan seterusnya fitrah dan tauhid adalah watak manusia. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang fitrah adalah Surat ar-Rum ayat 30 yang artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu dan tidak perubahan pada fitrah itu selama-lamanya."

Secara bahasa, fitrah (*fithrah*) berasal dari kata *fathara*-*yafthuru*-*fathr[an]* wa *futhr[an]* wa *fithrat[an]* yang berarti pecah, belah, terbuka, mencipta. *Al-fathr* artinya pecah atau belah. Dari makna ini, diambil pengertian *Fithru as-Shâ'im* (berbukanya orang berpuasa), karena ia membuka mulutnya. Tanggal 1 Syawal disebut Idul Fitri, yakni Hari Raya Ber buka. *Fathara an-Nâqah*, *mashdar*-nya, *al-fathr* berarti memerah susu onta dengan ibu jari dan telunjuk kedua tangan; sedangkan *al-futhr* artinya susunya sedikit ketika diperah (Al-Firuz Abadi, *Lisân al-'Arab*, 5/55-59).

Sedangkan kata *fathara Allâh* artinya Allah mencipta. Jadi, *al-fithr* artinya ciptaan. Menurut orang-orang Arab asli, *fathara* artinya memulai atau mencipta dan mengkreasi. Hal ini seperti yang dituturkan ar-Razi (*Mukhtâr as-Shihâh*, 1/212) dari Ibn 'Abbas ra. yang berkata, "Aku tidak tahu apa arti *Fâthir as-Samawât* hingga datang kepadaku dua orang Arab Baduwi yang sedang berselisih mengenai sumur. Salah seorang dari mereka berkata, 'Fathartuhâ,' yakni *ibtadâ'tuhâ* (Aku yang memulai/membuatnya)."

Dalam al-Qur'an, kata *fathara* (mencipta) terdapat dalam Qs. al-An'âm [6]: 67; Qs. ar-Rûm [30]: 30; Qs. al-Isrâ' [17]: 51; Qs. Thâhâ [20]: 72; Qs. Hûd [11]: 51; Qs. Yâsin [36]: 22; Qs. al-Anbiyâ' [21]: 56; dan Qs. az-Zukhruf [43]: 27. Kata *fâthir* (pencipta) terdapat dalam Qs. Yûsuf [12]: 101; Qs. Fâthir [35]: 1; Qs. Ibrahim [14]: 10; Qs. asy-Syuarâ [26]: 11; Qs. al-An'âm [6]: 14. Kata *futhûr* (sesuatu yang tidak seimbang) terdapat dalam Qs. al-Mulk [67]: 3. Kata *yatafaththar-na* (pecah atau belah) terdapat dalam Qs. Maryam [19]: 90 dan Qs. asy-Syurâ [42]: 5. Kata *infatharat* (terbelah/terpecah) terdapat dalam Qs. al-Infithâr [82]: 1. Kata *munfathir* (menjadi pecah-belah) terdapat dalam dalam Qs. al-Muzammil [73]: 18.

Kata *fitrah* sendiri diungkapkan Allah hanya dalam satu ayat. Allah SWT berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Qs ar-Rûm [30]: 30).

Ayat ini oleh para ulama dikaitkan dengan firman Allah:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami melakukan yang demikian itu) agar pada Hari Kiamat kalian tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)." (Qs. al-A'râf [7]: 172).

Kedua ayat tersebut selanjutnya sering dikaitkan tafsirnya dengan hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasul Saw bersabda: Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu-bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. [HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Ahmad, Malik]

At-Thabari dan Ibn al-Mundzir menjelaskan, dengan mengutip pendapat Mujahid, bahwa fitrah yang dimaksud adalah agama (*dîn*) Islam. Ini juga makna yang dipegang oleh Abu Hurairah dan Ibn Syihab. Maknanya bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan selamat dari kekufuran. Itulah janji setiap jiwa kepada Allah tatkala masih dalam kandungan, sebagaimana

diisyratkan dalam surat al-A'râf ayat 172.

Menurut Abu 'Amr dalam *at-Tamhîd* dan Imam Malik dalam *al-Muwatha'*, makna fitrah tersebut adalah permulaan. Maksudnya, permulaan atau ketetapan Allah tatkala menciptakan makhluk. Allah telah mengawali mereka dengan ketetapan bagi kehidupan dan kematiannya serta kebahagiaan dan kesengsaraannya. Pendapat yang senada menyatakan, sejak di dalam kandungan setiap manusia telah ditetapkan kesudahannya apakah di surga ataukah di neraka.

Pendapat demikian berlawanan dengan ketetapan Allah yang memberikan pilihan kepada manusia antara iman atau kufur, jalan selamat atau sebaliknya (Qs. al-Kahfi [18]: 29 dan Qs. asy-Syams [91]: 7-8). Atas pilihannya itulah manusia dimintai pertanggung-jawaban dan diberi pembalasan berupa pahala atau siksa. Nasib manusia di akhirat tergadai (ditentukan) oleh amal perbuatannya (Qs. ath-Thûr [52]: 21 dan Qs. al-Muddatstsir [74]: 38).

Ada juga yang berpendapat, makna fitrah tersebut adalah iman, yakni setiap bayi dilahirkan di atas keimanan. Sebagian lain memaknai fitrah sebagai ciptaan; Allah menciptakan setiap bayi dalam makrifat (mengetahui) Tuhannya. Fakta bayi yang baru lahir dan pendalaman atas makna nash-nash di atas memperlihatkan bahwa pada waktu bayi dilahirkan, ia belum beriman ataupun kufur; ia juga belum memiliki pengetahuan, ilmu pengakuan atau pengingkaran atas sesuatu. Pengetahuan dan ilmu mengharuskan adanya aktivitas berpikir.

Aktivitas ini tidak terjadi pada bayi yang baru lahir dan baru terwujud setelah jangka waktu tertentu yang setidaknya ia telah tumbuh sampai *mumayyiz* (bisa membedakan). Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun maka Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Mudah-mudahan kamu bersyukur (Qs. an-Nahl [16]: 78).

Di samping itu, iman dan kufur atau pengakuan dan pengingkaran bisa berubah-ubah dan berganti satu sama lain. Tentu yang demikian itu

menyalahi karakter fitrah karena tidak ada perubahan pada fitrah Allah (Qs. ar-Rûm [30]: 30).

Makna fitrah yang lebih tepat adalah seperti yang disampaikan oleh Ibn Abd al-Bar dan Ibn 'Athiyah, yaitu karakter ciptaan dan kesiapan yang ada pada diri anak ketika dilahirkan, yang menyediakan atau menyiapkannya untuk mengidentifikasi ciptaan-ciptaan Allah dan menjadikannya dalil pengakuan terhadap *Rabb*-nya, mengetahui syariatnya, dan mengimani-Nya.

Abu al-'Abbas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan hati anak Adam siap untuk menerima kebenaran seperti menciptakan mata siap untuk melihat dan telinga siap untuk mendengar. Hanya saja, faktor-faktor berupa bisikan setan jin maupun setan manusia serta hawa nafsu bisa menggelincirkannya dari kebenaran. Jadi, ibu-bapaknya dalam hadis di atas merupakan permissalan dari bisikan setan yang menjadikannya seorang kafir atau musyrik.

Ibn al-Atsir mengomentari hadis di atas: *Fitrah adalah ciptaan atau kreasi. Fitrah di antaranya adalah kondisi seperti berdiri atau duduk. Hadis tersebut bermakna bahwa setiap insan dilahirkan di atas suatu jenis dari jibillah (ciptaan) dan tabiat yang siap-sedia untuk menerima agama. Hal senada diungkapkan oleh Zamakhsyari. (Al-Fâ'iq, 3/128).*

Berdasarkan nash-nash di atas, maka makna fitrah adalah karakteristik ciptaan, yaitu karakteristik bawaan yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan. Fitrah itu merupakan tabiat bawaan yang bersifat jibiliyyah. Karakter bawaan ini tidak akan pernah berubah atau berganti.

Jika kita analisis, karakteristik bawaan itu tidak lain adalah potensi kehidupan manusia berupa *hajât al-'udhâwiyah* (kebutuhan untuk tetap hidup) dan *gharâ'iz* —jamak dari *gharîzah*— (naluri/insting). Tabiat yang berupa kesiapan menerima agama dan kelurusan itu tidak lain adalah *gharîzah at-tadayyun* (naluri beragama). Jadi, kesaksian dalam surat al-A'râf [7] tersebut adalah kesaksian naluriiah/instingtif (*syahâdah ghâriziyyah* atau *syahâdah fithriyyah* [b]) dan bukan kesaksian imani ([i] *syahâdah imâniyyah*). Kesaksian itu tidak akan bisa dilupakan oleh manusia karena melekat dalam dirinya dan tidak akan hilang sampai kematiannya dan sampai generasi manusia yang terakhir. Itulah yang ditegaskan Allah dalam Qs. al-A'râf [7]: 172-173.

Di samping itu dalam menafsirkan ayat ini beberapa ulama mengemukakan pendapatnya, antara lain:

1. Imam at-Turmuzi menafsirkan ayat ini dengan argumentasi Q.S. al-A'râf ayat 172. berdasarkan ayat ini menurutnya Allah telah menciptakan

anak Adam dari sulbinya dan mengangkat sumpah kesaksian mereka, maka secara otomatis mereka semua menjadi Islam baik karena taat atau terpaksa. Secara global semua calon bayi itu sepakat dan mengakui kerububiyahan Allah saja, mendengar, dan patuh kepada-Nya.

2. Fuad 'Abd. al-Baqi juga memaknai fitrah dengan Islam. Menurutnya pemaknaan fitrah dengan Islam sudah dikenal oleh kaum salaf dan para ulama telah sepakat untuk menakwilkan makna kata fitrah dalam surat ar-Rum ayat 30 dengan makna "Islam." Pemaknaan ini menurutnya juga didukung oleh hadis Nabi riwayat lyat bin Humar yang artinya: "Bukankah aku telah menceritakan kepadamu pada sesuatu yang Allah menceritakan kepadaku dalam Kitab-Nya. Bahwa Allah menciptakan anak Adam dan anak cucunya untuk berpotensi menjadi orang Islam."²⁷
3. Menurut Ibn al-Qayyim fitrah merupakan kecenderungan bawahi mengenal Tuhan untuk menjadi muslim-mukmin dan atau untuk mengenal dan konsisten dengan kesucian dan kebenaran. Penafsiran ini berdasarkan pada hadis Rasul yang berarti: "Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam), maka orang tuanyalah (lingkungan) yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
4. Al-Maraghi dalam menafsirkan surat ar-Rum ayat 30 mengaitkannya dengan surat al-A'râf ayat 172 menyatakan bahwa fitrah adalah kecenderungan kepada tauhid dan meyakini-Nya
5. Az-Zamakhshary dan Rasyid Rida lebih lanjut memahami surat al-Anfal ayat 172 secara metaforis seolah-olah manusia berjanji di depan Allah untuk mengakui keberadaan-Nya sebagai Tuhan dan bersedia mentaati-Nya. Dengan demikian seorang atheis atau musyrik berarti telah mengkhianati ikrarnya sendiri di hadapan Allah.
6. Nurcholish Madjid memandang fitrah merupakan kecenderungan alami manusia yang diwujudkan dalam bentuk ubudiyah. Karena itu perpindahan satu tindakan ubudiyah ke bentuk lainnya dapat dilihat sebagai tindakan substantif belaka.
7. Abdullah, menyatakan bahwa sifat buruk manusia bukan bagian dari fitrah. Pendapat ini didukung dengan kenyataan bahwa Allah selalu megutus Rasul-Nya untuk mengingatkan manusia terhadap kerusakan yang didatangkan sesamanya atau syetan. Di samping kewajiban manusia untuk memikul tanggung jawab atas dosa-dosanya juga mengisyaratkan bahwa manusia tidak mungkin dibekali potensi jahat, sebab manusia merupakan pengganti Tuhan di muka bumi

Pandangan Islam menunjukkan bahwa sejak manusia lahir, Allah telah membekali dirinya dengan potensi beragama. Sebagian psikolog juga mengakui hal tersebut di antaranya Woodworth. Menurut Woodworth bayi yang baru dilahirkan sudah memiliki instik keagamaan, sebagai salah satu dari beberapa instink yang dibawa anak sejak lahir. Instink keagamaan ini belum terlihat pada diri anak karena fungsi kejiwaan yang menopang berfungsinya instink keagamaan tersebut belum sempurna. Misalnya instink sosial anak sebagai potensi bawaan sebagai makhluk sosial (*homo socius*) baru akan berfungsi setelah anak dapat bergaul dan berkemampuan untuk berkomunikasi. Jadi instink sosial itu tergantung pada kematangan fungsinya. Demikian pula instink agama akan berfungsi setelah anak-anak mendengarkan ajaran-ajaran agama lewat bahasa orang-orang di sekitarnya.

Hurlock menyatakan konsep anak-anak mengenai agama bersifat riil dalam arti anak-anak menafsirkan apa yang dilihatnya dengan apa yang diketahuinya (Hurlock, 1992: 127). Sepanjang masa anak-anak usia dini, minat beragama bersifat egosentris. Doa misalnya pada anak-anak adalah upaya mencapai kehendak. Tuhan Maha Pemberi dan tak pernah meminta balasan. Waterink anak usia 6 tahun belum punya rasa berdosa terhadap apa yang dilakukannya, hanya lingkungan yang mengatakan kepadanya bahwa Tuhan tidak suka kepada kesalahan yang dilakukan anak, sehingga anak menjadi takut kepada Tuhan.

Beberapa sifat-sifat keagamaan yang muncul pada anak-anak menurut Jalaluddin di antaranya:

1. *Unreflective*: pemahaman dan kemampuan anak dalam mempelajari nilai-nilai agama sering menampilkan suatu hal yang tidak serius. Mereka melakukan kegiatan ibadah pun dengan sikap dan sifat dasar yang kekanak-kanakan. Tidak mampu memahami konsep agama dengan mendalam.
2. *Egocentris*: dalam mempelajari nilai-nilai agama, anak usia RA terkadang belum mampu bersikap dan bertindak konsisten. Anak lebih terfokus pada hal-hal yang menguntungkan dirinya.
3. *Misunderstand*: anak akan mengalami salah pengertian dalam memahami suatu ajaran agama yang banyak bersifat abstrak.
4. *Verbalis* dan *Ritualis*: kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai agama pada diri mereka dengan cara memperkenalkan istilah, bacaan, dan ungkapan yang bersifat agamis. Seperti memberi latihan menghafal, mengucapkan, memperagakan, dan sebagainya
5. *Imitative*: anak banyak belajar dari apa yang mereka lihat secara langsung.

Mereka banyak meniru dari apa yang pernah dilihatnya sebagai sebuah pengalaman belajar.

Berbagai penjelasan di atas tentang potensi beragama anak tentu menuntut kesediaan, kesiapan, dan kesungguhan orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya untuk mengembangkan potensi tersebut sehingga menjadi perilaku yang aktual pada anak. Sebagai individu yang paling dekat dengan anak sejak masa dalam kandungan sampai anak dewasa, tentu kepada para ibu harapan ini lebih besar diletakkan.

C. Ibu dan Pengembangan Potensi Keagamaan Anak

Fatimah (1998: 212-213) menuliskan dalam disertasinya bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan orang tua dalam mendidik akidah anak-anaknya. Fatimah juga menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan agama memang terletak pada kedua orang tua, tetapi kelembutan ibu, kedekatan anak dengan ibu, dan banyaknya waktu yang dimiliki ibu berkomunikasi dengan anak menyebabkan ibu memiliki potensi yang lebih besar untuk menanamkan akidah pada anak-anak sejak usia dini.

Lebih lanjut Fatimah menjelaskan kewajiban orang tua (ayah dan ibu) pada anak usia 2-7 tahun dalam hal pendidikan akidah pada anak-anaknya meliputi: (1) menanamkan kecintaan kepada Allah, (2) mengajarkan membaca al-Qur'an, (3) menanamkan kecintaan kepada Rasul, dan (4) menyukai yang halal dan menghindari yang haram.

1. Mencintai Allah

Ibu dapat menanamkan kecintaan kepada Allah SWT pada anak-anaknya melalui pembiasaan ibadah. Menanamkan pada diri anak sikap mencintai Allah dengan melakukan ibadah sebaiknya-baiknya dapat dilakukan melalui mengajak anak mensyukuri berbagai nikmat yang telah diberikan Allah. Para ibu dapat menjelaskan kepada anaknya hal-hal sebagai berikut:

- Allah yang menjadikan bagi kita makanan
- Allah yang memberikan kita dapat merasakan makanan yang lezat
- Allah yang menjadikan pemandangan yang indah

Para ibu dapat pula mengajak anak-anak untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat tersebut. Syukur nikmat membuat anak akan terbiasa berterima kasih kepada Allah dan mencintai Allah. Penanaman rasa syukur nikmat ini terutama dapat dibiasakan ibu pada saat memberi anak makanan. Diriwayat-

kan dari Anas ra Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT ridho pada hamba yang jika memakan sesuatu memuji-Nya, dan jika meminum memuji-Nya (H.R. Abu Dawud).

2. Mengajarkan anak Al-Qur'an.

Ibu sebagai wakil ayah dalam mengasuh anak-anak di rumahnya, maka kewajiban mengajarkan Al-Qur'an pada anak adalah salah satu kewajiban utama bagi seorang ibu. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam wajib diketahui umat Islam cara membaca dan maknanya. Belajar Al-Qur'an di waktu masih anak-anak merupakan waktu yang tepat untuk belajar al-Qur'an. Abu Darda sahabat Rasulullah saw mengatakan: “Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas air dan belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air.” (Haisymy: 333). Fatimah mengatakan bahwa yang baik diajarkan pada anak-anak adalah surat-surat pendek di antaranya surah Al-Ikhlâs, Al-'Alaq, dan An-Nas.

3. Mencintai Rasul.

Dalam hal mendidik anak mencintai Rasul, Ali bin Abi Thalib berkata: “Didiklah anak-anakmu dengan tiga hal: mencintai Nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca al-Qur'an..” Sikap mencintai Rasul akan menumbuhkan cinta kepada ajaran agama dan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya.

Bersalawat kepada Nabi merupakan salah satu kebiasaan yang dianjurkan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Salah satu hadis Nabi yang menganjurkan umat Islam untuk bersalawat kepadanya yang artinya: “Siapa yang bersalawat kepada satu kali, maka bersalawat Allah kepadanya 10 kali (H.R. Muslim). Para ibu dapat membiasakan anaknya membaca salawat kepada Rasul setelah mengajarkan anaknya membaca syahadat.

4. Mencintai yang halal dan menghindari yang haram

Para ibu harus membiasakan anak-anaknya mencintai yang halal dan menghindari yang haram. Kehalalan makanan sangat berkaitan dengan diterimanya amal. Kehalalan dapat dilihat dari sumber makanan dan kehalalan makanan itu sendiri. Sumber makanan harus berasal dari usaha yang halal. Rasulullah pernah menyuruh Hasan bin Ali membuang kurma hasil sedekah. Sebab Nabi dan keluarga haram menerima sedekah.

Para ibu harus memperhatikan makanan yang dimakan anak berasal dari sumber yang halal atau tidak. Begitu juga dengan makanan itu sendiri

halal atau haram. Sebaiknya para ibu membiasakan anaknya untuk membeli makanan yang memiliki label halal.

Keempat hal yang dikemukakan Fatimah di atas memang merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam, oleh sebab itu sebagai seorang yang sangat menyayangi anak sebaiknya para ibu menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak sejak usia dini. Menurut penulis ada berbagai cara yang dapat dilakukan para ibu dalam pengembangan potensi keagamaan anak di antaranya:

1. Melalui pembiasaan. Sikap agama anak yang verbalis-ritualis dan imitatif dapat digunakan orang tua untuk membiasakan pengamalan ajaran agama. Anak-anak dapat diajak ibunya untuk shalat dan membaca doa-doa dan belajar membaca al-Qur'an. Para ibu juga dapat membiasakan anak-anak memulai pekerjaan dengan membaca bismillah dan membaca alhamdulillah setelah selesai mengerjakan sesuatu. Pepatah melayu mengatakan: “Alah bisa karena biasa.” Pembiasaan akan membekas dalam diri anak sampai dia dewasa.
2. Melalui cerita. Para ibu dapat menceritakan kisah-kisah teladan. Kisah-kisah perjuangan dan budi pekerti Rasulullah, para sahabat Rasul, para nabi, dan para alim ulama. Sikap meniru pada anak dapat mendorong anak mencari tokoh idola. Melalui cerita-cerita yang dapat memberikan inspirasi pada anak-anak tentang nilai-nilai juang dan perilaku berbudi pekerti, para ibu dapat mengembangkan kecintaan anak kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara psikologis anak pada umumnya sangat suka mendengarkan cerita. Para ibu dapat menukar cerita-cerita dongeng dengan cerita-cerita Rasul, para nabi, sahabat Rasul, dan orang-orang saleh lainnya.
3. Melalui perbuatan (*contoh teladan*). Semua manusia dari kecil hingga dewasa memerlukan tokoh yang diidolakan untuk menjadi contoh teladan. Allah SWT memenuhi kebutuhan manusia terhadap contoh teladan dengan mengutus Rasulullah sebagai “*uswatun hasanah*” (contoh teladan yang baik). Mutahhari mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi merupakan pengabdian dari keinginan fitrah dan dorongan dalam diri manusia. Pada hakikatnya, apa yang dicari dan diusahakan oleh manusia dengan fitrahnya itu adalah ajaran yang diberikan para nabi kepadanya. Di sisi lain Menurut pandangan psikologi dalam (*psikoanalisa*) tokoh idola pada anak-anak yang pertama adalah orang tuanya.

Jika seorang ibu dapat menjadi teladan anak-anaknya dalam pengamalan ajaran agama tentulah potensi fitrah anak akan berkembang

dengan baik. Secara psikologis anak-anak umumnya merupakan “mesin foto copy” tercanggih. Buzan mengatakan kemampuan anak meniru mengalahkan mesin duplikator mekanis terhebat yang pernah diciptakan manusia (Buzan, 2003:91). Buzan juga menyarankan orang tua mendorong anak-anaknya meniru berbagai perilaku yang ingin ditanamkan pada anak.

4. Melalui diskusi dengan anak. Para ibu dapat mendiskusikan berbagai hal dengan anak yang berkaitan dengan upaya menanamkan ajaran agama kepada anak. Piaget pernah melakukan diskusi dilema moral dengan anak untuk mengetahui pengetahuan dan kesadaran anak tentang hal yang berkaitan dengan moral. Para ibu dapat mengajak anak-anaknya berdiskusi tentang bagaimana kasih sayang Allah kepada manusia dan bagaimana cintanya Rasul kepada umatnya. Para ibu juga dapat mengajak anak-anaknya berdiskusi tentang buruknya memakan makanan yang haram dan baiknya memakan makanan yang halal.
5. Melalui doa. Hal ini selalu terlupakan para ibu bila berkaitan dengan kepentingan agama. Para ibu mungkin selalu mendoakan anak-anaknya untuk mendapat kesenangan duniawi, seperti menjadi juara kelas, juara di bidang olah raga, dan juara-juara lainnya. Tetapi seorang ibu mungkin lupa mendoakan anak-anaknya untuk menjadi orang beriman dan beramal shaleh. Doa ini amat penting dalam menyempurnakan semua usaha-usaha yang dilakukan ibu untuk mengantarkan anaknya menjadi seorang yang beriman dan beramal shaleh. Simaklah doa ibu Bayazid (seorang ulama besar di zaman dinasti Abbasiyah). Ibu Bayazid setiap selesai shalat berdoa untuk anaknya sebagai berikut: “Ya, Allah yang Maha Kuasa, aku telah mengabdikan anakku di jalan-Mu, kepada-Mu jugalah aku memohon agar Engkau mencintainya dan memperhatikan kesejahteraannya. (Syaiful Bakhri, 2006: 75)

Kelima cara ini bukanlah batasan bagi para ibu untuk berkerasi dalam mengembangkan potensi keagamaan pada anak-anaknya. Tetapi kelima cara ini dapat menjadi alternatif dalam menunaikan tugas para ibu dalam menyiapkan generasi Islam yang beriman dan bertakwa.

Agar kelima hal di atas dapat berjalan dengan sempurna, seorang ibu harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa mendidik anak berlaku jujur sementara ia sendiri suka berbohong. Melalui penggunaan metode bermain peran atau bermain pura-

pura dan penuh kasih sayang, seorang ibu dapat menanamkan kebaikan kepada anak. Sebaliknya, cara yang kasar justru akan menimbulkan kebencian di hati anak. Misalnya, jika anak dipaksa dengan perlakuan keras untuk melakukan sholat, anak akan merasa benci kepada sholat.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Setiap anak yang dilahirkan membawa potensi beragama yang dapat dikembangkan orang tua dan lingkungan terutama para ibu yang memiliki kedekatan dengan anak sejak dalam kandungan sampai anak dewasa.
- b. Potensi beragama anak hanya dapat berkembang jika anak mendapatkan rangsangan dari lingkungan berupa upaya pengembangan potensi beragama yang dilakukan dengan sengaja oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya.
- c. Materi agama yang diberikan dalam pengembangan potensi beragama anak meliputi: mencintai Allah, membaca al-Qur'an, mencintai Rasul, dan menyukai yang halal serta menghindari yang haram.
- d. Berbagai cara yang dapat dilakukan para ibu untuk mengembangkan potensi beragama anak-anaknya antara lain: melalui pembiasaan, cerita-cerita, contoh teladan, diskusi, dan doa.

2. Saran-saran

Di sarankan kepada para ibu yang ingin mengembangkan potensi beragama anak-anaknya hal-hal sebagai berikut:

1. Terus menerus menambah pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama Islam dengan belajar sendiri atau belajar kepada orang lain
2. Meningkatkan kualitas pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.
3. Berusaha menjadi contoh teladan bagi anak-anak dalam amalan dan perilaku yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama.
4. Lebih memperhatikan kehalalan makanan yang dimakan anak baik dari sumber maupun dari kehalalan makanan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, Jabar, 2000.
- Al-Qur'an al-Karim
- Al-Baqiy, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam alMufahras li Ayati al-Qur'an*, Mesir
Mustafa al-Babi al-Halabi, tt.
- Buzan, Tony, *Brain Child: Cara Pintar Membuat Anak Menjadi Pintar*, Terj.
Rahayu Lestari, Jakarta, Gramedia, 2003.
- Elizabeth Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang
Remtang Kehidupan*, Terj. Istiwidayanti dan Sudjarwo, Edisi V,
Jakarta, Erlangga, 1992.
- Fatimah, Muhammad Khair, *At-Tarbiyat al-'Aqidah an-Nasyi'i*, Beirut, Dar
al-Fikr, 1998.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998
- Madjid, *Nurcholish, Islam Doktrin dan Peradaban sebuah Telaah Kritis tentang
Masalah Keimanan*, Jakarta.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Dar al-Ma'arif, 1996.
- Malik, Imam, *al-Muwatha'*, Beirut, Dar Ihya wa al-'Arabi, 1958.
- Al-Manzhur, Ibnu, *Lisân al-'Arab*, Beirut, Dar al-Fikri, tt
- Qayyim, Ibn, *at-Tafsir al-Qayyim lil Imam Ibn al-Qayyim*, Beirut, Dar Kuliyyat
al-Ilmiyah, tt.
- At-Turmuzi, *Jami' at-Turmuzi*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- 'Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiyat al-Aulad*, Beirut, Dar al-Fikr, 1401 H.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PEMBERDAYAAN KONSELING DALAM KEHIDUPAN

Drs. Abdurrahman, M.Pd.

A. Pendahuluan

Pengembangan profesi konseling dapat diamati dari berbagai dimensi yang berbeda. Ada yang mengamati profesi konseling dari sudut pandang yang polair, rasional dan afektif. Ada pula yang mengamatinnya dari segi pengembangan wawasan yang dipertentangkan dengan pengembangan tindakan. Ada pula yang mengamatinnya dari dimensi analitis yang diper-tentangkan dengan dimensi eksperiensial (Stone L, 1986:4-5).

Sekiranya dielaah lebih mendalam, dimensi yang ditetapkan secara polair tersebut, ternyata hanya terdapat dalam karya-karya tulis yang bersifat teoritik belaka. Dalam prakteknya kegiatan konseling nampak berada di antara kedua kutub tersebut, atau malah menyeberang silang ke dimensi lainnya, atau malah membaur, lebur, luntur dan bias.

Dilihat dari pengembangan kepribadian klien, memang tidak seluruh pengembangan potensi atau perubahan sikap dan perilaku klien menuntut rekonstruksi kepribadian secara utuh, tetapi cukup dibatasi pada pengembangan aspek-aspek tertentu saja (Hansen, dkk, 1982:13). Pada sisi lain nampak kecenderungan yang ekstrim, seperti pandangan John Locke (Dewey, 1958:71) yang mengatakan bahwa pengalaman membentuk pribadi seseorang. Pandangan Locke ini dipertentangkan dengan pandangan Immanuel Kant. Demikian pula pendekatan nomothetik dipertentangkan dengan pendekatan ideografik, pendekatan parsial dengan keutuhan kepribadian (Dewey, 1958:69).

Menurut Stone (Dewey, 1958:69) klasifikasi yang didasarkan pada berbagai dimensi itu ditandai oleh pemikiran Yung yaitu adanya dimensi informasional dan dimensi pengembangan kemampuan dalam pembuatan keputusan. Dimensi imformasional menyangkut proses penerimaan informasi melalui penginderaan atau sensasi, sedang dimensi pengambilan keputusan

menyangkut proses penilaian informasi yang diterima, dan disebut intuisi. Penginderaan atau sensasi memproses informasi melalui transmisi rangsangan fisik secara langsung ke dalam kesadaran. Indera penglihatan, pendengaran dan perabaan mencatat rangsangan lingkungan secara objektif dan realistik.

Adapun proses intuisi berlangsung dengan memperkaya dan mengelaborasi rangsangan yang dipersepsi melalui analisis semantik atau kognitif dan idealistik. Proses intuisi ini berlangsung melalui pembentukan konsep secara utuh berdasarkan berbagai situasi.

Demikianlah konseling yang menggunakan tipologi Yung ini akan sampai pada klasifikasi tipe-tipe konseling kepribadian (yang dalam prakteknya mengutamakan perubahan inderawi atau intuisi dan yang mengutamakan pengembangan dan perubahan pikiran atau perasaan

Konseling yang mengutamakan pengembangan kemampuan inderawi, akan mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah dan memandang "masalah" berasal dari dunia luar diri individu (eksternal) serta bebas nilai. Ini berarti bahwa hubungan dan pengaruh sosial sangat penting bagi upaya-upaya membantu mengembangkan kepribadian dan mengubah perilaku klien, didasarkan pada observasi dan pengalaman.

Konseling yang mengutamakan pengembangan kemampuan estetik akan mengaplikasikan komunikasi dalam mengubah dunia batiniah klien atau dunia internal bagi pertumbuhan pribadi. Dalam kenyataannya perspektif konseling estetik ini menumbuhkan kemampuan individu dengan menggunakan teknik konfrontasi antara kenyataan dengan yang diharapkan, sehingga kelak menjadi dirinya sendiri. Pendekatan ini mengutamakan hubungan antar pribadi.

Konseling ala filosof, bersandar pada tindakan bijak yang menghasilkan penjelasan ganda tentang kenyataan. Dibiarkan individu luhur dalam melihat realita yang berlawanan. Nalar dan analisis rasional memegang peranan penting dalam mengembangkan dan mengubah kepribadian individu. Klien sendiri diberi kesempatan untuk menjelajahi dan menafsirkan pengalamannya dalam menemukan distorsi kekurangan dan tahap perkembangan. Intervensi gaya ini didasarkan pada perubahan struktur kognitif klien.

Ada konselor yang mengharmoniskan ketiga perspektif tersebut di atas (pengembangan kemampuan inderawi, estetik dan konseling ala filosof yang bijak). Mereka berpendapat bahwa persepektif konseling estetik dan filosofis, tidak mampu melepaskan diri dari situasi sosial. Karena itu pendekatan keempat ini lebih melihat perlunya partisipasi klien dalam menangani determinasi sosial bagi pengembangan dan perubahan kepribadian (di

samping pendekatan estesis dan filosofis). Bagi mereka, adapun yang disebut "masalah" itu adalah keterpautan antara dirinya dengan realita sosial dan politik yang bersifat sistematis.

B. Analisis Kritis tentang Penyelenggaraan Bimbingan Konseling Selama ini

Teori bimbingan konseling yang selama ini dipergunakan, belum sepenuhnya memperhatikan keseimbangan antara berbagai issue dalam konseling berikut ini.

1. Kualifikasi konselor dipandang segalanya dan kurang memperhatikan teknik yang digunakan oleh konselor.
2. Materi dan isi konseling dipandang sangat esensial (Williamson) dan kurang memperhatikan proses yang berlangsung dalam konseling.
3. Pendekatan individual dipandang segalanya dan kurang memperhatikan pendekatan kelompok (role playing).
4. Fungsi pengembangan, penyaluran dan pencegahan, dipertentangkan dengan fungsi kuratif (psikoanalitik)
5. Keutuhan pribadi dipandang lebih utama (menurut Kaum Gestaltist) dari pada memperhatikan aspek-aspek unsuriah (behaviorisme)
6. Berulang kali bertemu dengan konselor, dipandang lebih berhasil dari pada pertemuan satu atau dua kali.
7. Mengutamakan pengembangan nalar dari pada penyembuhan perasaan klien.
8. Mengutamakan perluasan pengetahuan, dan mengabaikan kemampuan penyesuaian diri.
9. Mengabaikan tuntutan normatif dalam menentukan kriteria manusia sehat.

Didasarkan pada berbagai permasalahan pelaksanaan bimbingan konseling tersebut di atas, perlu dicari aspek nilai yang menjadi central pengembangan fithrah manusia. Pengembangan aspek value ini dapat ditelusuri melalui berbagai upaya bimbingan religius.

C. Pengembangan Fithrah Manusia

Fithrah manusia yang mencakup fithrah jasmani, rohani dan nafs, merupakan pola dasar yang perlu dikembangkan secara optimal. Fithrah jasmani merupakan aspek biologis yang dipersiapkan sebagai wadah fithrah

rohani yang memang memiliki daya mengembangkan proses biologisnya. Daya ini disebut daya hidup (al-hayat), belum mampu menggerakkan tingkah laku, selama belum ditempati fithrah rohani (Shihab, 1996:57).

Fithrah rohani ini merupakan esensi pribadi manusia dan berada di alam immateri dan alam materi. Ia lebih abadi dari pada fithrah jasmani, suci dan memperjuangkan dimensi-dimensi spiritual. Ia mampu bereksistensi dan dapat menjadi tingkah laku aktual apabila telah menyatu dengan fithrah jasmani.

Fithrah nafs merupakan paduan integral antara fithrah jasmani (biologis) dengan fithrah rohani (psikologis). Ia memiliki tiga. Komponen pokok, yaitu kalbu, akal dari nafsu yang saling berinteraksi, dan terwujud dalam bentuk kepribadian. Dalam dinamikanya, fithrah nafs ini digerakkan oleh Maha Pencipta, diwujudkan dalam hidayah (petunjuk) dan Sunnah (hukum Allah) yang mengatur nafs agar lestari dan berdaya fungsi.

Sunnah (hukum Allah) itu mengatur aspek fisik dan aspek psikis nafs. Diaturkannya manusia agar mampu memelihara, melindungi dan melestarikan aspek fisiknya, seperti memelihara panca indera, sistem saraf, sistem kelenjar, tulang dan daging. Kesemuanya itu diwujudkan dalam aturan makan, minum, tidur, olah raga, hubungan seksual, dan sebagainya, agar hidup sehat, stabil dan berfungsi. Sedang aspek psikis nafs diatur agar mampu hidup bahagia, menyenangkan, memberikan ketenangan dengan jalan memperluas ilmu, berpikir, tadabur, berdzikir, menghindar dari sifat tercela serta mempersiapkan diri agar memiliki sifat-sifat mulia (Ahmad, 2002:82-83).

Untuk menemukan jati dirinya, manusia diberinya *hidayatuddiny* (hidayah keimanan) di samping hidayah *wadany* (instink), hidayah *hawas* (indera), dan hidayah *aqly* (akal).

Dalam menafsirkan fithrah selanjutnya, (Q.S. 30 ar-Rum: 30) disebutkan bahwa manusia diciptakan dengan potensi fithrah keagamaan yang hanif (yang cenderung kepada kebaikan). Ini berarti bahwa manusia diberi kemudahan untuk berbuat baik, sedang untuk berbuat keburukan, manusia harus berupaya sekuat-kuatnya melawan fithrahnya sendiri.

Potensi yang dimiliki manusia berdimensi dua, tauhidi (mengetahui Allah Maha Esa) dan akhlaqi (kemampuan untuk membedakan tingkah laku baik dan buruk). Kedudukan manusia di hadapan Allah, sangat sejalan dengan derajat keimanan tentang kekuasaan dan keesaan Allah yang diyakininya (Ibnu 'Athaillah, 1985:325).

Komponen-komponen fithrah nafs (kalbu, akal dan nafsu) berinteraksi satu sama lain terwujud sebagai kepribadian yang didominasi oleh komponen kalbu. Apabila kepribadian itu didominasi oleh kemampuan kalbu, individu akan terkendali oleh dhamir yang dibimbing oleh fithrah azali, sebaliknya apabila individu tidak terkendali oleh dhamirnya, ia akan dikendalikan oleh napsunya.

Komponen akal (yang keadeannya di bawah kedudukan kalbu) memiliki daya kognitif yang berpegang pada prinsip rasional dan realistik, yang bertugas mengikat nafsu. Sekiranya akal ini berfungsi baik (dapat mengikat nafsu), individu akan mampu mengaktualisasikan komponen tertingginya dan dapat menyalurkan nafsu hewaniannya yang selalu mengejar kenikmatan. Apabila kendali kalbu dan akal melemah, maka nafsu akan mengaktualisasikan dorongan hewaniannya.

Manusia yang dikendalikan dorongan hewani akan berakhlak madzmunah (jelek) yang justru berlawanan dengan tujuan diutusnya Rasul yaitu menyempurnakan akhlak manusia (akhlak karimah) yang memiliki citra lahiriah dan batiniah (al-Ghazali).

Dalam memaknai istilah kalbu, para ahli berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang memandang kalbu sebagai materi organik, sedang yang lainnya memandang kalbu sebagai sistem kognisi yang memiliki daya emosi. Iman al-Ghazali sendiri menyebutkan bahwa kalbu memiliki dua aspek, jasmani dan rohani. Kalbu jasmani merupakan segumpal daging sebesar kepal, terletak di dada sebelah kiri, sedang kalbu ruhani memiliki sifat halus, Rabbani dan mampu memahami kebenaran yang bersifat metafisik, tanda kekuasaan Allah, makna di balik kejadian, dan kehidupan di akhirat kelak.

Kalbulah yang memiliki insting nur ilahi dan basirah yang memancarkan keimanan dan keyakinan. Kalbu inilah yang berkecenderungan menerima kebesaran dari Allah Maha Esa. Kalbu ini pula yang berfungsi sebagai pemandu, pengontrol, dan pengendali semua tingkah laku manusia. Apabila kalbu ini berfungsi sewajarnya, maka manusia akan hidup baik dan sesuai dengan fithrah aslinya. Sebaliknya, apabila kalbu itu rusak, rusak pulalah tingkah laku manusia.

Akhlak sebagai hakikat dari kepribadian manusia yang ditandai oleh motivasi ketaatan sepenuhnya kepada Allah swt. berserah diri secara utuh kepada-Nya, akan mampu secara konsisten meningkatkan kualitas peribadatannya melalui ketaqwaan (Zayadi, 2002:92).

Para penganut hedonisme yang berasal dari ajaran Epicurus (342-270 SM) merumuskan kebaikan sebagai sesuatu yang dikehendaki dan yang memberikan kenikmatan. Pandangan ini ditolak oleh Abdul Hakim (Khiffah, 1986:170-171) yang menyatakan bahwa "...pikiran yang tidak sehat menghendaki banyak kiat yang justru menyakitkan dan menghancurkan diri sendiri, yang kadang-kadang kenikmatan justru terletak pada hal-hal yang menghancurkan kehidupan dan menghilangkan tujuan-tujuan yang penuh kenikmatan itu sendiri kita mengetahui bahwa kesenangan atau kenikmatan tidak menjadi motif bagi kegiatan-kegiatan kita..." Orang-orang baik merasa mencapai tujuan mereka, walaupun ternyata mendatangkan lebih banyak penderitaan daripada kenikmatan.

D. Menggali dan Memaknai Berbagai Kasus Pengembangan Fithrah Manusia

Berikut ini akan diangkat beberapa kasus berkenaan dengan pengembangan fithrah manusia. Kasus ini diambil dari upaya Rasulullah saw. dan para shahabatnya dalam mengembangkan Fithrah manusia dan menyalurkan potensi individu akhlak mulia, dan menyembuhkan perilaku yang berlawanan dengan norma agama.

Terdapat asumsi bahwa kalbu yang berfungsi wajar, akan melahirkan kehidupan manusia yang baik, sesuai dengan fithrah azalnya. Sebaliknya apabila kalbu itu tidak berfungsi wajar, akan melahirkan manusia yang tidak baik, tidak sehat, dan bahkan jahat, gelisah, bingung, sedih, sesak dada, malas beribadah, dan ma'siat. Oleh karena itu upaya mengembangkan fithrah, manusia berarti memfungsikan kalbu agar konsisten pada kehidupan religius.

Implikasi dari asumsi tersebut ialah bahwa individu yang baik, berarti memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah swt. dan hubungan horizontal yang baik pula dengan sesama manusia. Menurut Abdullah al-Idain (Abdul Aziz, 1424:6-17), mereka secara konsisten akan berperilaku yang dapat memuliakan dirinya.

Dalam konteks ini, individu yang baik meyakini adanya Pencipta Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang mengatur segala kehidupan alam semesta, di dunia dan akherat. Meyakini adanya kehidupan lain setelah kehidupan di dunia, untuk mempertanggungjawabkan segala perilaku lahiriah dan batiniah. Memenuhi tugas dan kewajiban selaku hamba Allah dengan melaksanakan semua perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya, menjauhi perbuatan dosa dan keji, dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia.

Membiasakan diri membaca dan mengkaji ajaran al-Islam, al-Qur'an dan Hadits, sehingga dari hari ke hari terjadi peningkatan diri dalam mewujudkan akhlak mulia. Melaksanakan dzikir, pikir dan tadabur dalam berbagai suasana dan berbagai nuansa kehidupan. Memelihara diri agar tetap merasakan kehadiran yang Maha Esa dalam segala gerak tingkah laku dan kehidupan batiniahnya.

Dilihat dari fitrahnya, yaitu manusia sejak lahir condong untuk memperjuangkan dimensi-dimensi spiritual, wajarlah apabila orang selalu berupaya mencari jalan untuk memperoleh Ridla Allah swt. Dalam upaya memperjuangkan dimensi spiritual itu tidak aneh apabila orang mau menebusnya dengan tenaga, harta dan bahkan jiwanya dan mencari orang yang mau membantunya. Amat banyak peristiwa yang dilihat dan dirasakan, akan tetapi akal tak mampu menguraikannya. Memang benar keimanan itu merupakan kesediaan untuk memberi dan berkorban (Khid, 1981:58).

Salah satu yang mencari bantuan itu ialah Abubakar as-Shiddiq. Keyakinan Abubakar adalah keyakinan yang sanggup menanggung akibat dan tanggungjawab yang diperoleh melalui usahanya yang luar biasa dari sekalian logika yang menjadi landasannya dari pengalamannya yang tak pernah meleset tentang kebenaran dan kebesaran Muhammad, serta kesuciannya yang disaksikan dengan kedua matanya.

Abubakar as-Shiddiq mencari bantuan dari orang yang memang patut menjadi teladan, yang digambarkan sebagai berikut.

"Empat puluh tahun sudah. Ia tak pernah mengkhianati amanat, tidak pula berbuat kepalsuan walau hanya sekedar senda gurau. Dan tidak suatu cacatpun yang mengurangi kebesarannya. Ia selalu tampak anggun dan sangat cocok untuk segala yang anggun.... Karena perangainya yang menyenangkan, Muhammad sangat disenangi teman-temannya. Dan bukan hanya kepercayaan dalam urusan harta benda dan barang-barang titipan belaka, tetapi juga kepercayaan dalam nilai nilai dan keutamaan yang terdapat dalam kehidupan itu (Khid, 1424, 46-47).

Inilah salah satu gambaran kualifikasi manusia profesional yang diyakini mampu memberi bantuan. Ajaran yang dibawanya berpegang pada prinsip "Mudahkanlah dan jangan kalian persulit". Betapa kejujuran itu menjadi sangat penting sebagai salah satu syarat kualifikasi pemberi bantuan yang profesional, dilukiskan sebagai berikut, "Ia tidak akan berani berdusta walaupun hanya kepada seekor unta sekalipun."

DAFTAR BACAAN

- Al-Quranul Karim
- Abdul Bagi, Muhammad Fuad (t.t.), *Al-Lulu' Wal Marjan* (Terjemah Salim Bahreisy, Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim). Bandung : PT. Bina Ilmu.
- Al Idain, - Abdullah bin Abdul Aziz (1424 H.) *Thariquka ilas Shihatin Nafsaniyyah wal-'Adlawiyah*. Riyadl : TP
- Assukandary, Ibnu 'Athoillah:(t.t.) *Syarah Hikam* (Alih bahasa oleh Harun al-Rasyid)- Syarah Hikam. Bandung Penerbit Risalah, 1985.
- Abdul Hakim, Khifah (t.t.), *Islamic Ideology*, terjemah oleh Machnun Husein, Hidup yang Islami Menyeharikan Pemikiran Transendental (A, kidah dan Ubudiah). Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Biggs, Donald A., Pulvino, Charles J.&Beck, CarltonE, *Counseling and Values*. Washington, D.C: APGA, 1976.
- Dewey, John, *Democracy and Education An Introduction to The Philosophy of Education*. Amerika: The Macmillan Company, 1958.
- Hansen, James C., Stevie, Richard R. & Warner, Jr. Richard W., *Counseling Theory and Process (Third Edition)*. U.S.A. Allyn and Bacon, Inc., 1982.
- Khid, Muh. Khid (1:1) *Khulafaur Rasul*. (Alih bahasa Mahyudin Syaf dkk), Mengenal Pola Kepemimpinan Umat dari Karakteristik Perihidup Khifah Rasulullah. Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Khid, Muh. Khid: (t.t.) *Rijal Haolar Rasul*. (Alih bahasa Mahyudin Syaf dkk), Karakteristik Perihidup 60 Shahabat Rasulullah. Bandung: CV. Diponegoro, 1981.
- Salim, Hadiyah, *Tarjamah Mukhtarul Ahadits*. Bandung PT. Al-Ma'arif (Tanpa disebut kitab aslinya), 1981.
- Stone, Gerald L., *Counseling Psychology, Perspectives and Functions*. California Wadsworth Inc, 1986.
- Zayadi, Ahmad, *Hakikat Manusia Menurut al-Quran dan Implikasinya Bagi Pengembangan Teori-teori Pendidikan (Studi Tafsir Tematik (maudhu'i) tentang Manusia sebagai Dasar Pandangan Filosofis tentang Komponen-komponen Pendidikan)*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2002.

LASKAR PELANGI THE PHENOMENON:

Merajut Nilai-Nilai Pendidikan Islam
Yang Tercecer

Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag

A. Pendahuluan

Mutiara hikmah model novel Andrea Hirata, sesungguhnya telah pernah muncul sebelum Laskar Pelangi dimunculkan (2007). Namun, mutiara novel hikmah tersebut tidak mendapatkan momentumnya (Hamka, 1958:1979). Sementara, kehadiran karya Andrea Hirata menemukan momentumnya ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga pendidikan dan "hilangnya" identitas ideal seorang pendidik. Momentum ini menyebabkan apa yang ditawarkannya menjadi menarik untuk dikaji.

Laskar Pelangi pada dasarnya merupakan kisah perjalanan penulis (autobiografi) ketika di kampung halamannya. Melalui karyanya ini, Andrea Hirata telah mampu "menyihir" banyak kalangan melalui karya tetraloginya, terutama Laskar Pelangi. Ia telah menempatkan diri menjadi segelintir pengarang yang bisa kaya secara material melalui menulis sebuah buku. Hal yang jarang terjadi, di tengah rendahnya penghargaan masyarakat terhadap sebuah karya ilmiah. Karya yang penuh nilai pendidikan dengan warna Islam filosofis ini lebih mudah dipahami melalui karya Asrori S. Karni yang langsung menyentuh pada syaraf dunia pendidikan. Buku ini, paling tidak menjadi salah satu upaya untuk "mengoperasi" dunia pendidikan saat ini yang sistem sarafnya telah banyak rusak dan berbenalu.

Ada beberapa indikasi rusaknya sistem syaraf pendidikan saat ini, antara lain: lembaga pendidikan berubah menjadi lembaga bisnis dan politik yang hanya memperebutkan posisi, pendidik yang tidak lagi menghargai profesinya dengan melakukan tindakan-tindakan amoral (mulai pelecehan

seksual, menjual nilai, menerbitkan ijazah palsu, korupsi), pendidik yang tidak profesional, orientasi peserta didik hanya mengejar nilai dan ijazah, dan lain sebagainya.

Membaca karya Andrea Hirata dan –lebih mudah dipahami– Asrori S. Karni, akan membuat pembaca (khususnya pendidik dan pemerhati pendidikan) akan dapat berkaca, alangkah naifnya dunia pendidikan dewasa ini. Di sisi lain, melalui karya tersebut akan terlihat pula, peluang memperbaiki sistem pendidikan saat ini.

B. Upaya Menangkap Nilai pendidikan ideal

Buku Laskar Pelangi The Phenomenon memberikan gambaran bagaimana seorang murid (Andrea Hirata dan anggota Laskar Pelanginya) menceritakan sosok murid yang merekonstruksi sosok guru yang ideal dan penuh ketauladanan. Meskipun bukan lulusan institusi yang mencetak guru, tapi alam telah mampu mencetak sosok guru yang sesungguhnya. Pola pendidikan yang dikembangkan buk Muslimah tak obahnya “SuperCamp” yang telah memberikan dampak positif pada pribadi murid-muridnya (Laskar Pelangi) (DePotter dan Hernachi, 2003:7).

Adapun nilai pendidikan yang dapat ditangkap pada buku Laskar Pelangi The Phenomenon antara lain:

1. Pendidik perlu ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan keikhlasan, akan dimungkinkan pelaksanaan pendidikan akan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan (Nizar, 2008:137).
2. Pendidik tidak mutlak harus pintar, akan tetapi mampu membimbing peserta didik menjadi orang pintar. Meskipun idealnya, seorang Pendidik perlu pintar dan mampu membimbing peserta didiknya menjadi (lebih) pintar dibanding dirinya. Bila hal ini dapat terlaksana, maka di sinilah letak keberhasilan sesungguhnya tugas seorang pendidik (Nizar, 2008).
3. Pendidik perlu membuat Proses Belajar Mengajar (PBM) berjalan seperti air dengan acuan yang inklusif dan menyenangkan (DePotter dan Hernachi, 2003:9), bukan menjadikan PBM dengan acuan yang rigid, membosankan, dan penuh beban. Bila PBM berjalan dalam sebuah “tekanan” dan tidak menyenangkan, maka peserta didik akan melihat belajar sebagai suatu aktivitas yang membosankan dan penyebab stres.
4. Pendidik perlu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan

(*learning fun*) dan melihat perbedaan masing-masing peserta didik (*differensiasi individual*) sebagai sebuah mata rantai yang bisa saling mengisi.

5. Pendidik seyogyanya mampu merasakan eksistensi peserta didik sebagai bagian dari keluarganya (Nizar, 2008:161) Dengan perasaan ini. Pelaksanaan PBM akan lebih bermakna dan langsung menuju pada titik saraf intelektual dan kemanusiaan peserta didik.
6. Pendidik perlu memiliki wawasan inklusif tentang kebenaran dan memandang bahwa apa yang dikatakan sebagai salah satu (bukan satu-satunya) kebenaran. Di sisi lain, pendidik seyogyanya tidak fanatik terhadap suatu kebenaran. Padahal, fanatisme tersebut membuatnya justru akan tertinggal dan jumud. Hal ini bisa dilihat dari upaya buk Muslimah Hafsari yang menentang tradisi masyarakat yang melihat semua yang dibawa Belanda adalah kafir dan harus dihindari.
7. Pendidik perlu merekonstruksi fasilitas dan media pendidikan, bukan hanya mampu menuntut dan tergantung dengan fasilitas pendidikan yang tersedia. Pendidik seyogyanya memiliki kemampuan mengeksploitasi media yang ada disekelilingnya sebagai alat pencapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan.
8. Guru dituntut melaksanakan tugasnya sebagai pendidik secara totalitas (*total learning*) dengan kunci keikhlasan yang tinggi, penuh cinta, dan berkepribadian.
9. Pendidik perlu melihat peserta didiknya sebagai makhluk yang memiliki multi potensi (Nizar, 2001), (*multiple intelegency*) yang dapat berkembang dan dikembangkan. Bila Howard Gardner membagi potensi peserta didik dalam 8 (delapan) bentuk kecerdasan (linguistik, matematis-logis, spasial, kinestetik-jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis), maka sesungguhnya Islam melihat dalam 99 bentuk kecerdasan yang didelegasikan Allah kepada setiap manusia. Di sini terlihat secara jelas bagaimana Islam memiliki konsep yang lebih universal dan belum mampu terjangkau dan diapungkan oleh pemikiran ilmuwan saat ini. Dengan acuan ini, pendidik akan mampu membimbing peserta didiknya berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, tanpa hanya melihat satu sisi potensi (intelektual) saja. Padahal, masing-masing anak memiliki potensinya masing-masing. Di sinilah letak kepekaan seorang guru (pendidik) dalam memahami potensi masing-masing peserta

didiknya. Mungkin, dalam kelemahan seorang peserta didik, tersimpan daya imajinasi yang luar biasa yang dapat dibanggakan. Namun sayangnya, pendidikan saat ini hanya lebih mengedepankan pada kecerdasan tunggal (*mono intelegency*) yang diukur dengan kemampuan kognitif semata. Akibatnya, parameter kecerdasan menjadi sederhana dan pendidikan tidak mampu membuat peserta didiknya “berhasil” di luar lembaga pendidikan.

10. Pendidik seyogyanya membimbing peserta didik untuk membentuk karakter diri, bukan hanya sekedar transformasi ilmu tanpa karakter. Dengan pendekatan ini, peserta didik akan senantiasa memiliki jati diri dan idealisme yang terjaga, meskipun setelah mereka mampu memiliki wawasan keilmuan yang komprehensif.
11. Pendidik dituntut untuk menanamkan virus kepada peserta didiknya, bahwa “sekolah itu adalah candu” yang sangat mengasyikkan (Topatimasang, 2007). Kesan ini harus tumbuh dalam sistem pembelajaran dan tertanam dalam sistem syaraf peserta didik. Dengan upaya ini, sekolah akan menjadi tempat yang mengasyikkan dan penuh damai, bukan penjara atau kastil vampir yang menakutkan.
12. Laskar Pelangi menampilkan bagaimana hubungan psikologis yang demikian dekat antara guru dan murid yang dilandasi oleh iman dan keikhlasan. Kekentalan akhlak seorang murid yang tak pernah melupakan gurunya sebagai sosok *spritual father* dan menempatkan guru sebagai salah satu “penyebab” keberhasilan dirinya. Hal ini bisa dilihat dari waktu yang demikian luas diberikan oleh buk Muslimah pada murid-muridnya untuk menimba ilmu, bukan hanya waktu secara formal di sekolah akan tetapi juga di luar sekolah. Proses pendidikan yang ditawarkan memiliki kemiripan dengan pola pendidikan pesantren. Demikian idealnya bentuk pendidikan semacam ini, maka tak heran jika Hamka menempatkan sistem pendidikan pesantren (*boarding school*) sebagai sistem pendidikan ideal (Nizar, 2008:187-189). Di sini terlihat terlihat jelas perbedaan antara paradigma guru menurut Islam sebagai *aburrûkh* yang berlaku sepanjang hayat dengan paradigma barat yang menempatkan guru sebagai instrumen pendidik yang menempatkan guru pada batas diperlukan saja.
13. Laskar Pelangi menampilkan bagaimana hubungan psikologis dan kestiakawanan yang demikian dekat antar murid (Laskar Pelangi). Meskipun mereka telah berhasil dalam dimensi kehidupannya masing-

masing, akan tetapi dalam hati mereka senantiasa bersemayam kenangan masa lalu.

14. Laskar Pelangi memperlihatkan tidak selalu validnya teori yang dibangun ilmuwan (manusia) modern yang mengatakan bahwa sarana yang menunjang, guru yang profesional, gedung yang megah, latarbelakang keluarga yang berkecukupan, kota sebagai pusat pendidikan, dan lainnya akan menjadi faktor utama terciptanya proses pembelajaran yang mampu mencapai tujuan pendidikan. Masih banyak faktor lain yang ikut mempengaruhi. Bahkan, kita tidak tahu faktor mana yang lebih dominan dari sedemikian banyak faktor-faktor tersebut telah ikut mempengaruhi sebuah keberhasilan hidup. Untuk itu, menjadi orang besar tak selamanya dari tempat yang mewah, akan tetapi bisa jadi dari berasal dari kubangan lumpur.
15. Memotivasi peserta didik untuk berani memiliki impian, di tengah fasilitas yang minim. Jangan pantang menyerah dan putus asa dengan kondisi yang ada. Dalam hal ini, diperlukan motivasi yang kuat untuk bagaimana memanfaatkan yang ada untuk menjadi kekuatan pencapaian tujuan pendidikan.
16. Jangan menjadikan materi sebagai acuan utama. Acuan ini akan menjadikan keperibadian pendidik dihargai sebatas materi. Sangat murah dan rendahnya pribadi seperti ini.

Karya Laskar Pelangi yang menampilkan realitas fenomena dunia pendidikan, bukanlah konsep mati dan ideal secara ilmiah. Fenomena yang ditampilkan adalah satu bentuk pendidikan ideal yang sulit untuk ditemukan, terutama dengan kondisi yang demikian terbatas. Untuk itu, di samping memecut diri melalui Laskar Pelangi, pendidikan saat ini dituntut untuk melakukan perubahan dalam seluruh paradigma yang ditawarkan. Di antara tawaran yang perlu dilakukan untuk terciptanya impian Laskar Pelangi adalah:

1. Lembaga pendidikan yang diamanatkan mencetak tenaga pendidikan perlu menjadi piober perbaikan, bukan justeru melanjutkan kebobrokan sistem dan moral. Visi dan misinya harus secara konsisten dijaga. Sebab, jika salah mencetak pendidik, maka akan rusak sekian generasi ke depan.
2. Lembaga pendidikan yang diamanatkan mencetak tenaga pendidikan, perlu membenahi diri dengan manajemen al-Quran, melakukan desen-

tralisasi pengembangan pendidikan (sesuai dengan potensi peserta didik dan kebutuhan masyarakat), membantu terciptanya kualitas pribadi pendidik yang ideal, senantiasa melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman, merekonstruksi kurikulum yang fleksibel dan sistematis, merekonstruksi bentuk pendidikan yang mengembangkan multi potensi, menumbuhkembangkan minat terhadap kajian keislaman dengan penghargaan yang tinggi, dan mensinergikan muatan pendidikan dengan tuntutan pasar yang demikian dinamis dan multi efek (Hasibuan, 2004).

3. Membangun tradisi ilmiah, baik ditingkat pendidik dan peserta didik dengan melahirkan berbagai bentuk karya dan kajian ilmiah yang berkualitas. Bila pendidik membangun dunia politik, maka kecenderungan peserta didik akan lebih pada domain politik dan dunia demonstrasi. Jika ini terjadi, maka bagaimana mungkin lembaga pendidikan akan mampu mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Dituntut peranan pemerintah dan masyarakat secara aktif untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang berkualitas (Nizar, 2008:208).

Melalui beberapa pendekatan di atas, diharapkan cita-cita seorang pendidik untuk menciptakan "Laskar Pelangi" dapat terwujud. Laskar pelangi yang memiliki warna dan identitas ideal di tengah-tengah hilangnya idealisme.

C. Penutup

Paling tidak, dengan melihat karya Asrori S. Karni (2008), dan Andrea Hirata (2007), pembaca akan memiliki motivasi baru dan persepsi positif terhadap dunia pendidikan. Dalam konteks ini, masih ada harapan untuk menggapai impian pendidikan ideal, meskipun usaha untuk ke arah itu memerlukan usaha maksimal dari seluruh komponen pendidikan. Bahkan, penulis akan bisa berkaca, begitu kerdilnya diri sebagai pendidik era modern dengan tingkat pendidikan yang tinggi, tapi masih "kalah" profesional dibanding buk Muslimah sebagai guru ideal dan pak Arfan (kepala Sekolah) sebagai pimpinan lembaga pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamka, *Ayahku; Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangannya*, Jakarta: Pustaka Widjaja, 1958.
- Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup Jilid I, II, III, dan IV*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Topatimasang, Roem, *Sekolah Itu Candu*, Yogyakarta: INSIST Press, 2007.
- DePorter, Bobbi & Mike Hernacki, *Quantum Learning ; Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Kaifa, 2003.
- Nizar, Samsul, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nizar, Samsul, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Topatimasang, Roem, *Sekolah Itu Candu*, Yogyakarta: INSIST Press, 2007.
- Hasibuan, Lias, *Melejitkan Mutu Pendidikan*, Jambi: SAPA Project, 2004.
- Karni, Asrori S, *Laskar Pelangi The Phenomenon*, Bandung: Mizan, 2008.
- Hirata, Andrea, *Laskar Pelangi*, Yogyakarta: Bentang, 2007.

BAHASA SEBAGAI IDENTITAS PENDIDIKAN DALAM ERA GLOBALISASI

Tien Rafida, M.Hum

A. Pendahuluan

Fenomena paling menonjol yang tengah terjadi pada kurun waktu ini adalah terjadinya proses globalisasi. Proses perubahan inilah yang disebut Alvin Toffler sebagai gelombang ketiga, setelah berlangsung gelombang pertama (agrikultur) dan gelombang kedua (industri). Perubahan yang demikian menyebabkan terjadinya pula pergeseran kekuasaan dari pusat kekuasaan yang bersumber pada tanah, kemudian kepada kapital atau modal, selanjutnya (dalam gelombang ketiga) kepada penguasaan terhadap informasi (ilmu pengetahuan dan teknologi).

Proses globalisasi ini lebih banyak ditakuti daripada dipahami untuk kemudian diantisipasi dengan arif dan cermat. Akibatnya, antisipasi yang dilakukan cenderung bersifat defensif membangun benteng-benteng pertahanan dan merasa diri sebagai objek daripada subjek di dalam proses perubahan. Bagaimana dengan bahasa dan pendidikan? Apakah yang terjadi dengan bahasa dan pendidikan di dalam proses globalisasi?

B. Mitos Tentang Globalisasi

Mitos yang hidup selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal dan etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Anggapan atau jalan pikiran yang demikian tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang dan tidak berguna. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat surutnya peranan kekuasaan ideologi dan kekuasaan negara. Akan tetapi, Naisbitt dalam bukunya *Global*

Paradox memperlihatkan hal yang justru bersifat paradoks dari fenomena globalisasi. Di dalam bidang ekonomi, misalnya, Naisbitt mengatakan "Semakin besar dan semakin terbuka ekonomi dunia, semakin perusahaan-

perusahaan kecil dan sedang akan mendominasi". Ia di dalam bukunya itu juga mengemukakan pokok-pokok pikiran lain yang paradoks sehubungan dengan masalah ini. "Semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin bersifat kesukuan", "berfikir lokal, bersifat global." Ketika bahasa Inggris menjadi bahasa kedua bagi semua orang, bahasa pertama, bahasa ibu mereka, menjadi lebih penting dan dipertahankan dengan lebih giat.

Dari pernyataan Naisbitt itu, kalau kita mempercayai, proses globalisasi tetap menempatkan masalah lokal ataupun masalah etnis (tribe) sebagai masalah yang penting yang harus dipertimbangkan. Dalam bukunya yang lain *Megatrend 2000*, Naisbitt juga mengatakan bahwa era yang akan datang adalah era kesenian dan era pariwisata. Orang akan membelanjakan uangnya untuk bepergian dan menikmati karya-karya seni. Peristiwa-peristiwa kesenian yang akan menjadi perhatian utama dibandingkan peristiwa-peristiwa olahraga yang sebelumnya lebih mendapat tempat. "Berpikir lokal, bertindak global", seperti yang dikemukakan Naisbitt itu, pastilah akan menempatkan masalah bahasa dan pendidikan, sebagai sesuatu yang penting di dalam era globalisasi. Proses berpikir tidak akan mungkin dilakukan tanpa bahasa. Bahasa yang mendunia (Internasional) adalah bahasa Inggris. Proses berpikir dan kemudian dilanjutkan proses kreatif, proses ekspresi, akan melahirkan karya-karya dalam dunia pendidikan.

C. Peran Bahasa Inggris terhadap keseimbangan budaya global

Representasi budaya global dunia dewasa ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara peran bahasa-bahasa dunia dengan proses munculnya suatu budaya menjadi budaya global. Uraian-uraian yang disampaikan oleh Alaistar Pennycook dalam bukunya *"The Cultural Politics of English as an International Language"* mengindikasikan bahwa bahasa, dalam hal ini Bahasa Inggris, telah menjadi alat yang sangat ampuh untuk menyebarkan budaya penutur bahasa tersebut ke seluruh dunia. Itulah sebabnya ketika kita telusuri ke belakang kita akan menemukan bahwa hampir seluruh budaya populer yang sifatnya mendunia pada hari ini berasal dari negara-negara yang penduduknya berbahasa Inggris, terutama Amerika Serikat. Beberapa contoh diantaranya adalah musik pop ala barat, film, makanan dan minuman, pakaian, dan penggunaan istilah-istilah berbahasa Inggris baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan.

Adalah menarik untuk dicermati bahwa pada awalnya budaya-budaya tersebut sesungguhnya merupakan budaya lokal/nasional, sebagaimana halnya musik dangdut/pop atau kaos Lake Toba ala Parapat di Indonesia. Perbedaannya adalah pada tingkat kemampuan budaya lokal ini berkembang dalam waktu yang cepat menjadi budaya global. Musik dangdut/pop Indonesia atau kaos Lake Toba sampai hari ini masih menjadi bagian dari budaya lokal/nasional Indonesia, bahkan semakin tersaingi dengan semakin banyaknya kaum muda Indonesia yang menyenangi musik pop ala barat dan gandrung memakai kaos-kaos bertulisan CIA atau FBI dan isitilah-istilah dalam bahasa Inggris lainnya. Film-film Bollywood dari India masih jauh tertinggal dari film-film Hollywood dalam kemampuannya menjadi fenomena budaya global dunia. Hal serupa juga terjadi dalam bisnis minuman dimana beberapa pengusaha muslim meluncurkan Mecca Cola dan Qiblah Cola sebagai alternatif lain *soft drink* bagi umat Islam.

Sebaliknya kita melihat hampir semua budaya dari Amerika dengan cepatnya menjadi budaya global. Budaya-budaya tersebut bukan hanya sekedar disenangi, tetapi juga secara gradual beberapa sisi dari budaya tersebut menjadi gaya hidup, terutama dikalangan kaum muda dan penduduk perkotaan. Gejala semacam ini bukan hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, tetapi juga menunjukkan kecenderungan yang sama di negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Jerman, Perancis, bahkan Inggris sebagai tempat asal muasal Bahasa Inggris. Kita tentunya dengan mudah dapat berargumentasi bahwa fenomena ini tentunya tak lepas dari hegemoni Amerika sebagai satu-satunya negara adi daya saat ini. Tetapi apakah keberadaan Amerika sebagai negara adi daya tersebut kemudian dengan mudahnya menjadi faktor penyebab mengglobalnya budaya-budaya tersebut? Apakah negara-negara lain, terutama negara-negara maju, tidak memiliki kemampuan teknologi dan kemapanan media jurnalistik dan komunikasi untuk menyebarkan budaya-budaya populer yang mereka miliki sehingga menjadi budaya global? Atau apakah salah satu penyebab utamanya karena bahasa Inggris (American English) lebih dominan penggunaannya dari pada bahasa-bahasa lain di dunia?

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional telah tak tersaingi oleh bahasa-bahasa dunia lainnya dalam rentang waktu yang cukup lama. Fenomena seperti ini bahkan tetap berlangsung. Dengan demikian kita dapat berargumentasi bahwa status sebuah negara sebagai negara super power dunia plus kemapanan dalam dunia pendidikan, teknologi atau media jurnalistik/komunikasinya tanpa keunggulan

dominasi bahasa tidaklah mencukupi untuk mengantarkan budaya ataupun gaya hidup yang dimiliki negara tersebut menjadi budaya atau gaya hidup global.

D. Amerika dan Bahasa Inggris

Status Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional hari ini tentunya tak terlepas dari fakta bahwa Inggris dahulunya adalah sebuah negara adidaya dengan wilayah jajahan yang sangat luas di dunia. Pola hubungan antara Inggris sebagai sebuah negara adidaya dan tersebar luasnya penggunaan Bahasa Inggris, tidaklah didasari pola yang sama dengan hubungan antara Amerika sebagai sebuah negara super power dan semakin meningkatnya penggunaan bahasa Inggris yang merujuk kepada Amerika sebagai sebuah entitas peradaban dan kebudayaan hari ini. Fakta bahwa Amerika adalah sebuah negara super power disertai dengan keberhasilannya mengelola sumber daya yang berbasis pada dunia pendidikan yang dimilikinya secara relatif efektif menjadi daya tarik yang kuat bagi banyak orang, utamanya kaum muda, di berbagai negara di dunia untuk mengidentifikasi dirinya baik secara linguistik dan budaya atau sekedar pendidikan saja dengan Amerika.

Proses pengidentifikasian diri ini pada umumnya cenderung berlangsung secara tidak sadar dimana tindakan pengidentifikasian diri tersebut diambil lebih karena tekanan lingkungan pendidikan yang secara terus menerus mengekspos orang dengan budaya hidup yang identik dengan Amerika. Teman sekolah/kuliah, rekan sekantor, tetangga, tokoh, artis, dan terlebih lagi media elektronik semuanya memberikan tekanan psikologis yang kuat untuk mengikuti budaya hidup global ini. Walaupun sebagian besar dari orang yang mengadopsi budaya hidup global ini sangat mungkin tidak memahami Bahasa Inggris, lapisan pertama dari orang-orang ini, terutama dari kalangan media massa dan bisnis lokal (di luar Amerika), adalah orang-orang yang secara linguistik dan budaya memahami dengan baik fenomena budaya hidup global ini. Disinilah kita melihat peran Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi elemen penting yang memperkuat keberadaan Amerika sebagai sumber rujukan budaya global dunia.

E. Pendidikan dalam Dinamika Globalisasi

Sebagai suatu entitas yang terkait dalam budaya dan peradaban manusia, pendidikan di berbagai belahan dunia mengalami perubahan sangat mendasar dalam era globalisasi. Seperti kata Charles Dickens, *this is the best of times and the worst of times* (ini adalah masa paling baik dan sekaligus paling buruk). Ada banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dinikmati

umat manusia. Namun sebaliknya, kemajuan tersebut juga beriringan dengan kesengsaraan banyak anak manusia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, topik globalisasi juga memasuki wacana akademis dan menjadi fokus diskusi dalam dunia pendidikan. Sebagian fenomena globalisasi juga mulai muncul dalam dunia pendidikan, termasuk di Indonesia. Tentu saja dinamika globalisasi mengandung berbagai implikasi bagi pendidikan dan nasionalisme baru Indonesia. Salah satu gejala delokalisasi dalam pendidikan adalah penggunaan bahasa. Di Indonesia, bahasa Inggris secara resmi diajarkan dalam kurikulum mulai dari kelas 1 sekolah lanjutan tingkat pertama. Namun banyak sekolah mengajarkan bahasa Inggris sejak kelas 1 SD. Bahkan, taman kanak-kanak dan kelompok bermain juga tidak mau ketinggalan mengajarkan bahasa Inggris.

Beberapa sekolah “unggulan” mengklaim penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam sebagian atau keseluruhan proses belajar mengajar. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar juga berkaitan erat dengan adopsi kurikulum asing di Indonesia. Ada beberapa produk kurikulum dan ujian dari luar negeri yang sudah (atau pernah diujai untuk) dipakai di sekolah-sekolah di Indonesia yang mengklaim diri sebagai sekolah internasional, semi internasional, atau nasional plus.

Jumlah anak Indonesia yang mengikuti program kurikulum dan evaluasi asing memang masih teramat sedikit. Mereka bisa disebut sebagai *the privileged few* yang mengejar keunggulan dalam era globalisasi dan persaingan bebas. Dalam dunia pendidikan, tarik ulur antara keunggulan dan pemerataan selalu menjadi isu sangat menarik untuk dikaji. Ketika ada banyak gedung sekolah ambruk dan ada anak yang bunuh diri karena tidak mampu membayar biaya sekolah, segelintir anak sedang menikmati proses belajar dengan sarana dan prasarana kelas dunia.

Pendidikan sudah menjadi komoditas yang makin menarik. Suatu fenomena menarik dalam hal pembiayaan pendidikan menunjukkan gejala industrialisasi sekolah. Semakin mahal suatu sekolah, justru semakin laku. Semakin sekolah dikatakan plus, unggulan, atau berbau internasional, orang semakin tergiur untuk memasukinya. Bahkan ada fenomena menarik yang berkembang akhir-akhir ini. Beberapa pemain dari kalangan bisnis mengalihkan perhatian dan investasi mereka pada industri persekolahan. Bahkan beberapa sekolah mahal didirikan dan dikaitkan dengan pengembangan suatu kompleks perumahan elit. Sekolah-sekolah nasional plus di kota-kota besar di Indonesia dimiliki oleh pebisnis tingkat nasional dan didirikan

dengan mengandalkan jaringan multinasional berupa adopsi kurikulum dan staf pengajar asing.

Era persaingan global dan pusaran neo-liberalisme tidak bisa dibendung lagi dan melanda dunia pendidikan. Di jenjang pendidikan tinggi, mahasiswa di berbagai universitas terkemuka di Indonesia melakukan aksi menentang biaya tinggi pendidikan tinggi. Otonomi pendidikan tinggi membawa implikasi hak dan kewajiban perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengatur pengelolaannya sendiri termasuk mencari sumber-sumber pendapatan untuk menghidupi diri. Konsekuensi logis dari otonomi kampus, saat ini perguruan tinggi seakan berlomba membuka program baru atau menjalankan strategi penjangkaran mahasiswa baru untuk mendatangkan dana.

F. Kemana arah pendidikan Indonesia?

Menghentikan laju para *privileged few* dalam mengejar keunggulan melalui regulasi dari birokrasi bukan solusi yang tepat dan bijak. Jarum jam sudah tidak bisa diputar kembali dan arus globalisasi sudah tidak terbendung. Dua poin-keunggulan dan pemerataan pendidikan-harus diupayakan secara serius dan sistematis sampai kesenjangan dalam dunia pendidikan bisa makin diminimalkan dan pendidikan bisa menjadi jembatan bagi proses demokratisasi bangsa dan kebangkitan nasionalisme baru di Indonesia.

Dalam dinamika globalisasi, anak-anak bangsa tercecer dalam berbagai sekolah yang beragam menurut latar belakang sosio ekonomi yang berbeda. Negara belum mampu memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sampai saat ini, belum nampak adanya pembenahan yang signifikan dan terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Muncul pertanyaan besar: Kemana arah pendidikan di Indonesia?

Pendidikan dimaksudkan sebagai mempersiapkan anak-anak bangsa untuk menghadapi masa depan dan menjadikan bangsa ini bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Masa depan yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi lokomotif dari proses demokratisasi dan pembangunan bangsa. Pendidikan membentuk masa depan bangsa. Akan tetapi, pendidikan yang masih menjadi budak sistem politik masa kini telah kehilangan jiwa dan kekuatan untuk memastikan

reformasi bangsa sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan berada pada rel yang tepat.

Dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak untuk memahami eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segala persoalan dunia. Pendidikan nasional perlu mempertimbangkan bukan hanya *state building* dan *nation building* melainkan juga *capacity building*. Birokrasi pendidikan di tingkat nasional perlu fokus pada kebijakan yang strategis dan visioner serta tidak terjebak untuk melakukan tindakan instrumental dan teknis. Pendidikan berbasis masyarakat diharapkan bisa menjadi lahan persemaian bagi anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mengenali berbagai persoalan dan sumber daya dalam masyarakat serta terus mencari upaya-upaya untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

G. Keseimbangan globalisasi

Hendaknya penulis sampaikan bahwa penekanan dari tulisan ini adalah lebih pada isu tentang keseimbangan globalisasi dunia dalam kaitannya dengan peran Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu dicermati adalah dampak dari peta keseimbangan globalisasi hari ini, bentuk ideal representasi budaya global yang seharusnya muncul, dan sikap masyarakat dunia terhadap peran Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, globalisasi yang ada hari ini pada umumnya merujuk kepada budaya-budaya yang berasal dari Amerika. Dengan kata lain, sebagian besar dari wilayah dunia tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap apa yang kita sebut sebagai globalisasi. Realita seperti ini tentunya menimbulkan ketidakseimbangan representasi dari globalisasi itu sendiri yang dengan perjalanan waktu sangat mungkin untuk menimbulkan benturan dan konflik antar budaya. Perlu kita ingat bahwa dengan karakter globalnya, globalisasi hari ini bukan hanya akan dan telah menimbulkan benturan dan konflik dalam konteks internasional, tetapi juga dalam konteks suatu entitas nasional.

Sulit kiranya kita berharap akan munculnya suatu peta ideal dari representasi dari globalisasi karena kompleksnya faktor-faktor penentu yang menopang eksistensi suatu dunia yang menglobal. Yang dimaksudkan dengan peta ideal dari representasi globalisasi disini adalah adanya pilihan-

pilihan dalam dunia pendidikan yang global yang memungkinkan masyarakat dunia untuk tetap mengadopsi globalisasi tersebut namun dengan kemungkinan benturan yang kecil. Namun demikian, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa dunia telah sangat lama tidak berada dalam situasi dimana kemunculan globalisasi yang beragam dimungkinkan. Ditopang dengan kemampuan keuangan, politik, militer, dan dominasi bahasa, budaya global hari ini cenderung semakin menghegemoni ketimbang memberikan ruang untuk munculnya pluralitas budaya global.

Disamping itu sikap inferior atau minder yang semakin menjangkiti sebagian masyarakat dunia juga menghambat tumbuhnya usaha dan inovasi pendidikan ke arah munculnya pluralitas dunia pendidikan global tersebut. Berbagai hal yang terus melanggengkan ketidakseimbangan representasi pendidikan global ini bukan hanya sangat potensial untuk menimbulkan benturan dunia atau bisa jadi musnahnya identitas pendidikan lokal suatu bangsa, tetapi juga semakin menutup peluang untuk saling mempelajari dan mengambil manfaat dari dunia pendidikan yang plural. Alangkah malangnya peradaban manusia jika pada suatu waktu nanti masyarakat dunia tidak lagi bisa saling berbagi dan mengambil manfaat dari pluralitas dunia pendidikan karena semakin kokohnya hegemoni globalisasi hari ini. Oleh karena itu, berbagai upaya yang mungkin untuk dilakukan kearah munculnya keseimbangan dan pluralitas dunia pendidikan perlu terus mendapat dukungan.

Salah satu upaya yang perlu mendapat dukungan dan pemikiran yang terus menerus adalah upaya merubah sikap dan kebijakan kita terhadap Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dari segi sikap sudah saatnya terjadi perubahan sikap mental kita sebagai pengguna Bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau sebagai orang-orang yang selama ini secara sadar atau tidak sadar telah mengasosiasikan diri kita dengan budaya penutur asli Bahasa Inggris. Persepsi seperti bahwa cara berbicara atau cara menulis kita dalam bahasa Inggris haruslah seperti cara berbicara atau cara menulis orang Amerika misalnya, sudah tidak lagi relevan dengan kenyataan bahwa bahasa Inggris adalah sebuah bahasa internasional dengan jumlah pengguna bukan native (asli)nya sudah jauh lebih banyak jumlahnya dari pada mereka yang menggunakannya sebagai bahasa pertama.

Salah satu akibat dari status Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional adalah perlunya usaha untuk saling memahami dan saling belajar baik secara linguistik ataupun budaya dari semua pengguna Bahasa Inggris, baik yang

menggunakannya sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa asing. Perubahan sikap mental ini menjadi isu penting karena dengan terus-menerusnya exposure (pengenalan) budaya global hari ini ketengah masyarakat maka secara gradual persepsi, cara berpikir dan akhirnya tindakan-tindakan kita akan semakin jauh dari akar budaya kita sendiri yang sesungguhnya juga memiliki daya dorong untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang maju.

Perubahan sikap mental ini diperlukan agar kita tidak terjebak untuk terus-menerus mengadopsi kemajuan dan budaya global (baik yang dianggap positif ataupun negatif) yang ada dewasa ini. Perubahan sikap mental ini diperlukan agar kita bisa menginovasi dan mengkreasi kemajuan, atau minimal bisa mengadaptasikan kemajuan dan budaya global yang ada hari ini dalam koridor budaya lokal yang kita miliki. Oleh karena itu, Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, dengan segala pengaruh yang dimilikinya, seharusnya dijadikan alat untuk mencapai kemajuan yang berbasiskan budaya lokal/nasional, dan bukan sebagai alat untuk semakin mengokohkan hegemoni budaya global hari ini yang dampaknya sudah kita bicarakan di atas.

Dari segi kebijakan, khususnya dalam hal pengajaran Bahasa Inggris, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual karena dalam proses pengajaran suatu bahasa asing yang terjadi bukanlah semata-mata pembelajaran bahasa tetapi pada saat yang sama juga terjadi pembelajaran ~~dan transfer nilai-nilai budaya, prinsip hidup, dan pola pikir. Proses pendidikan dan peningkatan kualifikasi guru Bahasa Inggris, buku, dan metodologi~~ pengajaran perlu mendapat muatan-muatan lokal, disamping pengenalan nilai-nilai global/universal. Sikap proporsional tentunya diperlukan dalam hal ini agar proses pengajaran Bahasa Inggris mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap terbentuknya perubahan sikap mental yang mendorong orang untuk mengkreasi, menginovasi, dan mengadaptasi kemajuan.

H. Simpulan

Dalam perspektif arah baru dari pendidikan bahasa Inggris dengan pemandangan memuaskan kebutuhan spesifik berasal dengan siswa, baik akademik, profesional atau tipe pribadi. Pendekatan baru ini memungkinkan kita untuk memfasilitasi partisipasi aktif pernah berkembang profesional kami dan peneliti dalam komunitas ilmiah dan ekonominternasional. Sebelum tantangan ini, persiapan guru bahasa Inggris menjadi perlu dengan

sesuai visi untuk ini permintaan-permintaan baru dan mampu menjadi agen promosi perubahan dalam lingkup kegiatan profesional.

Oleh rasa takut dan cemas yang berlebihan itu, antisipasi yang dilakukan cenderung bersifat defensif membangun benteng-benteng pertahanan dan merasa diri sebagai objek daripada subjek di dalam proses perubahan. Apakah yang terjadi dengan bahasa dan pendidikan Indonesia di dalam proses globalisasi? "Berpikir lokal, bertindak global", seperti yang dikemukakan Naisbitt itu, pastilah akan menempatkan masalah bahasa dan sastra, khususnya bahasa dan sastra Indonesia, sebagai sesuatu yang penting di dalam era globalisasi. Proses berpikir tidak akan mungkin dilakukan tanpa bahasa.

Ketika bahasa Inggris menjadi bahasa kedua bagi semua orang, bahasa pertama, bahasa ibu mereka, menjadi lebih penting dan dipertahankan dengan lebih giat Bahasa Indonesia juga telah tumbuh dan berkembang menjadi bahasa yang modern pula. Perkembangan yang demikian akan terus berlanjut. Perkembangan tersebut akan banyak ditentukan oleh tingkat kemajuan masyarakat dan peranan yang strategis dari masyarakat dan kawasan ini di masa depan. Pendidikan sudah menjadi komoditas yang makin menarik. Suatu fenomena menarik dalam hal pembiayaan pendidikan menunjukkan gejala industrialisasi sekolah. Semakin mahal suatu sekolah, justru semakin laku. Semakin sekolah dikatakan plus, unggulan, atau berbau internasional, orang semakin tergiur untuk memasukinya. Bahkan ada fenomena menarik yang berkembang akhir-akhir ini. Beberapa pemain dari kalangan bisnis mengalihkan perhatian dan investasi mereka pada industri persekolahan. Bahkan beberapa sekolah mahal didirikan dan dikaitkan dengan pengembangan suatu kompleks perumahan elit. Sekolah-sekolah nasional plus di kota-kota besar di Indonesia dimiliki oleh pebisnis tingkat nasional dan didirikan dengan mengandalkan jaringan multinasional berupa adopsi kurikulum dan staf pengajar asing.

Era persaingan global dan pusaran neo-liberalisme tidak bisa dibendung lagi dan melanda dunia pendidikan. Di jenjang pendidikan tinggi, mahasiswa di berbagai universitas terkemuka di Indonesia melakukan aksi menentang biaya tinggi pendidikan tinggi. Otonomi pendidikan tinggi membawa implikasi hak dan kewajiban perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengatur pengelolaannya sendiri termasuk mencari sumber-sumber pendapatan untuk menghidupi diri.

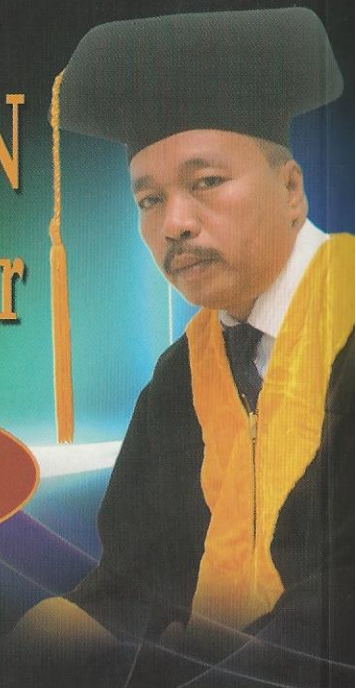


DAFTAR PUSTAKA

- Adiwoso, Riga, "Perubahan Sosial dan Perkembangan Bahasa, dalam *Prisma*, No.1/XVIII. 1989.
- Buchori, Mochtar. *Pendidikan Antisipatoris*. Kanisius, 2001.
- Burbules, N. C. and Torres, C. A, *Globalization and Education: Critical Perspectives*, London: Routledge. The introduction available on the web: [\[i\]http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/ncb/papers/global.html](http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/ncb/papers/global.html).2000.
- Falk, Richard, *On Human Governance: Toward a New Global Politics*. The Pennsylvania State University Press, 1995.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: The Seabury Press, 1974.
- Gollnick, Donna and Philip Chin. *Multikultural Education in a Pluralistic Society*. New York: Cornell. 1990.
- Giddens, Anthony, *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press. 1990.
- Kachru, B. *Introduction: The other side of English*. In Braj Kachru (Ed.), *The other tongue: English across cultures*. Oxford: Pergamon Press, 1983.
- Koentjoro, Jun, "Bahasa Media Massa Masih Mendiskreditkan Wanita" dalam *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Idi Subandy Ibrahim-Hanif Suranto. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Krech, David., Richard S Crutchfield, and Egerton L Ballachey. *Individual in Society*. Berkley: Mc.Graw-Hill Kogakusha,Ltd. 1982.
- Lie, Anita. "Peran Bahasa Inggris dalam Pembentukan Identitas Sosiokultural dan Implikasinya bagi Desain dan Implentasi Kurikulum Bahasa Inggris." Makalah dipresentasikan dalam Kongres Linguistik Nasional yang diadakan oleh Masyarakat Linguistik Indonesia di Denpasar, Juli 2002.
- Mangunwijaya, Y. B., Pr. "Beberapa Gagasan tentang SD bagi 20 juta Anak dari Keluarga Kurang Mampu," Sumaji (ed), *Pendidikan Sains yang Humanistis*. Kanisius, 1998.
- Nugroho, Heru (Ed.) *McDonaldisasi Pendidikan Tinggi*. Center for Critical Social Studies, Kanisius, 2002.
- Rahardi, Kunjana. *Jejak-Jejak Peradaban*. Dioma, 2003.
- Sen, Amartya, 'How to judge globalization', *The American Prospect Online*,. 2002.

ILMU PENDIDIKAN & Masyarakat Belajar

Persembahan Atas Pengukuhan
Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. sebagai Guru Besar
Ilmu Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah
IAIN Sumatera Utara



Ilmu pendidikan tidak hanya menjadi pedoman ilmiah dalam konseptualisasi pendidikan, tetapi sekaligus menjadi panduan praktik pendidikan. Untuk itu, ilmu pendidikan perlu bekerjasama dan menerima kontribusi dari ilmu lain dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dan pembelajaran.

Kontribusi ilmu pendidikan terhadap perwujudan masyarakat pembelajar (*learning society*) memerlukan pendekatan multi disiplin dengan membuat kebijakan pendidikan nasional yang menjamin formulasi program pendidikan sepanjang hayat, atau pendidikan untuk semua atas dukungan politik dan ekonomi untuk pendidikan yang mencerdaskan. Kebijakan pendidikan juga perlu memberikan ruang lebih luas bagi mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif di masyarakat, tak terkecuali sekolah sebagai organisasi pembelajar, berfokus pada tata kelola yang baik (*good governance*) dalam mengantisipasi globalisasi dengan menawarkan daya saing dan keunggulan lulusan dalam skala lokal, nasional, regional dan global.

citapustaka

MEDIA PERINTIS

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI

Email : citapustaka@gmail.com

Website : <http://www.citapustaka.com>

ISBN 978-602-8826-29-7



9 786028 826297